



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN



Walikota Pariaman



Wakil Walikota Pariaman

DR. GENIUS UMAR, S.Sos, M.Si

Drs. MARDISON MAHYUDDIN, MM

**PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH (RPJMD) KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018-2023**



BAPPEDA KOTA PARIAMAN
2019

KOTA PARIAMAN



SABIDUAK SADAYUANG



WALIKOTA PARIAMAN
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR : 3 TAHUN 2019

T E N T A N G

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan Pasal 267 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk jangka 5 (lima) tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman Tahun 2018-2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
21. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 144);

22. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pariaman Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 67, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 140);
23. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 165);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN
dan
WALIKOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018-2023

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pariaman.
3. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Walikota dan Wakil Walikota Pariaman sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat.
5. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pariaman;.
6. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Bappeda Kota Pariaman.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJP Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disingkat RPJM Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kota Pariaman untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 yang selanjutnya disingkat RPJMD Kota Pariaman adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Strategis SKPD tahun 2018-2023 yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
21. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah
22. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.

23. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
24. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.
25. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
26. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
27. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
28. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
29. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
30. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
31. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
32. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.

BAB II
RUANG LINGKUP RPJMD
Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang menjabarkan:

- a. visi dan misi, program Walikota dan Wakil Walikota terpilih; dan
 - b. tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra PD dan Renja PD.
- (3) RPJMD berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta memperhatikan :
- a. RPJMD Provinsi Sumatera Barat
 - b. RTRW
 - c. RPJMD Kabupaten/Kota sekitar

BAB III
SISTEMATIKA RPJMD
Pasal 3

- (1) Sistematika RPJMD meliputi :
- a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV : Permasalahan dan Isu -Isu Strategis Daerah;
 - e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
 - f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah;
 - g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
 - h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - I BAB IX : Penutup.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

RPJMD merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

- (1) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD;
 - b. pelaksanaan RPJMD; dan
 - c. hasil RPJMD.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RPJMD
Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan sasaran dan program tetapi tidak mengubah target akhir pencapaian sasaran daerah, maka penetapan perubahan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

- (1) Sebelum RPJMD periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan RKPD berpedoman pada RPJPD, Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun pertama periode pemerintahan Kepala Daerah terpilih berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 29 April 2019

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 29 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN



INDRA SAKTI

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2019 NOMOR 3

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018-2023

I. UMUM

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai kewajiban dasar untuk menciptakan suatu kehidupan yang sejahtera, baik bersifat materiil maupun imateriil bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa harus mengorbankan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara berlebihan dengan harapan tatanan sosial budaya, ekonomi dan pemerintahan tetap stabil, kondusif, demokratis, bertanggung jawab dan berkeadilan. Prinsip dasar etika dalam mewujudkan keadilan hukum sebagaimana terkandung dalam sila-sila Pancasila yang meliputi prinsip-prinsip nilai dasar ketuhanan, kemanusiaan yang beradab, serta keadilan dalam kehidupan sosial kenegaraan Indonesia. Pemerintah Kota Pariaman dalam menjalankan fungsi pemerintahan harus mampu mewujudkan agar cita-cita Negara Indonesia tersebut dapat terwujud, oleh karena itu Pemerintah Kota Pariaman mempunyai fungsi utama yang harus dijalankan saat ini adalah Public Service Function (fungsi pelayanan masyarakat), development Function (fungsi pembangunan), dan protection function (fungsi perlindungan). Good governance akan terwujud apabila setiap aparat pemerintah telah mampu melaksanakan apa yang disebut sebagai objective and subjective responsibility. Responsibility objective bersumber pada adanya pengendalian dari luar (external controls) yang

mendorong atau memotivasi aparat untuk bekerja keras sehingga tujuan three es (economy, efficiency and effectiveness) dari organisasi perangkat daerah dapat tercapai (Denhardt, 2003).

Dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota Pariaman diperlukan sinergitas dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah yang diwujudkan dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Kemajuan pembangunan Kota Pariaman perlu didukung dengan pemberian pelayanan bermutu dan berkualitas serta mempunyai daya saing tinggi. Disisi lain diperlukan peran serta dunia usaha dan swasta dalam turut serta mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disusun dengan tetap mengacu dan memperhatikan tujuan sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah diharapkan menghasilkan perkembangan pembangunan yang dapat bermanfaat untuk masyarakat khususnya masyarakat Kota Pariaman. Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 mengenai Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 3



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PARIAMAN
Nomor : 3 Tahun 2019
Tanggal : 29 April 2019

Tentang :

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA PARIAMAN TAHUN 2018-2023**

**BAPPEDA KOTA PARIAMAN
2019**

**DAFTAR ISI**

Daftar isi	i
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	viii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang.....	2
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	6
	1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	9
	1.4 Maksud dan Tujuan.....	11
	1.5 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	14
	2.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	15
	2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	36
	2.3 Aspek Pelayanan Umum.....	62
	2.4 Aspek Daya Saing Daerah.....	106
BAB III	GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	111
	3.1 Kinerja Keuangan Daerah.....	112
	3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.....	129
	3.3 Kerangka Pendanaan.....	142
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU-STRATEGIS	149
	4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah.....	150
	4.2 Isu Strategis Pembangunan Daerah.....	201
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	207
	5.1 Visi Pembangunan Daerah.....	208
	5.2 Misi Pembangunan Daerah.....	210



5.3	Tujuan dan Sasaran.....	212
5.4	Konsistensi Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	214
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.....	218
6.1	Pelaksanaan Arah Kebijakan Tahunan.....	254
6.2	Prioritas Pembangunan Daerah	257
6.3	Strategi Dan Arah Kebijakan Dengan Pendekatan Spasial.....	262
6.4	Program Pembangunan Daerah Tahun 2018-2023.....	263
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....	280
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....	317
BAB IX	PENUTUP.....	329

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Jumlah Kecamatan dengan desa/kelurahan di Kota Pariaman.....	15
Tabel 2.2	Kondisi Topografi Kota Pariaman.....	17
Tabel 2.3	Ketinggian, Panjang Garis Pantai Kota Pariaman Menurut Kecamatan.....	18
Tabel 2.4	Jenis dan Luas Tanah di Kota Pariaman.....	19
Tabel 2.5	Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Pariaman Tahun 2010-2030.....	26
Tabel 2.6	Proporsi Luas RTH Kota Pariaman Tahun 2010-2030.....	27
Tabel 2.7	Jumlah Penduduk Per Kecamatan Kota Pariaman Tahun 2014– 2018.....	35
Tabel 2.8	Proporsi Penduduk Kecamatan di Kota Pariaman Tahun 2018.....	35
Tabel 2.9	Kepadatan Penduduk Kota Pariaman tahun 2018.....	36
Tabel 2.10	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha di Kota Pariaman Tahun 2013 – 2017.....	39
Tabel 2.11	Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Tahun 2013-2017.....	39
Tabel 2.12	Kondisi Kemiskinan Kota Pariaman Tahun 2013 – 2017.....	46
Tabel 2.13	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan Kota Pariaman Tahun 2013-2017.....	51
Tabel 2.14	Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan Kota Pariaman Tahun 2013-2017.....	52
Tabel 2.15	Perkembangan Angka Partisipasi Murni Kota Pariaman Tahun 2013-2017.....	54
Tabel 2.16	Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup Kota Pariaman.....	55
Tabel 2.17	Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kota Pariaman Tahun 2013-2017.....	56
Tabel 2.18	Perkembangan Persentase Balita Gizi Buruk Kota Pariaman Tahun 2013-2017.....	58
Tabel 2.19	Perkembangan Rasio Penduduk Yang Bekerja Kota Pariaman Tahu 2013-2017.....	59
Tabel 2.20	Jumlah Gedung dan Group Kesenian Kota Pariaman Tahun 2013-2017.....	61
Tabel 2.21	Kondisi Pembangunan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga Kota Pariaman Tahun 2013-2017.....	61
Tabel 2.22	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD/MI dan SMP/MTs Kota Pariaman Tahun 2013-2017.....	62
Tabel 2.23	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Kota Pariaman Tahu 2013-2017.....	64
Tabel 2.24	Perkembangan Rasio Antara Jumlah Guru dan Murid untuk Tingkat SD,SMP,dan SMA Negeri Periode 2013-2017.....	64
Tabel 2.25	Perkembangan Rasio antara Ruang Kelas dan Murid untuk Tingkat SD, SMP dan SMA Negeri Periode 2013-2017.....	65
Tabel 2.26	Perkembangan Tingkat Kelulusan Siswa untuk Tingkat SD, SMP dan SMA Negeri Periode 2013-2017.....	66



Tabel 2.27	Perkembangan Pendidikan di Kota Pariaman tahun 2013-2017.....	66
Tabel 2.28	Perkembangan Sarana Pendidikan di Kota Pariaman Tahun 2013-2017.....	67
Tabel 2.29	Perkembangan AKB dan AKI Kota Pariaman 2013-2017	68
Tabel 2.30	Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kota Pariaman.....	69
Tabel 2.31	Panjang Jalan Kota Tahun 2013-2017 Menurut Status (km)	70
Tabel 2.32	Panjang Jalan Kota Tahun 2013-2017 Menurut Jenis Permukaan (km).....	70
Tabel 2.33	Persentase Jalan Kota tahun 2013-2017 Menurut Kondisi (%)	71
Tabel 2.34	Perkiraan Kebutuhan air minum di Kota Pariaman Tahun 2030	72
Tabel 2.35	Indikator Stabilitas dan Keamanan Lingkungan Kota Pariaman Tahun 2013-2017.....	73
Tabel 2.36	Indikator Capaian Kinerja Sosial Kota Pariaman Tahun 2013-2017.....	73
Tabel 2.37	Perkembangan Angkatan Kerja yang Bekerja dan yang Menganggur di Kota Pariaman Periode 2013-2017	74
Tabel 2.38	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2013- 2017.....	75
Tabel 2.39	Persentase Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan Kota Pariaman Tahun 2013-2017	76
Tabel 2.40	Rasio KDRT Kota Pariaman Tahun 2013-2017.....	76
Tabel 2.41	Capaian Kinerja Urusan Pangan Kota Pariaman Tahun 2013-2017.....	77
Tabel 2.42	Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kota Pariaman Tahun 2013-2017.....	78
Tabel 2.43	Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kota Pariaman Tahun 2013-2017.....	79
Tabel 2.44	Rasio Penduduk Ber KTP Kota Pariaman Tahun 2013-2017.....	79
Tabel 2.45	Kepemilikan Akte Kelahiran Per 1000 Penduduk Kota Pariaman Tahun 2013-2017.....	80
Tabel 2.46	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Kota Pariaman Tahun 2013-2017.....	80
Tabel 2.47	Perkembangan Kepemilikan e-KTP menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Di Kota Pariaman Tahun 2013-2017	81
Tabel 2.48	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kota Pariaman Tahun 2013-2017.....	81
Tabel 2.49	PKK Aktif Kota Pariaman Tahun 2013-2017.....	82
Tabel 2.50	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat Kota Pariaman Tahun 2013-2017.....	82
Tabel 2.51	Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga Kota Pariaman Tahun 2013-2017.....	83
Tabel 2.52	Cakupan Peserta KB Aktif Kota Pariaman Tahun 2013-2017.....	84
Tabel 2.53	Indikator Pembangunan Bidang Perhubungan Kota Pariaman Tahun 2013-2017.....	84
Tabel 2.54	Perkembangan Sistem Informasi Daerah Kota Pariaman Tahun 2013-2017.....	85
Tabel 2.55	Perkembangan capaian koperasi di Kota Pariaman tahun 2013-2017.....	86
Tabel 2.56	Kondisi Pembangunan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	88



	Kota Pariaman Tahun 2013-2017.....	
Tabel 2.57	Publikasi Buku Statistik di Kota Pariaman Tahun 2013 – 2017.....	89
Tabel 2.58	Indikator Fokus Layanan Urusan Wajib Bidang Kebudayaan Kota Pariaman Tahun 2013-2017.....	90
Tabel 2.59	Indikator Fokus Layanan Urusan Wajib Bidang Perpustakaan Kota Pariaman Tahun 2013-2017.....	90
Tabel 2.60	Indikator Fokus Layanan Urusan Wajib Bidang Kearsipan Kota Pariaman Tahun 2013-2017.....	91
Tabel 2.61	Perkembangan Produksi Ikan Tahun 2013-2017	91
Tabel 2.62	Nama Objek Wisata di Kota Pariaman Menurut Jenisnya dan Kecamatan 2017.....	92
Tabel 2.63	Luas Lahan Sawah dan Bukan Sawah Kota Pariaman (ha) Menurut Kecamatan Tahun 2017	95
Tabel 2.64	Perkembangan Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Rata-Rata Produksi Padi di Kota Pariaman Tahun 2013-2017	95
Tabel 2.65	Perkembangan Luas Tanam Produktif, Belum Produktif, Tidak Produktif, Produksi dan Rata-Rata Produksi Kelapa di Kota Pariaman Tahun 2013-2017	97
Tabel 2.66	Luas Tanam Produktif, Belum Produktif, Tidak Produktif, Produksi dan Rata-Rata Produksi Kelapa di Kota Pariaman Tahun 2017 Menurut Kecamatan	98
Tabel 2.67	Perkembangan Pupulasi Ayam dan Itik Kota Pariaman Tahun 2013-2017.....	99
Tabel 2.68	Capaian Kinerja Bidang Perdagangan Kota Pariaman Tahun 2013-2017.....	100
Tabel 2.69	Jumlah Sarana Perdagangan di Kota Pariaman Tahun 2013-2017.....	101
Tabel 2.70	Perkembangan Jumlah Industri di Kota Pariaman Tahun 2013-2017.....	102
Tabel 2.71	Capaian Kinerja Bidang Perindustrian Kota Pariaman Tahun 2013-2017.....	102
Tabel 2.72	Indikator Layanan Penunjang Urusan Perencanaan Kota Pariaman Tahun 2013-2017.....	103
Tabel 2.73	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2013 – 2017	104
Tabel 2.74	PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Berdasarkan Jenis dan Tingkat Pendidikan Tahun 2013-2017.....	105
Tabel 2.75	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Pariama Tahun 2013-2017.....	106
Tabel 2.76	Indikator Daya Saing Daerah Bidang Perhubungan Kota Pariaman Tahun 2013-2017.....	108
Tabel 2.77	Perkembangan Jumlah Restoran di Kota Pariaman Tahun 2013-2017.....	108
Tabel 2.78	Perkembangan Jumlah Hotel Di Kota Pariaman Tahun 2013-2017.....	109
Tabel 2.79	Indikator Daya Saing Daerah Fokus Wilayah/Infrastruktur Bidang Lingkungan Hidup.....	109
Tabel 2.80	Indikator Fokus Sumber Daya Manusia Kota Pariaman 2013 – 2017.....	110
Tabel 2.81	Indikator Fokus Sumber Daya Manusia Rasio Ketergantungan Kota Pariaman Tahun 2013-2017.....	110



Tabel 3.1	Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kota Pariaman Tahun 2013-2017.....	113
Tabel 3.2	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pariaman Tahun 2013-2017..	115
Tabel 3.3	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2013-2017	118
Tabel 3.4	Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Pariaman Tahun 2013-2017	120
Tabel 3.5	Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Pariaman Tahun 2013-2017.....	122
Tabel 3.6	Rasio Likuiditas Kota Pariaman Tahun 2017	127
Tabel 3.7	Rasio Solvabilitas Kota Pariaman Tahun 2017.....	128
Tabel 3.8	Perbandingan Proporsi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Kota Pariaman Tahun 2013-20	132
Tabel 3.9	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap Total Belanja Kota Pariaman Tahun 2013-2017	134
Tabel 3.10	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Pariaman Tahun 2014-2017	136
Tabel 3.11	Realisasi Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Pariaman Tahun 2014-2017.....	137
Tabel 3.12	Defisit Riil Anggaran Kota Pariaman Tahun 2013 – 2017.....	139
Tabel 3.13	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Pariaman Tahun 2013 –2017.....	139
Tabel 3.14	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kota Pariaman Tahun 2013-2017	141
Tabel 3.15	Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2019-2023.....	143
Tabel 3.16	Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kota Pariaman Tahun 2019-2023.....	146
Tabel 3.17	Pendanaan Prioritas Kota Pariaman Tahun 2019-2023.....	148
Tabel 4.1	Rumusan Permasalahan: Kualitas Sumber Daya Manusia yang Masih Perlu Ditingkatkan.....	155
Tabel 4.2	Rumusan Permasalahan: Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Masih Belum Optimal.....	159
Tabel 4.3	Rumusan Permasalahan: Belum Optimalnya Pembangunan tata ruang dan Penyediaan Infrastruktur Dasar serta Daya Saing Potensi Unggulan Daerah.....	161
Tabel 4.4	Rumusan Permasalahan: Inovasi dan Daya Saing Nilai Tambah Produksi Pada Sektor Perekonomian Masih Perlu Ditingkatkan.....	162
Tabel 4.5	Indikasi Program KLHS RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023.....	191
Tabel 5.1	Matriks Konsistensi Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	215
Tabel 6.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan.....	220
Tabel 6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kota Pariaman Tahun 2018-2023.....	255
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 – 2023.....	282
Tabel 7.2	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2018-2023 Pemerintah Kota Pariaman.....	284



Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019-2023 Pemerintah Kota Pariaman.....	319
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tahun 2018-2023 Pemerintah Kota Pariaman.....	321

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses Penyusunan, Pelaksanaan Serta Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah.....	4
Gambar 1.2	Diagram Hubungan antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	10
Gambar 1.3	Tahapan Penyusunan RPJMD Kota Pariaman (Permendagri 86 Tahun 2017).....	11
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kota Pariaman.....	16
Gambar 2.2	Konsep Struktur Ruang.....	28
Gambar 2.3	Piramida Penduduk Kota Pariaman Tahun 2018.....	36
Gambar 2.4	Persandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sumbar dan Kota Pariaman Tahun 2013-2027.....	37
Gambar 2.5	Perkembangan PDRB ADHB Kota Pariaman Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017 (Rp. Juta).....	40
Gambar 2.6	Perkembangan PDRB ADHK Kota Pariaman Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017 (Rp. Juta).....	41
Gambar 2.7	Perkembangan Kontribusi 3 Kategori Terbesar PDRB ADHB Kota Pariaman Tahun 2013-2017 (%).....	41
Gambar 2.8	Perkembangan PDRB/Pendapatan Per Kapita (Rp. Juta) Kota Pariaman Tahun 2013-2017.....	42
Gambar 2.9	Struktur Ekonomi Kota Pariaman tahun 2017.....	43
Gambar 2.10	Perkembangan Inflasi Kota Pariaman tahun 2017.....	44
Gambar 2.11	Perkembangan Indeks Gini Kota Pariaman Tahun 2013-2017.....	45
Gambar 2.12	Persandingan Angka Kemiskinan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kota Pariaman Tahun 2013-2017.....	47
Gambar 2.13	Persandingan IPM Provinsi Sumatera Barat dan Kota Pariaman Tahun 2013-2017.....	48
Gambar 2.14	Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Pariaman Tahun 2013-2017.....	49
Gambar 2.15	Perkembangan Angka harapan lama sekolah tahun 2012-2017.....	50
Gambar 2.16	Perkembangan APK Semua Jenjang Pendidikan Kota Pariaman Tahun 2013-2017.....	52
Gambar 2.17	Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan Pendidikan Kota Pariaman Tahun 2013-2017.....	53
Gambar 2.18	Perkembangan Angka APM Kota Pariaman Tahun 2013-2017.....	54



Gambar 2.19	Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup Kota Pariaman Tahun 2013-2017.....	56
Gambar 2.20	Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kota Pariaman Tahun 2013-2017.....	60
Gambar 2.21	Perkembangan Prevalensi Gizi Buruk Kota Pariaman Tahun 2013-2017.....	58
Gambar 2.22	Perkembangan Rasio Penduduk Yang Bekerja Kota Pariaman Tahu 2013-2017....	60
Gambar 2.23	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD/MI dan SMP/MTs Kota Pariaman Tahun 2013-2017.....	63
Gambar 2.24	Perkembangan Sarana Kesehatan Kota Pariaman Tahu 2013-2017.....	67
Gambar 2.25	Perkembangan Tenaga Kesehatan Kota Pariaman Tahu 2013-2017.....	68
Gambar 2.26	Perkembangan Koperasi Aktif dan Tidak Aktif Kota Pariaman Tahun 2013-2017.....	86
Gambar 2.27	Perkembangan Nilai Investasi Berskala Nasional Kota Pariaman Tahun 2014-2018*.....	87
Gambar 2.28	Perkembangan Jumlah Investor Berskala Nasional Kota Pariaman Tahun 2014-2018*.....	87
Gambar 2.29	Perkembangan Jumlah Wisatawan Kota Pariaman Tahun 2013-2017.....	93
Gambar 2.30	Perkembangan Luas Lahan Sawah Kota Pariaman Tahun 2013-2017 (Hektar).....	94
Gambar 2.31	Perkembangan Populasi dan Pemotongan Sapi di Kota Pariaman Tahun 2013-2017 (Ekor).....	98
Gambar 2.32	Perkembangan Jumlah Pedagang yang memiliki SIUP di Kota Pariaman Tahun 2013-2017.....	100
Gambar 2.33	Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Kota Pariaman Tahun 2013-2017.....	105
Gambar 2.34	Perkembangan Nilai Daya Beli Masyarakat Kota Pariaman Tahun 2013-2017.....	106
Gambar 2.35	Perkembangan Nilai Daya Beli Masyarakat Kota Pariaman Tahun 2013-2017.....	107
Gambar 3.1	Perkembangan Realisasi Pendapatan Tahun 2013-2017.....	116
Gambar 4.1	Mata Rantai Permasalahan Utama dan Pokok Pembangunan Daerah Kota Pariaman.....	152
Gambar 4.2	Permasalahan yang menyangkut pada Visi RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023.....	167
Gambar 4.3	Fokus Kebijakan Setiap Tahapan dalam RPJPN 2005-2025.....	172
Gambar 4.4	Tema/Agenda Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman Tahun 2005-2025.....	181



Gambar 6.1	Agenda/Tema Pembangunan RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023,.....	259
Gambar 6.2	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Pariaman.....	260
Gambar 6.3	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Pariaman.....	261



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 258 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini memiliki makna bahwa pemerintahan daerah melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah harus sinergi dan memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan serta mendukung pencapaian target pembangunan nasional, sehingga dapat diwujudkan tujuan bernegara.

Pelaksanaan pembangunan daerah diawali dengan penyusunan rencana sebagai permulaan dari siklus perencanaan pembangunan. Berdasarkan Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pada tanggal 27 Juni 2018 Kota Pariaman melaksanakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Periode 2018-2023. Berdasarkan hasil pilkada, maka ditetapkan pasangan DR. Genius Umar, S.Sos. M.Si sebagai Walikota Pariaman dan Drs. Mardison Mahyuddin, MM sebagai Wakil Walikota Pariaman Kota Pariaman Periode 2018-2023 serta telah dilantik pada tanggal 9 Oktober 2018. Walikota dan Wakil Walikota terpilih berkewajiban menyusun RPJMD dan menetapkannya dalam bentuk Perda paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik, sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dengan demikian, visi dan misi serta program

prioritas kepala daerah terpilih menjiwai seluruh muatan RPJMD Kota Pariaman 2018-2023 dan harus dioperasionalkan oleh seluruh perangkat daerah sesuai kewenangannya.

Penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Kota Pariaman dilakukan dengan inovasi dan kolaborasi. Pelaksanaan pembangunan diharapkan tidak hanya sebatas proses atau cara yang selama ini telah dilakukan, namun disertai dengan berbagai bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Demikian juga diharapkan terjalin kolaborasi yang intens antara pemerintah Kota Pariaman dengan pemerintah provinsi serta dengan pemerintah pusat.

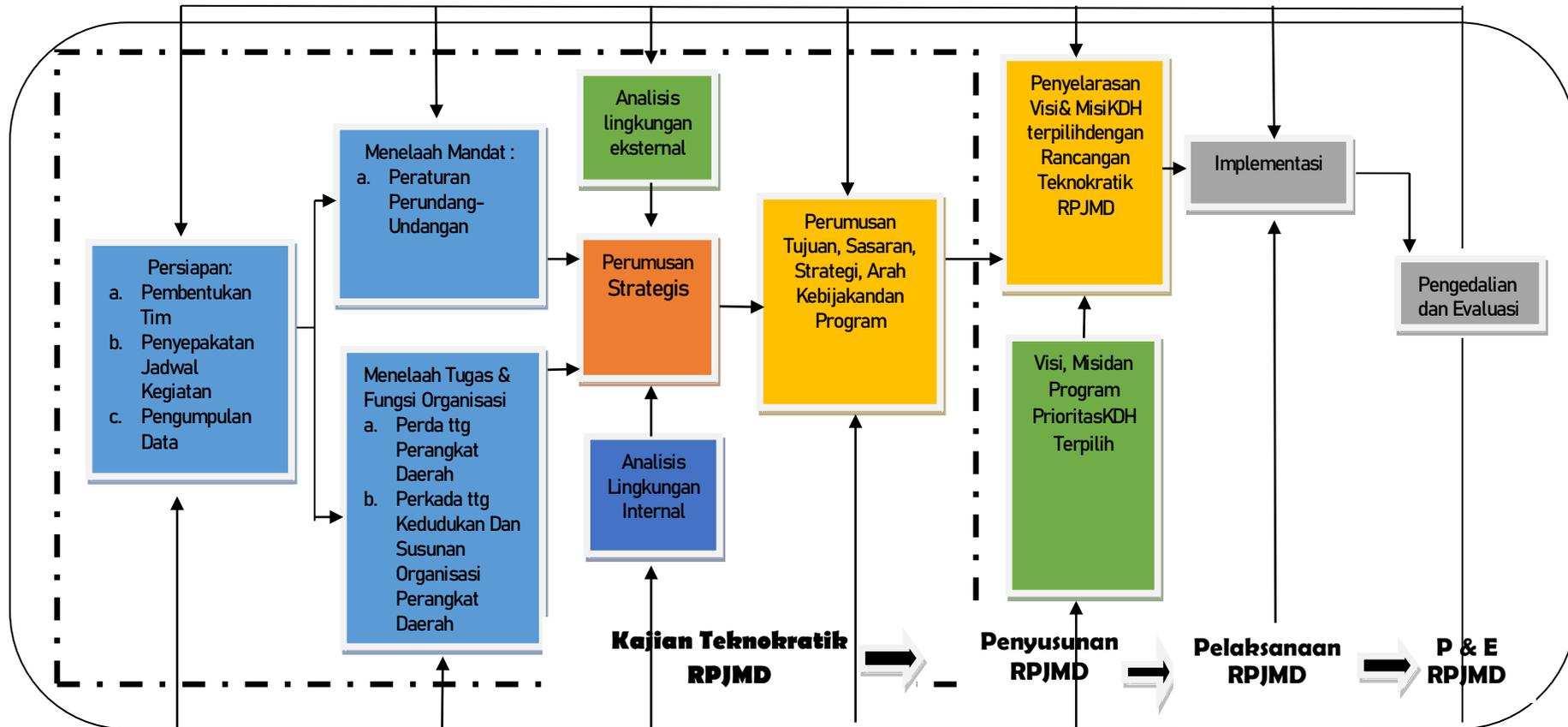
Dalam penyusunan RPJMD, pemerintah Kota Pariaman menerapkan beberapa pendekatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud, meliputi:

1. **Pendekatan teknokratis** menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
2. **Pendekatan partisipatif** dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
3. **Pendekatan politis** dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
4. **Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas** merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga Nasional.

Perumusan RPJMD Kota Pariaman juga memperhatikan pemenuhan pendekatan substansi penyusunan dokumen rencana, yaitu:

- a. Pendekatan perencanaan Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial.
 - 1) Pendekatan Holistik-Tematik: dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
 - 2) Pendekatan Integratif: dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
 - 3) Pendekatan Spasial: dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.
- b. Kebijakan anggaran belanja money follow program.

Gambar 1.1
Proses Penyusunan, Pelaksanaan Serta Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah



Berdasarkan Gambar 1.1 diatas, maka proses penting dalam penyusunan rancangan RPJMD setelah diperoleh rumusan isu-isu strategis yaitu tahap merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan. Hal ini merupakan perencanaan strategi yang membutuhkan proses berulang untuk menghasilkan rumusan tujuan dan sasaran yang dilengkapi dengan indikator kinerja sebagai tolok ukur. Selanjutnya, tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, perlu dilaksanakan dengan berbagai upaya/cara yang dirumuskan dalam strategi dan arah kebijakan. Dengan strategi dan arah kebijakan yang dipilih, maka dapat disusun indikasi rencana program prioritas pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Proses penyusunan RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 telah memperhatikan RPJPD Kota Pariaman Tahun 2005 – 2025, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pariaman Tahun 2010-2030, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Pariaman, serta masukan dari beberapa kali konsultasi publik dan Focus Group Discussion (FGD) . Kemudian didalam penyusunan RPJMD ini juga harus mempertimbangkan pencapaian konsep SDGs serta dengan merumuskan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk implementasinya RPJMD ini selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjadi pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya. Oleh sebab itu, dokumen ini menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah di pemerintah Kota Pariaman sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, serta pedoman bagi seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.

Penyusunan RPJMD Kota Pariaman merupakan rangkaian yang berkesinambungan, mulai dari tahap persiapan sampai dengan penetapan Perda tentang RPJMD. Pada tahap persiapan telah dilakukan penyusunan Rancangan teknokratik RPJMD, sesuai amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Hasil dari Rancangan Teknokratik RPJMD menjadi salah satu input bagi penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Selanjutnya, Rancangan Awal disusun dan disempurnakan dengan hasil konsultasi publik, pembahasan dan kesepakatan dengan DPRD Kota Pariaman serta hasil konsultasi ke Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

Rancangan Awal yang telah disempurnakan selanjutnya menjadi dasar bagi perangkat daerah untuk menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Hasil dari penyempurnaan Renstra PD menjadi rancangan Renstra menjadi masukan untuk perumusan Rancangan RPJMD dan siap untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD.

Hasil musrencang RPJMD menjadi masukan untuk penyempurnaan menjadi rancangan Akhir RPJMD. Rancangan Akhir RPJMD selanjutnya diajukan ke DPRD untuk dibahas dan disetujui menjadi

Peraturan Daerah tentang RPJMD. Setelah disetujui, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD dievaluasi oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Hasil evaluasi Gubernur Provinsi Sumatera Barat menjadi dasar penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, yang selanjutnya ditetapkan dengan Perda tentang RPJMD Kota Pariaman 2018-2023.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman menjadi dokumen yang sangat strategis, sebab merupakan :

1. Media untuk mengimplementasikan janji Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat.
2. Penjabaran pelaksanaan RPJPD Kota Pariaman 2005-2025 periode/tahap keempat.
3. Pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan Daerah.
4. Instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala Daerah dan Kinerja Kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun.
5. Instrumen pengendalian bagi satuan pengawas internal (SPI) dan Bappeda.
6. Pedoman penyusunan RPJMDes se Kota Pariaman.

Selanjutnya, RPJMD yang disusun akan menjadi dasar bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah tahun 2018-2023. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara perencanaan strategik di RPJMD dengan perencanaan operasional di perangkat daerah, dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, sekaligus sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pariaman.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum dalam penyusunan RJMD Pariaman Kota Pariaman Tahun 2018-2023 adalah landasan konstitusional berupa Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 serta landasan operasional yakni:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- m. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri



- Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah);
 - q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 - r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - t. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
 - u. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-
 - v. 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaga Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 126) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 144);
 - w. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pariaman Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 67, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 140);



- x. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 165);

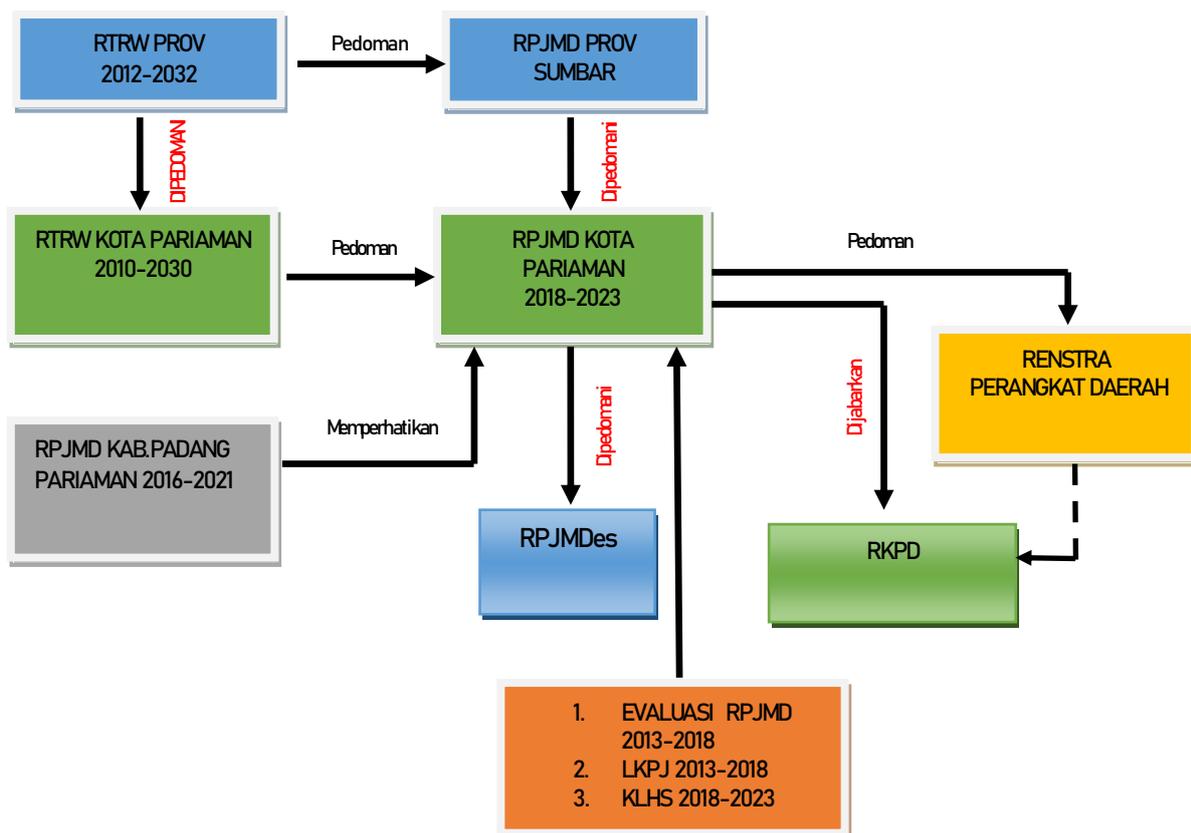
1.3. Hubungan Antar Dokumen

RPJMD merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, khususnya dalam menjalankan program pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan. Hubungan antara RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018–2023 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1. Hubungan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

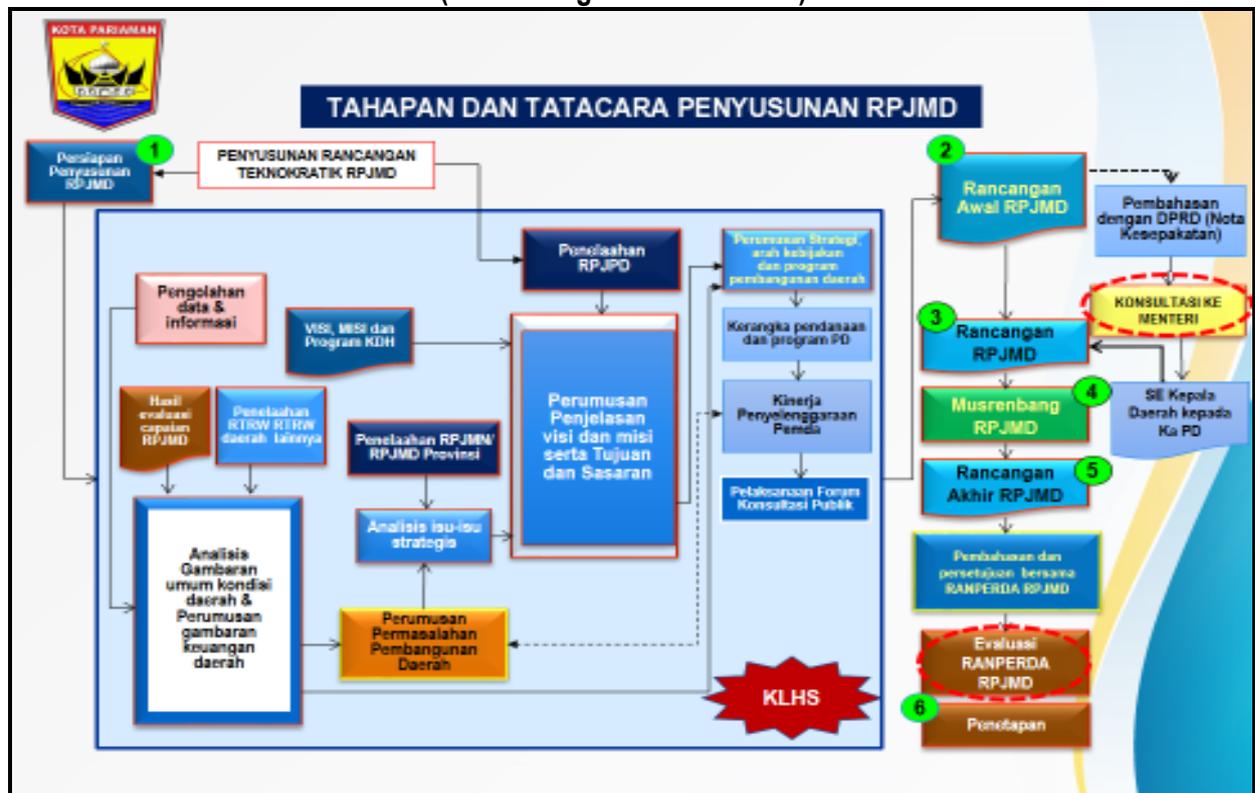
1. RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 berpedoman pada RPJPD Kota Pariaman Tahun 2005–2025, RPJMN Tahun 2015–2019, mempertimbangkan azas keberlanjutan dengan program-program pembangunan sebagaimana dimuat dalam RPJMD Kota Pariaman Tahun 2008 – 2013, serta memperhatikan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021.
3. RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 telah mengintegrasikan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pariaman Tahun 2010-2030 (Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012) dan mempedomani Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012).
4. RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra OPD). Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran teknis operasional dari RPJMD ke dalam arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan, bidang dan atau fungsi pemerintahan

- untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh OPD di bawah koordinasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
5. RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMDes masing-masing Desa se Kota Pariaman dalam rangka penyalarsan pembangunan pemerintah Kota Pariaman dan Desa se Kota Pariaman.
 6. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD
 7. Kota Pariaman menjadi analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023.

Gambar 1.2
Diagram Hubungan antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Gambar 1.3
Tahapan Penyusunan RPJMD Kota Pariaman
(Permendagri 86 Tahun 2017)



1.4. Maksud dan Tujuan

RPJMD Kota Pariaman 2018-2023 pada dasarnya dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang (sustainability development) dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Pariaman. Termasuk juga rencana-rencana kerja dan kerangka anggaran yang bersifat proyektif dan indikatif selama lima tahun ke depan. Dengan demikian, semua dokumen operasional dalam perencanaan periode 2018-2023 di lingkungan pemerintahan Kota Pariaman harus mengacu pada RPJMD ini.

Tujuan dari disusunnya dokumen RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 ini antara lain:

1. Sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan Pembangunan daerah tahun 2019-2023;



2. Sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan rencana strategis antara tahun 2019 sampai tahun 2023, termasuk dalam menentukan program-program prioritas;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS, RAPBD antara tahun 2019 sampai tahun 2023;
4. Sebagai tolak ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman antara tahun 2019 sampai tahun 2023;
5. Sebagai instrumen untuk memudahkan seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pariaman dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
6. Sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pariaman dalam mengimplementasikan kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan menuju masyarakat sejahtera dan berakhlak mulia.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika utama penulisan RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan struktur sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Memuat aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah.

BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah

Memuat Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2013-2017, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2013-2017 dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019-2023

BAB IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah

Memuat Permasalahan Pokok Pembangunan Daerah dan Isu-Isu Strategis Daerah.



BAB V Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran

Memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023.

BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Memuat strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, dan program pembangunan daerah, kebijakan pembangunan berdimensi kewilayahan, agenda dan prioritas pembangunan daerah.

BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Memuat urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah dan target indikator kinerja per urusan disertai kebutuhan pendanaan.

BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Memuat indikator kinerja makro pemerintah daerah dalam pencapaian outcome tahunan selama periode 2019-2023.

BAB IX Penutup



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB II**GAMBARAN UMUM
KONDISI DAERAH****2.1. Aspek Geografi dan Demografi**

Aspek geografi dan demografi bertujuan untuk memberikan gambaran dan hasil analisis dari aspek geografi mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan aspek demografi, menggambarkan kondisi penduduk secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu pada kota Pariaman.

2.1.1. Aspek Geografi**A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman sebagai salah satu Kota yang berada dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat mempunyai luas wilayah sebesar 73,36 Km² dan luas lautan 282,56 km², dengan panjang garis pantai 12,00 Km² yang mencakup 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Tengah dan Kecamatan Pariaman Selatan. Dan kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman No. 10 Tahun 2009, kecamatan di Kota Pariaman telah bertambah menjadi 4 (empat) kecamatan yakni: Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Tengah, Kecamatan Pariaman Selatan dan Kecamatan Pariaman Timur. Luas wilayah per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Jumlah Kecamatan dengan desa/kelurahan di Kota Pariaman

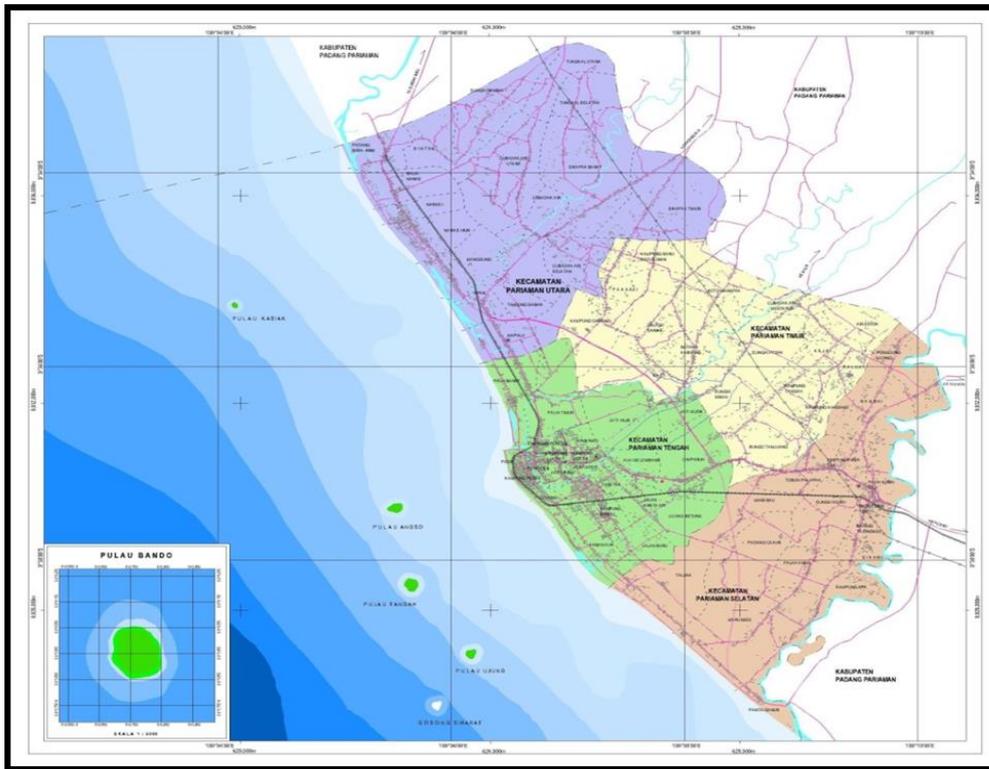
No	Kecamatan	Ibu Kota	Kelurahan	Desa	Luas Daerah(Km ²)
1	Pariaman Utara	Naras	-	17	23.35
2	Pariaman Tengah	Pariaman	16	6	15.68
3	Pariaman Selatan	Kurai taji	-	16	16.82
4	Pariaman Timur	Sei,Pasak	-	16	17.51
Kota Pariaman			16	55	73.36

Sumber : Pariaman Dalam Angka Tahun 2018

Kota Pariaman secara administrasi berbatasan langsung dengan daerah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Kecamatan V Koto Kp. Dalam dan V Koto Timur (Kab. Padang Pariaman)
- 2) Sebelah Selatan : Kecamatan Nan Sabaris (Kab. Pd. Pariaman)
- 3) Sebelah timur : Kecamatan VII Koto Sungai Sarik (Kab. Pd. Pariaman)
- 4) Sebelah Barat : Samudra Indonesia

Gambar 2.1 :
Peta Administrasi Kota Pariaman



Sumber : RTRW Kota Pariaman Tahun 2010-2030

B. Letak dan Kondisi Geografis

Kota Pariaman secara geografis terletak pada $0^{\circ} 33'00''$ - $0^{\circ}40'43''$ Lintang Selatan dan $100^{\circ}10' 33''$ - $100^{\circ} 10'55''$ Bujur Timur. Kota Pariaman terbentang pada jalur strategis lintas Sumatera Bagian Barat yang menghubungkan Propinsi Sumatera Utara dan Propinsi Sumatera Barat, berjarak kira-kira 56 kilometer dari Padang, atau kira-kira 45 menit perjalanan dengan bus dari Bandara Internasional Minangkabau. Letak geografis Kota Pariaman di daerah perlintasan antara beberapa kota di Sumatera Barat khususnya dan regional umumnya merupakan faktor strategis bagi kota ini. Jalan raya Padang-Lubuk Basung dan Simpang Ampek (Pasaman Barat) merupakan jalan negara yang penting bagi Pemerintah, karena itu kondisinya selalu terjaga dengan baik. Kondisi ini menguntungkan bagi Kota Pariaman. Disamping dilalui oleh lalu lintas barang, Kota Pariaman juga memiliki kawasan pesisir yang terbentang dengan potensi perikanan dan pariwisata yang tinggi. Dengan berkembangnya kegiatan Perdagangan dan Pariwisata, maka posisi Kota Pariaman sebagai pusat perdagangan hasil Pertanian dan Pariwisata Pantai akan menjadi semakin penting.

C. Topografi

Kota Pariaman merupakan hamparan dataran rendah yang terletak di pantai barat Propinsi Sumatera Barat dengan ketinggian antara 2 sampai dengan 35 meter di atas permukaan laut dengan sedikit daerah perbukitan. Memiliki 6 buah pulau-pulau kecil yaitu Pulau Bando, Pulau Gosong, Pulau Ujung, Pulau Tengah, Pulau Angso dan Pulau Kasiak. panjang pantai lebih kurang 12,7 kilometer.

Keadaan topografi wilayah, geomorfologi dan bentuk wilayah secara bersama-sama membentuk pola aliran sungai. Kota Pariaman dilalui oleh tiga buah sungai yaitu Batang Manggung yang melalui Kecamatan Pariaman Utara, Batang Piaman yang melewati Kecamatan Pariaman Tengah dan Batang Mangau yang melalui Pariaman Selatan.

Tabel 2.2
Kondisi Topografi Kota Pariaman

No	Kondisi Topografi	Pariaman Utara	Pariaman Tengah	Pariaman Selatan	Jumlah (Ha)
1	Datar - (0-2%)	2.479	2.313	1.994	6.786
2	Bergelombang - (3-15%)	0	64	120	184
3	Curam - (16-40%)	366	0	0	366
4	Sangat Curam - (>40%)	0	0	0	0
Jumlah (ha)		2.845	2.377	2.114	7.336

Sumber : RTRW Kota Pariaman Tahun 2010-2030

D Geologi

Seperti pada umumnya daerah lain yang berada di bagian Pantai Barat Pulau Sumatera, Kota Pariaman memiliki jenis batuan resen dan tuna vulkan. Memiliki kondisi tanah relatif subur yang sangat berpotensi untuk dikembangkan pada kegiatan pertanian. Adapun jenis-jenis tanah yang terdapat di Kota Pariaman terdiri dari tanah Glaisol Distrik, Latosol Kronik, Andosol Humik, dan Folkal Datar.

E. Klimatologi (Iklim)

Kota Pariaman merupakan daerah yang beriklim tropis basah yang sangat dipengaruhi oleh angin barat dan memiliki bulan kering yang sangat pendek. Curah hujan rata-rata pertahun mencapai angka sekitar 336 mm dengan lama hari hujan 199 hari. Suhu rata-rata 25,14°Celcius, dengan kelembaban udara rata-rata 86,57% dan kecepatan angin rata-rata 1,80 km/jam.

Kota Pariaman merupakan salah satu kota yang berhawa cukup panas, hal ini disebabkan karena secara geomorfologi wilayah Kota Pariaman berada di daerah pesisir pantai dengan panjang garis pantai sekitar 12,00 Km dan ketinggian rata-rata 0-15 M dpl sehingga suhu rata-rata pada siang hari cukup panas dan kelembaban yang cukup tinggi.

Tabel 2.3
Ketinggian, Panjang Garis Pantai Kota Pariaman
Menurut Kecamatan

Kecamatan	Ketinggian (dpl)	Panjang Garis Pantai (Km)
Pariaman Selatan	0 – 10	3,30
Pariaman Tengah	0 – 10	4,30
Pariaman Timur	5 – 15	0,00
Pariaman Utara	0 – 10	4,40
Kota Pariaman	0 - 15	12,00

Sumber : RTRW Kota Pariaman Tahun 2010-2030

F. Hidrogeologi

Berdasarkan peta hidrogeologi Indonesia lembar Padang maka terlihat ketersediaan air tanah di Kota Pariaman terdiri dari tiga tipe akuifer yaitu pertama, akuifer produktif dengan penyebaran luas yang terdapat disebagian besar wilayah kota. Kedua, akuifer produktif sedang dengan penyebaran luas terdapat di bagian tenggara kota, dan ketiga, akuifer produktif sedang setempat terdapat di bagian tengah wilayah kota membelah dari utara ke selatan.

G. Geomorfologi

Geomorfologi Kota Pariaman terdiri atas dataran estuarin sepanjang hilir sungai pantai, Pada daerah sepanjang aliran sungai di bagian selatan terdapat dataran banjir pada sungai meander di bagian hilir pesisir. Dibagian tengah dan utara terdapat dataran vulkanik dan perbukitan vulkanik.

H. Jenis Tanah

Kondisi tanah wilayah Kota Pariaman umumnya memiliki kondisi yang relatif subur. Dengan kondisi seperti itu, maka kegiatan pertanian sangat berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut di Kota Pariaman. Adapun jenis-jenis tanah yang terdapat di Kota Pariaman terdiri dari tanah Glaisol Distrik, Latosol Kronik, Andosol Humik, dan Volkan Datar, yang tersebar di ketiga kecamatan Kota Pariaman.

Berdasarkan sistem klasifikasi Soil Survey Staff USDA, jenis tanah yang terdapat di Kota Pariaman yaitu:

- Satuan lahan tanah Dystropept, Paleudults, Tropaquept yang terdapat di dataran bergelombang di bagian utara.
- Satuan tanah Tropaquets, Dystropepts, Tropopsamments, Tropofluvents yang terdapat pada daerah aliran sungai di bagian mengarah ke utara.
- Satuan tanah Tropaquets, Tropohemist yang terdapat pada daerah dataran di bagian tengah
- Satuan tanah Tropopsamments, Tropaquets dan Sulfaquents yang terdapat di bagian barat di pesisir pantai.

Tabel 2.4
Jenis dan Luas Tanah di Kota Pariaman

No	Jenis Tanah	Luas (Ha)
1	Dystropepts, Paleudults, Tropaquepts	2.048
2	Tropaquepts, Dystropepts, Tropopsamments, Tropofluvents	1.316
3	Tropaquepts, Tropohemists	1.481
4	Tropopsamments, Tropaquents, Sulfaquents	1.826
	Total	6.670

Sumber : RTRW Kota Pariaman Tahun 2010-2030

I. Potensi Pengembangan Wilayah

Peraturan Pemerintah RI No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Revisi RTRWN menyebutkan bahwa Kawasan PALAPA sebagai pusat kegiatan Nasional (PKN) menggantikan Kota Padang Dengan pendekatan kewilayahan ini Kota Padang berfungsi sebagai kota inti dan Kota Pariaman serta Lubuk Alung sebagai kota satelit. Kawasan PALAPA dan penjabarannya lebih lanjut dalam RTRW Provinsi Sumatera Barat menjadi kawasan metropolitan Painan-Solok-Padang-Lubuk Alung-Pariaman (PASOPALAPA) sebagai kawasan strategis Provinsi Sumatera Barat.

Dengan perubahan penetapan PKN ini maka konsekuensi pembangunan yaitu penyediaan sarana dan prasarana akan cenderung berskala regional (lintas daerah) perlu diprogramkan di wilayah PASOPALAPA dan arus pergerakan commuter antara Kota Padang dengan Kota Pariaman dengan kereta api maupun moda angkutan mobil penumpang akan semakin tinggi. Oleh karena itu Kota Pariaman perlu menyiapkan kawasan perdagangan dan wisata secara terpadu karena akan menjadi satu kesatuan wilayah pengembangan pesisir pantai yang terbentang dari Kota Pariaman – Kota Padang dan Kawasan Mandeh yang menjadi kawasan strategis wisata provinsi dan nasional.

Wilayah kota pada hakekatnya merupakan pusat kegiatan ekonomi yang dapat melayani wilayah kota itu sendiri maupun wilayah sekitarnya. Untuk dapat mewujudkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan ruang sebagai tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan ekonomi dan sosial budaya, kota perlu dikelola secara optimal melalui suatu proses penataan ruang.

Sesuai dengan amanat Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 11 ayat 2, pemerintah daerah kota mempunyai wewenang dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kota yang meliputi perencanaan tata ruang wilayah kota, pemanfaatan ruang wilayah kota dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. Semua kegiatan penataan ruang kota tersebut pada dasarnya ditujukan sebagai upaya untuk :

- a. Mewujudkan optimasi dan sinergi pemanfaatan ruang wilayah secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan nasional.
- b. Menciptakan keserasian dan keseimbangan antar wilayah, antar kawasan dan antar sektor pembangunan.
- c. Menciptakan keterpaduan program-program pembangunan wilayah.
- d. Mendorong minat investasi masyarakat dan dunia usaha di wilayah Kota Pariaman.

A. Kawasan Strategis Kota Pariaman

Kawasan strategis wilayah kota merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Penentuan kawasan strategis Kota lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis kota akan ditetapkan lebih lanjut di dalam rencana tata ruang kawasan strategis.

Kawasan strategis wilayah kota ditetapkan berdasarkan:

- a. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota;
- b. Nilai strategis dari aspek-aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan;
- c. Kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan terhadap tingkat kestrategisan nilai ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan pada kawasan yang akan ditetapkan;
- d. Daya dukung dan daya tampung wilayah kota; dan
- e. Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kawasan strategis wilayah kota ditetapkan dengan kriteria :

- a. Memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah kota yang memiliki kekhususan;
- b. Memperhatikan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis wilayah provinsi yang ada di wilayah kota;
- c. Dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional dan/atau provinsi, namun harus memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kota yang jelas;
- d. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kota;
- e. Merupakan kawasan budidaya maupun kawasan lindung yang memiliki nilai strategis sosial budaya di wilayah kota;
- f. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi di wilayah kota;

g. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; Kawasan strategis di Kota Pariaman terdiri dari:

a. Kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi

1) Kawasan Pasar Wisata

Kawasan strategis Pasar Wisata terdapat pada kawasan perdagangan pusat kota yang dikembangkan agar selain sebagai tempat belanja penduduk kota juga menjadi tempat yang rekreatif. Kawasannya meliputi Kampung Perak, Pasir, Lohong, Kampung Pondok dan Pondok II. Kawasan pasar wisata ini sebagai bagian dari sistem perwilayahan Destinasi Pengembangan Pariwisata II (DPP II) Provinsi SUMBAR yang meliputi Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat. DPP ini didominasi atraksi dari jenis wisata bahari seperti pantai, pulau-pulau, serta MICE, peninggalan sejarah, budaya, kesenian, pegunungan, sungai, dan hutan.

2) Kawasan Strategis Jati

Dalam kebijakan sebelumnya kawasan Jati difungsikan sebagai pusat kegiatan perdagangan & transportasi regional, akan tetapi kebijakan tidak berjalan. Salah satu alasannya karena pemisahan fungsi perdagangan grosir dan harian pasar untuk lingkup kota kecil seringkali tidak efektif karena skala kegiatan ekonomi yang masih kecil sehingga kegiatan perdagangan harian dan grosir masih menyatu dipusat kota. Oleh karena itu kawasan Jati perlu dijadikan tempat kegiatan berfungsi khusus agar menarik pengunjung secara khusus. Alternatif pengembangan kawasan menjadi pasar khusus seperti pasar wisata dengan mengembangkan fungsi atraksi penarik khusus pengunjung seperti museum atau galeri. Pada Kawasan ini Terminal Jati tidak termasuk menjadi Kawasan Strategis Jati karena Terminal Jati sudah menjadi Terminal Tipe A yang merupakan keweangan pusat .

3) Kawasan Strategis Wisata Pantai Pariaman

Kawasan strategis wisata pantai Pariaman meliputi kawasan sepanjang pesisir pantai mulai dari Gandoriah - Sunur dan ke utara sampai Padang Birik-Birik dan terhubung dengan pulau-pulau kecil didepan pesisirnya.

4) Kawasan Strategis Kegiatan Perikanan dan Wisata

Kawasan strategis kegiatan perikanan dan wisata terdapat di Muara Sunur. Di kawasan ini direncanakan dibangun Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan sekaligus Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Kawasan ini akan menjadi sentra perikanan bagi Kota Pariaman.

Kawasan ini dapat disatukan dengan atraksi wisata pesisir dan menjadi tempat pasar ikan higienis.

b. Kawasan Strategis Bidang Sosial Budaya

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya adalah kawasan yang memiliki nilai strategis kota dalam kaitannya dengan pengembangan atau pelayanan masyarakat.

1) Kawasan Strategis Naras Manggung

Kawasan Naras Manggung merupakan kawasan permukiman dengan fungsi sentra pengembangan kegiatan industri kecil dan industri rumah tangga berupa kain bordir yang meliputi kawasan Naras, Manggung, Pauh Barat, Pauh Timur, Jati Hilir, Jati Mudik, Sungai Sirah.

2) Kawasan Strategis Pusat Kegiatan Olah Raga dan Kemasyarakatan

Kawasan pusat kegiatan olah raga telah direncanakan untuk dibangun pada sisi jalan arteri primer di Kecamatan Pariaman Timur dalam wilayah administrasi desa Kampung Gadang dan Tanjung Sabar dengan luas lebih kurang 28 Ha. Kawasan pusat kegiatan olah raga juga sekaligus menjadi kawasan ruang terbuka hijau kota. Kawasan ini direncanakan dikembangkan lebih lanjut sebagai pusat kegiatan kemasyarakatan dengan fungsi pelayanan kota bagi penduduk yang lebih beragam

c. Kawasan Strategis Bidang Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup adalah kawasan yang memiliki nilai strategis dengan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kota Pariaman yaitu Kawasan Strategis Pulau-Pulau Kecil. Kawasan strategis pulau-pulau kecil sebagian berfungsi sebagai tempat kegiatan wisata seperti di Pulau Angso, Pulau Tengah, dan Pulau Ujung. Sementara di Pulau Kasiak menjadi tempat konservasi penyu. Meskipun dimanfaatkan sebagai objek wisata akan tetapi tetap perlu dilakukan perlindungan terumbu karang dan biota laut lainnya di perairan. Pulau Kasiak sebagai zona konservasi merupakan satu kesatuan dengan area penangkaran penyu Pantai Pauh. Wisata minat khusus dan edukasi penyu dengan sangat terbatas tanpa mengganggu fungsi ekologi dan ekosistem perkembangbiakan penyu masih mungkin dilakukan di Pulau Kasiak. Pengembangan yang dilakukan pada kawasan strategis pulau-pulau kecil yaitu: 1) Konservasi Pulau Kasiak dan memanfaatkan secara sangat terbatas dan bersyarat untuk wisata minat khusus tentang penyu, 2) Pengembangan wisata pulau di Pulau Angso, Pulau Tengah, Pulau Ujung, 3) Membangun prasarana perlindungan pantai dari abrasi, 4) Menjaga kelestarian terumbu karang dan biota laut.

B. Perkembangan Pemanfaatan Ruang

a. Kawasan Perumahan

Perencanaan perumahan menurut RTRW Kota Pariaman 2010-2030 menyatakan bahwa kawasan pusat kota dan sepanjang pantai tidak direkomendasikan untuk pengembangan permukiman dengan kepadatan sangat tinggi (>75%). Berdasarkan Rencana Pemanfaatan Ruang Kota Pariaman, kawasan permukiman akan dikembangkan dengan pola linear mengarah ke selatan dan utara. Tahun 2017 hasil dari pengamatan lapangan dan data perijinan terlihat bahwa kawasan sepanjang pantai yang terdapat permukiman tidak terlalu padat, tapi kawasan pusat kota memiliki kepadatan yang sangat tinggi di dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kota Pariaman. Tingkat kepadatan Kecamatan Pariaman Tengah 1.942,25 jiwa/km². Ini menunjukkan 1.943 jiwa dalam 1 km².

b. Kawasan Perdagangan dan Jasa

Kawasan Perdagangan dan Jasa berdasarkan RTRW Kota Pariaman 2010-2030 diarahkan berkembang sepanjang koridor jalan utama Kota Pariaman; di pusat kota di Kecamatan Pariaman Tengah tepatnya daerah Kampung Jawa, Kampung Perak, Kampung Pondok dan Kampung Keling; Pasar Jati sebagai pasar regional dan pasar wisata; dan beberapa pasar lainnya yang menjadi pusat lingkungan yaitu Cubadak Air di Kecamatan Pariaman Utara, Kuraitaji di Kecamatan Pariaman Selatan, dan Cubadak Mentawai di Kecamatan Pariaman Timur. Hasil observasi di lapangan, sebaran perdagangan dan jasa berkembang di sepanjang koridor jalan utama kota yang menghubungkan Kabupaten Agam dan Kota Padang. Saat ini dari pengamatan data di lapangan terdapat 7 pasar yang tersebar yaitu terpusat di pusat kota di Kecamatan Pariaman Tengah, dan menyebar di beberapa pasar bagian wilayah kota di kawasan Timur dan Selatan kota yaitu Pasar rakyat Kurai Taji, Pasar Nagari Desa Cubadak Air, Pasar Balai Nareh, Pasar Cubadak Mentawai, dan Pasar Ikan terdapat di Karan Aur. Sementara Pasar Jati samapi saat ini tidak berkembang sebagai pasar regional.

c. Kawasan Pusat Pemerintahan/Perkantoran

Dalam RTRW Kota Pariaman 2010-2030 menegaskan bahwa rencana pengembangan kawasan perkantoran pemerintahan dan swasta di Kota Pariaman adalah sebagai berikut : 1) Mempertahankan lokasi kawasan pusat pemerintahan pada lokasi yang ada saat ini di Cimparuh, Naras dan Karan Aur, 2) Mengembangkan ruang terbuka hijau kota dan memadukan dengan kegiatan jasa komersial pada Kawasan Jati sebagai kawasan perkantoran swasta yang terintegrasi dengan kawasan perdagangan dan jasa.

Pengembangan kawasan perkantoran pemerintahan tingkat kota tidak diarahkan pada kawasan khusus atau terkonsentrasi pada satu tempat melainkan berorientasi pada : 1) Relokasi kawasan perkantoran pemerintahan, khususnya bagi dinas-dinas yang belum memiliki bangunan tetap, pengaturan lokasinya dapat disesuaikan berdasarkan intensitas koordinasi antar instansi, 2) Beberapa perkantoran pemerintah seperti Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang berada pada zona kebencanaan, disarankan agar letaknya mendekati lokasi-lokasi yang menjadi daerah/tanggungjawab pembinaannya, 3) Alokasi kawasan perkantoran swasta diarahkan pada Kawasan Jati.

d. Kawasan Industri

RTRW Kota Pariaman 2010-2030 menjabarkan kategori industri di Kota Pariaman yaitu light industries (industri dengan tingkat polusi yang relatif rendah). Industri Kerajinan tangan tersebut dialokasikan ke arah jalan luar kota (arah utara Pariaman). Hal ini dengan mempertimbangkan pula lokasi pengembangan “Home Industry” yang diarahkan di Kecamatan Pariaman Utara tepatnya Kawasan Naras yang ditetapkan sebagai kawasan Sentra Bordir. Perkembangan Kota Pariaman dari tahun 2010-2017 untuk industri masih berada di Naras sangat signifikan. Sepanjang jalan utama sudah bermunculan toko, workshop industri, sentra bordir. Usaha bordir pariaman ini sudah sampai keluar negeri dan pameran di negara-negara eropa.

e. Kawasan Pariwisata

Objek wisata pantai dan bahari yang terdapat di Kota Pariaman tercakup : 1) Kawasan Pantai, 2) Gugus Pulau-Pulau, 3) Kawasan Bawah Laut, 4) Pesta Budaya Tabuik.

f. Kawasan Ruang Terbuka Hijau dan Non Hijau

Kawasan Ruang Terbuka Hijau dalam RTRW Kota Pariaman 2010-2030 di jabarkan dapat berupa ruang terbuka yang diperkeras (paved) maupun ruang terbuka biru (RTB) yang berupa permukaan sungai, danau, maupun areal-areal yang diperuntukkan sebagai genangan retensi. Kawasan ruang terbuka non hijau di Kota Pariaman letaknya menyebar di seluruh kota berupa lapangan olah raga (tennis, volley dan bulutangkis), lahan penjemuran padi maupun permukaan sungai. Pengamatan di lapangan saat ini Kota Pariaman telah memiliki taman bermain dan ruang hijau dalam jumlah kawasan yang belum memenuhi standar. Luas RTH yang ada saat ini 0,45 % dari Luas Kota Pariaman. Angka yang sangat kecil sekali dibandingkan dengan instruksi pemerintah untuk pengembangan RTH sebesar 20 %.

g. Kawasan Ruang Evakuasi Bencana

Penjabaran dari RTRW Kota Pariaman 2010-2030 terdapat 5 (lima) zona evakuasi di seluruh Kota Pariaman yang terletak di bagian timur Kota Pariaman. Dua zona masing-masing terdapat di

Kecamatan Pariaman Utara dan Kecamatan Pariaman Tengah (berdasarkan batas administrasi eksisting) serta satu zona evakuasi di Kecamatan Pariaman Selatan. Sebagai kawasan melting point adalah pada Kawasan GOR di Koto Marapak dan Hutan Kota di Sikapak Timur dengan penyediaan gudang logistik. Pengamatan di lapangan bahwa zona evakuasi di Kota Pariaman belum ada. Hutan Kota yang direncanakan masih dalam proses pembebasan lahan. Jadi kawasan ruang evakuasi bencana belum terealisasi di Kota Pariaman tahun 2017

h. Kawasan Pertanian

RTRW Kota Pariaman 2010-2030 menjelaskan ruang untuk pengembangan budidaya pertanian kota diarahkan pada lokasi-lokasi yang memiliki sarana saluran irigasi teknis. Upaya untuk mempertahankan kawasan pertanian kota tidak hanya dalam rangka ketahanan pangan namun juga sebagai bagian daripada penataan landscap kota dalam upaya menjaga keseimbangan antara lahan terbangun dan lahan tidak terbangun. Pertanian perkotaan yang terletak di seluruh kecamatan. Pengamatan di lapangan menunjukkan kawasan pertanian masih tetap di pertahankan dan di kawasan jati saat ini sudah ada yang berubah fungsi, tapi sawah masih dijumpai. Luas pertanian memang menurun seiring kebutuhan orang terhadap lahan, tapi pemerintah konsisten untuk tetap mempertahankan kawasan pertanian di Kota Pariaman.

i. Pemanfaatan ruang Laut, Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Pemanfaatan ruang Laut, Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan penjabaran RTRW Kota Pariaman 2010-2030 untuk pemanfaatan ruang laut, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah: 1) Wisata Bahari, 2) Kawasan Perikanan Tangkap, 3) Zona Konservasi.

j. Kawasan Potensi Pariwisata

Potensi pariwisata alam dan budaya Kota Pariaman cukup banyak, tabel berikut ini menunjukkan jumlah objek wisata menurut kecamatan dan objek wisata budaya yang banyak juga terdapat di Kota Pariaman.

Berikut ini disampaikan rencana pola ruang berdasarkan pembagian kawasan lindung dan budidaya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5
Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Pariaman Tahun 2010-2030

	PERUNTUKAN LAHAN	LUAS (Ha)	%
A.	Kasawan Lindung	325	4,87 %
	- RTH Sempadan Pantai	124,7	1,87 %
	- RTH Jalur Hijau Sempadan Sungai	116,7	1,75 %
	- RTH Mangrove	36,4	0,54 %
	- RTH Jalur Hijau Rel Karet Api	30,5	0,46 %
	- RTH Jalur Hijau Jalan	16,7	0,25 %
B.	Kasawan Budidaya	3.494,5	52,37 %
	a. Kawasan Terbangun	3.381,0	50,68 %
	- Perumahan Eksisting	905,5	13,57 %
	- Perumahan Rencana *)	1.803,2	27,03 %
	- Perdagangan dan Jasa	520,1	7,80 %
	- Sarana Pelayanan Umum	121,8	1,83 %
	- Kawasan Pelayanan Kegiatan Perikanan dan Wisata	19,8	0,30 %
	- Area Industri	4,3	0,06 %
	- Sarana Pertahanan dan Keamanan	0,8	0,01 %
	- Kawasan Pelayanan Kegiatan Perikanan dan Wisata	19,8	0,30 %
	- Tempat Pembuangan Akhir Sampah	5,5	0,08 %
	b. Ruang Terbuka Hijau Budidaya	113,5	1,69 %
	- Pusat Kegiatan Olah Raga dan Kemasyarakatan	28,0	0,42 %
	- RTH Hutan Kota	11,6	0,17
	- RTH Jalur Sisi Sawah	25,9	0,39 %
	- RTH Kawasan Wisata Pada Area Sungai	31,7	0,47 %
	- RTH Taman Kota	4,3	0,06 %
	- RTH Pemakaman	12,0	0,18 %
	c. Kawasan Pertanian Kota	2.769,40	41,50
	- Pertanian Lahan Basah	1.410,6	21,14 %
	- Pertanian Lahan Kering	1.343,8	20,14 %
	- Pertanian Lahan Kering	1.343,8	20,14 %
	- Tambak/Kolam	15,0	0,22 %
	- Sungai	82,4	1,24 %
	Total	6.671	100,00 %

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RTRW (2018)

Catatan : *)

- Kawasan terbangun untuk perumahan rencana seluas 1.803,2 Ha adalah lahan yang dicadangkan untuk dialihfungsikan sebagai kawasan perumahan.*
- Sedangkan perkiraan luas lahan yang akan terbangun untuk perumahan 15.600 jiwa berdasarkan proyeksi penduduk pada jangka waktu perencanaan RTRW sekitar 138 Ha (7,7% dari lahan yang dicadangkan).*
- Kawasan terbangun yang akan terisi berdasarkan kebutuhan proyeksi penduduk dengan demikian seluas 1.716,1 Ha (dihitung berdasarkan perkiraan lahan untuk perumahan rencana yang terealisasi diperkirakan hanya 138 Ha dari 1.803,2 Ha yang dialokasikan).*
- Luas kawasan terbangun yang terisi sampai akhir tahun RTRW yaitu 1.716,1 Ha atau 25,7% dari luas wilayah daratan kota.*

Proporsi luas RTH berfungsi lindung dan budidaya kalau dibandingkan dengan luas administratif kota hanya 6,56%. Tetapi Proporsi luas RTH dibandingkan dengan lahan terbangun perkotaan sesuai perkiraan penambahan penduduk 15.600 jiwa yaitu yaitu 2.097,8 Ha 20,9%.

Tabel 2.6
Proporsi Luas RTH Kota Pariaman Tahun 2010-2030

1.	Luas Peruntukan Lahan Ruang Terbuka Hijau lindung (325 Ha) dan budaya (113,5 Ha)	438,5 (Ha)
2.	Proporsi luas RTH dibandingkan dengan wilayah administratif kota (6.671,1 Ha)	6,56 %
3.	Proporsi luas RTH dibandingkan dengan luas kawasan terbangun perkotaan yang terisi sampai akhir tahun RTRW Kota Pariaman (1.716,1 Ha)	20,35 %

Sumber: hasil analisis tim penyusun RTRW (2018)

Dengan asumsi luas kapling rumah rata-rata 250 m²/unit rumah dan proporsi luas kapling: luas prasarana dan sarana kawasan perumahan = 60% : 40% maka diperoleh luas kapling perumahan: 3.319 unit x 250 m²/unit = 829.750 m² atau 83 Ha dan luas sarana prasarana kawasan perumahan 55 Ha. Sehingga luas kawasan perumahan rencana yang akan terisi: 83 Ha + 55 Ha = 138 Ha.

B. Konsep Pengembangan Struktur Ruang Kota Pariaman

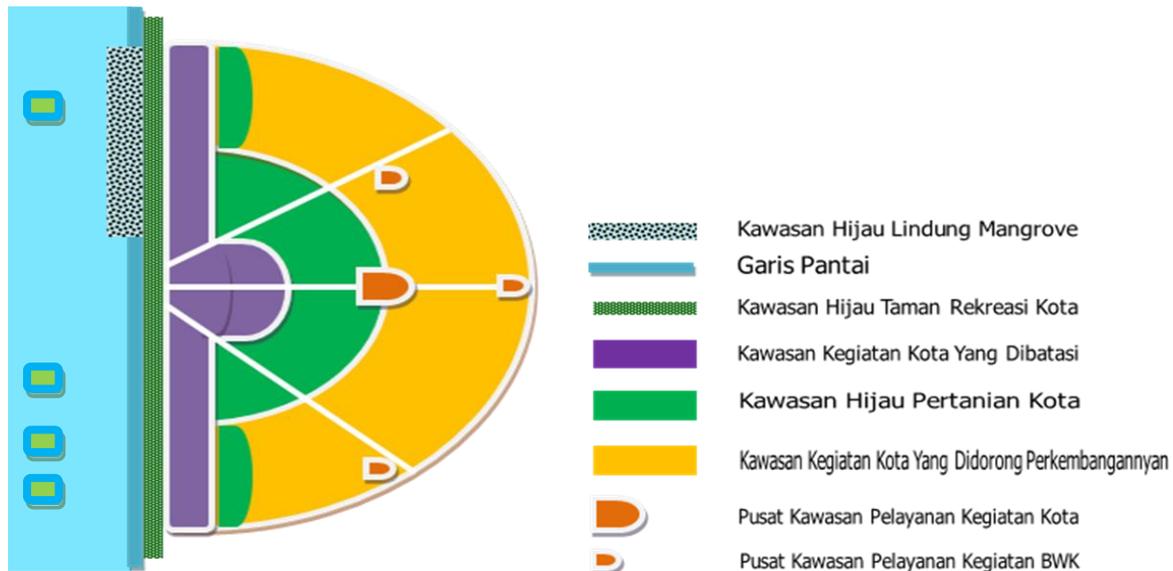
Berdasarkan potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pengembangan Kota Pariaman, maka dirumuskan konsep pengembangan struktur ruang kota yang dasar pemikirannya terutama dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Dapat meminimalisasi dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh terjadinya bencana gempa bumi dan tsunami.
- 2) Mengoptimalkan sistem jaringan jalan dan pola ruang yang sudah ada dan sudah terbentuk.
- 3) Mengoptimalkan sumberdaya yang ada berupa sumberdaya alam pesisir dan pulau-pulau kecil dan wilayah daratan untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

- 4) Menyiapkan Kota Pariaman sebagai bagian dari pengembangan Kawasan Metropolitan Padang-Lubuk Alung-Pariaman (PALAPA).

Konsep pengembangan struktur ruang Kota Pariaman adalah seperti dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.2
Konsep Struktur Ruang



Sumber : RTRW Kota Pariaman Tahun 2010-2030

- Kawasan Hijau Lindung Mangrove yang difungsikan sebagai kawasan konservasi dan pencegah abrasi pantai.
- Kawasan wisata pesisir merupakan kawasan pengembangan wisata pantai dan perikanan. Pada kawasan ini dikembangkan berbagai objek dan daya tarik wisata pantai dan fasilitas kegiatan perikanan.
- Kawasan permukiman pusat kota dan pinggir pantai merupakan kawasan padat yang berfungsi sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa, pemerintahan kota dan kawasan perumahan. Kawasan ini rawan terhadap bencana tsunami dan rawan terhadap likuifaksi tanah akibat gempa pada sebagian kawasan. Untuk itu diperlukan penanganan atau antisipasi bencana.
- Kawasan pertanian lahan basah Merupakan bagian dari kawasan rawan bencana sedang; termasuk dalam golongan kawasan kegiatan kota yang dibatasi perkembangannya dengan peruntukan khusus untuk kegiatan pertanian (khususnya lahan sawah). Juga berfungsi sebagai area pelepasan luapan tsunami yang mulai surut.

- e) Kawasan pengembangan permukiman Merupakan kawasan pengembangan permukiman yang didorong perkembangannya untuk menampung berbagai aktifitas yang dialihkan dari kawasan rawan bencana serta peningkatan dan pengembangan kegiatan di Kota Pariaman.

C. Rencana Sistem Pusat- Pusat Pelayanan

Sistem pelayanan perkotaan ini disusun berdasarkan kemudahan penduduk Kota Pariaman dalam mengakses fasilitas umum, sosial, dan perdagangan dengan juga mempertimbangkan pola pemanfaatan ruang serta struktur jaringan jalan. Dalam perencanaan sistem pelayanan lokal ditetapkan Kecamatan Pariaman Tengah sebagai Pusat Pelayanan Skala Kota. Kegiatan yang ada di pusat pelayanan kota ini adalah kegiatan perdagangan dan kegiatan wisata pantai. Untuk jangka waktu sampai tahun 2030, rencana sistem pelayanan harus mengikuti pola pertumbuhan dan perkembangan penduduk terutama dalam mengembangkan perumahan, kegiatan bekerja, dan pola pergerakannya, sehingga nantinya sub pusat pelayanan tersebut dapat sesuai dengan karakteristik penduduk kota yang ada. Pengembangan sistem pusat pelayanan di Kota Pariaman mempertimbangkan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) tahun 2017 yang menetapkan Kota Pariaman sebagai bagian dari wilayah Painan-Solok-Padang-Lubuk Alung-Pariaman (PASOPALAPA) sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Hal ini berdampak kepada penyediaan fasilitas pelayanan dalam skala regional.

Pemantapan fungsi pelayanan pada pusat-pusat kegiatan yang telah terbentuk, melalui penyesuaian fungsi jaringan jalan dengan aktivitas yang dikembangkan. Dimana pusat-pusat pelayanan ini selain memperhatikan sistem prasarana utama dan prasarana lainnya juga sangat memperhatikan aspek bencana alam. Pembentukan pusat pelayanan baru pada setiap bagian wilayah kota. Rencana sistem pusat-pusat pelayanan di Kota Pariaman adalah sebagai berikut :

- 1) Pusat Pelayanan Kota di kawasan pusat perdagangan kota. Kawasan perdagangan pusat kota perlu ditingkatkan fungsi dan pelayanannya dengan menata kawasan dengan mewujudkan pedestrianisasi dan mewujudkan sistem terminal terpadu antara angkutan umum, rel, dan angkutan wisata.
- 2) Sub Pusat Pelayanan Kota, merupakan pusat pelayanan dalam lingkup kecamatan atau antar kecamatan. Terdapat empat sub pusat pelayanan lingkungan yang akan dikembangkan. Pusat tersebut dikembangkan pada empat pasar di Kota Pariaman yaitu Pasar rakyat Kurai Taji di Kec. Pariaman Selatan, Pasar Balai Nareh di Kec. Pariaman Utara, Pasar Nagari Cubadak Air di Kec. Pariaman Utara, dan Pasar Cubadak Mentawai di Kec. Pariaman Timur.
- 3) Pusat Lingkungan untuk pelayanan skala lingkungan di Kota Pariaman berada pada setiap pusat pelayanan kelurahan dan desa. Pusat lingkungan berfungsi untuk penempatan fasilitas pelayanan masyarakat tingkat lingkungan kelurahan dan desa. Fasilitas tersebut seperti pelayanan kesehatan masyarakat, pendidikan non formal masyarakat, fasilitas olah raga dan ruang terbuka hijau serta

pelayanan administrasi masyarakat. Idealnya fasilitas tersebut menyatu dalam satu kawasan. Akan tetapi dengan banyaknya hambatan pengadaan lahan maka pengadaan fasilitas kenyataannya tidak selalu semuanya memusat di suatu tempat. Meskipun demikian konsep pemusatan ini perlu diupayakan sebisa mungkin untuk diwujudkan.

- 4) Kawasan Pasar Khusus Jati difungsikan sebagai tempat fasilitas pendukung fungsi utama Kota Pariaman sebagai kota pariwisata dan perdagangan dan jasa. Berbagai kemungkinan fungsi kepariwisataan seperti pasar khusus wisata atau sarana perdagangan untuk komoditi khusus yang menarik pembeli dari luar kota bisa dikembangkan disini.
- 5) Kawasan Pusat kegiatan olahraga dan kemasyarakatan yang terdapat di pinggir jalan arteri primer direncanakan bukan hanya sebagai pusat kegiatan olah raga bagi penduduk kota dan wilayah sekitarnya tetapi juga potensial sebagai pusat berbagai kegiatan kemasyarakatan seperti sarana balai pertemuan, gelanggang pemuda, perpustakaan daerah dan lain-lainnya.
- 6) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) direncanakan di Muara Sunur. Pada PPI terdapat juga Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

J. Wilayah Rawan Bencana

1) Kerawanan Gempa

Daerah Sumatera Barat dan sekitarnya termasuk Daerah Rawan Gempa bumi Indonesia. Berdasarkan asal usul kejadiannya gempa bumi dapat dibagi menjadi dua bagian yakni gempa bumi yang berasal dari aktifitas tunjaman Lempeng Samudera Hindia-Australia yang berinteraksi dengan Lempeng Benua Asia di sebelah barat Sumatera dan gempa bumi yang berasal dari aktifitas gerak sesar aktif mendatar Sumatera. Jejak rekam gempa bumi merusak yang pernah terjadi akibat interaksi kedua lempeng tersebut di atas diantaranya adalah Gempa bumi Sumatera Barat (1822), Gempa bumi Siri Sori diikuti dengan tsunami (1904), Gempa Bumi Padang (1835, 1981 dan 1991). Gempa bumi tunjaman tersebut terjadi di dasar laut Samudera Hindia dengan kekuatan $> 6,5$ SR dapat memicu terjadinya gelombang tsunami yang mengancam pantai barat Sumatera. Adapun gempa bumi sesar aktif Sumatera pernah terjadi 1926, 1943, 1977, 2004 dan 2007. Gempa bumi Padang-Pariaman yang terjadi pada tanggal 30 September 2009 berkekuatan 7,6 SR dengan kedalaman 71 Km (BMG) merupakan gempa bumi aktifitas tunjaman pada bidang sentuh Lempeng Samudera Hindia-Australia dan Lempeng Benua Eropa-Asia (Eurasia) dan disebut sebagai gempa bumi Interface Plate Boundary Earthquake. Gempa bumi ini tidak menimbulkan tsunami disebabkan gempa bumi tersebut tidak mempunyai energi yang cukup untuk mematahkan permukaan dasar laut Samudera Hindia di sebelah barat Sumatera yang merupakan bagian dari Lempeng Benua Asia.

Pergerakan blok Mentawai di sebelah barat wilayah Kota Pariaman yang diperkirakan masih belum stabil dan mungkin masih menyisakan energi yang belum terlepas memerlukan perhatian tersendiri sebagai pemicu terjadinya gempa di wilayah Kota Pariaman. Instabilitas blok ini telah dikaji oleh para peneliti dari LIPI dan BPPT dan diperkirakan masih aktif di masa mendatang.

Gempa bumi 30 September 2009 adalah gempa bumi tektonik yang terjadi akibat patahnya lempeng tektonik Hindia-Australia dengan mekanisme mendatar mengiri naik berarah barat daya-timur laut (Strike= 70° Dip= 50° Slip= 132°) pada zona antara lempeng tektonik (Interface Plate Boundary Fault), Berdasarkan skala kerusakan bangunan Modified Mercally Intesity (MMI), intensitas maksimum Kota Padang mencapai VIII, sedangkan wilayah pesisir Kabupaten Padang Pariaman intensitas maksimum mencapai VII dan ke arah perbukitan Barisan turun hingga intensitas V – VI. Berdasarkan perhitungan percepatan gempa untuk perioda ulang 100 tahun, Kota Padang, Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman berkisar antara 0,25 g - 0,5 g.

Kerusakan bangunan umumnya disebabkan oleh struktur bangunannya belum dirancang sesuai tingkat kerawanan gempa di Sumatera Barat, disamping itu akibat timbulnya bahaya likuifaksi telah menyebabkan nilai daya dukung tanah menurun sehingga terjadi keruntuhan pondasi. Berdasarkan tingkat kerusakan ini maka Kota Padang, Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman dapat dikategorikan pada intensitas V sampai VIII skala MMI.

2) Gerakan Tanah

Zona Kerentanan Gerakan Tanah ditentukan berdasarkan faktor penyebab kejadian, yakni: geologi, morfologi, curah hujan, tata guna lahan dan kegempaan. Geologi meliputi kondisi sifat fisik dan keteknikan batuan, tanah pelapukan, dan kedudukan batuan serta struktur geologi; morfologi meliputi kemiringan lereng medan; curah hujan meliputi intensitas dan lama hujan; tata lahan meliputi pengolahan lahan dan vegetasi penutup; dan kegempaan meliputi intensitas gempa. Berdasarkan faktor tersebut, daerah penyelidikan dibagi menjadi 4 (empat) zona, yaitu :

a) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Sangat Rendah

Daerah yang mempunyai tingkat kerentanan sangat rendah untuk terjadi gerakan tanah. Pada zona ini sangat jarang atau tidak pernah terjadi gerakan tanah, baik gerakan tanah lama maupun gerakan tanah baru, kecuali pada daerah tebing sungai sepanjang alurnya.

Merupakan daerah datar, kemiringan lereng 0 - 5 % dan lereng tidak dibentuk oleh endapan gerakan tanah, bahan timbunan atau lempung yang bersifat mengembang. Vegetasi penutup berupa pemukiman, sawah, tegalan, kebun campuran dan perkebunan.

b) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Rendah

Daerah yang mempunyai tingkat kerentanan rendah untuk terjadi gerakan tanah. Pada zona ini jarang terjadi gerakan tanah jika tidak mengalami gangguan pada lereng, dan jika terdapat gerakan tanah lama, lereng telah mantap kembali. Gerakan tanah berdimensi kecil mungkin dapat terjadi, terutama pada tebing lembah (alur) sungai. Kemiringan lereng mulai dari landai (5 – 15%) sampai sangat terjal (50 – 70%), tergantung pada kondisi sifat fisik dan keteknikan batuan dan tanah pembentuk lereng. Pada lereng terjal umumnya dibentuk olah tanah pelapukan yang cukup tipis dan vegetasi penutup baik, umumnya berupa pemukiman, sawah, tegalan, kebun campuran, perkebunan dan hutan.

c) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Menengah

Daerah yang mempunyai tingkat kerentanan menengah untuk terjadi gerakan tanah. Pada zona ini dapat terjadi gerakan tanah, terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir tebing jalan, atau jika lereng mengalami gangguan. Gerakan tanah lama dapat aktif kembali terutama akibat curah hujan yang tinggi. Kisaran kemiringan lereng mulai dari agak terjal (15 - 30%) sampai curam (>70%), tergantung pada kondisi sifat fisik dan keteknikan batuan dan tanah sebagai material pembentuk lereng. Pada lereng terjal umumnya dibentuk olah tanah pelapukan yang cukup tipis dan vegetasi penutup berupa pemukiman, sawah, tegalan, kebun campuran, perkebunan dan hutan.

d) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Tinggi

Daerah yang mempunyai tingkat kerentanan tinggi untuk terkena gerakan tanah. Pada zona ini sering terjadi gerakan tanah, sedangkan gerakan tanah lama dan gerakan tanah baru masih aktif bergerak akibat curah hujan tinggi dan erosi kuat. Kisaran kemiringan lereng mulai dari agak terjal (15-30 %) sampai curam (>70 %), tergantung pada kondisi sifat fisik dan keteknikan batuan dan tanah. Pada lereng terjal umumnya dibentuk oleh tanah pelapukan yang cukup tipis dan vegetasi penutup baik, umumnya berupa pemukiman, sawah, tegalan, kebun campuran, perkebunan dan hutan. Kejadian gempa pada hari Kamis 30 September 2009 sekitar pukul 17.16 WIB berkekuatan 7,9 SR yang berpusat di pantai barat Sumatera Barat telah memicu terjadinya bencana gerakan tanah. Gerakan tanah umumnya terjadi pada daerah yang tersusun oleh batuan yang kurang kompak dan tanah pelapukan yang kurang padat, yaitu antara lain pada daerah yang tersusun oleh satuan Tuf Batu Apung Hornblenda Hipersten (Qhpt) dan Tuf Batu Apung dan Andesit atau Basal (Qpt). Selain itu, gerakan tanah juga terjadi pada tebing jalan dan lokasi-lokasi pemotongan lereng yang berkemiringan lereng curam. Gerakan tanah yang memiliki dimensi cukup besar yang mengakibatkan banyak korban meninggal, antara lain terdapat di: Desa Tandikat, Jorong Pulau Air, Jorong Lubuk Laweh, Jorong Gunungtigo dan Paraman Cumanak. Gerakan tanah juga terjadi pada

pada tebing jalur jalan Sicincin - Pariaman (Jorong Air Marange, Desa Sicicin) dan jalur jalan mulai dari Kudu - Cumanak. Umumnya lokasi bencana merupakan daerah labil dan berkemiringan lereng terjal dengan potensi gerakan tanah tinggi, artinya daerah ini mudah terjadi gerakan tanah, sedangkan gerakan tanah lama dan gerakan tanah baru masih aktif bergerak, baik akibat curah hujan tinggi dan erosi kuat maupun gempa bumi. Menurut informasi penduduk pada saat terjadi gerakan tanah, sebelumnya telah turun hujan dengan intensitas kecil. Jenis gerakan tanah umumnya berupa longsoran bahan rombakan (debris slide).

3) Banjir

Erosi sungai dan air permukaan dapat terjadi karena pengikisan tebing sungai oleh arus air sungai atau air permukaan, sedangkan aliran banjir bandang terjadi setelah atau selama hujan akibat akumulasi dan pembendungan alur oleh endapan lahar atau material gerakan tanah pada alur sungai di bagian hulu dan dipicu oleh erosi yang kuat dan curah hujan yang tinggi. Erosi ini dapat terjadi pada longsoran serta terbukanya tanaman penutup terutama pada tanah/batuan pasir yang bersifat lepas. Berdasarkan kerawanan terhadap kebencanaan, maka dapat diperoleh wilayah rawan bencana di Kota Pariaman. Diketahui luas wilayah yang rawan bencana tinggi sebesar 31,84 km² (43,4% dari luas wilayah).

4) Tsunami

Tsunami adalah rangkaian gelombang yang mampu menjalar dengan kecepatan hingga lebih dari 900 km per jam, terutama disebabkan oleh gempa bumi yang terjadi di dasar laut. Kawasan rawan tsunami menggambarkan tingkat kemudahan suatu wilayah untuk terlanda tsunami. Tingkat kemudahan ini didasarkan pada besarnya intensitas gempa dengan energi yang cukup untuk dapat mematahkan permukaan dasar laut, serta bentuk morfologi pantai. Daerah penyelidikan terdiri dari 3 (tiga) kawasan rawan tsunami yakni; kawasan rawan tsunami tinggi, kawasan rawan tsunami menengah dan kawasan rawan tsunami rendah.

Kawasan rawan bencana tsunami tinggi memiliki resiko kerusakan dan kehancuran aset paling besar apabila terlanda tsunami. Kawasan ini adalah pantai landai berpasir dengan morfologi landai. sebagian berawa bakau dan nipah. Bentuk garis pantai sebagian besar lurus dan sebagian kecil berteluk. Kawasan rawan tsunami tinggi meliputi sepanjang pesisir pantai dengan nilai elevasi kurang dari 5 meter di atas permukaan laut.

Kawasan rawan bencana tsunami menengah memiliki potensi tsunami dengan kerusakan aset relatif lebih kecil dibandingkan dengan kawasan rawan tinggi. Kawasan rawan bencana tsunami menengah meliputi garis ketinggian elevasi di atas 5 hingga 7 meter di atas permukaan laut, dengan ketinggian genangan air maksimum mencapai 2 meter di atas permukaan tanah.

Kawasan rawan bencana tsunami rendah memiliki potensi landaan dan kerusakan paling kecil dibandingkan dengan kawasan lainnya. Kawasan rawan bencana tsunami rendah meliputi daerah dengan garis ketinggian elevasi hingga 9 meter di atas permukaan laut, dengan ketinggian genangan air maksimum mencapai 1 meter di atas permukaan tanah. Kawasan ini meliputi wilayah pesisir dengan morfologi curam dan berbukit.

5) Likuifaksi

Likuifaksi terjadi apabila lapisan tanah yang berupa pasir berbutir halus ($0,075 > 0,50$ mm), relatif seragam, bersifat lepas dan dalam keadaan jenuh air (muka air tanahnya dangkal) mendapat guncangan hebat akibat gempa bumi dengan percepatan gempa tertentu, maka tegangan airpori akan meningkat dan mengakibatkan lapisan tanah pasir tersebut akan cenderung membubur dan menyebabkan nilai daya dukung tanah menjadi berkurang atau bahkan menjadi nol (Kawamura, M., 1989). Berdasarkan data geologi teknik dan analisis citra satelit di Kota Padang, Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman, lapisan pasir halus yang berpotensi terjadi likuifaksi adalah pada Satuan Pasir yang terbentuk dari endapan pantai, pematang pantai, tematang sungai dan gosong-gosong sungai. Analisis zona potensi likuifaksi ini terbatas hingga kedalaman 6,00 m, karena keterbatasan peralatan. Sehingga hasil analisis yang menggunakan Metoda "Simplified Procedure" (Seed dan Izzard Idris, 1971), lapisan pasir halus (Satuan Pasir) yang berpotensi terjadi likuifaksi berkisar pada kedalaman $>1,00 - 6,00$ m.

6) Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Umumnya Pantai Pariaman berpotensi mendapatkan bencana gelombang ekstrim dan abrasi sebagaimana yang terlihat pada profil kawasan pesisir pada sabuk yang berwarna merah, namun abrasi ini dapat dikurangi dengan penanaman mangrove. Untuk lebih jelasnya potensi bencana gelombang ekstrim dan abrasi.

2.1.2 Demografi

A. Jumlah Penduduk Kota Pariaman per Kecamatan

Kota Pariaman terdiri dari 4 kecamatan memiliki jumlah penduduk saat ini (Tahun 2018) 87.626 jiwa dengan jumlah Desa sebanyak 71 desa dan penduduk tersebar di setiap desa. Berikut ini dapat dilihat perkembangan penduduk dan proporsi penduduk berdasarkan Kecamatan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.7
Jumlah Penduduk Per Kecamatan Kota Pariaman Tahun 2014– 2018

No	Nama Kecamatan	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
		2014	2015	2016	2017	2018	
1.	Kecamatan Pariaman Utara	20.379	20.712	21.058	21.784	22.145	2,27%
2.	Kecamatan Pariaman Tengah	29.827	30.028	30.289	30.628	30.824	0,21%
3.	Kecamatan Pariaman Selatan	17.182	17.524	17.895	18.610	18.978	2,43%
4.	Kecamatan Pariaman Timur	15.248	15.346	15.467	15.596	15.679	0,20%
	Total	82.636	83.610	84.709	86.618	87.626	1,18%

Sumber : Pariaman Dalam Angka 2019

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah Penduduk per kecamatan kota Pariaman dari tahun 2013 - 2017 terus meningkat, dan terjadi penambahan jumlah penduduk tiap tahunnya.

Tabel 2.8
Proporsi Penduduk Kecamatan di Kota Pariaman Tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah penduduk	%
1	Pariaman Utara	22.145	25
2	Pariaman Tengah	30.824	35
3	Pariaman Selatan	18.978	22
4	Pariaman Timur	15.679	18
	Total	87.626	100 %

Sumber : Pariaman Dalam Angka 2019

B. Kepadatan penduduk

Tingkat kepadatan penduduk brutto di Kota Pariaman merupakan jumlah penduduk dibagi luas wilayah dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)} = \frac{\text{Jumlah Penduduk (Jiwa)}}{\text{Luas Wilayah (Ha)}}$$

Angka kepadatan penduduk tersebut kemudian dikategorikan dalam 4 (empat) kategori yaitu (SNI 03-1733-2004) :

- 1) Kepadatan Sangat Tinggi :Kepadatan penduduk > 400 jiwa/ha.
- 2) Kepadatan Tinggi :Kepadatan penduduk 201 s/d 400 jiwa/Ha.
- 3) Kepadatan Sedang :Kepadatan penduduk 150 s/d 200 jiwa/Ha
- 4) Kepadatan Rendah :Kepadatan penduduk < 150 jiwa/Ha

Dengan demikian kepadatan penduduk di masing-masing kecamatan Kota Pariaman di tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.9
Kepadatan Penduduk Kota Pariaman tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah (Jiwa)	Luas Wilayah (ha)	Kepadatan Penduduk	
				Jiwa/ (ha)	Kategori
1	Pariaman Utara	22.145	2.335	7	Rendah
2	Pariaman Tengah	30.824	1.668	18	Rendah
3	Pariaman Selatan	18.978	1.682	11	Rendah
4	Pariaman Timur	15.679	1.751	12	Rendah
	Total	87.626	7.436	12	Rendah

Sumber : Pariaman dalam Angka 2019

Berdasarkan tabel diatas, kepadatan penduduk Kota Pariaman paling tinggi pada tahun 2018 terdapat pada Kecamatan Pariaman Tengah, yaitu sebanyak 18 Jiwa/ha, akan tetapi menurut SNI masih dikategorikan kepadatan rendah.

Komposisi penduduk Kota Pariaman tahun 2018 berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin digambarkan dalam bentuk piramid seperti pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.3
Piramida Penduduk Kota Pariaman Tahun 2018



2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Keberhasilan pembangunan merupakan cermin dari keberhasilan pencapaian indikator pembangunan yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat dana pembangunan yang merata di berbagai

bidang terutama bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi serta terpenuhinya kebutuhan fasilitas publik (infrastruktur).

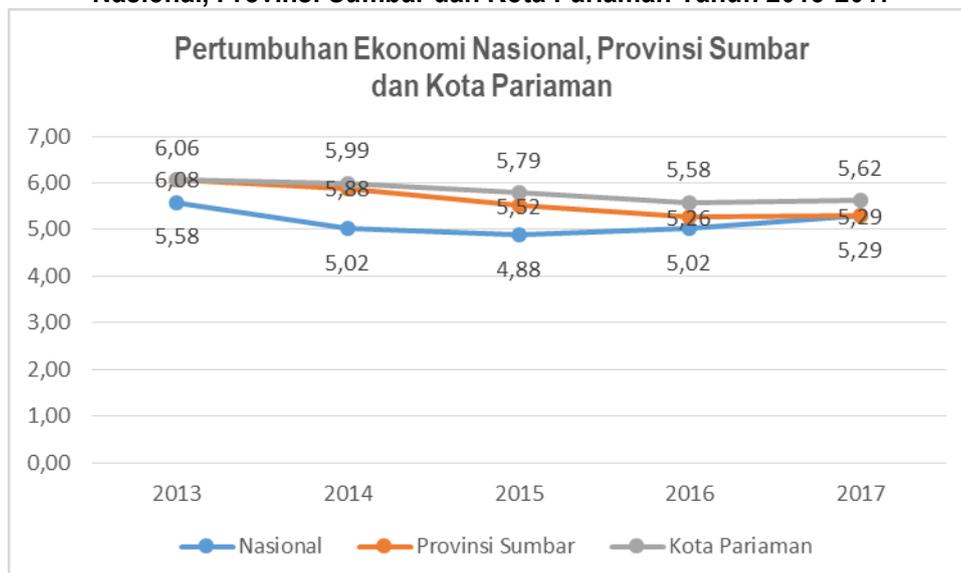
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung menjadi salah satu tolok ukuran bagi kesejahteraan di setiap daerah. Indikator yang digunakan untuk melihat pertumbuhan perekonomian daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat dari sisi makro ekonomi. PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto yang timbul akibat adanya berbagai kegiatan ekonomi atau proses produksi yang tercipta di suatu daerah atau region dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi dimiliki daerah tersebut atau bukan.

Pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman tahun 2017 tercatat sebesar 5,62 persen. Angka ini mengalami sedikit perlambatan dibanding tahun sebelumnya. Jika dilihat trend empat tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman terus mengalami perlambatan. Tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman telah mencapai 6,06 persen, tahun 2014 mengalami sedikit penurunan menjadi 5,99 persen. Kemudian pada tahun 2015, turun lagi menjadi 5,79 persen dan terus berlanjut pada tahun 2016, menjadi 5,58 persen, Tetapi pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman mulai naik lagi menjadi 5,62 persen. Berdasarkan informasi dari BPS, perlambatan ini jika dilihat sisi pengeluaran disebabkan oleh melemahnya komponen pembentukan modal tetap bruto.

Gambar 2.4
Persandingan Pertumbuhan Ekonomi
Nasional, Provinsi Sumbar dan Kota Pariaman Tahun 2013-2017



Sumber : Pariaman dalam Angka 2018

B. Pertumbuhan PDRB

Salah satu pendekatan krusial yang menjadi pertimbangan dalam melihat perkembangan kesejahteraan masyarakat dari sudut pandang ekonomi dapat dilihat dari analisis pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Melalui analisis pertumbuhan PDRB dari aktivitas ekonomi yang beragam dapat dianalisis perkembangan perubahan ekonomi serta perkiraan perkembangannya dimasa yang akan datang. Selain itu, analisis PDRB juga dapat dilakukan menurut sektor, sehingga dapat diketahui distribusi PDRB berdasarkan sektor lapangan usaha.

Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian :

- a. Atas Dasar Harga Berlaku yaitu apabila semua produksi barang dan jasa yang dihasilkan dinilai berdasarkan harga pasar pada tahun yang bersangkutan. Data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku digunakan untuk melihat perubahan struktural ekonomi suatu daerah dan untuk menghitung besaran pendapatan perkapita dari penduduknya.
- b. Atas Dasar Harga Konstan yaitu apabila semua produksi barang dan jasa yang dihasilkan dinilai dengan harga pada tahun tertentu (tahun 2010) yang dipilih sebagai tahun dasar. PDRB Atas Dasar Harga Konstan digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah, yang mencerminkan pertumbuhan produksi barang dan jasa secara riil dari suatu tahun ke tahun berikutnya.

Pada tahun 2017 Sektor Pertanian masih memiliki nilai PDRB paling tinggi di Kota Pariaman, sedangkan nilai PDRB paling rendah pada sektor Pengadaan air. Tabel 2.10 menunjukkan nilai PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) menurut lapangan usaha di Kota Pariaman tahun 2013 – 2017. Berdasarkan kontribusi sektor terhadap PDRB Kota Pariaman pada tahun 2017, Pertanian memiliki kontribusi paling tinggi, yaitu 19,2 persen, disusul sektor Perdagangan 15,2 persen serta sektor Kontruksi sebesar 14,8 persen. Ketiga sektor tersebut menjadi sektor unggulan dalam memberikan kontribusi sumbangan pada nilai PDRB Kota Pariaman. Sementara itu, tiga sektor yang memiliki kontribusi paling rendah yaitu pengadaan air sebesar 0,01 pengadaan listrik dan gas serta jasa perusahaan lainnya sebesar 0,1 persen.

Distribusi Persentase PDRB ADHK menurut Lapangan Usaha Kota Pariaman tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.10
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha di Kota Pariaman Tahun 2013 – 2017

Kategori	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	19,73	20,6	20,3	19,7	19,2
B	Pertambangan & Penggalian	2,07	2,2	2,2	2,1	2,0
C	Industri Pengolahan	8,81	8,0	7,9	7,8	7,6
D	Pengadaan Listrik, Gas	0,05	0,0	0,1	0,1	0,1
E	Pengadaan Air, Pengelolahan Sampah, dan Daur Ulang	0,04	0,0	0,0	0,0	0,01
F	Konstruksi	13,33	14,0	14,6	14,5	14,8
G	Perdagangan Besar dan Eceran	15,59	14,3	14,6	14,9	15,2
H	Transportasi & Pergudangan	12,48	12,6	12,2	11,9	11,6
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	1,52	1,8	2,1	2,3	2,4
J	Informasi & Kemonikasi	7,53	6,8	6,6	6,8	7,1
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,12	3,1	3,1	3,1	2,9
L	Real Estate	2,81	2,8	2,9	2,9	2,9
M,N	Jasa Perusahaan	0,14	0,1	0,1	0,1	0,1
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib	5,87	6,1	5,5	5,6	5,7
P	Jasa Pendidikan	3,48	3,7	3,8	4,0	4,2
Q	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	1,05	1,1	1,1	1,1	1,2
R,S,T,U	Jasa Lainnya	2,37	2,6	2,7	2,9	3,1

Sumber: Pariaman Dalam Angka, 2018

Distribusi Persentase PDRB ADHB menurut pengeluaran tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.11
Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Tahun 2013-2017

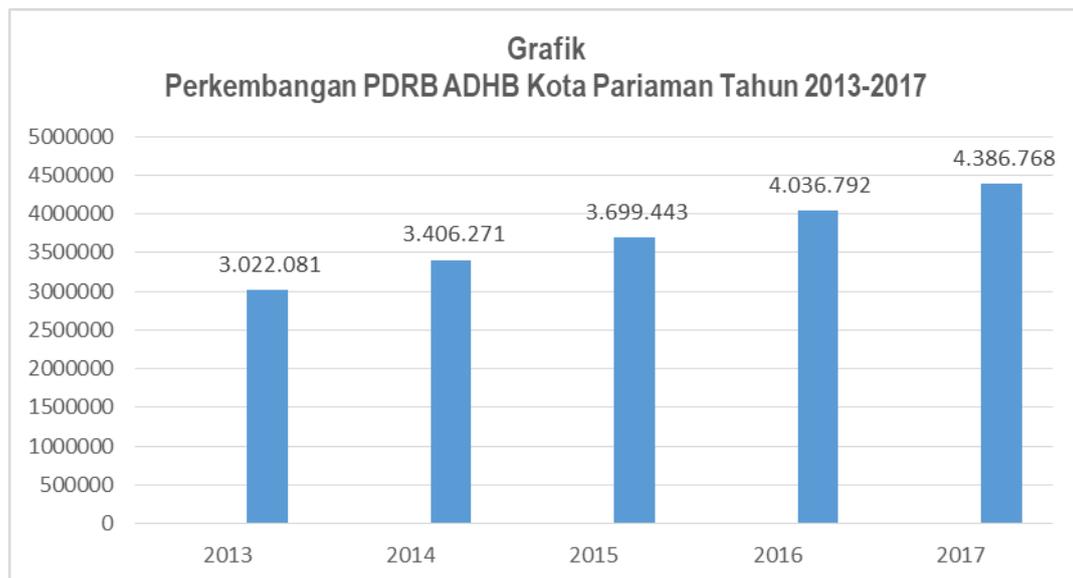
NO	Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016	2017
1	Konsumsi Rumah Tangga	53,29	53,61	53,98	52,69	51,95
2	Konsumsi LNPRT	1,07	1,12	1,17	1,20	1,21
3	Konsumsi Pemerintah	15,09	15,11	15,38	16,02	15,13
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	29,52	28,73	28,63	29,00	28,14
5	Perubahan Inventori	0,10	0,09	0,05	0,16	0,02
6	Ekspor	18,47	17,96	11,36	62,36	59,70
7	Impor	17,54	16,62	10,58	61,44	56,13
Total PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber :BPS Kota Pariaman, 2018

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa selama periode 2013-2017, PDRB Kota Pariaman sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), yakni sekitar 51 s.d. 54 Persen. Pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar, yakni sekitar 28 s.d 29,52 persen. Proporsi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 15,09 s.d. 16,02 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik cukup besar. Meskipun komponen ekspor berkontribusi sekitar 59,70 s.d 62,36 persen, tetapi di sisi lain komponen impor sebagai komponen pengurang dalam PDRB juga masih berkontribusi relatif besar, yakni sekitar 56,13 s.d 61,44 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah atau bahkan luar negeri/impor. (PDRB menurut Pengeluaran 2013-2017, BPS, 2018)

1) Perkembangan PDRB

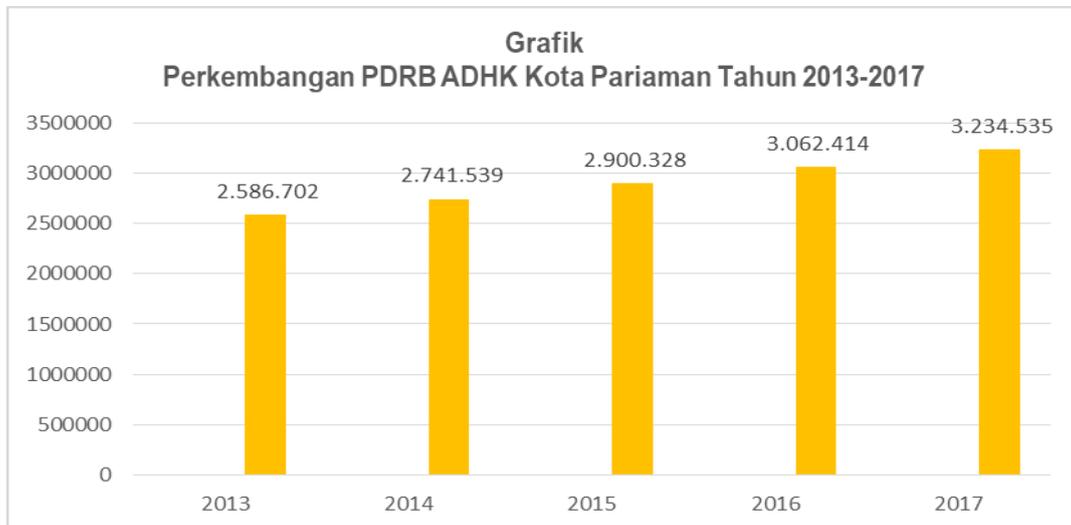
Gambar 2.5
Perkembangan PDRB ADHB Kota Pariaman
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017 (Rp. Juta)



Sumber : Pariaman dalam Angka, 2018

Dari gambar 2.5 di atas terlihat bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Pariaman ADHB di tahun 2013 terhitung sudah sebesar 3,022 triliun rupiah sedangkan pada tahun 2017 sudah mencapai sebesar 4,38 triliun rupiah. Ini berarti bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir telah terjadi peningkatan sekitar 1,4 Triliun rupiah.

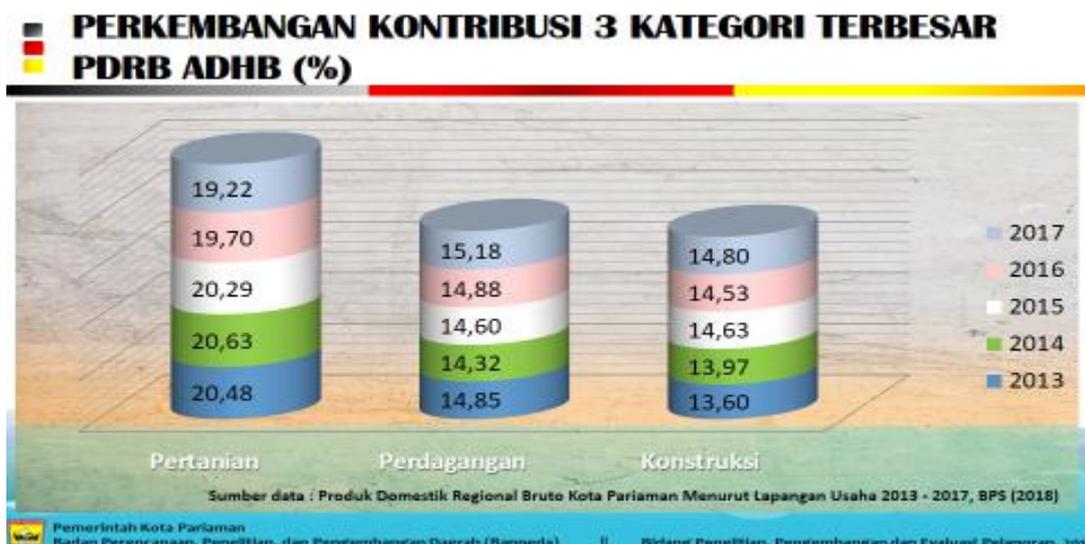
Gambar 2.6
Perkembangan PDRB ADHK Kota Pariaman
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017 (Rp. Juta)



Sumber : Pariaman dalam Angka, 2018

Selanjutnya dari gambar 2.6 diatas terlihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Pariaman ADHK pada tahun 2017 adalah sebesar 3,2 triliun rupiah, nilainya naik bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2013). Dimana, pada tahun 2013 PDRB Kota Pariaman sebesar 2,58 triliun rupiah. Ini berarti bahwa nilai PDRB Kota Pariaman atas dasar harga konstan selama tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 620 Milyar milyar rupiah. Dengan kata lain, Perekonomian Kota Pariaman selama tahun 2017 telah menghasilkan pertumbuhan sebesar 5,62 persen. (BPS, 2018)

Gambar 2.7
Perkembangan Kontribusi 3 Kategori Terbesar PDRB ADHB
Kota Pariaman Tahun 2013-2017 (%)



Berdasarkan Gambar 2.7 diatas menjelaskan tentang perkembangan kontribusi kategori terbesar dalam PDRB ADHB Kota Pariaman menurut Lapangan Usaha jangka waktu 5 tahun terakhir (2013-2017).

Kategori yang paling besar kontribusinya masih kategori pertanian dengan kontribusi pada tahun 2017 adalah sebesar 19,22 % dan tahun 2013 tercatat sebesar 20,48%, dengan laju pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 0,32% yang berarti terdapat penurunan rata-rata sebesar 0,32% per tahun. Hal ini dinilai wajar karena Kota Pariaman mulai berbenah dari Kota Tradisional menuju Kota Perdagangan Barang dan Jasa. Kategori dengan kontribusi terbesar kedua adalah kategori Perdagangan. Pada tahun 2017 kontribusi dari Perdagangan sudah mencapai adalah sebesar 15,18% yang dari tahun 2013 baru mencapai 14,85% dengan pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 0,10%. Untuk kategori penyumbang ketiga terbesar yakni kategori konstruksi, pada tahun 2013 kontribusi kategori ini adalah sebesar 13,60% menjadi 14,80% pada tahun 2017. Jika dihitung laju pertumbuhannya dari tahun 2013 adalah sebesar 0,41% per tahun. Dari ketiga sektor penyumbang terbesar ini dapat disimpulkan bahwa Kota Pariaman berada di masa transisi menuju Kota Perdagangan Barang dan Jasa.

2) PDRB/Pendapatan per kapita Kota Pariaman

PDRB/Pendapatan per kapita merupakan PDRB yang dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, dengan arti bahwa semakin tinggi jumlah penduduk akan semakin kecil besaran PDRB per kapitanya. Semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah maka akan semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut, meskipun ukuran ini tidak dapat memberikan gambaran kesenjangan pendapatan antar penduduk.

Gambar 2.8
Perkembangan PDRB/Pendapatan Per Kapita (Rp. Juta)
Kota Pariaman Tahun 2013-2017



Perkembangan nilai PDRB/Pendapatan perkapita Kota Pariaman tahun 2013 sampai tahun 2017 tersaji dalam gambar 2.8 di atas. Dari gambar terlihat bahwa besarnya nilai pendapatan rata-rata penduduk

Kota Pariaman setiap tahunnya mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya PDRB per kapita setiap tahunnya. Pada tahun 2013, nominal PDRB per kapita Kota Pariaman adalah Rp. 36,57 juta dan terus meningkat hingga tahun 2017 menjadi Rp. 50,64 juta, dengan laju pertumbuhan per tahun rata-rata sebesar 3,4%

3) Struktur Ekonomi Kota Pariaman Tahun 2017

Komposisi perekonomian suatu daerah terbentuk dari nilai tambah yang dihasilkan oleh 17 (tujuh belas) kategori, sehingga struktur ekonomi dapat menunjukkan besar kecilnya kontribusi yang diberikan oleh masing-masing kategori terhadap pembentukan nilai PDRB. Pada setiap tahunnya bisa terjadi pergeseran (transformasi) antar kategori, dan pergeseran tersebut diakibatkan adanya perkembangan nilai tambah yang dihasilkan oleh masing-masing kategori.

Gambar 2.9
Struktur Ekonomi Kota Pariaman tahun 2017



Perekonomian Kota Pariaman pada tahun 2017 ini masih didominasi oleh 5 kategori utama sebagai penghasil nilai tambah terbesar terhadap PDRB Kota Pariaman. Lima kategori tersebut adalah Sektor Pertanian, Perdagangan, Konstruksi, Transportasi dan Pergudangan, dan Industri Pengolahan. Kategori Pertanian memberikan kontribusi sebesar 19 %, Perdagangan memberikan kontribusi sebesar 15 %, Konstruksi memberikan sumbangan sebesar 15 %, Transportasi dan Pergudangan memberikan kontribusi sebesar 12 %. Dan industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 7,6 %.

Sedangkan 12 kategori lainnya dalam perekonomian yang meliputi Informasi dan Komunikasi, Administrasi pemerintahan, pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Keuangan, Real Estate, Jasa Lainnya, Pertambangan dan Penggalian, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Jasa Perusahaan, secara total

keseluruhan memberikan kontribusi sebesar 31,19% terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kota Pariaman pada tahun 2017.

C. Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan kenaikan atau penurunan dari periode ke periode atau dari tahun ke tahun yang merupakan salah satu indikator yang berkaitan erat dengan harga dari barang dan jasa yang dibutuhkan oleh penduduk dalam suatu wilayah. Inflasi diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa di dalam suatu wilayah juga mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut berakibat pada turunnya nilai mata uang. Keberadaan inflasi ini berkaitan erat dengan harga dari barang dan jasa yang dibutuhkan oleh penduduk dalam suatu wilayah dan mampu mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat. Gambar berikut ini Grafik menyajikan tingkat inflasi Kota Pariaman tahun 2013 – 2017.

Gambar 2.10
Perkembangan Inflasi Kota Pariaman tahun 2017



Sumber : BPS Kota Pariaman, 2018

Perkembangan Angka inflasi di Kota Pariaman dari tahun 2013-2017 berfluktuasi. Tercatat pada tahun 2013 angka inflasi Kota Pariaman sebesar 5,45 %. Namun meningkat pada tahun 2014 menjadi 6,35 %. Hal ini disebabkan adanya kenaikan harga BBM akibat tekanan harga minyak dunia yang semakin tinggi yang pada akhirnya membebani subsidi BBM. Kenaikan harga BBM di dalam negeri juga akhirnya diikuti oleh kenaikan harga listrik dan harga-harga kebutuhan bahan pokok lainnya yang mendorong inflasi menjadi 6,35 persen. Di tahun 2015 angka inflasi turun menjadi 2,66 %. Dan 2016 angka inflasi naik lagi menjadi 3,34 %. Kemudian pada tahun 2017 turun lagi menjadi 2,89 %. Turunnya angka inflasi ini disebabkan

karena harga bahan pokok yang sudah stabil dan geliat ekonomi di Kota Pariaman yang sudah membaik. Namun secara umum berdasarkan data diatas (Data BPS) inflasi untuk Kota Pariaman pada tahun 2013-2017 dikategorikan rendah karena masih single digit.

D. Indeks Gini

Indeks Gini atau koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Indeks Gini merupakan hasil perhitungan kurva Lorenz yang berfungsi untuk menggambarkan distribusi pendapatan penduduk dari seluruh kelompok pengeluaran (pengeluaran pangan dan non pangan). Rentang angka dalam Indeks Gini adalah 0 – 1. Semakin Indeks Gini mendekati angka 0, maka dapat diartikan bahwa pemerataan semakin baik. Sebaliknya, apabila Indeks Gini semakin mendekati angka 1 maka dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan di dalam masyarakat semakin besar. Berikut adalah pembagian klasifikasi ketimpangan secara lebih detail:

No.	Uraian	Ket
a.	Indeks Gini < 0,3	: Keimpangan Rendah
b.	0,3 =< Indeks Gini <= 0,5	: Ketimpangan Sedang
c.	Indeks Gini > 0,5	: Ketimpangan Tinggi

Gambar 2.11
Perkembangan Indeks Gini Kota Pariaman Tahun 2013-2017



Sumber : BPS 2018

Grafik 2.11 menunjukkan perkembangan Indeks Gini Kota Pariaman tahun 2013 – 2017. Berdasarkan nilai Indeks Gini, Kota Pariaman memiliki kriteria ketimpangan sedang (moderat) pada tahun 2013 – 2017. Indeks gini Kota Pariaman selama rentang waktu 2013 – 2017 secara umum berfluktuasi.

Pada tahun 2013 nilai Indeks Gini Kota Pariaman 0,38. Tahun 2014 naik menjadi 0,40 Dan pada tahun 2015 nilai Indeks Gini Kota Pariaman turun menjadi 0,30. Kemudian pada tahun 2016 dan tahun 2017 nilai Indeks Gini Kota Pariaman mulai naik lagi menjadi 0,33 dan 0,34. Meskipun demikian, kategori ketimpangan pendapatan Kota Pariaman masih tergolong dalam kategori sedang (moderat).

E. Kemiskinan

Indikator persentase penduduk di bawah garis kemiskinan merupakan langkah lanjutan dari analisis kesejahteraan penduduk dari segi pendapatan. Melalui indikator pemerataan pendapatan, diketahui bahwa terdapat penduduk dengan pendapatan terendah dan sebagian dari penduduk tersebut tergolong ke dalam kategori miskin karena pendapatan mereka berada dibawah garis kemiskinan. Menurut BPS, penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dapat diategorikan menjadi dua, yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non-makanan (GKNM). Terdapat perbedaan dalam penentuan garis kemiskinan perkotaan dan perdesaan. GKM ditetapkan sebesar 2.100 kkalori per kapita per hari, sedangkan GKNM yaitu untuk sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Persentase penduduk diatas garis kemiskinan berarti penduduk yang tidak miskin (penduduk sejahtera), yaitu penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan diatas garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kota Pariaman yang ditetapkan semakin meningkat per tahunnya. Pada tahun 2013, garis kemiskinan Kota Pariaman setara Rp. 331.511/kapita/bulan, sedangkan pada tahun 2014 setara Rp Rp 347.107/kapita/bulan, meningkat lagi menjadi Rp 392.970/kapita/bulan pada tahun 2016 dan Rp.412.231 pada tahun 2017. Persentase penduduk diatas garis kemiskinan di Kota Pariaman berfluktuasi selama tahun 2013-2017 Pada tahun 2013, penduduk miskin sebesar 5,35 persen, terus berkurang menjadi 5,12 persen pada tahun 2014 dan tahun 2015 naik lagi menjadi 5,42 persen. Persentase jumlah penduduk miskin menurun menjadi 5,23 persen tahun 2016 dan 5,02 tahun 2017. Tabel 2.12 menunjukkan tentang Kondisi kemiskinan (Kemiskinan Makro) Kota Pariaman selama periode 2013-2017.

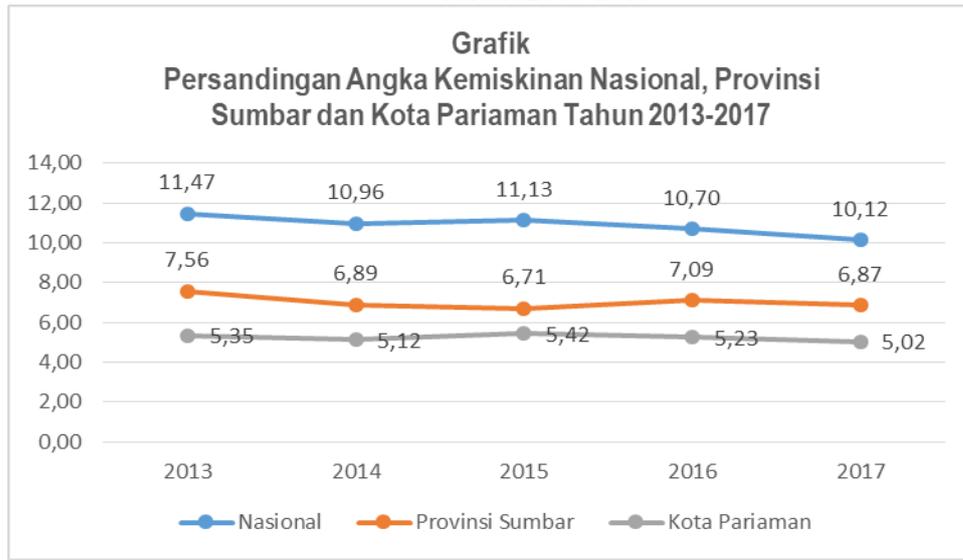
Tabel 2.12
Kondisi Kemiskinan Kota Pariaman Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Penduduk (000)	82.636	83.610	84.709	85.692	86.618
2.	Jml Penduduk Miskin (000)	4.400	4.300	4,580	4.470	4.490
3.	Jumlah Rumah Tangga	17.741	17.950	18.173	18.384	18.583
4.	Persentase Penduduk Miskin (P0)	5,35	5,12	5,42	5,23	5,20
5.	Indek Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,48	0,75	0,58	0,90	0,59
6.	Indek Keparahan Kemiskinan (P2)	0,10	0,20	0,09	0,22	0,14

7.	Garis kemiskinan	331.511	347.107	359.965	392.970	412.231
8.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6.78	5,99	5,37	N/A	5.97

Sumber : BPS Kota Pariaman Tahun 2018

Gambar 2.12
Persandingan Angka Kemiskinan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kota Pariaman Tahun 2013-2017

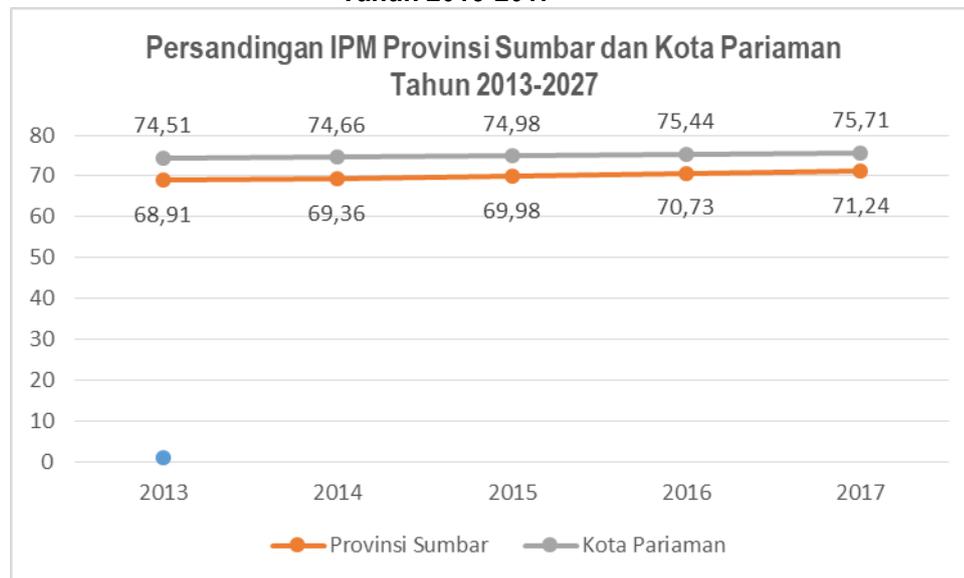


Sumber : Data Olahan 2018

F. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Perkembangan IPM Kota Pariaman dalam empat tahun terakhir mengalami kenaikan dari tahun ke tahun hingga mencapai 75,71 pada tahun 2017. Angka IPM di Kota Pariaman termasuk nomor urut 5 (lima) jika dibandingkan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Dan secara rata-rata IPM Kota Pariaman berada diatas rata-rata Provinsi Sumatera Barat. seperti terlihat pada Gambar 2.13

Gambar 2.13
Persandingan IPM Provinsi Sumatera Barat dan Kota Pariaman
Tahun 2013-2017



Sumber : Data Olahan 2018

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Fokus kesejahteraan Sosial bertujuan untuk memberikan gambaran umum dan hasil analisis bidang pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Fokus ini akan melihat sejauh mana tingkat capaian kesejahteraan masyarakat Kota Pariaman.

A. Pendidikan

1) Angka Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Angka RLS merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang telah ditamatkan. Angka ini mengindikasikan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk suatu wilayah dalam mengenyam pendidikan sekolah formal. Adapun cakupan penduduk yang dihitung dalam RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun, proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan ini mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP.

Gambar 2.14
Perkembangan rata-rata lama sekolah tahun 2013-2017



Sumber : BPS Kota Pariaman 2018

Gambar 2.14 menjelaskan bahwa perkembangan angka rata-rata lama sekolah di Kota Pariaman pada umumnya meningkat selama periode 5 tahun terakhir. Pada tahun 2013 angka rata-rata lama sekolah di Kota Pariaman adalah 9,88 selama 5 tahun angka ini semakin meningkat dan menjadi 10,10 tahun pada tahun 2017, artinya seluruh penduduk Kota Pariaman telah sampai menduduki bangku sekolah sampai kelas 1 SMA dan hampir mendekati kelas 2 SMA.

Kondisi ini sudah melampaui kebijakan nasional bidang pendidikan yakni Wajib Belajar 9 tahun. Dan saat ini Pemerintah Kota Pariaman sudah mencanangkan Program Wajib Belajar 12 tahun. Keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kota Pariaman dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan. Berbagai program/kegiatan yang sudah dilaksanakan seperti: penambahan jumlah RKB, USB, ruang sarana penunjang, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan mutu baik peserta didik maupun tenaga pendidik, peningkatan efisiensi manajemen dan lain-lainnya.

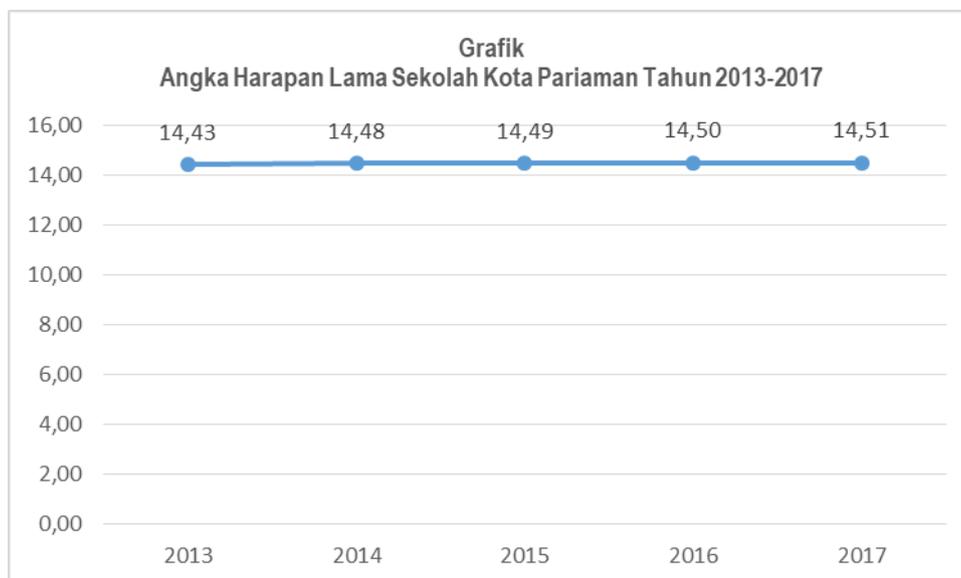
2) Angka Harapan Lama Sekolah

Selain Rata-rata Lama Sekolah (RLS), indikator lain yang memperlihatkan kualitas pendidikan suatu wilayah adalah harapan lama sekolah. Indikator Harapan Lama Sekolah merupakan indikator yang menggantikan indikator sebelumnya yaitu Angka Melek Huruf yang sudah tidak digunakan lagi karena sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Nilai HLS yang semakin tinggi, dapat menggambarkan bahwa rata-rata lamanya sekolah

seseorang diharapkan akan semakin besar (semakin tinggi pendidikan yang ditempuh). HLS ini dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Berdasarkan Gambar 2.15 di bawah, terlihat bahwa nilai HLS Kota Pariaman Tahun 2017 mencapai 14,51 tahun. Hal ini berarti bahwa seseorang yang berumur 7 tahun ke atas memiliki harapan untuk dapat bersekolah selama 14-15 tahun. Dengan kata lain, dalam kondisi normal, seseorang berumur 7 tahun ke atas diharapkan dapat bersekolah sampai dengan memasuki perguruan tinggi (semester VI). Cukup tingginya harapan lama sekolah ini mengindikasikan meningkatnya berbagai fasilitas pendidikan di kota Pariaman untuk meningkatkan kualitas dan daya saing individu sampai jenjang perguruan tinggi.

Gambar 2.15
Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kota Pariaman
Tahun 2013-2017



Sumber :Hasil Olahan, 2018

3) Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu perbandingan antara rasio jumlah siswa, pada jenjang usia manapun, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK adalah indikator yang dianggap paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Pada APK, korelasinya yaitu semakin tinggi angka partisipasi kasar menunjukkan semakin besar jumlah siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan, walaupun dengan mengesampingkan aspek usia dari siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan. Tabel 2.13 menunjukkan APK di Kota Pariaman tahun 2013 – 2017.

Tabel 2.13
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan
Kota Pariaman Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	APK SD/MI/Paket A	101,62	110,40	103,14	110,09	111,23
2.	APK SMP/MTs/Paket B	125,31	133,08	129,00	132,41	86,24
3.	APK SMA/SMK/MA/Paket C	156,87	151,15	145,65	172,42	96,62

Sumber : BPS Kota Pariaman 2018

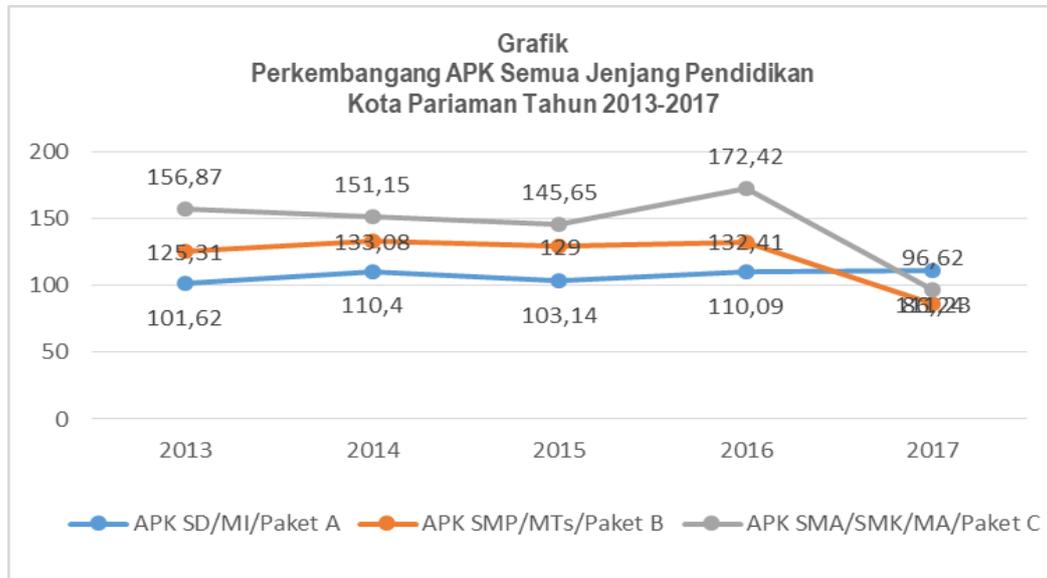
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar pada semua jenjang pendidikan berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 APK SD/MI/Paket A sebesar 101,62 persen. Tahun 2014 APK SD/MI/Paket A naik menjadi 110,40 persen. Dan pada tahun 2015 APK SD/MI/Paket A turun menjadi sebesar 103,14 persen. Kemudian pada tahun 2016 dan tahun 2017 APK SD/MI/Paket A naik lagi menjadi 110,09 persen dan 111,23 persen.

Sementara itu, untuk APK SMP/MTs/Paket B juga berfluktuasi dari tahun ketahun. Pada tahun 2013 APK SMP/MTs/Paket B sebesar 125,31 persen. Pada tahun 2014 APK SMP/MTs/Paket B naik menjadi sebesar 133,08 persen. Dan pada tahun 2015 APK SMP/MTs/Paket B turun menjadi sebesar 129,00. Kemudian pada tahun 2016 APK SMP/MTs/Paket B naik lagi menjadi 132,41 persen. Namun pada tahun 2017 APK SMP/MTs/Paket B jauh turun menjadi 86,24 persen.

Kemudian untuk APK SMA/SMK/MA/Paket C sama halnya dengan APK SD/MI/Paket A dan APK SMP/MTs/Paket B berflutuasi juga. Pada tahun 2013 APK SMA/SMK/MA/Paket C sebesar 156,87 persen. Dan pada tahun 2014 dan 2015 APK SMA/SMK/MA/Paket C turun menjadi 151,15 persen dan 145,65 persen. Kemudian pada tahun 2016 APK SMA/SMK/MA/Paket C naik lagi menjadi 172,42 persen. Namun pada tahun 2017 APK SMA/SMK/MA/Paket C turun lagi menjadi 96,62 persen.

APK sebesar lebih dari 100 persen menunjukkan banyaknya siswa dari luar Kota Pariaman yang bersekolah di Kota Pariaman. Hal tersebut dapat disebabkan kualitas pendidikan di Pariaman yang dianggap lebih baik daripada daerah di sekitarnya. Selain itu, dapat pula disebabkan oleh terdapatnya penduduk di luar batasan usia sekolah pada suatu jenjang pendidikan, yang bersekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan, karena siswa memiliki usia dini pada waktu masuk jenjang sekolah tertentu, atau pun karena siswa tidak berhasil melanjutkan ke tingkat kelas selanjutnya. Berikut Gambar 2.17 menunjukkan diagram APK di Kota Pariaman tahun 2013 – 2017.

Gambar 2.16
Perkembangan APK Semua Jenjang Pendidikan Kota Pariaman
Tahun 2013-2017



Sumber :Hasil Olahan, 2018

4) Angka Pendidikan Yang Ditamatkan

Indikator angka pendidikan yang ditamatkan merupakan perhitungan persentase masyarakat yang menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu pada tahun tertentu. Dengan mengetahui angka rata-rata pendidikan tertinggi yang ditamatkan, maka dapat diketahui tingkat partisipasi dan pendidikan masyarakat pada jenjang pendidikan tersebut. Sehingga dapat disusun program atau bentuk intervensi lain untuk meningkatkan angka pendidikan yang ditamatkan pada jenjang pendidikan tertentu. Pada indikator ini, semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, maka semakin baik pula kualitas pendidikan penduduknya yang juga menggambarkan kemajuan suatu daerah. Berikut Tabel 2.14 menunjukkan angka pendidikan yang ditamatkan di Kota Pariaman tahun 2013 – 2017.

Tabel 2.14
Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan
Kota Pariaman Tahun 2013-2017

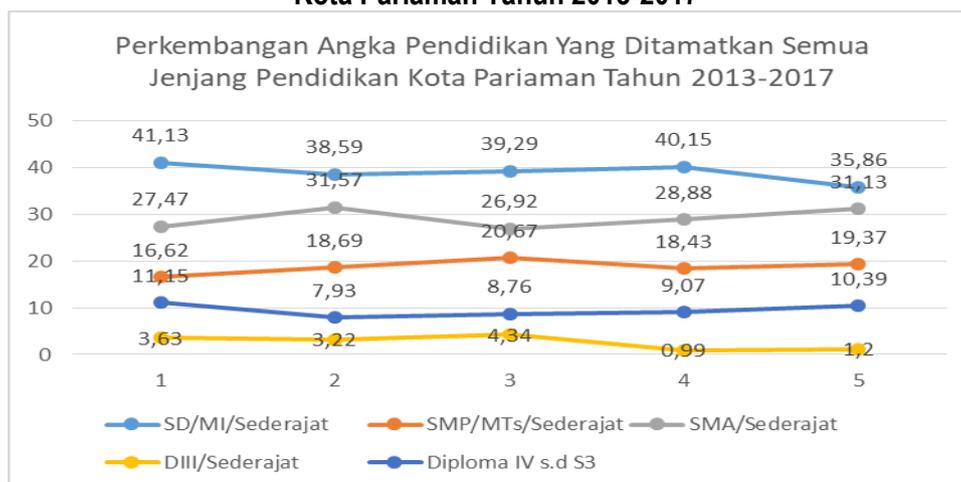
No	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
		2013	2014	2015	2016	2017	
1.	Angka Pendidikan Yang Ditamatkan SD Sederajat	41,13	38,59	39,29	40,15	35,86	-3 %
2.	Angka Pendidikan Yang Ditamatkan SMP Sederajat	16,62	18,69	20,67	18,43	19,37	4 %
3.	Angka Pendidikan Yang Ditamatkan SMA Sederajat	27,47	31,57	26,92	28,88	31,13	4 %
4.	Angka Pendidikan Yang Ditamatkan Diploma	3,63	3,22	4,34	0,99	1,20	-8 %

Sederajat							
5.	Angka Pendidikan Yang Ditamatkan Diploma IV s.d S3 Sederajat	11,15	7,93	8,76	9,07	10,39	0 %

Sumber : BPS Kota Pariaman, 2018

Persentase penduduk yang tidak/belum tamat SD berflutuasi dari tahun 2013 ke 2017. Sementara itu, pertumbuhan positif terdapat pada jenjang SMP Sederajat dan SMA Sederajat yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada jenjang SLPT/MTs/Sederajat, terjadi pertumbuhan yang negatif, sedangkan pada jenjang Diploma sederajat menunjukkan pertumbuhan yang negatif. Pertumbuhan negatif pada jenjang Diploma sederajat dapat disebabkan karena masih lbanyak penduduk yang menamatkan pendidikannya hingga tingkat SLTA/Sederajat. Pertumbuhan konstan terjadi pada Diploma IV s.d S3. Berikut Gambar 2.17 menunjukkan diagram angka pendidikan yang ditamatkan di Kota Pariaman.

Gambar 2.17
Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan
Kota Pariaman Tahun 2013-2017



Sumber :Hasil Olahan, 2018

5) Angka Partisipasi Murni

Angka partisipasi murni (APM) adalah suatu persentase yang menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Apabila dibandingkan dengan Angka Pendidikan Kasar (APK), APM dianggap lebih baik karena mampu menggambarkan partisipasi penduduk kelompok usia tertentu yang berada di jenjang pendidikan tertentu. Perhitungan APM di suatu jenjang pendidikan diambil dari pembagian jumlah siswa dengan kelompok umur tertentu (7 – 12 tahun untuk SD/MI dan 13 – 15 tahun untuk SMP/MTs) dibagi dengan jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu. Berikut Tabel dibawah ini menunjukkan angka partisipasi murni di Kota Pariaman tahun 2013 – 2017

Tabel 2.15
Perkembangan Angka Partisipasi Murni
Kota Pariaman Tahun 2013-2017

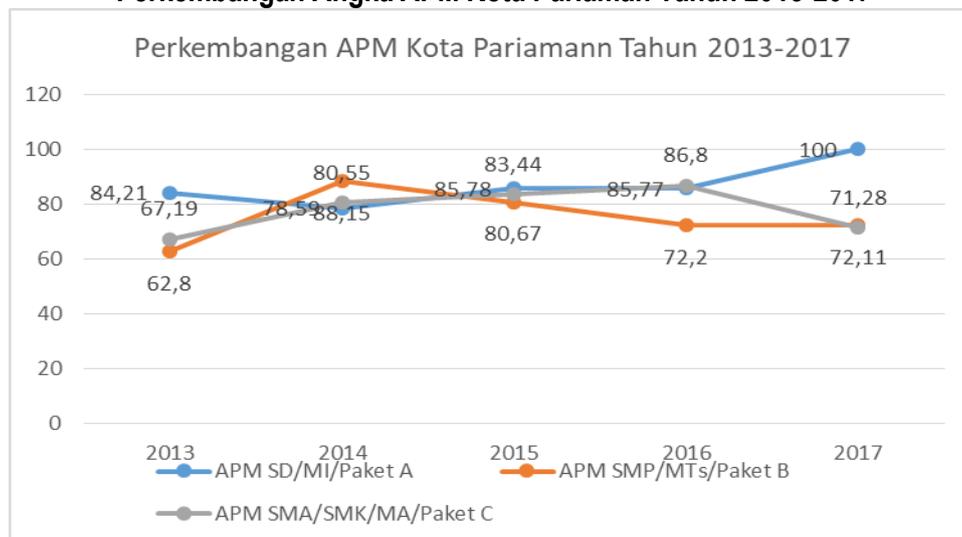
No	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
		2013	2014	2015	2016	2017	
1.	APM SD/MI/Paket A	84,21	78,59	85,78	85,77	100,00	5 %
2.	APM SMP/MTs/Paket B	62,80	88,15	80,67	72,20	72,11	5 %
3.	APM SMA /SMK / MA / Paket C	67,19	80,55	83,44	86,80	71,28	2 %

Sumber : BPS Kota Pariaman, 2018

Angka partisipasi murni pada semua jenjang pendidikan menunjukkan pertumbuhan positif, dengan pertumbuhan rata-rata per tahun yaitu 5 persen untuk jenjang SD/M/Paket A dan 5 persen juga untuk jenjang SMP/MTs/Paket B. Sedangkan untuk jenjang SMA/SMK/MA/Paket C pertumbuhannya sebesar 2 %.

Berikut ini grafik perkembangan Angka Partisipasi Murni Kota Pariaman Tahun 2013-2017.

Gambar 2.18
Perkembangan Angka APM Kota Pariaman Tahun 2013-2017



Sumber : Hasil Olahan, 2018

B. Kesehatan

1) Angka Usia Harapan Hidup (AHH)

Angka harapan hidup yaitu rata-rata lama hidup (dalam tahun) penduduk, yang menurut BPS dihitung berdasarkan angka kematian menurut umur. Indikator angka usia harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Asumsinya, semakin panjang angka harapan hidup maka kesejahteraan penduduk semakin tinggi, khususnya berdasarkan aspek kesehatan. Berikut merupakan data

angka usia harapan hidup di Kota Pariaman, ditunjukkan Tabel berikut ini.

Tabel 2.16
Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup
Kota Pariaman Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
		2013	2014	2015	2016	2017	
1.	Angka Usia Harapan Hidup (AHH)	70,20	70,20	71,00	71,00	71,00	5 %

Sumber : Dinkes Kota Pariaman, 2018

Penduduk Kota Pariaman secara umum memiliki angka usia harapan hidup 70 tahun atau lebih. Perkembangan angka usia harapan hidup di Kota Pariaman dari tahun 2013-2017 mengalami kenaikan walaupun kenaikannya sedikit. Pada tahun 2013, angka usia harapan hidup di Kota Pariaman yaitu 70,20 tahun. Dan pada tahun 2014 angka usia harapan hidup tetap yaitu sebesar 70,20 tahun. Kemudian pada tahun 2015 Angka usia harapan hidup Kota Pariaman naik menjadi 71,00 tahun. Angka usia harapan hidup ini bertahan sampai dengan tahun 2017 yaitu sebesar 71,00 tahun. Angka usia harapan hidup tersebut dipengaruhi oleh kualitas kesehatan yang cenderung semakin baik ditunjang dengan kemudahan dan kesadaran penduduk dalam mengakses fasilitas kesehatan yang baik. Kesadaran masyarakat dalam menggunakan layanan kesehatan pun ditunjang oleh berbagai jaminan kesehatan, yaitu berupa Jamkesda (jaminan kesehatan khusus pemegang KTP Pariaman), jamkesmas (jaminan kesehatan dari pemerintah pusat dimana keanggotaannya ditentukan melalui TNP2K), dan BPJS Kesehatan. Dengan adanya berbagai jaminan kesehatan tersebut, mendorong kesadaran masyarakat untuk berobat ke fasilitas kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit. Angka usia harapan hidup di Kota Pariaman ditunjukkan pada Gambar 2.19 dibawah ini.

Gambar 2.19
Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup
Kota Pariaman Tahun 2013-2017



Sumber :Hasil Olahan, 2018

2) Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka kematian bayi (AKB) atau Angka kelangsungan hidup bayi menggambarkan banyaknya kematian bayi berusia di bawah satu tahun per 1.000 kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu. Penyebab kematian bayi dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu karena faktor endogen (faktor dari dalam) dan eksogen (faktor dari luar). Faktor endogen merupakan faktor-faktor yang dibawa bayi sejak lahir yang diperoleh pada saat konsepsi atau selama kehamilan. Faktor eksogen merupakan faktor-faktor yang diakibatkan oleh pengaruh lingkungan luar. AKB dapat menjadi salah satu indikator penting dalam merepresentasikan kondisi kesehatan masyarakat, baik berkaitan dengan kondisi lingkungan tempat tinggal, sarana dan prasarana kesehatan, maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat. Data AKB ini dapat digunakan sebagai dasar merencanakan program-program pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi. Berikut Tabel 2.17 menunjukkan AKB di Kota Pariaman Tahun 2013 – 2017.

Tabel 2.17
Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi
Kota Pariaman Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	99,00	99,13	98,70	98,47	99,70

Sumber : Dinkes Kota Pariaman, 2018

Angka kelangsungan hidup bayi di Kota Pariaman tahun 2013 - 2017 berflutuasi. Pada tahun 2013 mencapai 99,00 persen. Dan pada tahun 2014 mengalami kenaikan sedikit menjadi 99,13 persen. Kemudian pada tahun 2015 dan tahun 2016 angka kelangsungan hidup bayi mengalami penurunan menjadi 98,70 persen dan 98,47 persen. Dan pada tahun 2017 angka kelangsungan hidup bayi mengalami kenaikan lagi menjadi 99,70 persen. Capaian angka kelangsungan hidup bayi yang berflukuasi ini harus terus dilakukan evaluasinya agar bisa melahirkan program-program yang tepat untuk mendukung peningkatan kesehatan masyarakat. Grafik angka kelangsungan hidup bayi di Kota Pariaman ditunjukkan pada Gambar 2.20

Gambar 2.20
Perkembangan Angka kelangsungan hidup bayi
Kota Pariaman Tahun 2013-2017



Sumber :Hasil Olahan, 2018

3) Prevalensi Balita Gizi Buruk

Prevalensi balita gizi buruk merupakan perbandingan dari jumlah balita gizi buruk berdasarkan kriteria berat badan per umur dan jumlah balita yang ditimbang. Perhitungan ini berguna untuk mengetahui berapa persentase balita gizi buruk di Kota Pariaman, dan selanjutnya digunakan sebagai acuan pengadaan program penanganan masalah gizi buruk di Kota Pariaman. Berikut ini data prevalensi balita gizi buruk di Kota Pariaman ditunjukkan pada tabel berikut ini.

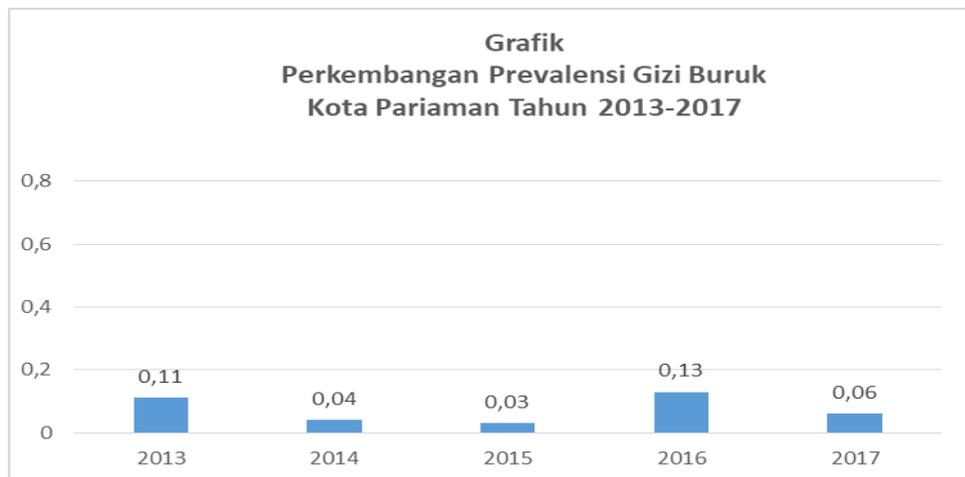
Tabel 2.18
Perkembangan Persentase Balita Gizi Buruk
Kota Pariaman Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Persentase Balita Gizi Buruk	0,11	0,04	0,03	0,13	0,06

Sumber : Dinkes Kota Pariaman, 2018

Perkembangan persentase balita yang mengalami gizi buruk berdasarkan kriteria berat badan per umur di Kota Pariaman mengalami fluktuasi, pada tahun 2013 berjumlah sebesar 0,11 %. Pada tahun 2014, persentase balita yang mengalami gizi buruk turun menjadi 0,04. Dan pada tahun 2015 persentase balita yang mengalami gizi buruk turun lagi menjadi 0,03 %. Kemudian pada tahun 2016 persentase balita yang mengalami gizi buruk naik lagi menjadi 0,13 %. Namun pada tahun 2017 persentase balita gizi buruk turun lagi menjadi 0,06 %. Peningkatan prevalensi balita gizi buruk harus diatasi dengan program-program terutama di bidang kesehatan untuk mendukung peningkatan kualitas gizi balita.

Gambar 2.21
Perkembangan Prevalensi Gizi Buruk
Kota Pariaman Tahun 2013-2017



Sumber : Hasil Olahan, 2018

C. Ketenagakerjaan

1) Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Semakin tinggi rasio menggambarkan bahwa penduduk di wilayah sudah banyak yang

terserap dalam dunia kerja. Rasio penduduk yang bekerja di Kota Pariaman tahun 2013 – 2017 disajikan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.19
Perkembangan Rasio Penduduk Yang Bekerja
Kota Pariaman Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rasio Penduduk Yang Bekerja (BPS)	93,93	89,15	93,39	79,84	94,03

Sumber : BPS Kota Pariaman 2018

Jumlah penduduk yang bekerja, jumlah angkatan kerja, maupun rasio penduduk yang bekerja di Kota Pariaman berfluktuasi. Pada tahun 2013 rasio penduduk yang bekerja adalah sebesar 93,33 %. Pada tahun 2014 rasio penduduk yang bekerja turun menjadi 89,15 %. Dan pada tahun 2015 rasio penduduk yang bekerja naik lagi menjadi 93,39 %. Kemudian pada tahun 2016 Besarnya rasio penduduk yang bekerja turun lagi menjadi 79,84 %. Sedangkan pada tahun 2017 rasio penduduk yang bekerja naik lagi menjadi 94,03 %. Angka ini menunjukkan bahwa serapan tenaga kerja di Kota Pariaman tergolong baik, yaitu lebih dari 90 persen. Hal tersebut berarti 94 persen dari total angkatan kerja di Kota Pariaman telah memperoleh kesempatan untuk bekerja, sementara untuk 6 persen yang lainnya masih dalam proses mencari pekerjaan atau menganggur. Rasio penduduk yang bekerja harus dipertahankan dan ditingkatkan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat, menuju kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Berikut Gambar 2.22 menunjukkan grafik rasio penduduk yang bekerja di Kota Pariaman.

Gambar 2.22
Perkembangan Rasio Penduduk Yang Bekerja
Kota Pariaman Tahun 2013-2017



Sumber :Hasil Olahan, 2018

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

A. Kebudayaan

Fokus seni budaya dan olahraga dapat diketahui dari pengelolaan kebudayaan dengan indikator meliputi jumlah grup kesenian, jumlah gedung, serta pengelolaan pemuda dan olahraga meliputi Jumlah klub olahraga, dan jumlah gedung olah raga. Fokus seni budaya dan olahraga bertujuan untuk melihat aspek kesejahteraan masyarakat dari segi seni budaya dan olahraga. Fokus seni budaya dan olahraga memberikan gambaran dan analisis di bidang kebudayaan serta pemuda dan olahraga. Kesadaran akan pentingnya seni, budaya dan olahraga memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional dan daerah yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa serta menciptakan iklim kondusif dan harmonis. pembangunan, baik di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, sosial kemasyarakatan, politik dan budaya

Pembinaan terhadap perkembangan seni budaya dapat dilihat dari jumlah grup kesenian dan jumlah gedung kesenian sebagaimana tergambar dalam Tabel dibawah ini.

Tabel 2.20
Jumlah Gedung dan Group Kesenian Kota Pariaman Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Group Kesenian	22	23	33	33	40
2.	Jumlah Gedung Kesenian	2	2	2	2	2

Sumber : BPS Kota Pariaman 2018

Jumlah grup kesenian di Kota Pariaman mengalami tren positif pada periode 2013 – 2017, Pada tahun 2013 yaitu 22 unit, naik menjadi 23 unit pada tahun 2014. Dan peningkatan cukup besar terjadi pada tahun 2015 jumlah group kesenian menjadi 33. Tahun 2016 tetap sama dengan tahun 2015 yaitu 33 unit. Tahun 2017 jumlah group kesenian naik lagi menjadi 40 unit. Dan diperkirakan untuk tahun berikut perkembangan jumlah group kesenian ini akan meningkat seiring kebijakan pemerintah daerah agar semua desa di Kota Pariaman membentuk ke khasan budaya lokal terkait dengan seni budaya ini. Sementara untuk jumlah gedung selama periode 2013-2017 tetap.

B. Pemuda dan Olahraga

Indikator jumlah klub olahraga dapat dimanfaatkan untuk melihat perkembangan sumber daya manusia melalui kegiatan olahraga. Semakin banyak jumlah klub olahraga maka semakin baik perkembangan dalam bidang kepemudaan dan olahraga, serta semakin membutuhkan pengelolaan yang baik. Kemajuan pembangunan di bidang keolahragaan bermuara pada pembangunan kepemudaan. Pembangunan kepemudaan dapat diwujudkan melalui peningkatan prestasi dan peran serta aktif pemuda dalam berbagai bidang. Berikut adalah kondisi pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga Kota Pariaman ditunjukkan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.21
Kondisi Pembangunan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
Kota Pariaman Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Klub Olahraga	32	37	41	41	41
2.	Jumlah Gedung Olahraga	10	11	12	12	12
3.	Jumlah Organisasi Pemuda	10	10	10	10	10
4.	Jumlah organisasi olahraga	12	12	12	12	12
5.	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	2	2	2	2	2
6.	Jumlah Kegiatan Olahraga	9	9	9	9	9
7.	Gelanggang/Balai Remaja	13	13	13	13	13
8.	Lapangan Olahraga	40	40	40	40	40

Berdasarkan data di atas, perkembangan pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga tidak begitu signifikan, bahkan dalam periode 5 tahun terakhir cenderung jumlahnya tetap. Kecuali untuk perkembangan jumlah klub olahraga yang naik pada tahun 2013 hanya berjumlah 32 klub. Kemudian pada tahun 2017 jumlah klub olahraga menjadi 41 klub. Termasuk juga untuk jumlah gedung olahraga bertambah 2 unit dari 10 unit pada tahun 2013 menjadi 12 unit pada tahun 2017.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua pemerintah daerah. Urusan pemerintahan wajib memiliki dua urusan pembangunan daerah, yakni urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelayanan dasar merupakan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara Indonesia. Oleh karena ini, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan urusan pemerintahan daerah yang wajib dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di Kota Pariaman.

A. Urusan Pendidikan

1) Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD/MI dan SMP/MTs

Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS PAUD di Kota Pariaman dihitung berdasarkan jumlah siswa yang berusia 4-6 tahun dibagi dengan jumlah penduduk Kota Pariaman yang berusia 4-6 tahun. Dan APS SD/MI di Kota Pariaman dihitung berdasarkan jumlah siswa SD/MI yang berusia 7 – 12 tahun yang bersekolah di Kota Pariaman dibagi jumlah penduduk Kota Pariaman berusia 7 – 12 tahun. Begitu juga dengan APS SMP/MTs disesuaikan dengan perhitungan usia SMP/MTs (13 – 15 tahun). Tabel 2.22 merupakan angka partisipasi sekolah di Kota Pariaman disajikan sebagai berikut.

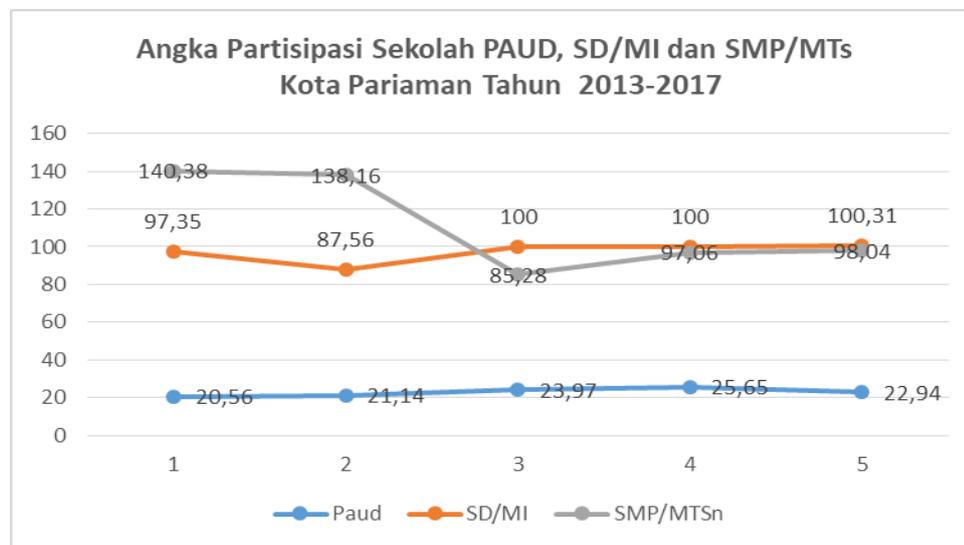
Tabel 2.22
Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD/MI dan SMP/MTs
Kota Pariaman Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	PAUD	20,56	21,14	23,97	25,65	22,94
2.	SD/MI	97,35	87,56	100,0	100,0	100,31
3.	SMP/MTs	140,38	138,16	85,28	97,06	94,08

Sumber : Dikpora Kota Pariaman 2018

Angka partisipasi sekolah SD/MI di Kota Pariaman dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2013 sampai dengan 2017 cenderung mengalami fluktuasi. Penurunan angka partisipasi sekolah dapat dimungkinkan terjadi karena beberapa anak di daerah perbatasan kota memilih sekolah yang tidak jauh dari rumahnya dimana sekolah yang dipilih secara administratif termasuk dalam kabupaten/kota lain. Secara umum, angka partisipasi sekolah tingkat SMP/MTs memiliki persentase yang lebih tinggi dibandingkan pada tingkat SD/MI dan PAUD. Berikut ini disajikan perkembangan angka partisipasi sekolah di Kota Pariaman Tahun 2013-2017 pada Gambar 2.23

Gambar 2.23
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD/MI dan SMP/MTs
Kota Pariaman Tahun 2013-2017



Sumber :Hasil Olahan, 2018

2) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah merupakan perbandingan antara jumlah sekolah dan penduduk usia sekolah tersebut dalam setiap 10.000 penduduk. Pada indikator ini yang digunakan adalah jumlah sekolah jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun dan 13 -15 tahun. Tabel 2.23 merupakan data rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah di SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pariaman.

Tabel 2.23
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs
Kota Pariaman Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	SD/MI	70,34	66,52	60,80	74,77	74,77
2.	SMP/MTs	35,29	34,35	33,54	68,93	NA

Sumber : Dikpora Tahun 2018

Berdasarkan pada Tabel 2.23 rasio ketersediaan sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pariaman dalam kurun waktu 2013 – 2017 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 rasio ketersediaan sekolah SD/MI sebesar 70,34 %. Dan pada tahun 2014 dan tahun 2015 rasio ketersediaan sekolah SD/MI turun menjadi 66,52 % dan 60,80 %. Kemudian pada tahun 2016 dan tahun 2017 rasio ketersediaan sekolah SD/MI naik lagi menjadi 74,77 % dan 74,77.

3) Rasio Guru/Murid SD/MI dan SMP/MTs serta SMA

Rasio guru/murid merupakan perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah murid pada suatu jenjang pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pendidik atau guru. Selain itu, rasio ini digunakan untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar mutu pengajaran tercapai. Jumlah keseluruhan guru SD/MI dan SPM/MTs yang dihitung adalah baik guru PNS maupun swasta (non-PNS). Formula untuk menghitung rasio guru/murid adalah jumlah murid dibagi dengan jumlah guru yang tersedia. Berikut tabel data rasio guru/murid SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pariaman.

Tabel 2.24
Perkembangan Rasio Antara Jumlah Guru dan Murid untuk Tingkat SD, SMP,
dan SMA Negeri Periode 2013 s/d 2017

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2017
1	SD	1:15	1:15	1:14	1:12	1:14
2	SMP	1:12	1:13	1:14	1:11	1:13
3	SMA	1:13	1:12	1:13	1:11	1:11

Sumber : Olahan Sendiri Dari Dikpora, 2018

Dilihat dari tabel 2.24 dapat disimpulkan bahwa Rasio antara jumlah guru dan murid di kota Pariaman sudah termasuk pada kondisi yang ideal (<1:20), hal ini menunjukkan bahwa dalam keseharian proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik.

Dari rasio tersebut tergambar bahwa ketersediaan guru pada sekolah sudah mencukupi, namun beberapa kendala dalam pemerataan guru ini adalah :

- a. Pemerataan guru setiap sekolah belum tepat karena ada penumpukan pada beberapa sekolah, sedangkan pada sekolah lain terjadi kekurangan guru.
- b. Belum meratanya penyebaran guru ke sekolah-sekolah menurut bidang studi yang dibutuhkan.
- a. Pemerintah Kota Pariaman melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga perlu mendata kembali kebutuhan guru pada sekolah-sekolah yang membutuhkan.
- b. Perlu diadakan pemerataan guru di setiap sekolah sesuai yang dibutuhkan.

Berikut perkembangan rasio antara ruang kelas dan murid untuk tingkat SD, SMP dan SMA negeri periode 2013 s/d 2017:

Tabel 2.25
Perkembangan Rasio antara Ruang Kelas dan Murid untuk Tingkat SD, SMP dan SMA Negeri Periode 2013 s/d 2017

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	SD	1:24	1:21	1:22	1:21	1:21
2	SMP	1:29	1:31	1:32	1:29	1:30
3	SMA	1:39	1:32	1:40	1:33	1:31

Sumber : Olahan Sendiri Dari Dikpora, 2018

Dari rasio sekolah murid di atas menunjukkan bahwa sekolah di Kota Pariaman tidak ada yang kekurangan murid, pemerataan sekolah pun terjadi karena masing-masing sekolah saling meningkatkan kompetensinya. Hal ini terlihat dari berkurangnya angka rasio ruang kelas dan murid dari tahun 2014 ke tahun 2017.

Kualifikasi guru sangat mendukung proses belajar mengajar di sekolah, untuk itu kualifikasi perlu agar kesesuaian tingkat pengajaran pendidikan dapat terlaksana sesuai dengan tingkat pengetahuan. Kualifikasi guru di Kota Pariaman hampir mendekati kesempurnaan dalam standarisasi kualifikasi dan menjadi perhatian baik dari Pusat, Provinsi maupun daerah setempat. Tingkat guru berkualifikasi dapat dilihat dari angka kelayakan guru. Untuk Kota Pariaman Angka Kelayakan Guru tingkat SD, SMP dan SMA sudah mendekati 100% dari target yang ditetapkan.

Keberhasilan sektor pendidikan juga dapat dilihat dari tingkat kelulusan pada masing-masing jenjang pendidikan. Pada Tingkat Pendidikan Dasar di upayakan kelulusan mencapai 100% ini sesuai dengan penancangan Pemerintah terhadap penuntasan Wajar 9 tahun memperhatikan tingkat kemampuan siswa.

Berikut perkembangan tingkat kelulusan siswa untuk tingkat SD, SMP dan SMA periode 2013 s/d 2017

Tabel 2.26
Perkembangan Tingkat Kelulusan Siswa untuk Tingkat SD, SMP dan SMA Negeri
Periode 2013 s/d 2017

NO	Uraian	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1	SD	%	100	100	100	99,87	99,25
2	SMP	%	99.93	99.18	100	99,77	100
3	SMA	%	99	100	100	100	100

Sumber: Pariaman Dalam Angka, BPS 2018

Dari tabel 2.26 dapat tergambar bahwa tingkat kelulusan SD dan SMP tahun 2016 mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun 2015, namun untuk tingkat SMA tingkat kelulusan tetap 100 %.

Beberapa langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman melalui Dinas Pendidikan dan Olah raga dalam rangka meningkatkan angka kelulusan siswa di Kota Pariaman, antara lain :

- Dalam menghadapi UASBN/UN sekolah sebagai pelaksana, membuat strategi khusus pencapaian materi yang akan di UASBN/UN kan, sehingga materi dapat di mengerti oleh siswa
- Mengadakan remedial teaching terhadap mata pelajaran yang belum tuntas.
- Bagi siswa yang tidak ikut ujian UASBN/UN diupayakan untuk mengikuti ujian susulan di sekolah.
- Sekiranya tidak lulus pada ujian UASBN/UN diupayakan ditampung dalam Paket A, B, atau C.

Tabel 2.27
Perkembangan Pendidikan di Kota Pariaman tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2013	2014	2015	2017
1	Pendidikan Dasar					
1.1.	Angka Partisipasi Sekolah (%)	99,60	97,35	87,56	100,00	100,00
1.2.	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah (%)	69,53	70,34	66,52	60,80	74,77
2	Pendidikan Menengah					
2.1.	Angka Partisipasi Sekolah (%)	96,93	140,38	138,16	85,28	97,06
2.2.	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah (%)	20,4	35,29	34,35	33,54	68,93
3	Angka Putus Sekolah					
3.1.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	0,00	0,15	0,04	0,12	0,00
3.2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	0,28	0,38	0,07	0,13	0,00
3.3.	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA (%)	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00

Sumber: Dinas Dikpora Kota Pariaman, 2018

4) Fasilitas Pendidikan

Sekolah atau bangunan pendidikan dalam kondisi baik merupakan perbandingan antara gedung atau

bangunan dalam kondisi baik dengan total seluruh gedung atau bangunan. Data mengenai sekolah dalam kondisi bangunan yang baik tidak didapatkan. Data pada indikator ini diganti dengan data kelas dalam kondisi baik. Data jumlah kelas dalam kondisi baik di Kota Pariaman Tahun 2013 – 2017 disajikan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.28
Perkembangan Sarana Pendidikan di Kota Pariaman tahun 2013-2017

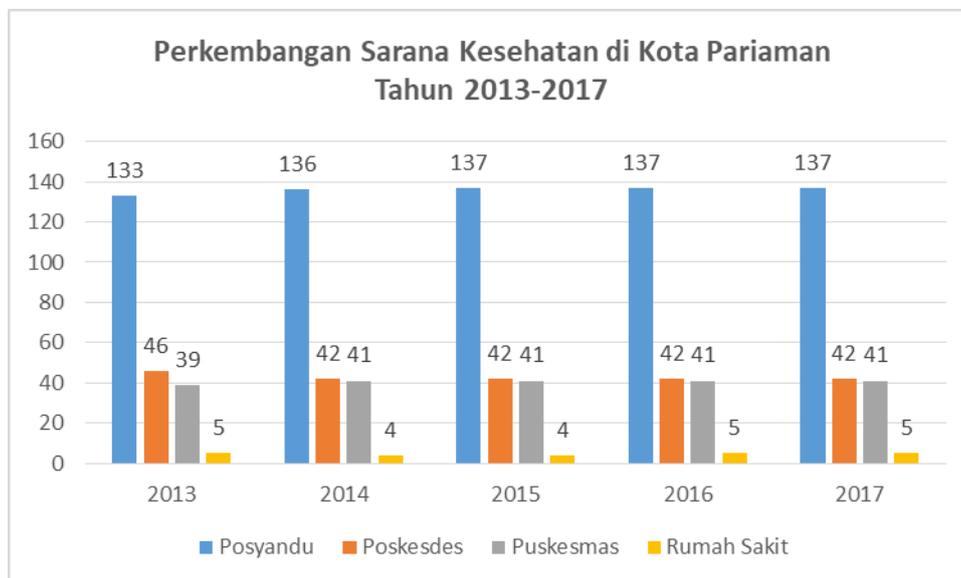
No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Sekolah pendidikan SD/MI dalam kondisi baik	77	77	77	77	79
2.	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA dalam kondisi baik	35	36	36	37	18

Sumber: Dinas Dikpora Kota Pariaman, 2018

B. Kesehatan

Perkembangan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan di Kota Pariaman dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Gambar 2.24
Perkembangan Sarana Kesehatan di Kota Pariaman Tahun 2013-2017



Dari gambar 2.25 terlihat bahwa perkembangan sarana dan prasarana kesehatan di Kota Pariaman dalam tahun 2012-2017 berkembang cukup lambat. Jumlah Rumah Sakit Umum di Kota Pariaman dari tahun 2012-2017 hanya terdapat 5 unit Rumah Sakit, 1 unit milik Provinsi Sumatera Barat sedangkan untuk

milik Pemko Pariaman pada akhir tahun 2016 (24 Desember 2016) diresmikan 1 Rumah Sakit Tipe D, yakni Rumah Sakit Dr. Sadikin di Kampung Baru Padusunan. Dan 3 lagi rumah sakit khusus.

Sebagai ujung tombak dalam melakukan pelayanan kesehatan di daerah khususnya pelayanan terhadap ibu hamil dan melahirkan, bidan memegang peranan yang sangat penting terutama untuk mengurangi angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian ibu melahirkan (AKI). AKB dan AKI ini merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam konsep MDG's (*Millennium Development Goals*).

Berikut perkembangan AKB dan AKI di Kota Pariaman tahun 2013-2017

Tabel. 2.29
Perkembangan AKB dan AKI Kota Pariaman 2013-2017

NO	Uraian	Satuan	2013	2013	2014	2015	2017
1	AKB	%	1,10	1,00	0,88	1,30	1,53
2	AKI	(Jiwa)	1	0	0	5	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pariaman, 2018

Dalam periode 5 tahun terakhir, jumlah tenaga kesehatan di Kota Pariaman perkembangannya cukup fluktuatif, namun cenderung mengalami penurunan jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2013. Jumlah dokter umum mengalami penurunan dari tahun 2013 sebanyak 13 orang dari sebelumnya sejumlah 29 orang menjadi 16 orang di tahun 2016. Jumlah dokter gigi di Kota Pariaman berkembang cukup fluktuatif namun secara jumlah tahun 2012 sebanyak 8 orang ditahun 2016 berkurang menjadi 6 orang.

Berikut dapat terlihat perkembangan tenaga kesehatan periode 2012 s/d 2017.

Gambar 2.25
Perkembangan Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun 2012-2017



Upaya pelayanan kesehatan dasar merupakan langkah awal yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Dengan pemberian pelayanan kesehatan dasar

secara cepat dan tepat, diharapkan sebagian besar masalah kesehatan masyarakat sudah dapat diatasi. Perkembangan derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari kejadian kematian dari waktu ke waktu. Di samping itu, kejadian kematian juga dapat digunakan sebagai indikator dalam penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan lainnya.

Tabel 2.30
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kota Pariaman Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Angka kelangsungan hidup bayi (%)	98,9	99,00	99,13	98,70	98,47
2.	Persentase balita gizi kurang (%)	0,90	1,00	0,90	0,80	0,82
3.	Rasio posyandu per satuan balita (%)	33,53	33,53	34,29	34,29	34,29
4.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (%)	0,28	0,33	0,33	0,33	0,33
5.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (%)	0,03	0,05	0,05	0,03	0,03
6.	Rasio dokter per satuan penduduk (%)	0,29	0,22	0,22	0,22	0,22
7.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk (%)	0,37	0,29	0,29	0,29	0,29

Sumber : Dinkes 2018

C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kota Pariaman merupakan wilayah perkotaan dengan kegiatan utama perdagangan, jasa, wisata dan pertanian. Susunan fungsi kawasan Kota Pariaman terbagi menjadi tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Dari pengertian tersebut, terdapat beberapa indikator pada aspek pekerjaan umum ini yang disesuaikan dan atau ditiadakan sehingga mampu untuk menggambarkan kondisi kinerja kewilayahan di Kota Pariaman. Penyesuaian indikator dilakukan karena beberapa faktor, seperti belum adanya pendataan yang dilakukan oleh instansi terkait maupun data pendataan pada dan atau hingga tahun tertentu.

1) Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan

Sesuai dengan Permen PU Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disebutkan bahwa persentase kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan didapatkan dari perbandingan antara kondisi jalan baik dengan panjang jalan penghubung pusat kota. Kondisi jalan baik diartikan sebagai kondisi jalan dengan kondisi baik dan sedang. Kondisi jalan

yang baik diasumsikan mampu untuk mendukung pengembangan wilayah dari segi kegiatan ekonomi maupun pengembangan infrastruktur.

Jalan merupakan salah satu infrastruktur utama dalam mendorong perekonomian suatu daerah. Jalan sebagai sarana penunjang transportasi memiliki peran penting khususnya untuk transportasi darat. Pembangunan transportasi jalan di Kota Pariaman dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir tidak menunjukkan angka penambahan. Fokus pemerintah Kota Pariaman adalah peningkatan kualitas jalan yang sudah ada. Di tahun 2017 keseluruhan panjang jalan di Kota Pariaman sepanjang 405.692 km. Bila dirinci menurut statusnya, 12.920 km merupakan jalan Negara, 2.629 km jalan Provinsi dan 390.143 km lagi merupakan jalan Kota.

Dilihat dari jenis permukaan jalan yang terdapat di Kota Pariaman selama periode 2013-2017 menunjukkan kondisi bahwa sebagian besar jalan-jalan mempunyai permukaan berupa aspal. Hal ini menggambarkan bahwa kondisi jalan menurut jenis permukaan di Kota Pariaman sudah berada dalam kondisi yang cukup baik.

Tabel. 2.31
Panjang Jalan Kota Tahun 2013-2017 Menurut Status (km)

NO	Tahun	Panjang jalan menurut status (km)		
		Negara	Provinsi	Kota
1	2017	12,920	2,629	390,143
2	2016	14,075	0,00	398,726
3	2015	14,075	0,00	398,726
4	2014	14,075	0,00	398,726
5	2013	14,075	9,175	398,726

Sumber : Pariaman Dalam Angka, BPS 2018

Tabel. 2.32
Panjang Jalan Kota Tahun 2013-2017 Menurut Jenis Permukaan (km)

Tahun	Panjang Jalan Kota Menurut Jenis Permukaan (km)			
	Aspal	Kerikil	Tanah	Beton
2017	248.783	35.286	43.876	62.198
2016	39.525	52.972	103.644	202.385
2015	49.459	57.210	107.018	185.039
2014	53.316	59.594	107.018	178.798
2013	53.316	59.594	107.018	178.798

Sumber : Pariaman Dalam Angka, BPS 2018

Peningkatan kualitas jalan pada suatu wilayah akan sangat menentukan kelancaran jalur distribusi barang sehingga bisa menopang pertumbuhan ekonomi. Semakin baik kualitas jalan yang ada di suatu

wilayah maka akan semakin lancar distribusi barang dan pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Perkembangan persentase jalan menurut kondisinya di Kota Pariaman pada tahun 2013-2017 menunjukkan kondisi yang cukup fluktuatif. Namun secara keseluruhan selama periode waktu ini didapatkan angka bahwa kondisi jalan yang baik di Kota Pariaman rata-rata adalah sebesar 41,30%, jalan dengan kondisi sedang rata-rata sebesar 15,69%, jalan dengan kondisi rusak rata-rata sebesar 8,99% dan jalan dengan kondisi rusak berat rata-rata sebesar 33,99%.

Tabel 2.33
Persentase Jalan Kota tahun 2013-2017 Menurut Kondisi (%)

Tahun	Kondisi Permukaan Jalan Kota Pariaman			
	Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat
2017	34,43	38,64	11,03	15,90
2016	45,01	9,52	7,72	37,63
2015	42,98	9,91	8,60	38,50
2014	42,33	10,17	8,68	38,82
2013	41,75	10,21	8,91	39,12
Rata2	41,30	15,69	8,99	33,99

Sumber : Olahan sendiri dari Pariaman Dalam Angka, BPS 2018

D. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kualitas lingkungan permukiman menjadi perhatian utama dalam urusan wajib bidang perumahan guna menciptakan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Terkait dengan hal ini, Penataan dan pembangunan perumahan permukiman dilaksanakan secara bertahap dan diprioritaskan pada pemukiman penduduk untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Rasio rumah layak huni dihitung dari perbandingan jumlah rumah layak huni (unit) dengan jumlah penduduk (jiwa).

Sumber daya air adalah sumber daya berupa air yang berguna atau potensial bagi manusia. Kegunaan air meliputi penggunaan di bidang pertanian, industri, rumah tangga, rekreasi, dan aktivitas lingkungan.

Ketersediaan air di Indonesia mencapai 15.000 m³ perkapita pertahun masih di atas rata-rata dunia yang hanya 8.000 m³ perkapita pertahun. Sumberdaya air di Kota Pariaman berupa air tanah dan sungai yang mengalir dari wilayah timur laut ke barat daya Pariaman. Potensi pemenuhan kebutuhan akan air bersih di Kota Pariaman pada umumnya relatif besar karena dangkalnya air tanah di wilayah ini sehingga memudahkan penduduk dalam penggunaannya. Pola pengaliran sungai yang relatif paralel menunjukkan perubahan morfologi yang konsisten. Pada daerah pantai aliran sungai umumnya berubah membentuk pola aliran sejajar pantai. Kota Pariaman dilalui oleh 3 buah sungai yaitu Batang Manggung (11,50 km) yang melalui Kecamatan Pariaman Utara, Batang Pariaman (12,00 km) dan Batang Manggau (11,80 km) yang

berhulu di Kecamatan Pariaman Selatan dan melewati Kecamatan Pariaman Tengah. Kebutuhan air minum di Kota Pariaman sangat mendesak. Kapasitas yang ada saat ini tidak berimbang dengan jumlah pelanggan yang harus dilayani karena masih banyak rumah tangga yang memanfaatkan air sungai untuk kelangsungan hidupnya selain itu penyediaan sistem air minum juga diarahkan untuk menunjang fungsi pengembangan kota.

Rencana pengembangan utilitas air minum diarahkan pada:

- Pencarian sumber air minum alternatif, misalnya dengan membuat DAM, membuat reservoir, atau memanfaatkan sungai kecil.
- Peningkatan sistem jaringan distribusi
- Penambahan dan perbaikan sistem pelayanan sambungan ke rumah-rumah sehingga persebaran pelayanan air minum dapat meliputi seluruh masyarakat.

Sistem penyediaan air minum dikonsentrasikan di pusat kota yang merupakan pusat kegiatan lokal yaitu di seluruh Kecamatan Pariaman Tengah dan pada pusat-pusat unit lingkungan. Sistem tersebut diakomodasi oleh sarana pengangkutan air bersih berupa truk tangki. Sedangkan untuk daerah lainnya di Kota Pariaman dibangun penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS). Perkiraan kebutuhan air minum di Kota Pariaman dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.34
Perkiraan kebutuhan air minum di Kota Pariaman Tahun 2030

Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga 2030	Jumlah kebutuhan air untuk sambungan rumah @230 L/RT/hari	Kebutuhan sambungan rumah (RT)	Jumlah kebutuhan air untuk kran umum @30 L/hari	Kebutuhan sambungan kran umum
Pariaman Utara	4.991	1.147.930	549.036	748.686	6.487
Pariaman Tengah	5.123	1.178.290	705.132	788.499	7.747
Pariaman Selatan	3.928	903.440	432.075	589.193	5.892
Pariaman Timur	2.139	491.970	209.978	201.678	3.155
Jumlah	15.520	3.721.630	1.707.241	2.328.056	23.281

Sumber : Dinas Perkim, Perum & LH 2018

Perkembangan kebutuhan air minum di Kota Pariaman untuk setiap tahunnya mengalami peningkatan sesuai dengan terjadinya peningkatan jumlah penduduk. Namun dari data yang ada terlihat bahwa persentase penduduk Kota Pariaman yang dapat akses air bersih mengalami fluktuatif tiap tahunnya, hal ini bergantung kepada kemampuan PDAM sebagai unit pengelolaan dan penyediaan air minum di Kota Pariaman.

E. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Pemerintah Kota Pariaman terus melakukan upaya untuk menjaga stabilitas ketertiban dan kemanaan lingkungan, termasuk di dalamnya adalah upaya-upaya untuk mencegah terjadinya konflik horizontal di masyarakat dan kerawanan politik. Beberapa hal yang menjadi perhatian serius di antaranya adalah perkembangan kasus narkoba yang cenderung menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2017 kasus narkoba yang tercatat berjumlah 26 kasus. Angka ini naik dibandingkan pada tahun 2013 yang tercatat hanya 5 kasus. Sedangkan Kasus kriminalitas menunjukkan kecenderungan menurun. Pada tahun 2017 terjadi 347 kasus dari 391 kasus pada tahun 2013. Dari data tersebut bisa digambarkan rata-rata dalam satu hari terjadi 1 – 2 kasus kriminal di Kota Pariaman. Data terkait dengan pembangunan di bidang trantibum dan linmas tergambar dalam Tabel dibawah ini.

Tabel 2.35
Indikator Stabilitas dan Keamanan Lingkungan Kota Pariaman Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	20	22	23	25	26
2.	Kasus Kriminalitas	391	424	456	377	347
3.	Kasus Narkoba	5	6	7	10	26

Sumber : Kantor Kesbangpol 2018

F. Urusan Sosial

Penyediaan fasilitas sosial ditujukan untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung. Penyediaan fasilitas tersebut diberikan oleh pemerintah, dengan melalui dinas terkait, dalam hal ini adalah Dinas Sosial. Data sarana sosial yang tersedia di Kota Pariaman disajikan dalam Tabel 2.36.

Tabel 2.36
Indikator Capaian Urusan Sosial Kota Pariaman Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	4	5	5	5	5
2.	PMKS yang memperoleh bantuan	187	198	110	20	2.975
3.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial/ Penanganan PMKS	187	198	110	20	2.975
4.	Jumlah PMKS	NA	3.699	5.879	5.879	5.879

Sumber : Dinas Sosial 2018

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar

A. Urusan Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan merupakan bidang yang penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat karena dalam bidang ini dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia yang secara otomatis berdampak pada *income* rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam bidang ketenagakerjaan dimana semakin menurun tingkat pengangguran dapat mengindikasikan peningkatan kesejahteraan manusia karena diasumsikan pendapatan rumah tangga yang meningkat.

Berdasarkan aspek ketenagakerjaan, pembangunan di Kota Pariaman menggambarkan kinerja yang cukup baik. Berikut perkembangan angkatan kerja di Kota Pariaman periode 2013 s/d 2017

Tabel 2.37
Perkembangan Angkatan Kerja yang Bekerja dan yang Menganggur
di Kota Pariaman Periode 2013 s/d 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Penduduk yang Bekerja (%)	93,21	91,34	97,08	61,48	79,84
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	66,43	78,2	88,6	61,16	73,45
Pengangguran Terbuka (jiwa)	2.471	1.311	2.402	2.668	2.462
Tingkat pengangguran terbuka	6,65	7,02	6,50	6,61	3,96

Ket: * = angka *backcasting* Sakernas 2016 BPS 2017 Sumber: DPMPTSP & NAKER 2018

Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang potensial untuk memproduksi barang dan jasa, dan jika ada permintaan terhadap tenaga kerja, mereka mampu untuk berpartisipasi didalamnya. Batasan usia > 15 tahun ini sesuai dengan ketentuan batasan penduduk usia kerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Batasan ini diberlakukan mengingat juga ada pekerja anak dengan kategori rentang umur antara 10-14 tahun.

Selain tingkat tenaga kerja, di dalam demografi penduduk juga perlu diperhatikan aspek kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

B. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan. Cara untuk mengetahui persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan adalah dengan membandingkan dari jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintahan dengan jumlah seluruh pekerja perempuan. Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintahan di dapat dari BKPSDM, dan jumlah seluruh pekerja perempuan didapat dari penjumlahan data dari BKPSDM serta DPMPTSP & Naker. Data presentasi partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan di Kota Pariaman Tahun 2013-2017 disajikan dalam Tabel dibawah ini

Tabel 2.38
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	64,37	63,84	63,83	64,13	64,13

Sumber : DP3AKB, 2018

Berdasarkan Tabel 2.38 persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan di Kota Pariaman dalam kurun waktu 2013-2017 bersifat fluktuatif. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan tahun 2013 sebesar 64,37 %. Dan tahun 2014-2015 persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan turun menjadi 63,48 % dan 63,83 %. Kemudian pada tahun 2016 dan tahun 2017 persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan naik lagi menjadi 64,13 % dan 64,13%.

2) Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Tindakan kekerasan pada perempuan dan anak sama halnya dengan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan merupakan proporsi jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak yang terselesaikan terhadap jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak. Data penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kota Pariaman tahun 2013-2017 disajikan dalam Tabel dibawah ini.

Tabel 2.39
Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan Kota Pariaman Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	87,75	89,28	100,00	100,00	100,00

Sumber : DP3AKB, 2018

Berdasarkan Tabel 2.39 penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kota Pariaman dalam kurun waktu 2013-2017 cenderung meningkat. Hanya pada tahun 2013 dan 2014 yang tidak bisa diselesaikan 100 %. Tapi pada tahun 2015-2017 telah terselesaikan semuanya (100 persen). Kesadaran masyarakat untuk melaporkan semakin tinggi sehingga jumlah kasus yang dilaporkan semakin banyak. Namun untuk masa yang akan datang diharapkan jumlah kasus pengaduan semakin menurun, bukan karena hanya sedikit kasus yang dilaporkan, tapi memang benar-benar berkurang jumlah kasusnya.

3) Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar rasio KDRT di Kota Pariaman. Rasio KDRT dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah KDRT dengan jumlah rumah tangga. Berikut ini merupakan rasio KDRT di Kota Pariaman tahun 2013-2017.

Tabel 2.40
Rasio KDRT Kota Pariaman Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rasio KDRT	0,22	0,13	0,05	005	0,05

Sumber : DP3AKB, 2018

Berdasarkan Tabel 2.40 rasio KDRT di Kota Pariaman dalam kurun waktu 2013-2017 berada dalam kondisi yang cukup bagus, ditunjukkan dengan rasio KDRT yang menurun hampir setiap tahunnya. Pada tahun 2013 rasio KDRT sebesar 0,22 %. Dan pada tahun 2014 rasio KDRT turun menjadi 0,13 %. Sampai

terakhir pada tahun 2017 rasio KDRT menjadi 0,05 %. Pada kurun waktu 2013-2017 terjadi penurunan rasio KDRT hal tersebut mengindikasikan adanya kondisi yang sedikit demi sedikit membaik dengan berkurangnya kasus KDRT.

C. Urusan Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu keadaan tersedianya pangan yang cukup (baik jumlah dan mutunya), aman, beragam, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan). Dalam suatu wilayah, diharapkan tercapai ketahanan pangan, yang juga menjadi kebutuhan dasar penduduk. Dengan demikian, diharapkan penduduk Kota Pariaman mendapatkan akses pangan yang baik, dari jumlah maupun mutu pangan.

Secara umum, berdasarkan Tabel 2.41 ketersediaan pangan utama di Kota Pariaman telah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini tampak dari persentase ketersediaan pangan utama yang lebih dari 100%, artinya terdapat surplus ketersediaan pangan utama.

Tabel 2.41
Capaian Kinerja Urusan Pangan Kota Pariaman Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	PPH Kota Pariaman	72,41	73,45	74,10	75,20	75,80
2.	Regulasi ketahanan pangan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Ketersediaan pangan utama	181,02	187,40	206,80	196,40	203,26

Sumber Dinas Pertanian, Pangan & Perikanan 2018

Berdasarkan data tabel diatas secara umum kualitas (Keragaman dan Keseimbangan) konsumsi pangan masyarakat Kota Pariaman ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) terus mengalami peningkatan dengan skor 72,41 tahun 2013 menjadi 75,80 pada tahun 2017. Sedangkan untuk ketersediaan pangan utama di Kota Pariaman pada tahun 2013 – 2017 cenderung fluktuatif. Ketersediaan pangan utama di Kota Pariaman pada tahun 2015 adalah yang paling besar pada kurun waktu 2013 – 2017. Pada tahun 2015, ketersediaan pangan utama Kota Pariaman mencapai 206,80 kg/jiwa, sedangkan pada tahun 2016, ketersediaan pangan utama turun menjadi sebesar 196,40 kg/jiwa. Ketersediaan pangan di Kota Pariaman berasal dari daerah lain di sekitar Kota Pariaman dan juga hasil produksi di wilayah Kota Pariaman. Di samping itu, perhitungan ketersediaan pangan di kota Pariaman didapat dari akumulasi cadangan pangan ketika bencana terjadi. Perkembangan positif ketersediaan pangan utama di Kota Pariaman ini mengindikasikan bahwa kebutuhan penduduk akan pangan utama dapat tercukupi dengan baik.

D. Urusan Pertanahan

Terdapat tiga indikator yang termasuk dalam urusan pertanahan, yakni indikator persentase luas lahan bersertifikat terhadap luas wilayah, penyelesaian kasus tanah negara, serta indikator penyelesaian izin lokasi. Dalam urusan pertanahan ini, terdapat beberapa indikator yang mengalami penyesuaian judul dan atau formula yang telah disesuaikan dengan kondisi wilayah Kota Pariaman.

Urusan pertanahan menjadi tanggungjawab pemerintah daerah kota Pariaman. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang pertanahan, pemerintah daerah melalui Kantor Pertanahan mempunyai program *one day service*. Sementara tujuan diadakannya *One Day Service* adalah untuk mempermudah pelayanan di bidang pertanahan, mempersingkat alur birokrasi pelayanan di bidang pertanahan, serta mewujudkan harapan masyarakat pengguna layanan di bidang pertanahan.

Tabel 2.42
Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kota Pariaman Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Persentase sertifikasi aset tanah & bangunan pemko	38,50	40,68	41,90	42,80	45,68

Sumber : Dinas PU, PR & Pertanahan 2019

Indikator pembentuk untuk persentase luas lahan bersertifikat di Kota Pariaman mengalami peningkatan dari tahun 2013 hingga tahun 2017. Tercatat seluas 38,50 % lahan bersertifikat di tahun 2013 kemudian meningkat di tahun 2017 menjadi 45,58 %. Hektar lahan bersertifikat di Kota Pariaman dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 4 % per tahun.

E. Urusan Lingkungan Hidup

Lampiran 1 Permendagri menyebutkan bahwa terdapat delapan indikator untuk urusan lingkungan hidup, yakni persentase penanganan sampah, persentase penduduk berakses air minum, persentase luas permukiman yang tertata, pencemaran status mutu air, cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air, cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal, tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk, dan penegakan hukum lingkungan. Dari 8 indikator itu hanya 3 indikator yang dapat disajikan 1) Persentase penanganan sampah, 2) cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal, 3) tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk.

Indikator persentase penanganan sampah didapatkan dari perbandingan antara volume sampah yang ditangani dengan volume produksi sampah dikalikan dengan bilangan 100. Indikator persentase penanganan sampah di Kota Pariaman berdasarkan Dinas Permukiman, Perumahan Rakyat dan LH Kota

Pariaman menggunakan perbandingan antara volume sampah yang dibuang ke TPA dengan perkiraan volume sampah. Analisis terkait dengan pengelolaan sampah dilakukan berdasarkan data dari tahun 2013 hingga tahun 2017.

Tabel 2.43
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kota Pariaman Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.	100	100	100	100	100
2.	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0,55	0,60	0,49	0,14	0,17

Sumber Dinas Perkim, Perum & LH 2018

F. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1) Rasio Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar kepemilikan KTP per satuan penduduk Kota Pariaman. Cara untuk mencari rasio ini menurut Lampiran 1 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah dengan membagi jumlah penduduk usia >17 tahun yang memiliki KTP dengan jumlah penduduk usia >17 tahun atau telah menikah (wajib KTP). Dapat dilihat dari tabel berikut bahwa rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu signifikan. Rasio tersebut sudah tergolong dalam kondisi yang baik karena sudah mengalami peningkatan hampir tiap tahun dan sudah hampir mencapai angka 1,00.

Tabel 2.44
Rasio Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk Kota Pariaman Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	0,73	0,73	0,84	0,87	0,88

Sumber : Dinas Capil 2018

2) Kepemilikan Akte Kelahiran Per 1.000 Penduduk

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase penduduk yang memiliki akte kelahiran. Kepemilikan akte lahir menunjukkan bahwa kelahirannya telah dicatat dalam data kependudukan. Kepemilikan akte kelahiran tidak hanya penting bagi bayi yang baru lahir akan tetapi bagi orang dewasa. Manfaat memiliki akte kelahiran adalah kemudahan dalam mengakses pelayanan publik yang bersifat formal

ataupun menjadi syarat untuk pembuatan surat keterangan diri penduduk. Cara menghitung kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran terhadap jumlah penduduk. Berikut merupakan data kepemilikan akte kelahiran per 1.000 penduduk di Kota Pariaman tahun 2013-2017.

Tabel 2.45
Kepemilikan Akte Kelahiran Per 1.000 Penduduk Kota Pariaman Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	5,44	6,54	15,11	34,65	41,61
2.	Kepemilikan KTP	72,56	73,11	84,07	86,93	88,20

Sumber : Dinas Capil 2018

3) Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Indikator ini bertujuan untuk melihat apakah KTP yang diterbitkan sudah berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan). Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman telah menerapkan program e-KTP dan penerapan KTP berbasis NIK. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman, penerapan KTP Nasional berbasis NIK telah dilaksanakan mulai tahun 2012. Data penerapan KTP Nasional Berbasis NIK dari tahun 2013-2017 di Kota Pariaman disajikan dalam Tabel dibawah ini.

Tabel 2.46
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Kota Pariaman Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Capil 2018

Urusan administrasi kependudukan merupakan urusan yang sangat penting dalam tata pemerintahan nasional. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa urusan administrasi kependudukan merupakan salah satu urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar termasuk Kota Pariaman.

Tabel 2.47
Perkembangan Kepemilikan e-KTP menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin
Di Kota Pariaman Tahun 2017

Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Kecamatan Pariaman Utara	5.715	6.121	11.836
Kecamatan Pariaman Tengah	9.724	10.113	19.837
Kecamatan Pariaman Selatan	5.443	5.833	11.176
Kecamatan Pariaman Timur	6.585	7.063	13.648
Total	27.467	29.130	56.597

G. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

PKK atau yang biasa dikenal sebagai Pembinaan Kesejahteraan Keluarga merupakan wadah kegiatan untuk kaum wanita dengan tujuan untuk mengembangkan kreativitas. Tujuan PKK adalah untuk mewujudkan keluarga sejahtera. Keluarga sejahtera seperti tujuan awal pergerakan PKK adalah keluarga yang mampu menciptakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah serta mampu berperan dalam masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan keluarga, PKK memiliki 10 program pokok PKK. Dalam gerakannya PKK berorientasi kepada 10 program pokok tersebut. Melalui 10 program pokok ini maka aktivitas dan kreativitas ibu-ibu dapat tersalurkan. Upaya menyumbangkan ide, karya dan pengabdian para wanita melalui PKK ini dapat lebih efektif. Pertemuan yang bersifat rutin bulanan dapat menjadi media kekompakan warga dalam saling menginformasikan pembangunan yang berjalan di tingkat kampung maupun kelurahan. Bahkan PKK juga merupakan wadah koordinasi strategis yang menyambungkan program-program Kota Pariaman hingga menyentuh ke masyarakat terbawah. Data rata-rata jumlah kelompok binaan PKK di Kota Pariaman disajikan pada Tabel 2.48

Tabel 2.48
Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kota Pariaman Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK berbasis NIK	100	100	100	100	100

Sumber : DPMDes 2018

2) PKK aktif

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah kegiatan sekelompok kaum wanita yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan keluarga. Keaktifan PKK untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga

merupakan sebuah kekuatan mendasar pada setiap keluarga. Pembangunan terkecil dilakukan oleh PKK di rumah tangganya masing-masing. Untuk itu peran PKK menjadi sangat strategis untuk merealisasikan visi dan misi pemerintah pada skop yang paling kecil. Pemantauan kegiatan PKK menjadi sangat penting untuk mengetahui usaha-usaha aktif di tingkat akar rumput dalam merealisasikan program pembangunan.

Monitoring terhadap kegiatan PKK dilakukan untuk melihat peran serta dalam mencapai tujuan pembangunan. Tabel informasi di bawah ini menunjukkan bahwa kegiatan PKK di Kota Pariaman muncul di tiap-tiap jenjang administrasi, mulai dari RT/RW, Desa/kelurahan, kecamatan hingga kota. Keaktifan PKK sebenarnya dapat membantu ibu-ibu untuk meningkatkan kreativitas di berbagai bidang, yang mungkin dapat dikembangkan untuk membantu ekonomi keluarga. Data jumlah Persentase PKK aktif di Kota Pariaman disajikan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.49
PKK Aktif Kota Pariaman Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	PKK aktif	100	100	100	100	100

Sumber : DPMDes 2018

3) Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat

Indikator pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat kota Pariaman sejak tahun 2013 hingga tahun 2017 mencapai 100 persen. Angka tersebut dihasilkan dari perbandingan jumlah program pemberdayaan masyarakat dengan monitoring dan evaluasi yang dilakukan untuk program yang bersangkutan pada tahun berkenaan. Tabel 2.50 menyajikan data pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat kota Pariaman tahun 2013 hingga 2017.

Tabel 2.50
Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat
Kota Pariaman Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	5	5	8	8	8

Sumber : DP3AKB 2018

H. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga

Rata-rata jumlah anak per keluarga dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah anak dan jumlah keluarga. Definisi anak dan keluarga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah samping dengan derajat ketiga. Dari definisi tersebut didapat bahwa yang dimaksud dengan anak adalah penduduk berusia 0-17 tahun. Berikut merupakan data rata-rata jumlah anak per keluarga di Kota Pariaman.

Tabel 2.51
Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga Kota Pariaman Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	5	4	4	4	4

Sumber : DP3AKB 2018

Dalam hal ini, digunakan data jumlah penduduk dengan usia 0-17 tahun menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pariaman. Sedangkan untuk jumlah keluarga menggunakan data jumlah kartu keluarga yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pariaman. Dari pendataan dari tahun 2013 – 2017 menunjukkan kecenderungan penurunan rata-rata jumlah anak dalam keluarga. Pada tahun 2013 rata-rata jumlah anak dalam keluarga berjumlah 5 orang. Kemudian mulai tahun 2014-2017 rata-rata jumlah anak dalam keluarga sudah mulai menurun menjadi 4 orang.

2) Cakupan Peserta KB Aktif

Peserta KB aktif merupakan Pasangan Usia Subur (PUS) yang pada saat ini masih menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi. Cakupan peserta KB aktif dilihat berdasarkan proporsi jumlah peserta program KB aktif terhadap jumlah pasangan usia subur. Dalam rangka menekan laju pertumbuhan penduduk, salah satu cara yang digunakan adalah melalui program KB. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Tabel 2.52 merupakan data cakupan peserta KB aktif di Kota Pariaman.

Tabel 2.52
Cakupan Peserta KB Aktif Kota Pariaman Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Cakupan peserta KB aktif	71,7	70,14	64,52	63,67	63,89
2.	Rasio Akseptor KB	71,7	70,14	64,52	63,67	63,89

Sumber : DP3AKB 2018

I. Urusan Perhubungan

Pelayanan Urusan Perhubungan belum optimal karena sistem transportasi barang dan orang belum terkoneksi dengan pasar sebagai pusat aktivitas ekonomi. Berdasarkan data sarana dan prasarana penunjang bidang perhubungan seperti rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, traffic light dan warning light tahun 2013-2017, pada tahun 2013 jumlah rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, demikian juga dengan jumlah kendaraan wajib uji mengalami peningkatan.

Tabel 2.53
Indikator Pembangunan Bidang Perhubungan Kota Pariaman Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	2.179.560	2.714.839	180.177	147.523	160.601
2.	Jumlah uji KIR angkutan umum	1.173	1.101	1.142	1.600	841
3.	Jumlah pelabuhan laut/ udara/ terminal bis	2	2	2	2	2
4.	Kepemilikan KIR angkutan umum	1,52	1,52	2,54	13,75	13,90
5.	Pemasangan rambu-rambu	52,00	6,46	2,53	1,93	1,00
6.	Jumla Pelanggaran Lalu Lintas	204	127	144	122	155

Sumber : Dinas Perhubungan, 2018

Untuk mengetahui sejauh mana pembangunan di bidang perhubungan ini, jumlah kecelakaan lalu lintas digunakan sebagai ukuran keberhasilan. Semakin sedikit jumlah kecelakaan lalu lintas terjadi, maka pembangunan di bidang perhubungan sudah berhasil menyelamatkan banyak nyawa. Jumlah kecelakaan lalu lintas di Kota Pariaman cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2013, terdapat 204 kasus kecelakaan lalu lintas terjadi di Kota Pariaman. Dan pada tahun 2014 kasus kecelakaan turun menjadi 127 kasus. Kemudian pada tahun 2015 naik lagi menjadi 144 kasus. Sedangkan pada tahun 2016 turun lagi menjadi 122 kasus. Dan pada tahun 2017 naik lagi menjadi 155 kasus. Dengan kondisi seperti perlu mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Kota Pariaman untuk melakukan evaluasi kelayakan jalan

dan kendaraan. Selain itu tindakan tegas dan pengawasan yang ketat terhadap pengguna jalan oleh aparat kepolisian juga diperlukan, agar warga masyarakat lebih tertib dalam berkendara di jalan raya.

J. Urusan Komunikasi dan Informatika

Kebutuhan komunikasi dan informasi menjadi kebutuhan seperti “makanan” masyarakat pada era globalisasi ini. Hal ini membuat masyarakat mengandalkan teknologi dan informasi dalam kesehariannya. Telepon genggam sudah menjadi bagian dari kebutuhan primer masyarakat dalam memenuhi kebutuhan teknologi dan informasi melalui internet. Meningkatnya kebutuhan internet, membuat pengguna telepon rumah semakin berkurang tiap tahunnya dan memilih telepon genggam yang mudah dibawa kemanapun. Berikut ini tabel perkembangan informasi daerah Kota Pariaman yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.54
Perkembangan Sistem Informasi Daerah Kota Pariaman Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2015	2014	2016	2017
1	Sistem Informasi Manajemen Pemda	22	22	22	22	25
2	Website Daerah	5	5	5	5	22

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2018

K. Urusan Koperasi

Salah satu penunjang perekonomian masyarakat, dalam perekonomian mikro adalah koperasi yang merupakan wadah kegiatan produktif masyarakat dalam perekonomian rakyat. Meskipun belum sepenuhnya berkembang, namun koperasi di Kota Pariaman masih menunjukkan eksistensinya dalam meningkatkan pergerakan perekonomian mikro daerah. Pada tahun 2017, jumlah koperasi aktif di Kota Pariaman mencapai 62 koperasi sedangkan jumlah koperasi tidak aktif sebesar 20 koperasi dengan rincian seperti pada tabel di bawah ini. Dengan banyaknya koperasi yang aktif maka perekonomian masyarakat terutama masyarakat pada kelas menengah kebawah dapat terbantu untuk memberikan modal dengan bunga yang ringan sehingga usaha masyarakat dapat lebih maju dan berkembang.

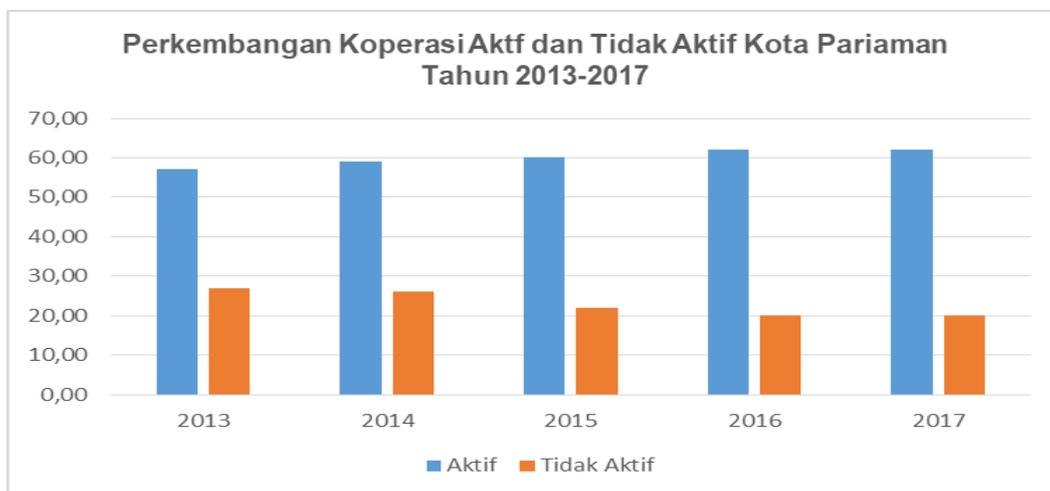
Berikut ini tabel perkembangan capaian koperasi di Kota Pariaman tahun 2013-2017.

Tabel 2.55
Perkembangan capaian koperasi di Kota Pariaman tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Koperasi Aktif	57	59	60	62	62
2	Jumlah Koperasi Tidak Aktif	27	26	22	20	20
3	Jumlah Koperasi KUD	5	5	5	5	5
4	Jumlah Koperasi Non KUD	79	79	77	77	77

Sumber : Dinas Koperindagkop & KUKM 2018

Gambar 2.26
Perkembangan Koperasi Aktif dan Tidak Aktif Kota Pariaman Tahun 2013-2017



Sumber : Data olahan 2018

L. Urusan Penanaman Modal

Iklim investasi di Kota Pariaman sudah mulai menunjukkan *'trend positif'* sejak tiga setahun terakhir. Walaupun perkembangan kenaikannya tidak terlalu tinggi. Namun ini tetap menjadi komitmen daerah Kota Pariaman bagaimana menumbuhkan minat investor untuk berinvestasi di Kota Pariaman. Bila dilihat dari sumber daya alam Kota Pariaman mempunyai potensi untuk investor menanamkan investasinya. Yang perlu disediakan oleh Kota Pariaman adalah bagaimana bisa memberikan kemudahan dan daya minat yang tinggi bagi investor tersebut. Dan sebagai kota yang potensial untuk pengembangan investasi. Hal ini menunjukkan adanya potensi besar Kota Pariaman untuk dapat menarik minat para investor berbagai industri dan pelaku bisnis beragam sektor untuk turut memajukan perekonomian daerah. Kemudahan berinvestasi di Kota Pariaman tidak lepas dari upaya Pemerintah Kota Pariaman untuk menyederhanakan pelayanan perijinan serta mengedepankan pelayanan yang bersih dan bebas pungli. Berikut ini dapat dilihat Grafik perkembangan nilai investasi dan jumlah investor di Kota Pariaman

Gambar 2.27
Perkembangan Nilai Investasi Berskala Nasional Kota Pariaman
Tahun 2014-2018

**PERKEMBANGAN NILAI INVESTASI BERSKALA NASIONAL DI
KOTA PARIAMAN (Rp. JUTA)**



Sumber : Data olahan 2018

Gambar 2.28
Perkembangan Jumlah Investor Berskala Nasional Kota Pariaman
Tahun 2014-2018

**PERKEMBANGAN JUMLAH INVESTOR BERSKALA NASIONAL DI
KOTA PARIAMAN (UNIT)**



M. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

1) Jumlah Organisasi Pemuda

Pemberdayaan pemuda bertujuan membangkitkan potensi dan peran aktif dibutuhkan pengakuan positif dari masyarakat akan meningkatkan kedewasaan, harga diri, menghindarkan mereka dari masa krisis identitas dan perasaan tak berguna serta memacu perkembangan pola pikir yang positif (pengembangan

jiwa kepemimpinan, penguasaan keterampilan, dan kerjasama dalam aksi-aksi sosial merupakan kematangan mental). Pemuda didorong untuk melakukan hal yang bermakna dalam pelayanan masyarakat, pencegahan dan penyalahgunaan obat dan terlarang dan perilaku berisiko di samping peningkatan hubungan sosial yang positif dan partisipatif serta keterlibatan dalam komunitas di bidang sosio- ekonomi dan politik.

Pemuda merupakan aset pembangunan yang harus mendapat perhatian dari pemerintah. Salah satu bentuk perhatian yang telah diberikan oleh pemerintah selama ini adalah fasilitasi kegiatan kepemudaan dan olahraga. Tabel 2.56 menggambarkan kondisi pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga:

Tabel 2.56
Kondisi Pembangunan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
Kota Pariaman Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Organisasi Pemuda	10	10	10	10	10
2	Jumlah organisasi olahraga	12	12	12	12	12
3	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	2	2	2	2	2
4	Jumlah Kegiatan Olahraga	9	9	9	9	9
5.	Gelanggang/Balai Remaja	13	13	13	13	13
6.	Lapangan Olahraga	40	40	40	40	40

Sumber : Dikpora, 2018

* Data sarana olahraga termasuk sarana olahraga milik swasta/masyarakat

Berdasarkan data di atas, perkembangan pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga tidak begitu signifikan, bahkan dalam periode 5 tahun terakhir cenderung jumlahnya tetap.

N. Urusan Statistik

Statistik merupakan basis dasar yang diperlukan untuk perencanaan daerah. Tentunya semua bentuk perencanaan akan bertolak dari kondisi statistik pembangunan yang disajikan ke dalam data yang terstruktur. Oleh karena itu semestinya buku statistik ini dapat terinformasikan secara progresif. Kendati buku statistik yang dibutuhkan belum lengkap, akan tetapi secara progresif data semestinya disajikan hingga satu bulan terakhir dalam setiap perjalanan tatakala waktu. Namun sebaliknya yang terjadi seringkali buku statistik terbit harus lengkap sehingga data yang dijadikan dasar perencanaan menjadi kurang up date. Untuk mengolah data statistik ini diperlukan indikator yang sesuai. Indikator pada aspek statistik meliputi tersedianya buku “Kota dalam Angka” dan buku “PDRB Kota”. Untuk buku “Kota dalam Angka” tahun 2013

hingga 2017 telah terpenuhi. Sejalan dengan buku “Kota dalam Angka”, buku “PDRB Kota” juga telah terpenuhi

Tabel 2.57
Publikasi Buku Statistik di Kota Pariaman Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Buku “Kota Dalam Angka”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku “PDRB Kota”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: BPS Kota Pariaman 2018

Pada data tersebut hanya menginformasikan bahwa buku statistik Kota Pariaman telah tersedia, namun belum menjawab kebutuhan pengukuran dari indikator jumlah eksemplar buku yang tersedia. Sementara itu tentunya penerbitan buku statistik ini merupakan pekerjaan yang melekat sebagai fungsi wajib yang harus dijalankan yang bersifat periodik, dengan batasan anggaran yang jelas. Semestinya penyebutan jumlah eksemplar sudah harus dapat dipenuhi karena sebenarnya dalam perencanaan dan alokasi anggaran sudah harus jelas.

O. Urusan Kebudayaan

Kebudayaan Kota Pariaman cukup beranekaragam terutama kebudayaan minang yang masih terjaga sampai sekarang. Program budaya yang dilaksanakan untuk mendukung kebudayaan di Kota Pariaman adalah Pesta Budaya Tabuik Kota Pariaman mempunyai potensi yang sangat besar di bidang budaya. Sampai dengan tahun 2017, upaya pemerintah untuk melestarikan budaya loka ditandai dengan banyaknya festival seni budaya yang diselenggarakan, baik skala kecil maupun skala yang cukup besar, baik yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat maupun pemerintah. Salah satu contohnya adalah penyelenggaraan Pesta Budaya Tabuik yang telah menjadi agenda rutin daerah dan dilaksanakan satu kali dalam satu tahun. Kinerja pemerintah dalam pelestarian seni dan budaya lokal tergambar dalam Tabel dibawah ini.

Tabel 2.58
Indikator Fokus Layanan Urusan Wajib Bidang Kebudayaan
Kota Pariaman Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	4	5	6	7	7
2	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	2	2	2	2	2
3.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	52	52	52	52	52

Sumber : Dinas Parbud 2018

P. Urusan Perpustakaan

Perpustakaan mempunyai posisi yang strategis dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia karena keberadaannya disamping sebagai sumber informasi dan pengetahuan, juga menjadi salah satu alat untuk mengukur minat baca masyarakat. Guna menunjang hal tersebut, pemerintah setiap tahun selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas perpustakaan, baik melalui penambahan koleksi wisata, maupun peningkatan pelayanan lainnya, seperti layanan perpustakaan keliling. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan jumlah pengunjung ke perpustakaan. Tabel 2.59 menggambarkan perkembangan pengelolaan perpustakaan daerah.

Tabel 2.59
Indikator Layanan Wajib Bidang Perpustakaan
Kota Pariaman Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Perpustakaan	1	1	1	1	1
2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun	2.259	2.506	2.850	3.150	3.340
3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	1.865	1.925.	2.150	2.235	2.408

Sumber : Bagian Arsip & Perpustakaan 2018

Q. Urusan Kearsipan

Penyelenggaraan urusan kearsipan diarahkan terutama untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan kearsipan, di antaranya melalui bimbingan teknis dan pembinaan pengelolaan arsip secara baku. Sampai dengan tahun 2017, sudah 29 SKPD yang diberikan bimbingan teknis dan pembinaan pengelolaan arsip secara baku. Namun hal ini belum menggambarkan secara lebih akurat apakah sistem pengelolaan arsip secara baku sudah benar-benar dilaksanakan oleh SKPD.

Dalam rangka peningkatan SDM pengelola kearsipan telah diupayakan peningkatan kapasitas, meskipun selama kurun waktu 5 tahun terakhir baru dilaksanakan satu kali. Hasil-hasil pembangunan urusan kearsipan dapat dilihat pada Tabel 2.60

Tabel 2.60
Indikator Layanan Wajib Bidang Kearsipan
Kota Pariaman Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pengelolaan arsip secara baku	0	0	0	4	8
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	0	0	0	0	4

Sumber : Bagian Arsip & Perpustakaan 2018

2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Berikut analisis singkat potensi yang dimiliki oleh Kota Pariaman

A. Urusan Kelautan dan Perikanan

Sektor perikanan merupakan salah satu komoditas yang dikembangkan oleh Kota Pariaman. Hal ini dikarenakan struktur daerah Kota Pariaman yang sesuai untuk mengembangkan usaha perikanan dan kelautan. Potensi subsektor perikanan darat dan laut merupakan lapangan usaha yang mempunyai prospek sangat bagus untuk dikembangkan.

Pada urusan Kelautan dan Perikanan, secara rinci perkembangan pembangunan urusan Kelautan dan Perikanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.61
Perkembangan Produksi Ikan Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
	Jumlah Produksi					
1	Perikanan Laut	11.810 ton	8.111 ton	7.049 ton	6.345 ton	6.117 ton
2	Perikanan Darat	106 ton	158 ton	180 ton	192 ton	254 ton
3	Jumlah Konsumsi Ikan	27,70 Kg/Kap	30 Kg/Kap	33 kg/Kap	36 kg/Kap	32 kg/Kap

Sumber : Dinas Perikanan, 2018

B. Urusan Pariwisata

Pariwisata adalah suatu perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan atau kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu. Pariwisata juga dapat didefinisikan sebagai suatu transformasi orang untuk sementara dan dalam waktu jangka pendek ke tujuan-tujuan di luar tempat dimana mereka biasanya hidup dan bekerja, dan kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di tempat-tempat tujuan itu. Selain itu pengertian pariwisata yang lainnya adalah salah satu jenis industri baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya. Sebagai sektor yang kompleks, pariwisata juga meliputi industri-industri klasik seperti kerajinan tangan dan cinderamata, penginapan, transportasi secara ekonomi juga dipandang sebagai industri.

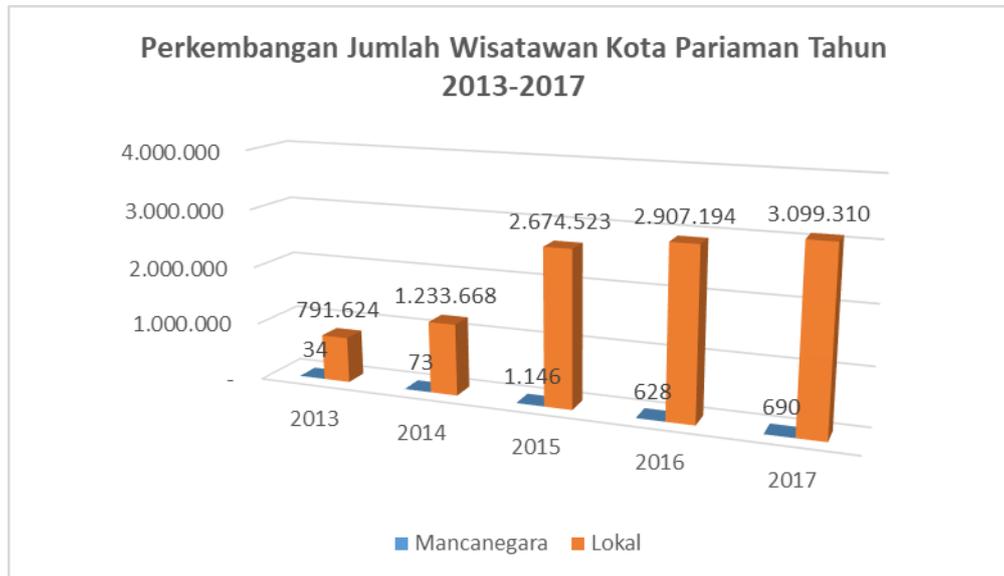
Tabel 2.62
Nama Objek Wisata di Kota Pariaman
Menurut Jenisnya dan Kecamatan 2017

No.	Objek Wisata	Lokasi	Jenis Wisata
Pariaman Tengah			
1	Pantai Gandorih	Kel. Pasir	Wisata Alam
2	Pantai Cermin	Kel. Karang Aur	Wisata Alam
3	Pulau Angso Duo	Pulau Angso Duo	Wisata Alam
No.	Objek Wisata	Lokasi	Jenis Wisata
4	Pulau Tengah	Pulau Tengah	Wisata Alam
5	Talao Pauh	Desa Pauh Pariaman	Wisata Alam
6	Kuburan Panjang	Pulau Angso Duo	Wisata Sejarah
7	Pesta Budaya Tabuik	Kel. Pasir	Wisata Budaya
8	Mariam Kuno	Kampung Pondok	Wisata Sejarah
9	Mesjid Tua	Kampung Perak	Wisata Sejarah
10	Rumah Gadang Moh. Sholeh	Kampung Perak	Wisata Budaya
Pariaman Selatan			
1	Pantai Sunur	Desa Sunur	Wisata Alam
2	Pantai Kata	Desa Taluak	Wisata Alam
3	Pulau Ujung	Pulau Ujung	Wisata Alam
4	Surfing	Desa Taluak	Wisata Alam
5	Mesjid Tua Kuraitaji	Desa Balai Kuraitaji	Wisata Sejarah
Pariaman Timur			
1	Benteng Jepang Santok	Air Santok	Wisata Sejarah
2	Benteng Santok II	Air Santok I	Wisata Sejarah
3	Guci Badano	Bungo Tanjung	Wisata Sejarah
Pariaman Utara			
1	Pantai Teluk Belibis	Desa Padang Birik-Birik	Wisata Alam
2	Talao Manggung	Desa Manggung	Wisata Alam
3	Pulau Kasiak	Pulau Kasiak	Wisata Alam
4	Penangkaran Penyus	Desa Apar	Wisata Minat khusus

Sumber : Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kota Pariaman, 2018

Objek wisata yang ada di Kota Pariaman cukup beragam jenis dan lokasinya. Dari beberapa potensi tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan domestik maupun asing. Berikut dapat kita lihat perkembangan wisatawan yang datang ke Kota Pariaman dari tahun 2013-2017.

Gambar 2.29
Perkembangan Jumlah Wisatawan Kota Pariaman Tahun 2013-2017



Sumber : Data Olahan 2018

Jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Pariaman dalam periode 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan. Pada tahun 2013 jumlah kunjungan wisatawan domestik adalah sebanyak 791.624 orang dan pada tahun 2017 jumlah kunjungan wisatawan meningkat pesat menjadi 3.099.310 orang atau meningkat sebesar 287,5% dalam kurun 5 tahun terakhir.

Selain wisatawan domestik, dengan semakin banyaknya diselenggarakan event-event pariwisata oleh Pemerintah Kota Pariaman seperti Festival Tabuik, Lomba Triathlon, Pariaman Fashion Parade, Pariaman Expo, Tour de Singkarak, Pariaman Batagak Gala dan lain-lain, Lomba lari 5 k dan 10 k serta lomba sepatu roda. Jumlah wisatawan mancanegara juga mengalami peningkatan yang sangat tajam. Jika dibandingkan pada tahun 2013 wisatawan mancanegara yang hanya berjumlah 34 orang, naik menjadi 690 orang pada tahun 2017.

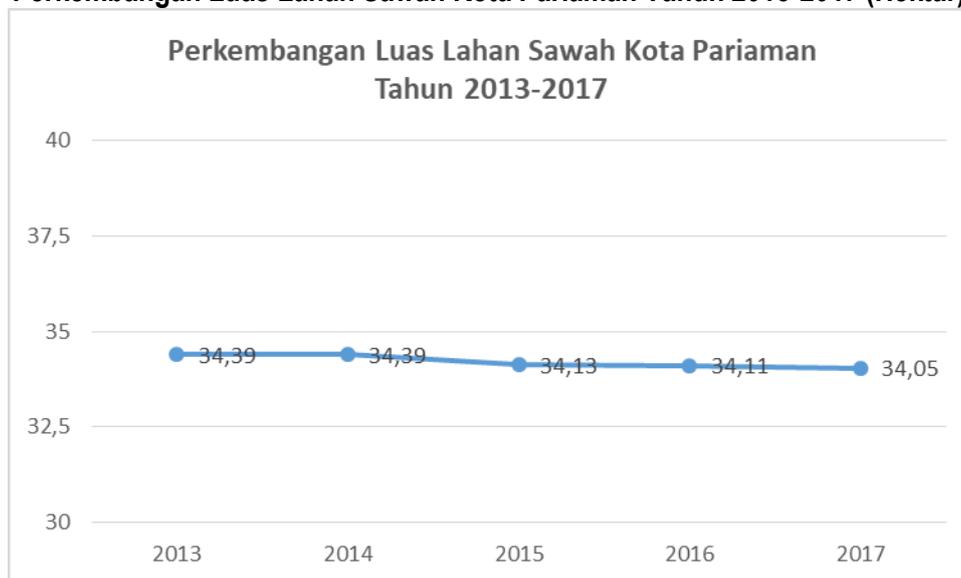
Untuk meningkatkan jumlah wisatawan berkunjung ke suatu daerah maka diperlukan juga sarana dan prasarana pendukung seperti hotel dan penginapan. Pada tahun 2017 jumlah hotel, penginapan dan homestay yang terdapat di Kota Pariaman adalah sebanyak 29 buah dengan rincian 8 unit hotel dan 21 unit penginapan.

C. Urusan Pertanian

Pertanian sebagai salah satu kategori dalam pembentukan PDRB Kota Pariaman mempunyai peranan yang sangat penting. Kontribusi pertanian merupakan yang terbesar dibandingkan dengan kategori yang lainnya. Kontribusi yang diberikan selama periode 2013-2017 tercatat di atas 18%.

Sebagai salah satu penyumbang terbesar dalam kategori pertanian ini adalah produksi padi yang dihasilkan dari lahan sawah. Sawah adalah lahan usaha tani yang secara fisik permukaan tanahnya rata. Luas lahan sawah pada tahun 2017 adalah seluas 2.504 hektar atau sekitar 34,05 % dari 7.336 hektar total wilayah Kota Pariaman (gambar 2.31)

Gambar 2.30
Perkembangan Luas Lahan Sawah Kota Pariaman Tahun 2013-2017 (Hektar).



Sumber :Pariaman Dalam Angka, BPS 2018

Berdasarkan luas lahan sawah di Kota Pariaman pada tahun 2017 menurut kecamatan pada tabel 2.64 dapat dilihat bahwa daerah yang menjadi sentra pertanian sawah di Kota Pariaman adalah Kecamatan Pariaman Utara. Luas lahan sawah di kecamatan ini pada tahun 2017 adalah seluas 755 hektar (30,10% dari luas lahan sawah di Kota Pariaman). Kecamatan Pariaman Selatan berada pada urutan kedua dengan luas lahan sawah seluas 693 hektar (27,70% dari luas lahan sawah di Kota Pariaman), kemudian Kecamatan Pariaman Timur seluas 653 hektar (26,10% dari luas lahan sawah di Kota Pariaman) dan Kecamatan Pariaman Tengah paling sedikit yang mempunyai sawah dengan luas tercatat sebesar 403 hektar (16,10% dari luas lahan sawah di Kota Pariaman).

Tabel 2.63
Luas Lahan Sawah dan Bukan Sawah Kota Pariaman (ha)
Menurut Kecamatan Tahun 2017

No	Kecamatan	Lahan Sawah	Bukan Lahan Sawah Lahan Kering	Lainnya	Jumlah
1.	Pariaman Selatan	693	1.172	117	1.982
2.	Pariaman Tengah	403	709	101	1.213
3.	Pariaman Timur	653	980	84	1.717
4.	Pariaman Utara	755	1.557	112	2.424
Total		2.504	4.418	414	7.336

Sumber : Dinas Pertanian Kota Pariaman, 2018

Namun jika kita lihat luas lahan sawah yang terdapat pada masing-masing kecamatan dibandingkan dengan luas kecamatannya maka kecamatan yang paling besar persentase luas lahan sawahnya adalah Kecamatan Pariaman Timur dengan persentasenya adalah sebesar 38,03%, diikuti Kecamatan Pariaman Selatan dengan persentase sebesar 34,96%, kecamatan Pariaman Tengah dengan persentase sebesar 33,22%. Dan terakhir adalah Kecamatan Pariaman Utara sebesar 31,06%.

Beberapa Komoditas Unggulan Kota Pariaman:

1. Padi

Padi merupakan tanaman pangan berupa rumput berumpun. Tanaman pertanian kuno berasal dari dua benua yaitu Asia dan Afrika Barat tropis dan sub tropis. Bukti sejarah memperlihatkan bahwa penanaman padi di Zhejiang (Cina) sudah dimulai pada 3.000 tahun SM. Fosil butir padi dan gabah ditemukan di Hastinapur Uttar Pradesh India sekitar 100-800 SM. Selain Cina dan India, beberapa wilayah asal padi adalah Bangladesh Utara, Burma, Thailand, Laos, dan Vietnam.

Perkembangan luas tanam, luas panen, produksi dan rata-rata produksi padi di Kota Pariaman selama jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir tersaji dalam tabel 2.64

Tabel 2.64
Perkembangan Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Rata-Rata Produksi Padi
di Kota Pariaman Tahun 2013-2017

No.	Tahun	Luas tanam (ha)	Luas panen (ha)	Produksi (ton)	Rata-rata produksi (ton/ha)
1	2013	5.362,00	5.478,00	29.641,00	5,41
2	2014	5.529,00	5.266,00	31.259,62	5,94
3	2015	5.561,00	5.686,00	32.093,00	5,64
4	2016	5.843,00	5.851,00	31.047,00	5,25
5	2017	5.982,00	5.948,00	32.011,00	5,46

Sumber : Dinas Pertanian Kota Pariaman, 2018

Pada tahun 2017, Kecamatan Pariaman Utara merupakan sentra pertanian (penghasil padi/beras) terbesar di Kota Pariaman dengan luas tanam padi di Kecamatan Pariaman Utara adalah seluas 1.718 hektar, luas panen 1.868 hektar, produksi sebesar 10.165 ton dan produktivitas sebesar 5,44 ton/ha.

Berikutnya Kecamatan Pariaman Timur dengan luas tanam sebanyak 1.677 hektar, luas panen 1.539 hektar, produksi sebanyak 9.137 ton, dan produktivitas 5,94 ton/ha. Kemudian Kecamatan Pariaman Selatan dengan luas tanam sebanyak 1.402 hektar, luas panen 1.432 hektar, produksi sebanyak 6.941 ton, dan produktivitas 4,85 ton/ha. Dan terakhir Kecamatan Pariaman Tengah dengan luas tanam sebanyak 1.046 hektar, luas panen 1.012 hektar, produksi sebanyak 4.804 ton, dan produktivitas 4,75 ton/ha.

2. Kelapa

Kelapa (*Cocos nucifera* L.) merupakan tanaman perkebunan industri berupa batang lurus dari famili Palmae. Ada dua pendapat mengenai asal-usul kelapa yaitu dari Amerika Selatan menurut D.F. Cook Van Martius Beccari dan Thor Herjedahl dan dari Asia atau Indo Pacific menurut Berry, Werth, Mearil, Mayurathan, Lepesma dan Pureseglove. Kata coco pertama kali digunakan oleh Vasco da Gama atau dapat juga disebut Nux Indicas, nargil, narlie, tenga, temuai, coconut dan pohon kehidupan. Tanaman kelapa merupakan tanaman serbaguna atau tanaman yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Seluruh bagian pohon kelapa dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, sehingga pohon ini sering disebut sebagai pohon kehidupan (*tree of life*) karena hampir seluruh bagian dari pohon, akar, batang, daun dan buahnya dapat dipergunakan untuk kebutuhan kehidupan manusia sehari-hari. Tanaman kelapa membutuhkan lingkungan hidup yang sesuai untuk pertumbuhan dan produksinya. Faktor lingkungan itu adalah sinar matahari, temperatur, curah hujan, kelembaban, keadaan tanah dan kecepatan angin. Tanaman kelapa tumbuh optimum pada 100 LS – 100 LU, oleh karena itu kelapa banyak dijumpai di daerah tropis seperti Indonesia, Filipina, India, Srilangka dan Malaysia. Kota Pariaman yang terletak di pesisir barat wilayah Pulau Sumatera merupakan salah satu sentra kelapa di Provinsi Sumatera Barat. Kota Pariaman memiliki luas lahan tanaman kelapa sebesar 2.868 hektar.

Perkembangan luas tanam kelapa (produktif, belum produktif, tidak produktif), produksi dan rata-rata produksi tanaman kelapa di Kota Pariaman selama periode 2013-2017 dapat dilihat pada tabel 2.66 Tahun 2013 total luas tanam kelapa adalah 3.092 hektar yang terdiri dari luas tanam yang produktif 84,86%, yang belum produktif 9,02% dan luas perkebunan yang tidak produktif sebesar 6,11%. Dari segi produksi tahun 2012, dihasilkan 2.209,60 ton kelapa dengan produktivitas 0,84 ton/ha. Tahun 2013 luas tanam meningkat menjadi 3.142 hektar dengan komposisi 85,11% merupakan lahan produktif, 8,88% belum produktif, dan 6,02% tidak produktif. Produksi kelapa di tahun 2013 meningkat menjadi 2.256 ton seiring dengan peningkatan luas tanam, dan produktivitas tetap sebesar 0,84 ton/ha. Tahun 2014 total areal tanaman kelapa mengalami penurunan menjadi seluas 2.875 hektar, namun luas tanaman yang produktif meningkat menjadi 96,83%, yang belum produktif turun jadi 2,19% dan luas perkebunan yang tidak produktif turun menjadi 0,97%. Dari segi produktivitas tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 0,71 ton/ha. Penurunan luas tanam kelapa terus berlanjut ke tahun 2015 dimana

luas tanam turun menjadi 2.868 hektar dengan komposisi 96,97% produktif, 2,23% belum produktif, dan 0,80% tidak produktif. Dari sisi produksi, pada tahun 2015 juga mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya menjadi sebesar 1.054 ton dengan produktivitas 0,38 ton/ha. Pada tahun 2016 luas tanam kelapa mengalami peningkatan menjadi 2.896 ha yang terdiri dari luas tanam produktif 98,10% belum produktif 1,07%, tidak produktif 0,83%. Dari sisi produksi, pada tahun 2016 juga mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya menjadi sebesar 2.210 ton dengan produktivitas 0,78 ton/ha.

Tabel 2.65
Perkembangan Luas Tanam Produktif, Belum Produktif, Tidak Produktif, Produksi dan Rata-Rata Produksi Kelapa di Kota Pariaman Tahun 2013-2017

No.	Tahun	Produktif (ha)	Belum produktif (ha)	Tidak produktif (ha)	Jumlah (ha)	Produksi	Rata-rata produksi (ton/ha)
1	2013	2.624,00	279,00	189,00	3.092,00	2.209,60	0,84
2	2014	2.674,00	279,00	189,00	3.142,00	2.256,00	0,84
3	2015	2.784,00	63,00	28,00	2.875,00	1.967,00	0,71
4	2016	2.781,00	64,00	23,00	2.868,00	1.054,00	0,38
5	2017	2.841,00	31,00	24,00	2.896,00	2.210,60	0,78

Sumber : Dinas Pertanian Kota Pariaman, 2018

Jika dilihat kondisi perkebunan kelapa rakyat di Kota Pariaman tahun 2017 menurut kecamatan, terlihat bahwa sentra perkebunan kelapa yang paling utama di Kota Pariaman pada tahun ini adalah Kecamatan Pariaman Utara. Dari luas tanam kelapa di Kota Pariaman tahun 2017 sebesar 2.896 hektar, sebesar 38,60% berada di Kecamatan Pariaman Utara, kemudian diikuti Pariaman Timur sebesar 28,42%, Pariaman Tengah sebesar 16,54% dan Pariaman Selatan sebesar 16,44%. Namun jika kita lihat dari aspek produktivitasnya, dari rata-rata produktivitas kelapa di Kota Pariaman tahun 2017 sebesar 0,78 ton/ha terlihat bahwa pengusahaan tanaman kelapa di Kecamatan Pariaman Selatan lebih efektif dibandingkan dengan kecamatan lainnya yaitu 1,03 ton/ha, kemudian diikuti Pariaman Tengah sebesar 0,83 ton/ha, Pariaman Utara 0,72 ton/ha dan terakhir Pariaman Timur sebesar 0,68 ton/ha.

Tabel 2.66
Luas Tanam Produktif, Belum Produktif, Tidak Produktif, Produksi dan Rata-Rata Produksi Kelapa di Kota Pariaman Tahun 2017 Menurut Kecamatan

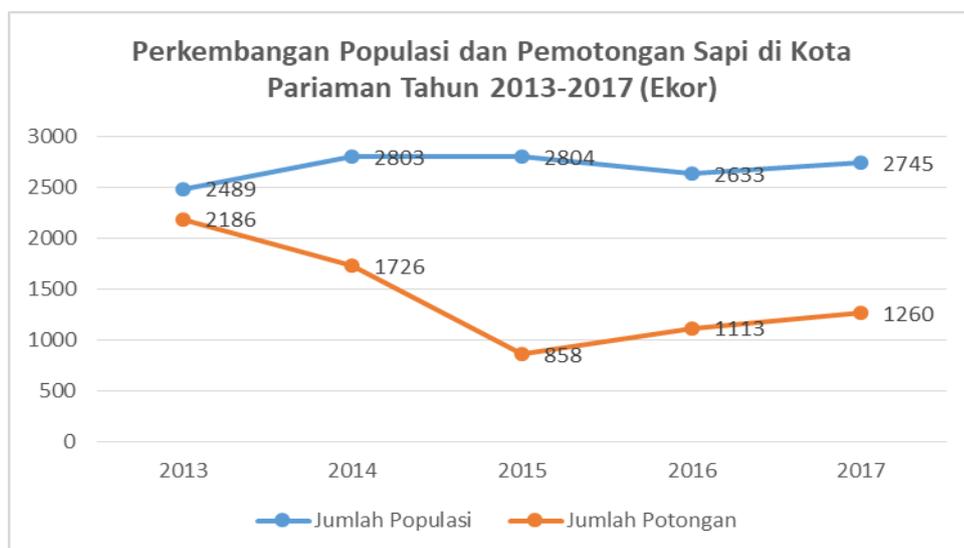
No.	Tahun	Produktif (ha)	Belum produktif (ha)	Tidak produktif (ha)	Jumlah (ha)	Produksi	Rata-rata produksi (ton/ha)
1	Pariaman Selatan	451,00	2,00	23,00	476,00	469,00	1,03
2	Pariaman Tengah	471,00	8,00	0,00	479,00	391,00	0,83
3	Pariaman Timur	820,00	2,00	1,00	823,00	562,30	0,68
4	Pariaman Utara	1.099,00	19,00	0,00	1.118,00	788,30	0,72
Total		2.841,00	31,00	24,00	2.896,00	2.210,60	0,78

Sumber : Dinas Pertanian Kota Pariaman, 2018

3. Sapi

Pertanian merupakan kategori paling utama dalam PDRB Kota Pariaman selama periode 2013-2017. Salah satu sub-kategorinya yang penting yaitu sub-sektor peternakan. Salah satu hewan ternak yang cukup unggul dan dikembangkan di Kota Pariaman adalah hewan ternak sapi. Pada tahun 2013 jumlah populasi sapi 2.489 ekor dan jumlah pemotongan 2.186 ekor. Pada tahun 2014 populasi sapi di Kota Pariaman mengalami kenaikan menjadi 2.803 ekor dan jumlah pemotongan turun menjadi 1.726 ekor. Jumlah populasi sapi kembali mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi 2.804 ekor. Dan pada tahun 2016 jumlah populasi sapi mengalami penurunan lagi menjadi 2.633 ekor. Dan pada tahun 2017 jumlah populasi sapi naik lagi menjadi 2.745 ekor.

Gambar 2.31
Perkembangan Populasi dan Pemotongan Sapi di Kota Pariaman Tahun 2013-2017 (Ekor)



Sumber : Data Olahan 2018

4. Unggas

Selain ternak sapi, jenis ternak yang paling umum dikembangkan untuk dimanfaatkan dagingnya dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia akan protein hewani adalah ternak unggas (ayam dan itik). Pemeliharaan ternak unggas ini sangat lazim dikembangkan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kota Pariaman. Ternak ayam buras setiap tahunnya dalam periode 2013-2017 mengalami perkembangan yang cukup fluktuatif. Tahun 2013 tercatat terdapat 55.801 ekor ayam buras dan meningkat menjadi 63.251 ekor di tahun 2014. Dan mulai tahun 2015 seterusnya populasi ayam buras turun hingga mencapai 55.010 ekor pada tahun 2017.

Perkembangan populasi itik yang ada di Kota Pariaman dalam periode 2013 – 2017 juga mengalami peningkatan yang cukup fluktuatif setiap tahunnya. Tahun 2013 populasi itik 10.519 ekor dan meningkat menjadi 11.676 ekor di tahun 2014. Pada tahun 2015 jumlah itik kembali turun sedikit menjadi 11.133 ekor. Dan penurunan ini berlanjut hingga tahun 2017 menjadi 10.251 ekor.

Tabel 2.67
Perkembangan Populasi Ayam dan Itik di Kota Pariaman
Tahun 2013-2017 (Ekor)

No.	Tahun	Populasi (ekor)		Itik
		Ayam		
		Buras	Ras	
1	2013	55.801	1.036.385	10.519
2	2014	63.251	1.420.900	11.676
3	2015	58.310	1.152.000	11.133
4	2016	54.022	1.656.500	9.681
5	2017	55.010	1.690.200	10.251

Sumber : Dinas Pertanian Kota Pariaman, 2018

D. Urusan Perdagangan

1) Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Sektor perdagangan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang relatif berkembang di Kota Pariaman. Sektor perdagangan dalam PDRB Kota Pariaman terdiri dari dua sub sektor, yaitu perdagangan besar dan eceran serta perdagangan mobil, sepeda motor, dan reparasinya.

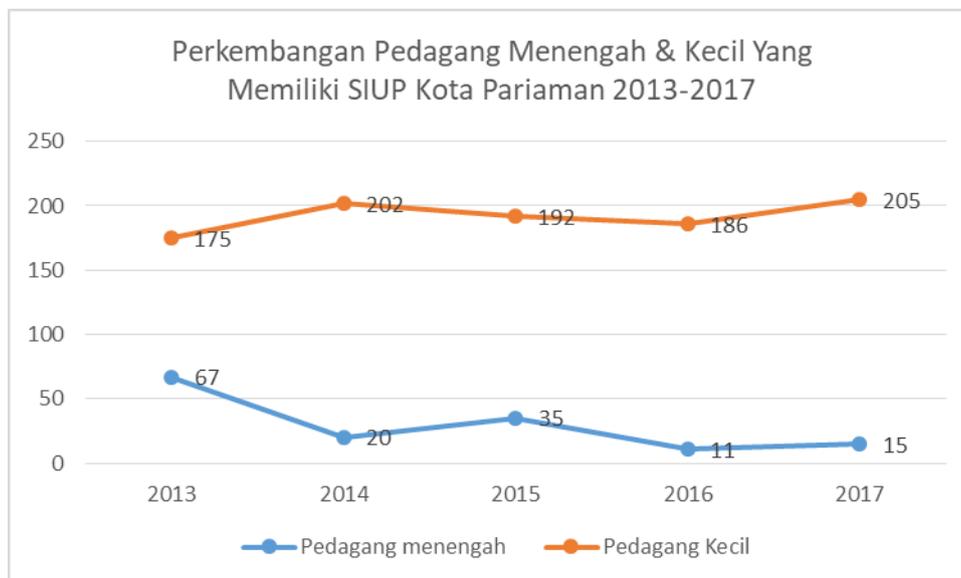
Dilihat dari segi kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB cenderung berfluktuasi. Namun pertumbuhan kontribusi perdagangan terhadap PDRB terus meningkat dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 1 persen per tahun.

Tabel 2.68
Capaian Kinerja Bidang Perdagangan Kota Pariaman Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	14,85	14,32	14,67	14,89	15,20
2	Ekspor Bersih Perdagangan	NA	NA	NA	NA	NA
3.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	50	50	50	50	50

Sumber : Dikoperindag & KUKM 2018

Gambar 2.32
Perkembangan Pedagang Menengah dan Kecil yang memiliki SIUP di Kota Pariaman Tahun 2013-2017



Sumber : Pariaman dalam Angka, BPS 2018

Dalam periode 5 (lima) tahun terakhir data yang ada memperlihatkan jumlah pedagang yang mengurus izin usaha perdagangan (SIUP) di Kota Pariaman mengalami perkembangan yang fluktuatif dan cenderung menurun di 3 tahun terakhir. Pedagang yang mengurus SIUP terdiri dari klasifikasi pedagang kecil, pedagang menengah, dan tidak ada klasifikasi pedagang besar di Kota Pariaman.

Perkembangan pedagang kecil di Kota Pariaman mulai dari tahun 2013-2017 mengalami fluktuatif. Dimana pada tahun 2013 pedagang kecil berjumlah 175 pedagang kecil. Kemudian tahun 2014 naik menjadi 202 pedagang kecil. Tahun 2015 dan Tahun 2016 turun lagi menjadi 192 pedagang dan 186 pedagang. Dan baru pada tahun 2017 jumlah pedagang kecil naik lagi menjadi 205 pedagang kecil. Sementara itu untuk perkembangan pedagang menengah juga mengalami fluktuasi dari tahun 2013-2017. Dimana pada tahun 2013 jumlah pedagang menengah adalah sebesar 67 pedagang. Pada tahun 2014 jumlah pedagang

menengah turun menjadi 20 pedagang. Dan pada tahun 2015 jumlah pedagang menengah naik lagi menjadi 35 pedagang. Kemudian pada tahun 2016 dan 2017 jumlah pedagang menjadi 11 dan 15 pedagang.

Tabel 2.69
Jumlah sarana perdagangan di Kota Pariaman tahun 2013-2017 (unit)

No	Kecamatan	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Pasar	6	7	7	7	8
2	Jumlah minimarket/swalayan	16	18	18	18	20
3	Pertokoan/Warung	2.820	2.820	2.820	2.820	2.910

Sumber : Diskpoindag & KUKM Kota Pariaman, 2018

Dari tabel 2.69 terlihat bahwa sektor perdagangan cukup berkembang di Kota Pariaman selama tahun 2013-2017. Indikator yang bisa dijadikan sebagai penilaian adalah jumlah sarana perdagangan yang ada, seperti pasar tradisional, minimarket/swalayan dan pertokoan/warung yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Hingga tahun 2017 terdapat 8 pasar tradisional di Kota Pariaman tempat bertemunya para pedagang dan pembeli yaitu Pasar Cubadak Aia, Pasar Baru, Pasar Serikat, Pasar Nareh, Pasar Kurai Taji, Pasar Karan Aua, dan Pasar Produksi Jati.

Dewasa ini transaksi masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan baik primer dan sekunder tidak hanya berlangsung di warung, toko, atau pasar tradisional namun juga telah bertambah dengan adanya mini market/swalayan.

E. Urusan Perindustrian

Industri merupakan salah satu sektor penggerak pembangunan perekonomian, sektor ini memegang peranan yang penting dalam setiap aktivitas sektor lainnya. Jika sektor industri berkembang dengan pesat maka sektor lainnya seperti investasi, perdagangan dan jasa juga akan ikut berkembang. Keberhasilan suatu daerah dapat dilihat dan dinilai dari perkembangan sektor industrinya, jika semakin baik laju pertumbuhan sektor industrinya maka daerah tersebut juga akan semakin cepat maju dan berkembang. Hal ini nantinya akan memberikan peluang terhadap pembukaan lapangan kerja/usaha bagi masyarakat dan pada akhirnya akan mampu mengurangi nilai pengangguran dan kemiskinan.

Perkembangan jumlah industri di Kota Pariaman dalam jangka waktu 2013-2017 menunjukkan angka yang fluktuatif. Jumlah industri yang ada di kelompokkan menjadi Industri Kecil Hasil Pertanian dan Kehutanan, Industri Aneka, dan Industri Kecil Logam, Mesin dan Kimia. Masing-masing kelompok industri terbagi menjadi industri formal dan non formal. Tahun 2017 jumlah industri formal meningkat menjadi 861 unit dan industri non formal meningkat menjadi 1.560 unit. Serapan tenaga kerja pada tahun ini juga

mengikuti perkembangan jumlah industrinya, dimana serapan tenaga kerja industri formal meningkat menjadi 4.720 orang, dan serapan tenaga industri non formal meningkat menjadi 3.854 orang.

Tabel 2.70
Perkembangan Jumlah Industri di Kota Pariaman Tahun 2013-2017 (unit)

No.	Tahun	Jumlah Industri		Tenaga Kerja	
		Formal	Non Formal	Formal	Non Formal
1	2013	687	1.137	3.673	2.961
2	2014	695	1.604	4.198	4.088
3	2015	778	1.477	4.619	3.794
4	2016	860	1.555	4.705	3.838
5	2017	861	1.560	4.720	3.854

Sumber : Diskopindag & UMKM Kota Pariaman, 2018

Industri yang berkembang di Kota Pariaman masih didominasi oleh industri kecil menengah (IKM). Kontribusi IKM terhadap pembentukan PDRB masih relatif kecil. Perkembangan industri dan kontribusinya terhadap pembentukan PDRB tergambar pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.71
Capaian Kinerja Bidang Perindustrian Kota Pariaman Tahun 2013-2017

No	Kecamatan	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	8,83	8,01	7,90	7,80	7,60
2	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	NA	NA	NA	NA	NA
3	Pertumbuhan Industri	0,94	1,98	0,97	1,60	1,60
4.	Cakupan bina kelompok pengrajin	75	50	25	50	50

Sumber : Dikoperindag & KUKM 2018

2.3.4 Fokus Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan

Pelayanan umum yang dilaksanakan oleh pemerintah belum optimal diantaranya disebabkan oleh keterbatasan pemerintah daerah dalam membentuk Perangkat Kerja Daerah (PKD) dan masih terbatasnya sumber daya aparatur yang berkualitas, kinerja birokrasi dan kualitas sarana prasarana yang belum memadai, dan belum optimalnya koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan mengakibatkan belum terwujud sepenuhnya good governance (tata kelola yang baik) dan tata pemerintahan yang bersih, santun dan melayani.

Untuk peningkatan kualitas SDM aparatur perlu diupayakan pendidikan dan pelatihan struktural maupun fungsional di lingkungan pemerintah kabupaten maupun nagari. Disamping itu, dalam rangka

peningkatan kinerja birokrasi dilakukan dengan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah kabupaten kepada kecamatan dan pelayanan keliling, seperti pelayanan perizinan, administrasi kependudukan, dan pelayanan lainnya serta peningkatan sarana prasarana pemerintahan.

Selain itu, untuk meningkatkan kinerja pembangunan pemerintahan perlu ditingkatkan koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi dalam rangka mewujudkan good and clean governance.

A. Urusan Perencanaan Pembangunan

Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka 1 tahun. Ketersediaan masing-masing dokumen tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.72.

Tabel 2.72
Indikator Layanan Penunjang Urusan Perencanaan

No	Kecamatan	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	ada
2	Dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada
3	Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	ada
4.	Dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber : Bappeda 2018

B. Urusan Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 merupakan implementasi dari Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman Tahun 2013-2018. Keuangan daerah merupakan

salah satu faktor yang sangat strategis untuk mencapai/mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan Pemerintah Kota Pariaman, disamping faktor sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. Kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari indikator Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana tergambar dalam Tabel 2.73.

Tabel 2.73
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Pariaman, Tahun 2013-2017

No	Tahun	Opini Publik
1.	2013	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2.	2014	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
3.	2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4.	2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
5.	2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat

C. Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

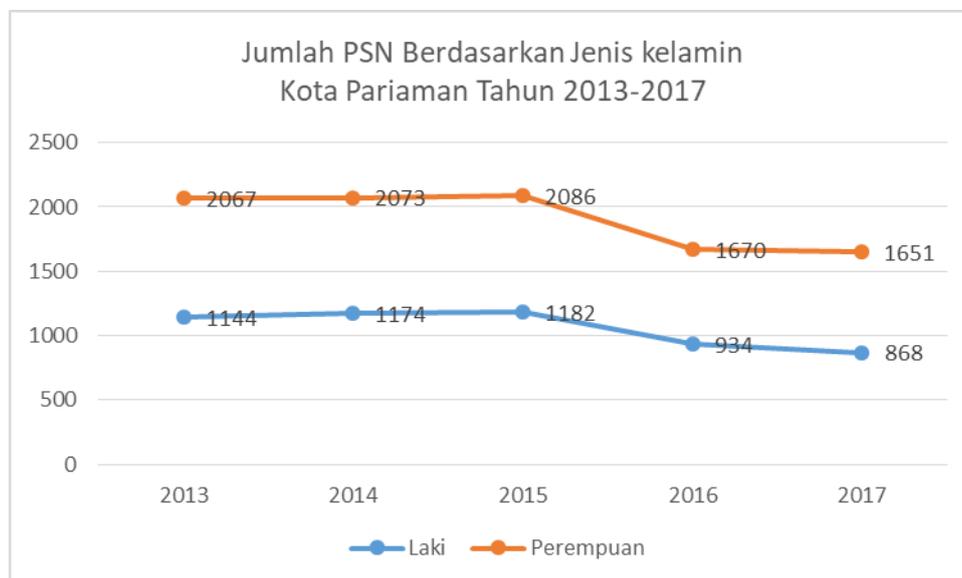
Selama kurun waktu tahun 2013 – 2015, jumlah PNS berfluktuasi. Tapi mulai tahun 2016 dan tahun 2017 jumlah PNS Kota Pariaman mulai menurun. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan moratorium penerimaan PNS yang diterapkan oleh pemerintah pusat serta dengan ditariknya pendidikan menengah menjadi kewenangan provinsi akibatnya guru SMA/SMK menjadi pegawai provinsi. Pada tahun 2017 jumlah PNS mencapai 2.519 orang, dengan komposisi 65,54 % adalah PNS perempuan dan sisanya 34,46 % adalah PNS laki-laki. Dari sisi tingkat pendidikan, terbanyak adalah PNS dengan pendidikan D-4/S-1, yaitu 62,36 %, sementara jumlah PNS dengan pendidikan S-2 baru mencapai 5,2 % dan PNS dengan pendidikan S-3 berjumlah 1 orang. PNS dengan pendidikan DIII sebesar 13,29 %. SLTA atau di bawahnya mencapai 13,25 %. Tabel 2.74 menggambarkan jumlah PNS berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan.

Tabel 2.74
PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman
berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan, 2013 – 2017

No	Kecamatan	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Laki	1.144	1.174	1.182	934	868
2.	Perempuan	2.067	2.073	2.086	1.670	1.651
		3.211	3.247	3.268	2.604	2.519
	Berdasarkan Tingkat Pendidikan					
1.	SD	11	25	26	23	12
2.	SMP	12	18	17	16	10
3.	SMA	443	368	360	340	312
4.	D-I dan D-II	188	224	213	182	147
5.	D-III	480	323	319	294	335
6.	D-IV/S-1	1.948	2.095	2.133	1.609	1.571
7.	S-2	129	194	200	140	131
8.	S-3	-	-	-	-	1

Sumber : BPKPSDM 2018

Gambar 2.33
Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Pariaman
Tahun 2013-2017



Sumber : Data Olahan 2018

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

A. Pengeluaran konsumsi rumah tangga Perkapita

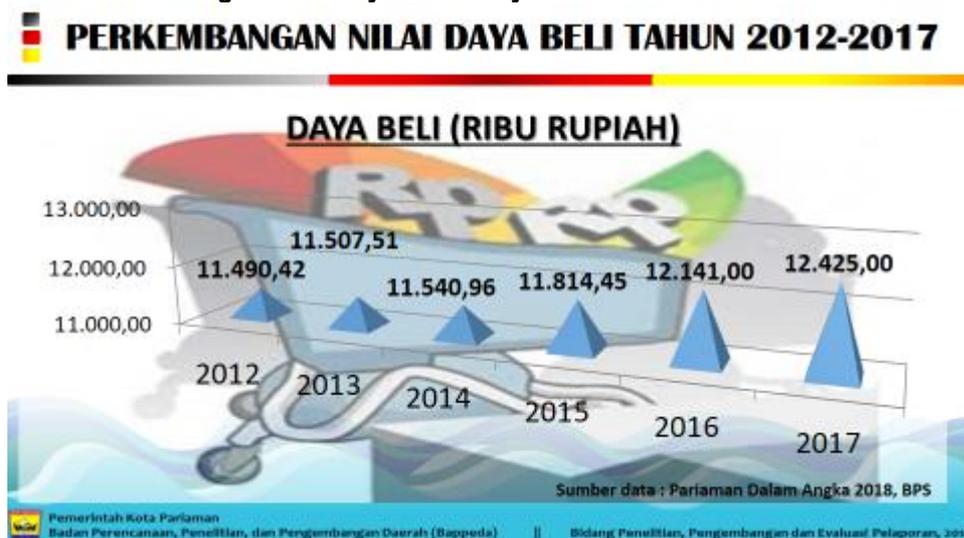
Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga berkaitan erat dengan kemampuan konsumsi dan daya beli masyarakat pada skala rumah tangga. Semakin tinggi angka konsumsi rumah tangga (RT), maka secara umum kemampuan ekonomi masyarakat juga mengindikasikan perkembangan yang positif. Konsumsi rumah tangga ini dapat diidentifikasi berdasarkan beberapa kelompok konsumsi, diantaranya adalah konsumsi makanan dan non makanan. Berikut ini tabel perkembangan pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita tahun 2013-2017.

Tabel 2.75
Perkembangan Pengeluaran konsumsi rumah tangga Perkapita
Kota Pariaman Tahun 2013-2017 (unit)

No	Kecamatan	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga perkapita sebulan	1.133.552	869.346	946.825	1.153.156	1.218.958
2	Pengeluaran Konsumsi non pangan perkapita sebulan	560.984	359.266	441.284	535.438	542.766

Sumber : BPS Kota Pariaman 2018

Gambar 2.34
Perkembangan Nilai Daya Beli Masyarakat Kota Pariaman Tahun 2012-2017



Gambar 2.35
Perkembangan Nilai Daya Beli Masyarakat Kota Pariaman Tahun 2014-2017
PERKEMBANGAN ANGKA PENGELUARAN PER KAPITA
SEBULAN TAHUN 2014-2017



2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

A. Perhubungan

Aspek daya saing dari segi perhubungan memiliki tiga indikator utama yakni indikator rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, serta indikator jumlah orang/barang melalui terminal per tahun. Pada indikator jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum dan indikator jumlah orang/barang melalui terminal per tahun memiliki formula yang sama di Kota Pariaman. Hal ini dikarenakan Kota Pariaman tidak memiliki terminal cargo (terminal barang) dan hanya memiliki satu terminal yakni Terminal Jati Tipe A.

Sarana dan prasarana wilayah/infrastruktur pada dasarnya adalah elemen pendukung bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat dalam suatu wilayah, salah satunya adalah infrastruktur bidang perhubungan. Tabel 2.76 menggambarkan perkembangan bidang perhubungan selama kurun waktu 2013 – 2017 :

Tabel 2.76
Indikator Daya Saing Daerah Bidang Perhubungan

No	Kecamatan	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	2.179.560	2.214.839	180.177	147.523	160.601
2	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	2.179.560	2.214.839	180.177	147.523	160.601

Sumber : Dishub 2018

B. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

5) Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran

Restoran merupakan tempat yang menyediakan dan menjual makanan dan minuman di suatu bangunan tetap dengan pembeli yang membayar pajak. Ketersediaan restoran dan rumah makan menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Dari tahun 2013-2017, jumlah restoran di Kota Pariaman cenderung meningkat. Berikut ini tabel perkembangan jumlah restoran di Kota Pariaman Tahun 2013-2017.

Tabel 2.77
Perkembangan Jumlah Restoran Di Kota Pariaman Tahun 2013-2017

No	Kecamatan	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran	79	85	90	92	95

Sumber : Dinas Parbud 2018

6) Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel

Penginapan atau hotel merupakan salah satu kebutuhan penunjang dalam kegiatan pariwisata di suatu wilayah, termasuk di Kota Pariaman. Kota Pariaman yang terkenal dengan wisata alam dan bahari banyak menarik wisatawan dari luar daerah sehingga keberadaan penginapan atau hotel banyak dibutuhkan oleh wisatawan. Beberapa tahun terakhir, pertumbuhan hotel atau penginapan di Kota Pariaman menunjukkan pertumbuhan positif seiring berkembangnya pariwisata Kota Pariaman. Memang di Kota Pariaman belum ada hotel yang berbintang semuanya masih kategori hotel melati. Namun untuk tahun berikutnya Kota Pariaman sedang berusaha menarik investor untuk bisa berinvestasi untuk membangun hotel yang berbintang. Berikut ini tabel perkembangan jumlah hotel di Kota Pariaman Tahun 2013-2017.

Tabel 2.78
Perkembangan Jumlah Hotel Di Kota Pariaman Tahun 2013-2017

No	Kecamatan	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel	18	18	31	31	43

Sumber : Dinas Parbud 2018

C. Lingkungan Hidup

Air Bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak. Sumber air bersih dapat dibedakan atas air hujan, air sungai dan danau, mata air, air sumur dangkal, air sumur dalam. Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih di Kota Pariaman dapat dilihat pada Tabel 2.79.

Tabel 2.79
Indikator Daya Saing Daerah Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
Bidang Lingkungan Hidup

No	Kecamatan	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air minum bersih	73,73	65,48	85,44	80,92	81,00

Sumber : Dinas Perkim, Perum & LH 2018

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Tinggi rendahnya minat pelaku usaha untuk menanamkan investasi tergantung di antaranya kepada tingkat keamanan dan ketertiban, kemudahan pengurusan perizinan, tersedianya infrastruktur pendukung, jumlah dan macam pajak yang harus dipenuhi, dan regulasi yang mendukung iklim usaha.

2.4.4. Fokus Sumberdaya Manusia

1) Rasio Lulusan S1/S2/S3

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor penting dalam pembangunan daerah. Sehingga kualitas SDM tersebut sangat menentukan kualitas pembangunan daerah tersebut. Kualitas SDM ditentukan salah satunya oleh tingkat pendidikan yang ditempuh. Korelasinya adalah, semakin tinggi tingkat pendidikan SDM maka semakin tinggi juga kualitas SDM di suatu wilayah, sehingga semakin berkualitas tenaga kerja di dalam wilayah tersebut.

Pada indikator ini kualitas tenaga kerja dilihat dari seberapa banyak jumlah lulusan S1/S2/S3 di Kota Pariaman. Pemaparan data dapat dilihat pada tabel di bawah yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Perkembangan rasio lulusan S1/S2/S3 di Kota Pariaman selama tahun 2013-2017 menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2013 rasio lulusan S1, S2, dan S3 yaitu sebesar 6,35 %. Dan pada tahun 2014 rasio lulusan S1, S2, dan S3 naik menjadi 7,17 %. Begitu juga untuk tahun 2015 dan tahun 2016 serta tahun 2017 rasio lulusan S1, S2, dan S3 selalu naik yaitu sebesar 8,79 % dan 9,99 % serta 10,63 %. Berikut ini tabel perkembangan rasio lulusan S1, S2, dan S3 Kota Pariaman Tahun 2013-2017.

Tabel 2.80
Indikator Fokus Sumber Daya Manusia Kota Pariaman 2013 – 2017

No	Kecamatan	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Rasio lulusan S1/S2/S3 yang bekerja	6,35	7,17	8,79	9,99	10,63

Sumber : Data olahan 2018

2) Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (dependency ratio) atau angka beban ketergantungan adalah suatu angka yang menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif. Apabila dilihat dari komposisi usia produktif yaitu 15 - 65 tahun dan usia tidak produktif (0 - 14 tahun dan 65 tahun keatas) maka dapat diketahui bahwa angka ketergantungan (dependency ratio) Kota Pariaman pada tahun 2017 adalah 56,31 persen. Itu artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 56 orang yang belum produktif dan/atau dianggap tidak produktif lagi. Dari tahun 2013 hingga 2017, rasio ketergantungan ini cukup mengalami sedikit penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif di Kota Pariaman semakin kecil setiap tahunnya.

Tabel 2.81
Indikator Fokus Sumber Daya Manusia Rasio Ketergantungan
Kota Pariaman 2013 – 2017

No	Kecamatan	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Rasio Ketergantungan	57,39	56,98	56,68	56,50	56,31

Sumber : BPS Kota Pariaman 2018



BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Penyusunan Gambaran Pengelolaan Keuangan daerah dilakukan untuk menganalisis capaian dan memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.

Peraturan yang mendasari pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab, adil, patut, dan bermanfaat. Kerangka pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Pariaman secara garis besar terdiri dari penyusunan anggaran daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban. Kemampuan keuangan Pemerintah Kota Pariaman perlu dianalisis kondisi kinerja keuangannya (2013-2017), baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya. Berdasarkan hal tersebut dapat diproyeksikan pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagai kerangka pendanaan di masa yang akan datang.

3.1 Kinerja Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Hak dan kewajiban daerah sebagaimana dimaksud diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.

2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga.
3. Penerimaan daerah.
4. Pengeluaran daerah.
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; serta
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Kinerja keuangan daerah pada masa-masa lalu menggambarkan kemampuan pendanaan pembangunan pemerintahan daerah selama ini. Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah diukur melalui kontribusi realisasi PAD terhadap APBD. Kesinambungan penyelenggaraan pembangunan di masa datang ditentukan sejauh mana kemandirian pembiayaan tersedia untuk melaksanakan pembangunan daerah. Perkembangan DOFD Kota Pariaman periode tahun 2013-2017, dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut.

Tabel 3.1:
Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kota Pariaman Tahun 2013-2017

NO	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan	%
1	2013	20.639.404.314,56	470.911.374.343,56	4,3
2	2014	26.677.826.163,98	552.365.209.077,98	4,8
3	2015	29.897.289.136,50	573.471.864.431,50	5,2
4	2016	29.680.784.157,91	621.535.178.051,91	4,7
5	2017	30.881.846.112,42	639.032.751.955,42	4,8
Rata-rata				4,76

Sumber : Data diolah, 2018

Dari tabel di atas tampak bahwa derajat otonomi fiskal Kota Pariaman rata-rata 4,76 persen. Secara keseluruhan, derajat otonomi fiskal (DOF) Kota Pariaman dari tahun 2013-2017 mempunyai tren yang cenderung stagnan. DOF Kota Pariaman pada tahun 2013 sebesar 4,3 % dan pada tahun 2017 mencapai 4,8 %. Artinya selama 5 tahun terakhir DOF Kota Pariaman hanya mengalami kenaikan 0,5 % ini menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi Kota Pariaman agak melambat. DOF ini menggambarkan kondisi kemandirian kemampuan keuangan daerah yang belum stabil. Kondisi seperti ini sebenarnya masih bisa dianggap wajar khususnya bagi daerah yang sedang berkembang yang tentu saja belum

bisa mandiri secara ekonomi untuk membiayai pembangunan daerah. Untuk itu tantangan terbesar Kota Pariaman kedepan ialah bagaimana meningkatkan DOF daerah sehingga bisa lebih mandiri dalam perekonomian daerah.

Pada bagian kinerja keuangan masa lalu menggambarkan kinerja masa lalu tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta neraca.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Pada sub pembahasan ini diuraikan perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah.

A. Pendapatan

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Kapasitas Keuangan Daerah akan menentukan kemampuan pemerintah Daerah dalam menjalankan pembangunan dan pembiayaan. Realisasi Pendapatan Kota Pariaman secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 3.2 Presentase rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan diasumsikan dihasilkan berdasarkan perhitungan total dari selisih anggaran setiap tahun dibagi tahun dasar dikalikan 100%. Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kota Pariaman selama kurun waktu 2013-2017 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pendapatan daerah tersebut dihasilkan dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah Kota Pariaman. Di tahun 2013 470.911.374.343,56. Di tahun 2014 meningkat menjadi Rp 552.365.209.077,98. Dan di tahun 2015 meningkat menjadi Rp. 573.471.864.431,50. Di tahun 2016 meningkat menjadi 621.535.178.051,91. Dan di tahun 2017 terus meningkat menjadi 639.032.751.955,42. Namun memang dari tabel 3.2 ada komponen pendapatan yang rata-rata pertumbuhannya menurun yaitu 1) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, 2) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.

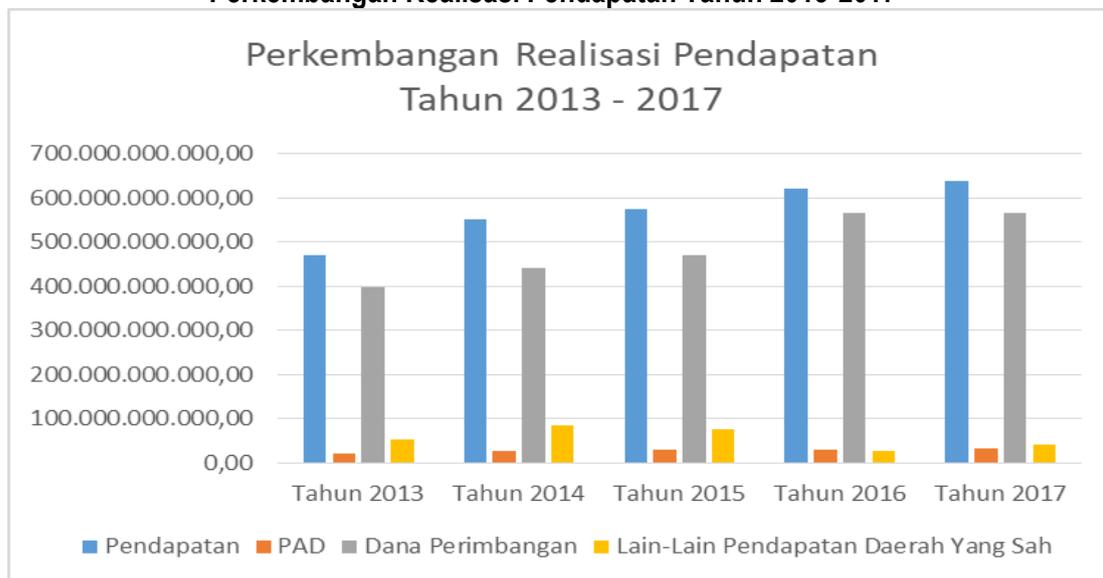
Tabel 3.2
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pariaman Tahun 2013-2017

NO	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
4	PENDAPATAN	470.911.374.343,56	552.365.209.077,98	573.471.864.431,50	621.535.178.051,91	639.032.751.955,42	8,08 %
4.1	Pendapatan Asli Daerah	20.639.404.314,56	26.677.826.163,98	29.897.289.136,50	29.680.784.157,91	30.881.846.112,42	11,16 %
4.1.1	Pajak Daerah	3.852.668.277,00	4.839.643.402,00	5.961.977.273,00	6.646.520.377,00	8.304.791.195,00	21,31 %
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	3.137.631.066,00	2.430.794.204,00	2.696.873.201,87	3.371.154.780,00	3.369.770.163,00	3,34 %
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.523.786.806,00	4.277.041.035,00	4.785.269.530,00	4.846.776.943,00	6.290.774.658,00	9,38 %
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9.125.318.165,56	15.130.347.522,98	16.453.169.131,63	14.816.332.057,91	12.916.510.096,42	12,94 %
4.2	Dana Perimbangan	396.829.953.496,00	441.287.178.214,00	468.883.713.798,00	567.005.675.712,00	566.825.661.201,00	9,61 %
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	19.731.418.029,00	16.592.520.214,00	14.194.560.798,00	14.224.900.804,00	14.355.010.047,00	-7,31 %
4.2.2	Dana Alokasi Umum	343.061.622.000,00	386.256.228.000,00	389.745.497.000,00	422.666.213.000,00	415.241.327.000,00	5,05 %
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	33.771.130.000,00	38.438.430.000,00	49.605.640.000,00	96.738.396.954,00	85.580.651.154,00	31,59 %
4.2.4	Dana Desa	0,00	0,00	15.339.016.000,00	33.376.164.954,00	44.148.673.000,00	37,47 %
4.2.5	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000.000,00	0,00%
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	53.707.800.000,00	84.400.204.700,00	74.690.861.497,00	24.848.718.182,00	41.325.244.642,00	11,30 %
4.3.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	12.433.887.000,00	15.346.507.700,00	21.560.534.497,00	21.030.606.182,00	22.836.260.931,00	5,39 %
4.3.2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	41.273.913.000,00	68.911.335.000,00	50.692.827.000,00	0,00	0,00	-14,87 %
4.3.3	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	142.362.000,00	2.437.500.000,00	3.818.112.000,00	5.850.000.000,00	430,51 %
4.3.4	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	12.638.983.711,00	0,00 %

Sumber : LRA LKPD Kota Pariaman Tahun 2013-2017

Realisasi pendapatan daerah Kota Pariaman setiap tahunnya mengalami kenaikan, namun jika dilakukan analisis berdasarkan proporsi sumber pendapatan, ternyata sumber pendapatan yang paling dominan berasal dari dana perimbangan. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peringkat paling akhir. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan pembangunan di Kota Pariaman masih bergantung pada pusat dan provinsi melalui bantuan dana perimbangan. Adapun perkembangan dan posisi masing-masing pendapatan dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut ini.

Gambar 3.1
Perkembangan Realisasi Pendapatan Tahun 2013-2017



B. Belanja

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Klasifikasi belanja menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud terdiri dari:

1. Belanja pegawai;
2. Belanja bunga;
3. Belanja subsidi;
4. Belanja hibah;
5. Belanja bantuan social;
6. Belanja bagi hasil kepada provinsi/ kabupaten/kota/ desa;

7. Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/ kota dan pemerintahan;
8. Belanja tidak terduga.

Sedangkan Belanja Langsung meliputi :

1. Belanja pegawai;
2. Belanja barang dan jasa;
3. Belanja modal

Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (Performance budget) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik.

Berdasarkan pada tabel 3.3 dapat dilihat bahwa selama periode 2013-2017 tidak semua komponen belanja mengalami kenaikan. Rata-rata pertumbuhan pada Belanja Tidak Langsung memiliki rata-rata pertumbuhan positif dan Negatif. Rata-rata pertumbuhan belanja tidak langsung yang paling tinggi adalah 1) Belanja Hibah, dan 2) Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa dan Partai Politik. Nilai rata-rata yang sangat tinggi tersebut disebabkan karena terdapat peningkatan jumlah anggaran yang sangat signifikan pada tahun 2016 dari yang sebelumnya hanya sebesar Rp 1.822.610.442,00 menjadi Rp. 13.103.800.000,00 pada tahun 2017. Sedangkan rata-rata pertumbuhan belanja langsung memiliki rata-rata pertumbuhan yang positif. Rata-rata pertumbuhan belanja langsung yang paling tinggi adalah belanja barang dan jasa yang mencapai 12,86 %.

Tabel 3.3
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2013-2017

NO	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
5	BELANJA	503.910.834.158,00	505.918.261.869,54	579.810.478.739,00	664.690.733.675,18	641.311.902.997,40	6,53
5.1	Belanja Tidak Langsung	251.295.356.082,00	254.245.953.030,54	275.149.296.216,00	336.989.924.248,20	305.401.002.419,00	5,62
5.1.1	Belanja Pegawai	226.638.966.156,00	238.997.464.514,25	251.163.656.045,00	258.904.645.538,00	196.265.256.699,00	-2,64
5.1.3	Belanja Subsidi	67.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4	Belanja Hibah	13.135.263.733,00	5.052.590.000,00	0,00	1.822.610.442,00	13.103.800.000,00	123,37
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.249.819.000,00	1.898.500.000,00	0,00	0,00	5.338.750.000,00	34,14
5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa	207.329.862,00	205.697.993,29	272.329.029,00	521.674.411,00	763.246.055,00	42,37
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa dan Partai Politik	7.816.177.331,00	8.091.700.523,00	23.574.328.342,00	75.537.565.857,20	89.929.665,00	108,59
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	138.982.800,00	203.428.000,00	0,00	11,59
5.2	Belanja Langsung	252.615.478.076,00	251.672.308.839,00	304.661.182.523,00	327.700.809.426,98	335.910.900.578,40	7,69
5.2.1	Belanja Pegawai	21.408.159.300,00	17.823.276.455,00	20.603.647.500,00	22.371.325.650,00	22.528.494.750,00	2,03
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	99.583.339.502,00	106.285.971.948,00	113.866.345.733,00	126.954.702.805,75	160.089.255.624,68	12,86
5.2.3	Belanja Modal	131.623.979.274,00	127.563.060.436,00	170.191.189.290,00	178.374.780.971,23	153.293.150.203,72	5,27

Sumber : LRA LKPD Kota Pariaman Tahun 2013-2017



Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata proporsi belanja tidak langsung di Kota Pariaman sebesar 49,18 % Sedangkan rata-rata proporsi belanja langsung di Kota Pariaman sebesar 50,82 %. Sehingga dengan komposisi seperti ini menunjukkan angka yang sangat baik karena prosentase belanja tidak langsung selama tahun 2013-2017 masih berada dibawah 50% masih jauh dibawah 70 %.

C. Pembiayaan

Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun – tahun anggaran berikutnya. Begitu pula dengan pengeluaran pembiayaan yaitu pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun – tahun anggaran berikutnya. Sumber pembiayaan pemerintahan daerah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diperoleh berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dengan ditetapkannya kebijakan otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan dengan lebih berorientasi kepada kepentingan daerah yang diimplementasikan dalam bentuk program kegiatan SKPD.

Tabel 3.4
Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Pariaman Tahun 2013-2017

NO	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
6	PEMBIAYAAN	125.862.299.966,77	87.751.840.152,33	126.683.787.360,77	120.345.549.294,27	66.006.993.671,00	-9,02 %
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	131.934.899.242,33	92.862.840.152,33	134.198.787.360,77	120.345.549.294,27	77.189.993.671,00	-7,82 %
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	131.934.899.242,33	92.862.840.152,33	134.198.787.360,77	120.345.549.294,27	77.189.993.671,00	-7,82 %
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	6.072.599.275,56	5.111.000.000,00	7.515.000.000,00	0,00	11.183.000.000,00	20 %
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.582.000.000,00	5.111.000.000,00	7.515.000.000,00	0,00	11.183.000.000,00	21,85 %
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	490.599.275,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	Pembiayaan Netto	125.862.299.966,77	87.751.840.152,33	126.683.787.360,77	120.345.549.294,27	66.006.993.671,00	-9,02 %
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	92.862.840.152,33	134.198.787.360,77	120.345.173.053,27	77.189.993.671,00	63.727.842.629,02	-4,78 %

Sumber : LRA LKPD Kota Pariaman Tahun 2013-2017

Dari tabel di atas dapat diketahui realisasi penerimaan pembiayaan daerah dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 131.934.899.242,33. Dan pada tahun 2014 turun dengan nilai penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 92.862.840.152,33. Pada tahun 2015 naik lagi menjadi sebesar Rp 134.198.787.360,77. Pada tahun 2016 turun lagi dengan nilai sebesar Rp 120.345.549.294,27. Dan sampai pada tahun 2017 nilai penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 77.189.993.671,00. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp 6.072.599.275,56. Dan pada tahun 2014 turun menjadi Rp. 5.111.000.000,00. Pada Tahun 2015 naik menjadi Rp. 7.515.000.000,00. Sedangkan untuk Tahun 2016 tidak ada pengeluaran pembiayaan. Serta pada tahun 2018 nilai pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 11.183.000.000,00

3.1.1 Neraca

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada waktu tertentu. Laporan neraca daerah akan menggambarkan informasi penting kepada manajemen Pemerintah Daerah, Pihak Legislatif daerah maupun para kreditur/ pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu. Pada setiap elemen utama dari neraca daerah akan diturunkan dalam beberapa sub – sub rekening yang lebih terinci. Perkembangan Neraca Pemerintahan Kota Pariaman dan rata – rata pertumbuhannya dapat dilihat pada tabel 3.5.



Tabel 3.5
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Pariaman Tahun 2013-2017

NO	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	Rata-rata (%)
1	ASET						
1.1	ASET LANCAR						
	Kas di kas daerah	92,851,513,657.33	134,041,175,216.77	120,242,900,379.27	77,014,390,124.00	63,718,091,419.02	14 %
	Kas di Bendahara Penerimaan	4,960,000.00	1,214,000.00	0.00	(1,457,000.00)	9,618,662.00	23 %
	Kas di Bendahara Pengeluaran	63,008,998.00	157,612,144.00	104,041,843.00	176,231,273.00	50,927,337.45	-24 %
	Kas Di Badan Layanan Umum Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
	Kas Lainnya - Setara Kas		813,556,118.00	0.00	132,547.00	20,887,319.55	3890 %
	Investasi Jangka Pendek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
	Piutang Pajak	261,409,496.00	685,654,521.00	0.00	0.00	0.00	-15 %
	Piutang Retribusi	582,743,384.00	425,265,000.00	0.00	0.00	0.00	9 %
	Piutang Dana Bagi Hasil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
	Piutang Dana Alokasi Umum	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
	Piutang Dana Alokasi Khusus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
	Piutang Lain-lain	1,586,015,533.04	4,005,512,317.94	2,093,909,778.00	2,093,909,778.00	2,093,909,778.00	8 %
	Persediaan	2,955,202,461.08	2,622,253,341.11	5,338,200.00	5,338,200.00	5,338,200.00	-22 %
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih		(109,897,350.20)	0.00	0.00	0.00	0 %
	JUMLAH ASET LANCAR	98,304,853,529.45	142,642,345,308.62	122,446,190,200.27	79,288,544,922.00	65,898,772,716.02	-24 %
	INVESTASI JANGKA PANJANG						
	Investasi Non Permanen						
	Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
	Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
	Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
	Investasi dalam Surat Utang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %



Negara							
Investasi Non Permanen Lainnya	687,267,625.00	698,161,875.00	698,161,875.00	698,161,875.00	698,161,875.00	698,161,875.00	0 %
JUMLAH Investasi Non Permanen	687,267,625.00	698,161,875.00	698,161,875.00	698,161,875.00	698,161,875.00	698,161,875.00	0 %
Investasi Permanen							
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5,582,000,000.00	27,524,899,000.00	27,524,899,000.00	27,524,899,000.00	27,524,899,000.00	27,524,899,000.00	-20 %
Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
Penyertaan Modal Perusahaan Patungan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
Invertasi Permanen Lainnya	16,831,899,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
JUMLAH Investasi Permanen	22,413,899,000.00	27,524,899,000.00	27,524,899,000.00	27,524,899,000.00	27,524,899,000.00	27,524,899,000.00	-5 %
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	23,101,166,625.00	28,223,060,875.00	28,223,060,875.00	28,223,060,875.00	28,223,060,875.00	28,223,060,875.00	-5 %
ASET TETAP							
Tanah	65,874,931,412.20	96,100,343,912.20	97,724,843,912.20	97,837,458,912.20	102,976,262,912.20	102,976,262,912.20	-6 %
Peralatan dan Mesin	135,339,959,634.55	151,720,436,263.20	179,788,793,048.90	197,010,440,956.07	217,238,873,986.07	217,238,873,986.07	7 %
Gedung dan Bangunan	329,653,987,478.65	332,081,109,167.61	396,638,326,230.61	446,402,452,980.67	484,571,161,925.39	484,571,161,925.39	10 %
Jalan, Jaringan dan Instalasi	470,037,309,887.01	524,257,705,379.01	600,919,149,305.01	711,215,335,394.01	798,198,818,983.01	798,198,818,983.01	9 %
Aset Tetap Lainnya	10,048,575,762.67	13,795,630,263.67	15,046,759,463.67	16,026,964,688.67	18,800,685,328.67	18,800,685,328.67	1 %
Konstruksi dalam Pengerjaan	12,355,661,488.00	25,442,283,862.00	25,442,283,862.00	25,442,283,862.00	25,442,283,862.00	25,442,283,862.00	-13 %
Akumulasi Penyusutan	(77,518,753,062.57)	(239,733,000,720.03)	(239,733,000,720.03)	(239,733,000,720.03)	(239,733,000,720.03)	(239,733,000,720.03)	-17 %
JUMLAH ASET TETAP	945,791,672,600.51	903,664,508,127.66	1,075,827,155,102.36	1,254,201,936,073.59	1,407,495,086,277.31	1,407,495,086,277.31	13 %
DANA CADANGAN							
Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
JUMLAH DANA CADANGAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ASET LAINNYA							
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %



Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
Aset Tidak Berwujud	255,770,000.00	341,900,000.00	341,900,000.00	341,900,000.00	341,900,000.00	-6 %
Kas yang dibatasi penggunaannya		373,204,480.00	3,877,899,658.32	3,877,899,658.32	3,877,899,658.32	210 %
Aset Lain-lain	326,056,893.00	219,420,877.00	219,420,877.00	219,420,877.00	219,420,877.00	12 %
JUMLAH ASET LAINNYA	581,826,893.00	934,525,357.00	4,439,220,535.32	4,439,220,535.32	4,439,220,535.32	84 %
JUMLAH ASET	1,067,779,519,647.96	1,075,464,439,668.28	1,230,935,626,712.95	1,366,152,762,405.91	1,506,056,140,403.65	9 %
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	51,682,503.00	34,607,178.00	1,769,169.00	1,777,273.00	71,814,656.00	454 %
Utang Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
Utang Pajak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Bank	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Obligasi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Pemerintah Pusat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Pemerintah Provinsi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Pemerintah Kabupaten/Kota	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
Pendapatan Diterima Dimuka	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
Utang Jangka Pendek Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	54,182,503.00	34,607,178.00	1,769,169.00	1,777,273.00	71,814,656.00	976 %



KEWAJIBAN JANGKA PANJANG							
Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
Utang Dalam Negeri-Obligasi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
Utang Pemerintah Pusat	7,620,442,702.35	7,620,442,702.35	7,620,442,702.35	7,620,442,702.35	7,620,442,702.35	7,620,442,702.35	0 %
Utang Pemerintah Provinsi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
Utang Pemerintah Kabupaten/Kota	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
Utang Luar Negeri-Sektor Perbankan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	7,620,442,702.35	7,620,442,702.35	7,620,442,702.35	7,620,442,702.35	7,620,442,702.35	7,620,442,702.35	0 %
JUMLAH KEWAJIBAN	7,674,625,205.35	7,655,049,880.35	7,622,211,871.35	7,622,219,975.35	7,692,257,358.35	7,692,257,358.35	0 %
EKUITAS DANA							
EKUITAS DANA LANCAR							
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	92,862,500,152.33	134,198,787,360.77	120,345,173,053.27	77,189,617,430.00	(473,436,975,209.05)	(473,436,975,209.05)	-198 %
Cadangan untuk Piutang	2,430,168,413.04	5,006,534,488.74	2,093,909,778.00	2,093,909,778.00	2,093,909,778.00	2,093,909,778.00	-27 %
Cadangan untuk Persediaan	2,955,202,461.08	2,622,253,341.11	5,338,200.00	5,338,200.00	5,338,200.00	5,338,200.00	-22 %
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	(2,500,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
Pendapatan yang Ditangguhkan	4,960,000.00	1,214,000.00	0.00	(2,474,000.00)	(2,474,000.00)	(2,474,000.00)	1 %
Bukan SILPA		778,948,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	98,250,331,026.45	142,607,738,130.62	122,444,421,031.27	79,286,391,408.00	(471,340,201,231.05)	(471,340,201,231.05)	-194 %
EKUITAS DANA INVESTASI							
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	23,101,166,625.00	28,223,060,875.00	28,223,060,875.00	28,223,060,875.00	28,223,060,875.00	28,223,060,875.00	-5 %



Diinvestasikan dalam Aset Tetap	945,791,672,600.51	903,664,508,127.66	1,075,827,155,102.36	1,254,201,936,073.59	1,412,249,025,359.26	13 %
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak termasuk Dana Cadangan)	581,826,893.00	934,525,357.00	4,439,220,535.32	4,439,220,535.32	4,439,220,535.32	84 %
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang Jangka Panjang	(7,620,442,702.35)	(7,620,442,702.35)	(7,620,442,702.35)	(7,620,442,702.35)	(7,620,442,702.35)	0 %
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	961,854,223,416.16	925,201,651,657.31	1,100,868,993,810.33	1,279,243,774,781.56	1,437,290,864,067.23	13 %
EKUITAS DANA CADANGAN						
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
KOREKSI EKUITAS						
Koreksi Ekuitas	0.00	0.00	0.00	(528,530,962,631.13)	(528,529,945,631.13)	0 %
JUMLAH KOREKSI EKUITAS	0.00	0.00	0.00	(528,530,962,631.13)	(528,529,945,631.13)	0 %
JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
JUMLAH EKUITAS DANA	1,060,104,554,442.61	1,067,809,389,787.93	1,223,313,414,841.60	829,999,203,558.43	437,420,717,205.05	-16 %
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1,067,779,179,647.96	1,075,464,439,668.28	1,230,935,626,712.95	837,621,423,533.78	445,112,974,563.40	-16 %

Sumber : LRA LKPD Kota Pariaman Tahun 2013-2017

Berdasarkan tabel diatas Aset memberikan memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat maupun Pemerintah daerah dimasa yang akan datang. Aset terdiri atas aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya.

Kewajiban merupakan dampak dari pelaksanaan tugas atau tanggung jawab yang terjadi dimasa lalu. Kewajiban memberikan informasi kepada pihak ketiga terhadap arus kas Pemerintah Daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana merupakan selisish antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana meliputi Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dan Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk Dana cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang.

Untuk menganalisis neraca Kota Pariaman periode tahun 2014-2017 digunakanlah beberapa analisis rasio, yaitu:

1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas yaitu rasio yang menunjukkan hubungan antara kas dan aset lancar lainnya dari sebuah entitas dengan kewajiban lancarnya untuk melihat kemampuan entitas dalam memenuhi kewajiban lancarnya. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Data rasio likuiditas tahun terakhir 2017 dapat dilihat pada tabel 3.6

Tabel 3.6
Rasio Likuiditas Kota Pariaman Tahun 2017

NO	Ratio	Rumus	2017 (%)
1	Ratio Lancar	$\frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Jangka Panjang}}$	8,65
2	Ratio Quick (Quick Ratio)	$\frac{\text{Aset Lancar-Persediaan}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}}$	917,54
3	Rasio Total Hutang Terhadap Total Asset	$\frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$	0,005

Sumber : BKD Kota Pariaman, 2014-2017 (Diolah 2017)

Hasil analisis diatas menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pariaman memiliki kondisi pendanaan yang cukup kuat (likuid) dilihat dari hasil analisis ratio lancar dan rasio total hutang terhadap total asset juga bernilai sangat kecil. Sedangkan untuk quick ratio sangat bagus sekali. Ini terbukti dari hasil penghitungan yang mencapai angka 917,54. Hal ini menunjukkan bahwa kapabilitas keuangan Pemerintah Kota Pariaman cukup kuat dalam pelunasan kewajiban-kewajiban daerahnya.

2. Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas atau disebut juga Ratio Leverage yaitu mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh suatu entitas dengan dana yang dipinjam dari kreditor entitas tersebut. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban kewajiban jangka panjang. Rasio solvabilitas Tahun 2017 dapat dilihat di tabel 3.7

Tabel 3.7
Rasio Solvabilitas Kota Pariaman Tahun 2017

NO	Ratio	Rumus	2017 (%)
1	Rasio Kewajiban terhadap Aset	$\frac{\text{Kewajiban}}{\text{Aset}}$	0,005
		$\frac{7.692.257.358}{1.506.056.140.403}$	
2	Rasio Kewajiban terhadap Ekuitas	$\frac{\text{Kewajiban}}{\text{Ekuitas}}$	0,017
		$\frac{7.692.257.358}{437.420.717.205}$	

Sumber : BKD Kota Pariaman, 2014-2017 (Diolah 2017)

Rasio kewajiban terhadap asset di Kota Pariaman pada tahun 2017 sangat rendah hanya 0,005 %. Kecilnya nilai rasio ini menunjukkan bahwa kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terkait anggaran oleh Pemerintah Kota Pariaman masih cukup jauh di bawah nilai total asset yang dimiliki. Sedangkan pada rasio kewajiban terhadap ekuitas (modal) juga sangat rendah 0,017 %. Rasio kewajiban terhadap modal yang tertera di atas menunjukkan bahwa nilai total hutang masih jauh dibawah nilai modal yang dimiliki Pemerintah Kota Pariaman.

3. Rasio Aktivitas

Rasio Aktivitas adalah untuk mengukur sampai seberapa jauh aktivitas Pemerintah Daerah dalam menggunakan dananya secara efektif dan efisien. Ratio ini dapat mengukur efisiensi kegiatan operasional birokrasi Pemerintah Daerah, karena rasio ini didasarkan pada perbandingan antara pendapatan dengan pengeluaran pada waktu periode tertentu. Untuk

Neraca keuangan daerah, rasio aktivitas yang digunakan adalah rasio rata-rata umur piutang dan rasio rata-rata umur persediaan. Rasio rata-rata umur piutang adalah 365 hari dibagi dengan perputaran piutang, perputaran piutang tersebut diperoleh dari Pendapatan Daerah dibagi dengan rata-rata Piutang Pendapatan Daerah, sedangkan rata-rata Piutang Pendapatan Daerah diperoleh dari Saldo Awal Piutang ditambah dengan Saldo Akhir Piutang dibagi 2 (dua), sedangkan rasio rata-rata umur persediaan adalah 365 hari dibagi dengan perputaran persediaan, perputaran persediaan tersebut diperoleh dari Nilai Persediaan yang digunakan dalam satu tahun dibagi dengan rata-rata nilai persediaan, sedangkan rata-rata Nilai Persediaan diperoleh dari Saldo Awal Persediaan ditambah Saldo Akhir Persediaan dibagi 2 (Dua).

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pendapatan daerah termasuk Pendapatan Asli Daerah harus benar benar mampu merespon perkembangan ekonomi yang diperkirakan akan terjadi. Upaya pengelolaan pendapatan daerah harus dilakukan dengan sebaik mungkin supaya dapat membawa perubahan yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah, perlu adanya strategi koleksi dan pemetaan potensi penerimaan daerah baik yang bersumber dari pajak, retribusi maupun penerimaan lain-lain yang sah menurut perundangundangan yang berlaku.

Aspek yang dapat mempengaruhi kebijakan pendapatan daerah antara lain adanya regulasi peraturan yang merupakan acuan yang dipakai dalam menggali penerimaan daerah dan struktur ekonomi/ sosial masyarakat yang sangat menentukan kemampuan masyarakat dalam membayar segala pungutan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Teknik yang digunakan untuk mengukur potensi harus lebih realistis yakni tidak hanya didasarkan pada keinginan untuk senantiasa menaikkan pajak dan retribusi akan tetapi juga melihat aspek lain yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Bertitik tolak pada kondisi tersebut, kebijakan strategis yang akan dilakukan dalam pengelolaan pendapatan daerah antara lain:

1. Meningkatkan kinerja Perangkat Daerah bidang pendapatan dan kualitas sistem pemungutan pendapatan daerah terutama pelayanan pajak dan retribusi daerah;
2. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah dengan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran serta sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas;

3. Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah berdasarkan karakteristik daerah dan pendayagunaan aset daerah termasuk pendapatan dari pihak ketiga;
4. Optimalisasi pendapatan asli daerah dengan menitikberatkan pendekatan potensi sumber daya alam;
5. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dalam upaya peningkatan penerimaan dari Dana Bagi Hasil dan Dana Perimbangan;

Kebijakan yang dilakukan dalam pengelolaan belanja daerah antara lain:

1. Mengalokasikan anggaran dana transfer ke daerah dan dana desa;
2. Mengupayakan alokasi anggaran untuk urusan kesehatan sebesar 10 persen sebagaimana amanat dari wujud penyediaan kebutuhan dasar masyarakat dengan penyediaan alokasi anggaran untuk peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan;
3. Optimalisasi pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang meliputi sebagai daya dukung dalam pengembangan daerah, dan peningkatan perekonomian daerah;
4. Peningkatan aktifitas perekonomian melalui pemberdayaan koperasi dan UMKM dengan upaya perluasan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah adalah mengoptimalkan bantuan keuangan, bantuan provinsi dan nasional, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial untuk urusan non pemerintahan.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah adalah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dianggarkan untuk rencana penerimaan yang berasal pengembalian pinjaman daerah kepada pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah lainnya termasuk juga penerimaan yang berasal dari pemberian pinjaman dana bergulir (penyertaan modal daerah pada pihak ketiga) Kebijakan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan tujuan tertentu sehingga terdapat keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Belanja daerah Kota Pariaman dibagi menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung memiliki delapan komponen belanja yaitu 1) belanja pegawai, 2) belanja hibah, 3) belanja bantuan sosial, 4) belanja bagi hasil, 5) belanja bantuan keuangan, dan 6) belanja tidak terduga. Sedangkan untuk belanja langsung daerah Kota Pariaman, terdiri dari 1) belanja pegawai, 2) belanja barang dan jasa dan 3) belanja modal.



Pengalokasian anggaran merupakan salah satu dukungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap pembangunan yang dilaksanakan pada wilayahnya. Berdasarkan proporsi belanja pemerintah dapat dilihat apakah pengeluaran yang dilakukan pemerintah selama periode 2013-2017 lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan internal organisasi pemerintah atau pada kebutuhan diluar organisasi pemerintah. Proporsi alokasi anggaran yang memiliki kriteria baik adalah proporsi alokasi anggaran yang proporsi belanja tidak langsungnya tidak melebihi 70% dari keseluruhan anggaran belanja pemerintah. Proporsi belanja Kota Pariaman pada periode 2013-2017 disajikan pada tabel 3.8



Tabel 3.8
Perbandingan Proporsi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Kota Pariaman Tahun 2013-2017

NO	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	Rata-rata Proporsi Belanja (%)
5	BELANJA	503.910.834.158,00	505.918.261.869,54	579.810.478.739,00	664.690.733.675,18	641.311.902.997,40	100,00 %
5.1	Belanja Tidak Langsung	251.295.356.082,00	254.245.953.030,54	275.149.296.216,00	336.989.924.248,20	305.401.002.419,00	49,18 %
5.2	Belanja Langsung	252.615.478.076,00	251.672.308.839,00	304.661.182.523,00	327.700.809.426,98	335.910.900.578,40	50,82 %

Sumber : LRA LKPD Kota Pariaman Tahun 2013-2017

3.2.2 Analisis Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Selain gambaran mengenai belanja daerah baik belanja langsung maupun tidak langsung, perlu diketahui juga gambaran proporsi anggaran belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kota Pariaman. Kebutuhan belanja aparatur Kota Pariaman selama periode tahun 2013-2017 antara lain meliputi 1) Belanja Pegawai untuk Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH), Belanja Bunga, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Langsung untuk kebutuhan operasional rutin perkantoran yang harus diselenggarakan. Sedangkan belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan seperti honorarium tenaga pendidik dan medis, serta belanja sejenis lainnya. Total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan yang disajikan pada Tabel 3.9 dan Tabel 3.10 sebagai berikut.

Tabel 3.9
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap Total Belanja
Kota Pariaman Tahun 2013-2017

NO	Uraian	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
A	Belanja Tidak Langsung	238.997.464.514	251.163.656.045	258.904.645.538	196.265.256.619
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	173.041.401.287	184.619.385.617	194.023.213.738	150.848.669.273
2	Belanja Tambahan Penghasilan	17.394.414.863	17.617.794.935	14.685.203.932	13.292.473.158
3	Belanja Penghasilan Lainnya	47.484.079.140	47.322.039.010	48.588.513.395	30.558.172.050
4	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	785.380.000	1.308.000.000	1.299.600.000	1.499.100.000
5	Belanja Insentif pemungutan Pajak Daerah	36.776.724	195.326.790	211.253.087	51.642.338
6	Belanja Insentif pemungutan Retribusi Daerah	255.412.500	101.109.693	96.861.386	15.199.800
B	Belanja Langsung	58.659.785.659	72.914.294.153	73.030.237.151	85.090.350.447
1	Belanja Honorarium PNS	15.269.198.000	18.305.015.500	19.982.233.750	19.566.119.250
2	Belanja Honorarium Non PNS	1.470.875.750	1.184.905.000	1.115.055.000	1.055.690.000
3	Belanja Uang Lembur	1.083.202.705	1.112.927.000	1.274.036.900	1.290.046.000
4	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	247.500.000	168.250.000	99.000.000	142.750.000
5	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	1.601.969.200	1.320.609.900	1.687.587.100	1.717.031.200
6	Belanja premi asuransi kesehatan	771.281.720	6.039.048.046	2.181.738.419	3.167.287.448
7	Belanja makanan dan minuman pegawai	7.243.561.900	7.594.483.900	8.765.802.900	9.058.673.869
8	Belanja pakaian dinas dan atributnya	641.849.800	4.307.551.752	764.623.000	1.036.507.400
9	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	679.736.700	699.434.425	1.896.031.250	2.124.452.137
10	Belanja perjalanan dinas	21.423.416.094	20.428.595.838	28.444.685.283	35.699.050.928
11	Belanja perjalanan pindah tugas	12.666.300	0	0	0
12	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Mebeleur, Peralatan dan Perlengkapan dll)	8.214.527.490	11.753.472.792	6.819.443.549	10.232.742.215
	Total Belanja Pemenuhan Aparatur	297.657.250.173	324.077.950.198	331.934.882.689	281.972.246.566



Total (Belanja Langsung + Belanja Tidal Langsung)	505.918.261.869	579.810.478.739	664.690.733.675	641.311.902.997
Total Pengeluaran Pembiayaan	5.111.000.000	7.515.000.000	0	11.183.000.000
Total Belanja + Total Pengeluaran Pembiayaan	511.029.261.869	587.325.478.739	664.690.733.675	652.494.902.997

Sumber : Data diolah, 2018

Tabel 3.10
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kota Pariaman Tahun 2014-2017

No.	Tahun	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase (%)
1	2014	297.657.250.173	511.029.261.869	58,24
2	2015	324.077.950.198	587.325.478.739	55,17
3	2016	331.934.882.689	664.690.733.675	49,93
4	2017	281.972.246.566	652.494.902.997	43,21

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat Proporsi belanja aparatur terhadap total pengeluaran memiliki kondisi tren yang selalu menurun dari tahun ketahun. Pada Tahun 2014 proporsinya sebesar 58,24 %, lalu tahun 2015 turun menjadi 55,17 % dan kembali turun di tahun 2016 sebesar 49,93 %. Angka ini semakin menurun di setiap tahunnya hingga mencapai 43,21 % proporsi realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan total pengeluaran.

3.2.3 Analisis Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama.

Selain belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kota Pariaman, perlu diketahui juga bagaimana gambaran pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kota Pariaman. Belanja untuk pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama adalah menyangkut pelayanan dasar wajib yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan menyangkut kebutuhan operasional rutin perkantoran yang harus diselenggarakan. Pengeluaran wajib dan mengikat mencakup pengeluaran untuk bidang pendidikan dan kesehatan. Total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama pada tabel diatas menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat ditunda dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan. Tabel berikut adalah rincian pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kota Pariaman Tahun 2014-2017.



Tabel 3.11
Realisasi Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kota Pariaman Tahun 2014-2017

NO	Uraian	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
A	Belanja Tidak Langsung	259.356.953.030	282.664.296.216	336.989.924.248	316.584.002.419	5,62 %
1	Belanja Pegawai	254.245.953.030	275.149.296.216	336.989.924.248	305.401.002.419	-2,64 %
2	Belanja Subsidi	67.800.000	0	0	0	0,00 %
3	Belanja Hibah	5.052.590.000	0	1.822.610.442	13.103.800.000	123,37 %
4	Belanja Bantuan Sosial	1.898.500.000	0	0	5.338.750.000	34,14 %
5	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa	205.697.993	272.329.029	521.674.411	763.246.055	42,37 %
6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Pantai	8.091.700.523	23.574.328.342	75.537.565.857	89.929.949.665	108,59 %
7	Belanja Tidak Terduga	0	138.982.800	203.428.000	0	11,59 %
B	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	5.111.000.000	7.515.000.000	0	11.183.000.000	20,00 %
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.111.000.000	7.515.000.000	0	11.183.000.000	21,85 %
	Pembayaran Pokok Hutang	0	0	0	0	0,00 %
	Total (A+B)	259.356.953.030	282.664.296.216	336.989.924.248	316.584.002.419	5,73 %

Sumber : LRA LKPD Kota Pariaman Tahun 2013-2017

3.2.4 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah yang bertujuan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu, penerimaan, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan.

A. Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah yang dilakukan. Tabel 3.12 menyajikan gambaran realisasi defisit riil anggaran Kota Pariaman Tahun 2013-2017. Berdasarkan pada tabel 3.12 defisit riil anggaran menunjukkan bahwa pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 terjadi surplus dimana realisasi pendapatan daerah lebih besar dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Pada tabel 3.12 ditampilkan komposisi penutup defisit riil yang terdiri dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya dan pencairan dana cadangan.

Tabel 3.12
Defisit Riil Anggaran Kota Pariaman Tahun 2013 – 2017

NO	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
A	Realisasi Pendapatan Daerah	470.911.374.343	552.365.209.077	573.471.864.431	621.535.178.051	639.032.751.955
	<i>Dikurangi Realisasi :</i>					
1	Realisasi Belanja Daerah	503.910.834.158	505.918.261.869	579.810.478.739	664.690.733.675	641.311.902.997
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	6.072.599.275	5.111.000.000	7.515.000.000	0	11.183.000.000
B	Surplus/Defisit Riil	(39.072.059.090)	41.335.947.208	(13.853.614.308)	(43.155.555.624)	(13.462.151.042)

Sumber : LRA LKPD Kota Pariaman Tahun 2013-2017

Tabel 3.13
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Pariaman Tahun 2013 –2017

NO	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
C	Penerimaan Pembiayaan Daerah					
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	131.934.899.242	92.862.840.152	134.198.787.360	120.345.173.053	77.189.617.429
2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	131.934.899.242	92.862.840.152	134.198.787.360	120.345.173.053	77.189.617.429
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (A-B) + C	92.862.840.152	134.198.787.360	120.345.173.053	77.189.617.429	63.727.466.387

Sumber : LRA LKPD Kota Pariaman Tahun 2013-2017



B. Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran tentang komposisi sisa lebih perhitungan anggaran. Dengan mengetahui SILPA realisasi anggaran periode sebelumnya, dapat diketahui kinerja APBD tahun sebelumnya yang lebih rasional dan terukur. Gambaran masa lalu terkait komposisi realisasi anggaran SiLPA Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2013-2017 tersaji di tabel 3.14. Dari tabel 3.14 terlihat bahwa realisasi SiLPA berasal dari beberapa komponen, seperti pelampauan pendapatan bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah; sisa penghematan belanja atau akibat lainnya; dan Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum terselesaikan. Pelampauan Penerimaan PAD menunjukkan angka positif dari tahun ke tahun.

Tabel 3.14
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kota Pariaman Tahun 2013-2017

NO	Uraian	2013 (Rp)	% dari SILPA	2014 (Rp)	% dari SILPA	2015 (Rp)	% dari SILPA	2016 (Rp)	% dari SILPA	2017 (Rp)	% dari SILPA
1	Jumlah SILPA										
a	Pelampauan Penerimaan PAD	2.689.819.508	2,90 %	6.091.119.760	4,54 %	2.445.709.077	2,03 %	(3.618.029.400)	-4,69 %	(3.720.128.772)	-5,84 %
b	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	(265.783.467)	-0,29 %	335.464.709	0,25 %	(5.182.284.261)	-4,31 %	28.197.149.820	36,53 %	(16.852.506.799)	-26,44 %
c	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	(1.040.023.120)	-1,12 %	(24.743.090.300)	-18,44 %	(7.863.502.603)	-6,53 %	(2.901.726.961)	-3,76 %	362.163.192	0,57 %
d	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	91.437.601.364	98,47 %	152.515.293.190	113,65 %	130.945.250.839	108,81 %	55.512.600.212	71,29 %	83.938.315.008	131,71 %
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	92.862.840.152	100 %	134.198.787.360	100 %	120.345.173.053	100 %	77.189.993.671	100 %	63.727.842.629	100 %

Sumber : LRA LKPD Kota Pariaman Tahun 2013-2017

3.3 Kerangka Pendanaan

Pada bagian kerangka pendanaan memberikan gambaran tentang proyeksi pendapatan, Proyeksi Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran (SiLPA), dan Proyeksi belanja wajib dan mengikat yang kemudian akan dihitung seberapa besar kapasitas riil daerah untuk pendanaan indikatif pada tahun 2019 hingga 2023.

1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah dapat dilakukan berdasarkan pada data dan mengkaitkan dengan informasi yang dapat memengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah. antara lain:

- a) Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu;
- b) Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);
- c) Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; dan
- d) Kebijakan dibidang keuangan negara

Dalam proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kota Pariaman ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan angka rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan dan belanja daerah selama 4 (empat) tahun terakhir tahun 2014 hingga 2017. Kemudian proyeksi menggunakan data dasar keuangan APBD tahun 2018. Hal ini dilakukan agar proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kota Pariaman tidak terpaut jauh dengan pendanaan indikatif tahun yang terdekat, proyeksi pendapatan dan belanja secara keseluruhan Kota Pariaman Tahun 2019-2023 ini dapat dilihat pada Tabel 3.15 sebagai berikut.

Tabel 3.15
Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2019-2023

NO	Uraian	PROYEKSI					KET
		2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023(Rp)	
4	PENDAPATAN	686.195.621.170	759.357.593.526	829.164.491.180	907.882.045.477	957.606.974.346	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	35.881.361.440	40.261.262.296	45.193.407.040	50.749.420.736	57.010.441.604	
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	8.808.080.368	10.192.292.423	11.648.686.287	13.395.989.230	15.405.387.614	
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	6.973.558.414	7.670.914.255	8.438.005.681	9.281.806.249	10.209.986.874	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.290.774.658	6.856.944.377	7.474.069.371	8.146.735.615	8.879.941.820	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	13.808.948.000	15.604.111.240	17.632.645.701	19.924.889.642	22.515.125.296	
4.2	DANA PERIMBANGAN	612.835.276.000	674.118.803.600	736.245.158.220	809.869.674.042	846.521.806.772	
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	12.730.522.000	14.003.574.200	15.403.931.620	16.944.324.782	18.638.757.260	
4.2.2	Dana Alokasi Umum	429.494.368.000	472.443.804.800	519.688.185.280	571.657.003.808	588.322.704.189	
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	99.939.086.000	109.932.994.600	120.926.294.060	133.018.923.466	146.320.815.813	
4.2.4	Dana Desa	48.050.234.000	52.855.257.400	52.855.257.400	54.654.569.800	56.120.026.780	
4.2.5	Dana Insentif Daerah	22.621.066.000	24.883.172.600	27.371.489.860	30.108.638.846	33.119.502.731	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	37.478.983.730	44.977.527.630	47.725.925.920	50.749.164.039	54.074.725.970	
4.3.1	Dana BOS	12.267.870.730	12.267.870.730	12.267.870.730	12.267.870.730	12.267.870.730	
4.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	25.211.113.000	27.709.656.900	30.458.055.190	33.481.293.309	36.806.855.240	
4.3.3	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	
5	BELANJA	723.876.777.946	796.672.918.988	858.898.864.992	927.781.108.383	996.105.821.452	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	337.905.243.210	363.363.557.803	378.722.816.478	401.079.679.518	420.673.279.216	
5.1.1	Belanja Pegawai	231.140.381.262	245.008.804.138	259.709.332.386	275.465.386.381	293.062.128.491	
5.1.3	Belanja Hibah	2.600.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	
5.1.4	Belanja Bantuan Sosial	0.00	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	
5.1.5	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.578.163.878	1.672.853.711	1.773.224.933	1.879.618.429	1.992.395.535	



5.1.6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	98.731.346.070	107.681.899.954	108.240.259.158	114.734.674.708	116.618.755.190	
5.1.7	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000.00	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	
5.2	Belanja Langsung	385.971.534.736	433.309.361.185	480.176.048.514	526.701.428.864	575.432.542.236	
5.2.1	Belanja Pegawai	17.480.864.500	18.354.907.725	18.722.005.880	19.658.106.173	20.641.011.482	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	192.294.324.012	221.138.472.614	245.561.242.066	269.561.242.066	293.561.242.066	
5.2.3	Belanja Modal	176.196.346.224	193.815.980.846	215.892.800.568	237.482.080.625	261.230.288.687	
	Surplus/Defisit	(37.681.156.776)	(31.915.325.462)	(29.734.373.812)	(24.899.062.906)	(42.498.847.106)	
6	PEMBIAYAAN						
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	47.681.156.776	41.915.325.462	39.734.373.812	34.899.062.906	52.498.847.106	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	47.681.156.776	41.915.325.462	39.734.373.812	34.899.062.906	52.498.847.106	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	10.000.000.000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10.000.000.000	
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000.000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	
	Pembiayaan Netto	37.681.156.776	31.915.325.462	29.734.373.812	24.899.062.906	42.498.847.106	
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan						



2. Kapasitas Riil Keuangan Daerah

Kapasitas riil keuangan Daerah diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan. Dengan hal ini proyeksi kapasitas riil keuangan daerah dilakukan dengan total penerimaan (proyeksi) dikurangi dengan belanja tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan, hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.16 sebagai berikut.



Tabel 3.16
Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kota Pariaman Tahun 2019-2023

NO	Uraian	PROYEKSI					KET
		2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	
1	Pendapatan	686.195.621.170	759.357.593.526	829.164.491.180	907.882.045.477	957.606.974.346	
2	Pencairan dana cadangan	0	0	0	0	0	
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	47.681.156.776	41.915.325.462	39.734.373.812	34.899.062.906	52.498.847.106	
4	Total Penerimaan	733.876.777.946	801.272.918.988	868.898.864.992	942.781.108.383	1.010.105.821.452	
	Dikurangi (-)						
1	Belanja Tidak Langsung	337.905.243.210	363.363.557.803	378.722.816.478	401.079.679.518	420.673.279.216	
2	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10.000.000.000	
	Kapasitas Riil	385.971.534.736	427.909.361.185	480.176.048.514	531.701.428.865	579.432.542.236	

Sumber : Data diolah



Dengan kapasitas riil yang tersedia sebagaimana tabel diatas maka pendanaan selama 5 (lima) tahun dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Prioritas I, digunakan untuk alokasi pembangunan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;
2. Prioritas II, digunakan untuk dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah serta Program Unggulan Kepala Daerah; dan
3. Prioritas III, digunakan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Pembagian pendanaan untuk program prioritas diatas secara lebih lanjut dapat dilihat dalam Tabel 3.17 sebagai berikut.



Tabel 3.17
Pendanaan Prioritas Kota Pariaman Tahun 2019-2023

No	Uraian	Proyeksi				
		2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
1	Kapasitas riil kemampuan keuangan	385.971.534.736	427.909.361.185	480.176.048.514	531.701.428.865	579.432.542.236
2	Prioritas I	166.874.534.736	175.218.261.473	183.979.174.546	193.178.133.274	202.837.039.937
3	Prioritas II	121.471.146.669	127.544.704.002	133.921.939.203	140.618.036.163	168.741.643.395
4	Prioritas III	97.625.853.331	125.146.395.710	162.274.934.765	197.905.259.428	207.853.858.904

Sumber : Data diolah, 2018



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

**BAB IV****PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

Pembangunan daerah dilakukan bertujuan untuk mengatasi permasalahan daerah. Dengan ini pembangunan yang berkualitas diharapkan masyarakat akan merasakan dampaknya sehingga akan memperbaiki daya saing kualitas kehidupan masyarakat yang akan berakhir pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam proses pembangunan untuk mengatasi permasalahan daerah maka perlu dilakukan perumusan kebijakan publik, selanjutnya dalam perumusan kebijakan publik salah satu hal penting yang harus dilakukan di awal adalah identifikasi permasalahan kebijakan (policy problem) sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa datang, baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah.

Isu-isu strategis baik berskala regional, provinsi, nasional, maupun internasional harus dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Rumusan kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Pariaman.

4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan sebuah “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan tersebut dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum diperdagunakan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi, peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal, serta ancaman yang belum diantisipasi.

Untuk meminimalisir kesenjangan tersebut dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka diperlukan perumusan yang tepat terkait analisis permasalahan daerah. Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan

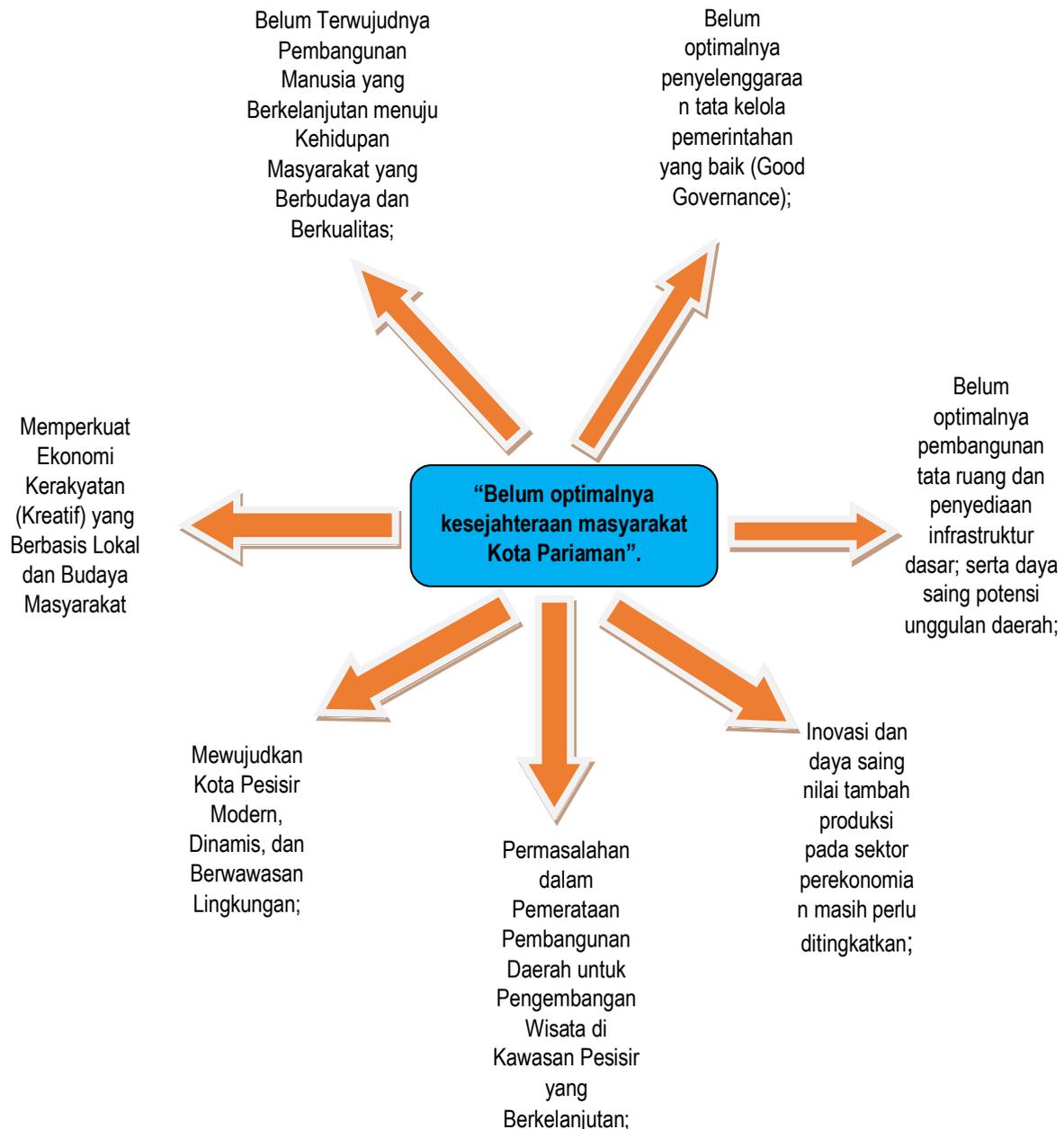


(stakeholders) pembangunan daerah, maka diketahui permasalahan utama Kota Pariaman yakni **“Belum optimalnya kesejahteraan masyarakat Kota Pariaman”**.

Permasalahan utama pembangunan Kota Pariaman tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 8 (delapan) pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Belum Terwujudnya Pembangunan Manusia yang Berkelanjutan menuju Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas;
2. Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance);
3. Belum optimalnya pembangunan tata ruang dan penyediaan infrastruktur dasar; serta daya saing potensi unggulan daerah;
4. Inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian masih perlu ditingkatkan;
5. Permasalahan dalam Pemerataan Pembangunan Daerah untuk Pengembangan Wisata di Kawasan Pesisir yang Berkelanjutan;
6. Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis, dan Berwawasan Lingkungan;
7. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan (Kreatif) yang Berbasis Lokal dan Budaya Masyarakat

Gambar 4.1
Mata Rantai Permasalahan Utama dan Pokok Pembangunan Daerah
Kota Pariaman



Permasalahan pembangunan daerah Kota Pariaman diidentifikasi melalui kajian data dan informasi pembangunan daerah khususnya data strategis pembangunan. Berikut penjabaran permasalahan pembangunan Kota Pariaman berdasarkan gambaran umum kondisi pembangunan daerah di Kota Pariaman:

1. Belum Terwujudnya Pembangunan Manusia yang Berkelanjutan menuju Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas

Pendekatan baru dalam pembangunan manusia menuju masyarakat Kota Pariaman yang berbudaya dan religius, harus menekankan pada hubungan antara kebudayaan dan pembangunan berkelanjutan melalui dua hal:

Pertama, pembangunan dari kebudayaan itu sendiri (warisan/tabuik, kreatifitas, industri-industri budaya, barang-barang kerajinan, wisata budaya);

Kedua, kepastian bahwa kebudayaan bertumpu secara benar di seluruh kebijakan publik, khususnya yang berhubungan dengan pendidikan, ekonomi, ilmu pengetahuan, komunikasi, lingkungan, kepaduan sosial serta kerja sama internasional.

Dunia tidak hanya menghadapi tantangan-tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kreatifitas, pengetahuan, keanekaragaman, dan keindahan adalah dasar yang tak terhindarkan bagi dialog untuk perdamaian, dan kemajuan dari nilai-nilai tersebut pada hakekatnya terhubung dengan pembangunan manusia dan kebebasan-kebebasannya. Sementara kita mempunyai tugas mempromosikan kelestarian budaya asli, tradisi-tradisi lama bertemu dengan kreatifitas baru setiap harinya di kota-kota dunia, memelihara identitas dan keanekaragaman. Dialog antar budaya adalah salah satu tantangan terbesar umat manusia, dan kreatifitas dikenal sebagai sumber yang tidak pernah berhenti mengilhami masyarakat dan ekonomi.

Permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

Pertama, oralitas remaja; krisis moralitas para remaja ditandai dengan adanya hilangnya karakter religius, budaya dan karakter kebangsaan. Hal ini dipicu oleh pengaruh budaya asing yang begitu mudahnya diadopsi oleh remaja, misalnya westernisasi dalam berpakaian, gaya hidup hedonisme dan perilaku anti social lainnya. Pendidikan keagamaan belum terealisasi sebagai bekal remaja dalam kehidupannya.

Kedua, kualitas lingkungan sosial; persoalan sosial budaya yang dihadapi oleh Kota Pariaman disinyalir bersumber dari masalah dalam keluarga dan lingkungan sosial. Munculnya berbagai masalah sosial seperti narkoba, LGBT, seks pranikah, perceraian, KDRT dan adanya tempat yang

memicu terjadinya penyimpangan perilaku terutama oleh generasi muda. Selain itu dahsyatnya pengaruh budaya asing melalui media sosial dan mudahnya masyarakat terpancing berita hoaks.

Ketiga, kualitas pendidikan di Kota Pariaman, terlihat dari belum optimalnya pencapaian prestasi siswa dan di dunia pendidikan SD dan SLTP atau belum bisanya siswa dan guru di Kota Pariaman dalam kompetisi seperti OSN, OGN dan F2SN baik di tingkat lokal maupun nasional. Selain itu kurang terealisasinya pendidikan berbasis agama dan budaya local. Masalah lainnya belum terintegrasinya kurikulum kebencanaan dalam proses pembelajaran, padahal Kota Pariaman rawan bencana terutama gempa dan tsunami.

Keempat, belum optimalnya 'mengkomersialisasikan' nilai-nilai budaya masyarakat Kota Pariaman menjadi penyokong untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Kota Pariaman, baik secara local, nasional, maupun internasional.

SDM yang unggul merupakan tugas bersama dalam menciptakan Kota yang kuat dan makmur. Melalui SDM yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian daerah, namun juga dalam mendukung pembangunan nasional.

Dalam kaitan ini, terdapat beberapa hal yang harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan kualitas SDM di Kota Pariaman, antara lain:

1. Sistem pendidikan yang baik dan bermutu. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan penataan terhadap sistem pendidikan secara menyeluruh di Kota Pariaman, terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Pemerintah Kota Pariaman dalam hal ini memiliki peran penting dalam penyelenggaraan sistem pendidikan yang efektif dan efisien, berorientasikan pada penguasaan iptek, serta merata di seluruh pelosok tanah air.
2. Penguatan peran agama dalam kehidupan sosial bermasyarakat dalam rangka memperkokoh jati diri dan kepribadian (character building).
3. Peningkatan kapasitas SDM melalui berbagai diklat, kompetensi, pembinaan dan lain-lain. Tenaga kerja profesional dan terampil sesuai tuntutan/kebutuhan pasar merupakan faktor keunggulan suatu daerah dalam menghadapi persaingan global. Pemerintah Kota memegang peranan penting dalam menyiapkan program-program strategis guna menghasilkan SDM berkualitas dan siap memasuki pasar kerja.
4. Pembinaan dan pengembangan masyarakat terutama generasi muda. Sebagai penopang utama dalam roda pembangunan. Pemberdayaan generasi muda diharapkan dapat

menciptakan generasi yang kreatif, inovatif dan berdaya saing tinggi. Karakteristik generasi muda seperti inilah yang diharapkan mampu berkontribusi dan memenangkan persaingan global.

5. Mengoptimalkan potensi budaya menjadi daya jual dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kota Pariaman.

Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan Belum Terwujudnya Pembangunan Manusia yang Berkelanjutan menuju Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas yang Masih Perlu Ditingkatkan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1

Rumusan Permasalahan: Belum Terwujudnya Pembangunan Manusia yang Berkelanjutan menuju Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas

NO	Permasalahan	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kualitas pelayanan pendidikan	Masih rendahnya cakupan pendidikan anak usia dini
		Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan dasar 12 tahun
		Masih perlunya peningkatan pendidikan pembentukan karakter
2	Masih rendahnya kualitas kesehatan masyarakat	Belum optimalnya budaya perilaku hidup sehat pada masyarakat
		Belum optimalnya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
		Belum optimalnya kompetensi tenaga medis dan non medis
		Masih cukup tingginya kasus penyakit menular
		Belum optimalnya cakupan total coverage
3	Tingkat pengangguran	Rendahnya pertumbuhan ketersediaan lapangan kerja
		Kualitas dan kompetensi tenaga kerja belum sesuai kebutuhan pasar kerja
4	Masih belum optimalnya penanganan perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Masih kurang optimalnya peran masyarakat dan swasta dalam penanganan PMKS
		Masih belum optimalnya tempat rehabilitasi terhadap PMKS
5	Masih tingginya beban pengeluaran warga miskin	Belum optimalnya cakupan masyarakat miskin yang terlayani jaminan kesehatan
6	Pelestarian kekayaan dan keragaman budaya masih perlu ditingkatkan	Belum optimalnya pelestarian seni dan budaya yang berbasis kearifan lokal

7	Masih rendahnya peranan pemuda dalam pembangunan	Belum optimalnya partisipasi aktif kepemudaan dalam pembangunan
8	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih perlu ditingkatkan	Kecenderungan penurunan peran serta masyarakat dalam pembangunan
		Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan masih perlu dioptimalkan
		Masih perlu dioptimalkannya koordinasi lintas sektor untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat

2. Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance);

Dalam cakupan 8 (delapan) program reformasi birokrasi, permasalahan yang mendapat perhatian dalam kurun waktu lima tahun mendatang, meliputi:

1. Manajemen Perubahan

Pemerintahan Kota Pariaman merupakan Pemerintah Kota punya visi perubahan yang jelas dalam tatakelola pemerintahan. Beranjak dari kondisi tersebut, pemerintah Kota Pariaman saat ini memiliki orientasi budaya kerja yang berbeda, tata nilai yang berbeda, serta etika kerja yang berbeda dalam menyelenggarakan pemerintahan. Keadaan seperti ini akan menjadi problem apabila tidak ditangani dengan benar dan tepat.

2. Penguatan Pengawasan

Di sisi lain, pemerintah Kota Pariaman juga menghadapi masalah dalam hal kurangnya kemampuan dan jumlah personil aparatur pengawas. Belum dapat diselenggarakannya kegiatan pencanangan (launching) Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan pemerintah Kota Pariaman secara menyeluruh. Masalah lain yang muncul terkait dengan hal di atas adalah masalah sistem dokumentasi dan monitoring yang terintegrasi belum dimanfaatkan secara maksimal. Kondisi itu dapat dilihat pengelolaan dokumentasi dan kearsipan yang masih bersifat manual dan belum terdokumentasi secara elektronik.

3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Dari hasil evaluasi yang dilakukan Kementerian PAN-RB tahun 2018, bahwa secara umum penerapan manajemen kinerja menunjukkan kecenderungan yang semakin baik dan bersifat

implementatif sampai ke level operasional. Hal yang masih perlu menjadi perhatian adalah masalah pengukuran kinerja, khususnya indikator kinerja.

4. Penguatan Kelembagaan

Desain organisasi yang dirancang saat ini belum optimal menjawab kebutuhan organisasi yang ideal. Akibatnya masih terdapat tumpang tindih tugas dan fungsi pada unit kerja pada unit utama serta masih terdapatnya besaran organisasi unit pelaksana teknis yang tidak sesuai dengan beban kerja yang harus dilaksanakan. Dalam tataran implementasi, masih terdapat beberapa program/kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya, terdapatnya ketidakseimbangan beban kerja antar bagian, serta kurang berimbang penjabaran tugas dan fungsi ke dalam program/kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibandingkan dengan program/kegiatan fasilitasi.

5. Penguatan Tata Laksana

Dalam bidang tata laksana masih ditemui beberapa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kota Pariaman yang belum sepenuhnya didasarkan atas prosedur yang baku dan terstandarisasi. Hal ini berakibat pada layanan yang seharusnya dapat dilakukan secara cepat seringkali harus berjalan tanpa proses yang pasti karena terdapat sistem tata laksana yang tidak baik. Penerapan e-government telah dilaksanakan pada beberapa layanan di pemerintah Kota Pariaman, namun demikian pemanfaatannya belum efektif efisien, dan terintegasi dalam satu sistem. Selain itu manajemen kearsipan berbasis TIK belum berjalan baik dan belum diterapkan di semua unit utama.

6. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur

SDM pemerintah Kota Pariaman, masih belum memenuhi jumlah yang sesuai untuk menjalankan fungsi organisasi. Ditinjau dari aspek lain, jenis pegawai yang ada di pemerintah Kota Pariaman secara kualitas kurang memadai, masih terdapat kesenjangan antara kualifikasi dan kompetensi dengan kebutuhan organisasi, belum akuratnya penempatan pegawai sesuai dengan kompetensinya, serta belum efektifnya sistem pengelolaan kepegawaian berdasarkan kinerja. Permasalahan lainnya terkait dengan data/informasi kepegawaian, yakni kurangnya kesadaran dan partisipasi unit kerja dalam mengelola data-data kepegawaiannya sehingga berpengaruh pada tingkat keakuratan, kemutakhiran, keterpaduan, dan pemanfaatannya secara terpadu. Sementara itu, pemerintah Kota Pariaman belum ada diklat yang digunakan sebagai tempat pelatihan dan pendidikan pegawai.

7. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan di Lingkungan pemerintah Kota Pariaman

Masih adanya peraturan perundang-undangan dan Peraturan di Lingkungan pemerintah Kota Pariaman yang telah habis masa berlakunya tetapi belum ada peraturan pencabutan atau penggantinya, dan masih terjadi implementasi peraturan perundang-undangan dan Peraturan di Lingkungan Pemko yang tidak sesuai dengan harapan. Untuk itu, maka perubahan yang besar di dalam reformasi birokrasi ini harus dikelola dengan baik. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan di Lingkungan pemerintah Kota Pariaman dan akan dirancang serta diimplementasikan sesuai dengan kondisi yang ada di Kota Pariaman.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Banyak ditemukan problem kelembagaan dan masyarakat yang menyangkut pelayanan diantaranya: Ditemukan adanya keterlambatan pelayanan, menumpuk urusan pelayanan pada satu OPD (Organisasi Pemerintahan Daerah), pegawai yang mempersulit pelayanan, rantai birokrasi pelayanan yang masih panjang. Untuk itu, maka perubahan yang besar di dalam reformasi birokrasi ini harus dikelola dengan baik. Peningkatan kualitas pelayanan publik akan dirancang serta diimplementasikan sesuai dengan kondisi yang ada di pemerintah Kota Pariaman.

Secara umum, masing-masing program area perubahan pemerintahan memiliki tujuan spesifik sebagai berikut:

- **Manajemen Perubahan** bertujuan mendorong terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas.
- **Penguatan Pengawasan** bertujuan menciptakan penyelenggaraan birokrasi yang bersih dan bebas KKN.
- **Penguatan Akuntabilitas Kinerja** bertujuan mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan segala sumber yang dipergunakannya.
- **Penguatan Kelembagaan** bertujuan mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien
- **Penguatan Tata Laksana** bertujuan mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintah Kota Pariaman dan pelayanan, sekaligus juga untuk mengubah mental aparatur.
- **Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur** bertujuan memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional.

- **Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan di Lingkungan pemerintah Kota Pariaman** bertujuan terciptanya sistem peraturan perundang-undangan dan Peraturan di Lingkungan pemerintah Kota Pariaman yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
- **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik** bertujuan mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta meningkatkan kualitas pelayanan.

Untuk menjalankan agenda reformasi ini, diperlukan adanya dukungan dana serta unit pelaksana yang bertanggung jawab menjalankan program ini. Garis besar rencana anggaran reformasi birokrasi di pemerintah Kota Pariaman dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 telah tersusun bagi terlaksananya reformasi birokrasi pada kedelapan program area perubahan.

Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Masih Belum Optimal dapat dilihat pada tabel 4.2

Tabel 4.2
Rumusan Permasalahan: Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Masih Belum Optimal

NO	Permasalahan	Akar Masalah
1	Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik	Belum optimalnya penyusunan dan penerapan SOP, SP dan SPM
		Belum optimalnya sarana prasarana pelayanan publik sesuai standar
		Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik
		Belum optimalnya budaya kerja aparatur
2	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah daerah	Belum optimalnya Implementasi SPIP dan Kapabilitas APIP
		belum optimalnya sistem manajemen SDM aparatur
		belum optimalnya kinerja dan ketatalaksanaan OPD
		Belum optimalnya pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah
		Belum optimalnya integrasi sistem perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pengelolaan keuangan dan aset daerah
		Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah
		Belum optimalnya tingkat kesesuaian perencanaan pembangunan
3	Masih adanya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Masih kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan perundangan

		Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga ketertiban dan ketentraman
		Masih adanya ancaman dan gangguan , kerawanan sosial politik terhadap masyarakat

3. Belum Optimalnya Pembangunan Tata Ruang Dan Penyediaan Infrastruktur Dasar

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan daerah. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi.

Pengembangan infrastruktur merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan secara keseluruhan. Hal ini mengingat dampaknya yang hampir mempengaruhi indikator kunci keberhasilan pembangunan dasar, baik pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi.

Pembangunan infrastruktur berkualitas dengan kapasitas yang memadai dan merata merupakan faktor penting untuk mendorong konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi. Kualitas dan kapasitas infrastruktur yang memadai akan memperlancar konektivitas, menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, sehingga wilayah Kota Pariaman akan mampu menjadi wilayah yang tangguh, produktif dan berkelanjutan. Belum optimalnya kinerja pelayanan dan infrastruktur kota menjadi permasalahan di Kota Pariaman.

Permasalahan lain yang menjadi perhatian adalah terkait dengan tata ruang wilayah. Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang baik menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pengembangan wilayah. Masih belum optimalnya kesesuaian pemanfaatan ruang merupakan hal yang menjadi perhatian dalam lima tahun ke depan. Pembangunan infrastruktur dasar lainnya yang menjadi perhatian pemerintah Kota Pariaman adalah lingkungan pemukiman. Seperti yang kita ketahui bahwa Pemerintah Pusat mencanangkan program 100-0-100 yaitu target 100% akses air minum, 0% kawasan permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak, yang harus dicapai oleh Kabupaten/kota pada tahun 2019. Kota Pariaman, sebagai sebuah kota persentase rumah tangga kumuh nilainya memang lebih besar dibandingkan kabupaten di sekitarnya. Hal ini menjadi perhatian Pemerintah Kota Pariaman untuk memerhatikan rumah tangga kumuh sehingga target nasional tercapai 0% kawasan kumuh di Pariaman.

Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan Belum Optimalnya Pembangunan tata ruang dan Penyediaan Infrastruktur Dasar serta daya saing potensi unggulan daerah dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3.
Rumusan Permasalahan: Belum Optimalnya Pembangunan tata ruang dan Penyediaan Infrastruktur Dasar serta Daya Saing Potensi Unggulan Daerah

NO	Permasalahan	Akar Masalah
1	Masih diperlukan peningkatan pengelolaan tata ruang	Belum optimalnya kesesuaian tata ruang
		Pengembangan kawasan yang mendukung perwujudan tata ruang yang berdaya guna perlu dioptimalkan
2	Belum seluruh permukiman memiliki sarana dan prasarana dasar yang berkualitas	Ketersediaan lahan untuk instalasi sanitasi komunal di kawasan pesisir Pariaman sangat sulit didapatkan.
		Masih terdapat kondisi lingkungan permukiman yang masih buruk
		Masih perlunya pengoptimalan upaya peningkatan pelayanan pengelolaan air minum dan air limbah dari Rumah Sakit dan Industri Rumah Tangga
3	Pengelolaan kualitas lingkungan hidup yang masih belum optimal	Masih ada saluran dan gorong-gorong yang belum berfungsi optimal
4	Masih terjadinya genangan banjir	Infrastruktur pengendali Banjir belum terbangun secara menyeluruh
		Saluran drainase belum terintegrasi secara menyeluruh
5	Belum optimalnya ketangguhan bencana	Masih Kurangnya Sistem peringatan dini bencana
6	Belum optimalnya aksesibilitas dan konektivitas kawasan-kawasan strategis	Masih perlunya pengoptimalan Integrasi jaringan jalan dan fasilitas jalan dioptimalkan
		Masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum masal
		Masih perlunya pengoptimalan Pengelolaan sarana dan prasarana transportasi

4. Inovasi dan Daya Saing Nilai Tambah Produksi Pada Sektor Perekonomian Masih Perlu Ditingkatkan

Perekonomian suatu wilayah menjadi salah satu tolok ukur utama dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat baik secara makro maupun mikro. Hal tersebut merupakan poin penting mengingat kehidupan masyarakat sangat ditentukan oleh perekonomian terkait dengan finansial atau kebutuhan. Salah satu problem yang menghambat percepatan kemajuan Kota Pariaman adalah

masih belum optimalnya daya saing produk unggulan daerah, terutama untuk produk-produk usaha mikro. Selain itu masih belum optimalnya inovasi juga merupakan hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan daya saing. Secara teori, variabel daya saing ini menjadi faktor kunci peningkatan pertumbuhan ekonomi baik skala nasional, regional, dan global. Daya saing dalam hal ini terkait dengan kapasitas produksi, kapasitas inovasi, dan kemampuan daerah Kota Pariaman menarik investasi dalam kerangka meningkatkan struktur perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi di Kota Pariaman menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat dan kota/kabupaten lain di sekitarnya. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) menurut Lapangan Usaha Kota Pariaman di tahun 2017 sebesar 5,62 %. Angka ini sedikit naik dari LPE di tahun 2016 yang tercatat sebesar 5,59 %. Dan kondisi LPE Kota Pariaman di masih lebih baik daripada LPE Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 yaitu sebesar 5,29 % Namun demikian, sebagai sebuah kota yang menuju perdagangan dan jasa, LPE ini masih perlu diakselerasi lagi pertumbuhannya karena akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan Inovasi dan Daya Saing Nilai Tambah Produksi Pada Sektor Perekonomian Masih Perlu Ditingkatkan dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4.4.

Rumusan Permasalahan: Inovasi dan Daya Saing Nilai Tambah Produksi Pada Sektor Perekonomian Masih Perlu Ditingkatkan

NO	Permasalahan	Akar Masalah
1	Kurang berkontribusinya sektor sektor lainnya dalam perekonomian daerah	Belum optimalnya upaya pengembangan dan pengelolaan objek dan daya tarik wisata
2	Masih belum optimalnya nilai investasi	Masih terbatasnya regulasi terkait investasi.
3	Kontribusi kategori-kategori pada sektor perdagangan dan jasa-jasa perlu dioptimalkan	Distribusi produk belum efektif dan efisien
		Masih kurangnya sentra usaha / produk ekonomi lokal
		Akses permodalan dan pasar Industri Kecil Menengah (IKM) masih terbatas
		Belum optimalnya hubungan kerjasama usaha antara IKM dengan industri besar
4	Ketahanan pangan masyarakat masih perlu ditingkatkan	Masih adanya ketergantungan sumber pangan dari daerah lain.

5. Permasalahan dalam Pemerataan Pembangunan Daerah untuk Pengembangan Wisata di Kawasan Pesisir yang Berkelanjutan

Kota Pariaman mempunyai kendala yang sangat besar dalam hal melaksanakan pemerataan pembangunan daerah yang berorientasi pada pemerataan pendapatan dan ekonomi masyarakat. Permasalahan pemerataan pembangunan daerah dalam pengembangan wisata pesisir merupakan sebuah “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang bersifat fisik dengan pembangunan masyarakat yang berbasis moral, etika, dan religious di Kota Pariaman. Potensi permasalahan pembangunan daerah dalam pengembangan wisata di kawasan pesisir yang berkelanjutan di Kota Pariaman, umumnya timbul dari kekuatan yang belum diperdagunakan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi, peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal, serta ancaman yang belum diantisipasi.

Kondisi saat ini yang dihadapi Pemerintah Kota Pariaman dalam mengoptimalkan pembangunan kawasan pesisir untuk wisata adalah:

1. Masalah yang harus diperhatikan adalah pemilikan atau masalah ulayat dan adat. Sebenarnya ini merupakan sebuah masalah atau tantangan, tetapi sebagai modal atau dorongan dalam pembangunan yang tentunya melibatkan masyarakat Kota Pariaman sendiri, sebagai pemilik hak ulayat dan adat yang bisa ikut berperan dalam proses pembangunan. Budaya dan adat istiadat akan menunjukkan pada proporsi sebenarnya dan dengan bersama-sama pemerintah dan stake holder lainnya akan membangun kawasan pesisir Kota Pariaman sebagai kawasan wisata pesisir yang menjanjikan.
2. Potensi obyek pariwisata pantai dan pariwisata pesisir yang belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini disebabkan belum tersedianya infrastruktur dasar yang memadai dan sarana prasarana pariwisata lainnya. Selain itu juga belum dilakukan promosi yang maksimal terhadap potensi wisata pesisir di Kota Pariaman.
3. Belum diprioritaskannya pembangunan wisata pada kawasan pesisir yang berbasis bencana gempa dan tsunami oleh pemerintah kota Pariaman, karena pembangunan kawasan pesisir yang berbasis pada bahaya bencana gempa dan tsunami belum disikapi secara optimal oleh sektor terkait
4. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang bahaya dan risiko bencana sangat rendah, karena belum optimalnya dilakukan pendidikan mitigasi bencana gempa dan tsunami pada masyarakat Kota Pariaman, terutama pada masyarakat yang bermukim pada kawasan pesisir Kota Pariaman.

5. Belum berkembangnya sistem informasi yang dapat memberikan akses pada informasi produk unggulan, pasar, dan teknologi. Keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dalam penggunaan teknologi ini menjadi salah satu kendala dan pemicu adanya eksploitasi sumberdaya pesisir yang merusak potensi lestari dan berdampak negatif bagi lingkungan.
6. Belum tertatanya sistem kelembagaan dan manajemen yang belum terkelola dengan baik untuk pengelolaan pengembangan wisata pada kawasan pesisir yang terpadu, dan berkelanjutan, dalam memberikan dukungan kepada peningkatan daya saing produk dan kawasan yang dikembangkan.

Dilihat dari isu permasalahan dalam pengelolaan pengembangan wisata pada kawasan pesisir Kota Pariaman yang sedang terjadi saat ini, maka diperlukan smart solution untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, yaitu:

1. Kebijakan pengelolaan dan pembangunan kawasan pesisir di Kota Pariaman sebaiknya dilakukan dengan Co-Management dimana pengelolaan ini melibatkan unsur-unsur dari pemerintah (government based management) baik Pemerintah Kota maupun OPD terkait yang kemudian bekerja sama dengan masyarakat lokal (community based management) serta investor (private sector) yang berwawasan lingkungan sebagai sumber pendanaan dalam membiayai pembangunan sarana atau fasilitas penunjang kawasan wisata pesisir di Kota Pariaman.
2. Pemanfaatan wilayah pesisir dan laut ini juga seharusnya dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan daya dukung lingkungan (carrying capacity) wilayah tersebut.

6. Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis, dan Berwawasan Lingkungan

Kota Pariaman merupakan Kota Pesisir yang memiliki arah perkembangan kota yang tadinya hanya sebagai kota pesisir tradisional menjadi kota pesisir modern yang memiliki peranan yang cukup penting bagi perkembangan Kota. Sebagai kota pesisir, perkembangan Kota Pariaman masih dipengaruhi oleh proses-proses alamiah yang berasal dari laut seperti siklus pasang-surut, angin laut dan intrusi air laut terhadap daratan. Selain itu, topografi Kota Pariaman yang relative datar dan agak miring akan mengakibatkan terjadinya proses sedimentasi yang berasal dari daratan melalui aliran air tawar ke laut serta area-area laut yang dipengaruhi oleh kegiatan manusia melalui lingkungan buatan seperti permukiman dan wisata. Perkembangan pembangunan seharusnya membentuk dan menciptakan karakteristik Kota Pariaman sebagai kota modern yang berada di wilayah pesisir yang berbasis lingkungan hidup,

sehingga pembangunan akan infrastruktur baru berupa bangunan dan fasilitas pendukungnya harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup. Selain itu, Kota Pariaman terletak di pesisir barat Pulau Sumatera dan secara geologis berhadapan langsung dengan Megathrust Mentawai, sehingga Kota Pariaman rentan terdampak bahaya dan risiko bencana gempa dan tsunami.

Isu strategis yang dihadapi Kota Pariaman:

1. Kota Pariaman dan Sumatera Barat memiliki potensi sangat tinggi terjadi gempa dan tsunami. Bahkan, ancaman tsunami bersumber dari gempa segmen megathrust Mentawai masih ada. Untuk itu, perlu kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat sehingga dampak kerusakan bangunan dan korban jiwa bisa diminimalisasi.
2. Belum terintegrasinya penataan lingkungan kota yang berwawasan lingkungan antar OPD
3. Ketersedian sarana parsarana yang masih kurang menuju kota modern
4. Master plan kota modern Pariaman yang belum ada
5. Belum adanya perumusan tata ruang kota yang berbasis bencana dan pelestarian lingkungan hidup yang didasari pada KLHS

Untuk itu perlu dirancang arahan kebijakan kota pesisir modern, dinamis dan berwawasan lingkungan, yang tanggap terhadap kemungkinan bencana alam. Di samping itu disiapkan pembangunan fasilitas fisik menuju kota modern. Selain itu perlunya kerjasama Kota Pariaman dengan kota pesisir lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri. inovatif yang juga penting untuk menjadi kota modern, khususnya dalam bidang kesehatan adalah konsep green hospitality.

7. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan (Kreatif) yang Berbasis Lokal dan Budaya Masyarakat

Ekonomi Kreatif adalah kegiatan ekonomi dimana input dan outputnya adalah Gagasan. Esensi dari kreatifitas adalah gagasan. Bayangkan hanya dengan modal gagasan, seseorang yang kreatif dapat memperoleh penghasilan yang sangat layak. Kemampuan untuk mewujudkan kreativitas yang diramu dengan sense atau nilai seni, teknologi, pengetahuan dan budaya menjadi modal dasar untuk menghadapi persaingan ekonomi, sehingga muncullah ekonomi kreatif sebagai alternatif pembangunan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Alasan mengapa Indonesia perlu mengembangkan ekonomi kreatif antara lain karena ekonomi kreatif berpotensi besar dalam: Memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan; Menciptakan iklim bisnis yang positif; Membangun citra dan identitas bangsa; Mengembangkan ekonomi berbasis kepada sumber daya yang terbarukan; Menciptakan inovasi dan kreativitas yang merupakan keunggulan kompetitif suatu bangsa; Memberikan dampak sosial yang positif. Kota

Pariaman harus mengembangkan secara maksimal ekonomi kreatif, karena nilai-nilai budaya luhur (cultural heritage) yang kental terwarisi. Ekonomi kreatif merupakan satu dari tiga sektor yang dapat mendorong perekonomian Indonesia di saat ekonomi dunia melambat. Dua sektor lain, yaitu pariwisata serta tenaga kerja yang handal, terampil, dan berbudaya. Tiga sektor ini, punya potensi cukup besar, keunggulan serta peluang devisa yang tinggi. Ekonomi kreatif sangat tergantung kepada modal manusia (human capital atau intellectual capital, ada juga yang menyebutnya creative capital). Ekonomi kreatif membutuhkan sumberdaya manusia yang kreatif tentunya, mampu melahirkan berbagai ide dan menterjemahkannya ke dalam bentuk barang dan jasa yang bernilai ekonomi. Proses produksinya bisa saja mengikuti kaidah ekonomi industri, tetapi proses ide awalnya adalah kreativitas.

Untuk mengembangkan ekonomi kreatif, Pemko Pariaman harus membuat beberapa langkah terobosan, diantaranya seperti:

1. Melakukan pemetaan potensi Desa/Kelurahan berbasis WEB, sehingga Pemerintah Kota Pariaman memiliki data faktual tentang semua potensi Desa/Kelurahan, terutama potensi ekonomi dan budaya yang bisa dikembangkan menjadi produk ekonomi kreatif andalan Desa/Kelurahan serta Kota Pariaman
2. Menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya. Insentif itu mencakup perlindungan produk budaya, pajak, kemudahan memperoleh dana pengembangan, fasilitas pemasaran dan promosi, hingga pertumbuhan pasar domestik dan internasional.
3. Membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan berbagai OPD dan kalangan.
4. Membuat program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif melalui pendidikan, pengembangan SDM, desain, mutu dan pengembangan pasar.
5. Memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi karya industri kreatif.

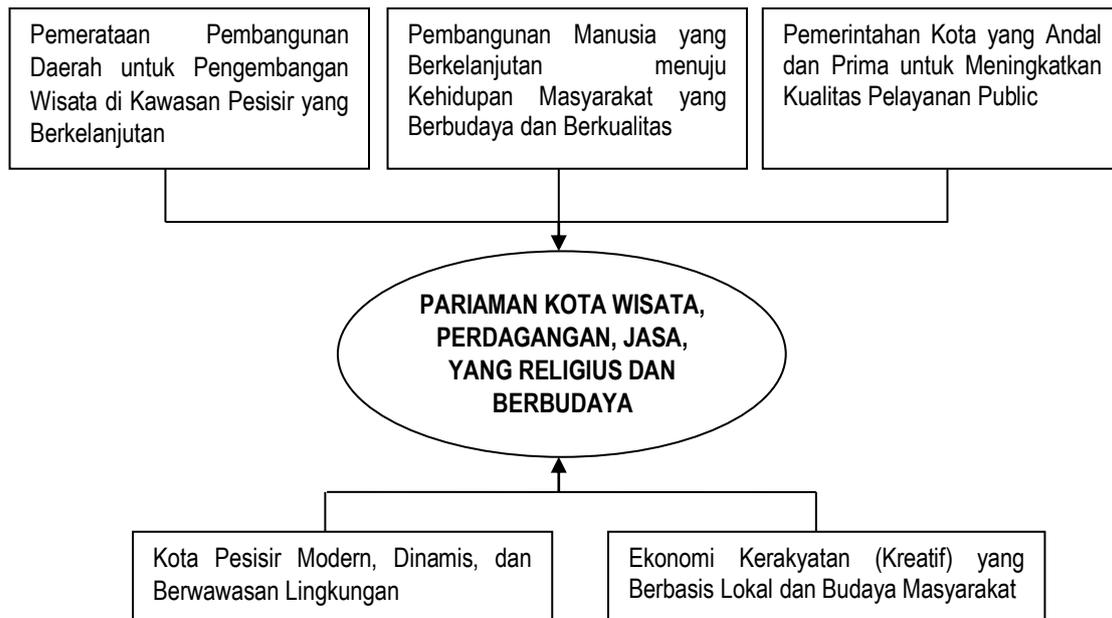
Langkah-langkah yang dibutuhkan adalah: sebagai berikut :

1. Menyusun Cetak Biru Ekonomi Kreatif Kota Pariaman yang melibatkan seluruh Stake Holder.
2. Mengajukan usulan kebijakan Ekonomi Kreatif yang komprehensif.
3. Menggiatkan inisiatif, baik swasta maupun Pemko Pariaman untuk menciptakan tempat-tempat pengembangan talenta industri kreatif
4. Menciptakan produk yang kreatif dan berbasis budaya berdasarkan prioritasnya, misalnya :
 - a. Pariwisata
 - b. Kerajinan
 - c. Gaya Hidup (spa, herbal, kuliner)

- d. Furniture, dll
5. Menciptakan pasar berbasis budaya di Kota Pariaman
6. Menumbuhkan semangat inovasi dan kreativitas didalam dunia pendidikan agar generasi muda mampu melahirkan gagasan baru berdasarkan apa yang sudah dimiliki sejak dulu.
7. Transfer teknologi yang konsisten terhadap industri kreatif berwawasan budaya seperti disebut diatas.
8. Promosi Potensi Kota Pariaman.
 - a. Alam
 - b. Warisan Budaya (herritage)
 - c. Budaya
9. Sosialisasi, diseminasi dan promosi secara sistimatis tentang kekuatan Kota Pariaman dibidang industri kreatif agar diperhitungkan di Peta kompetensi Nasional dan Internasional
10. Rumah promosi ekonomi kreatif dan perlunya dibangun sebuah museum 'Rumah Tabuik' sebagai ikon historis dan budaya masyarakat Kota Pariaman.

Jika dilihat dari visi RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023, maka ada 5 (lima) Permasalahan utama yang mempengaruhi terhadap visi tersebut yang bisa dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 4.2
Permasalahan yang menyangkut pada Visi RPJMD
Kota Pariaman Tahun 2018-2023



Pernyataan isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada pembangunan masa mendatang. Isu-isu strategis merupakan isu-isu yang jika diprioritaskan antisipasi dan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Namun jika isu-isu strategis ini tidak ditangani dengan serius, maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai. Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai isu internasional, nasional, dan regional. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu tersebut dapat ditentukan isu strategis yang akan ditangani dalam lima tahun ke depan.

5.2.1 Isu Internasional

Isu strategis internasional merupakan suatu kondisi yang dialami secara global oleh seluruh negara di dunia dimana isu tersebut merupakan prioritas utama setiap negara dalam penyusunan rumusan kebijakan di negaranya masing-masing. Isu strategis internasional sebagian besar mengusung perihal degradasi kualitas lingkungan hidup hingga ancaman menipisnya sumber daya tak terbarui yang merupakan bahan bakar untuk energi. Sebagai kota yang telah dan didorong untuk menjadi Isu strategis di tingkat internasional yang relevan bagi perencanaan pembangunan masa mendatang bagi Kota Pariaman antara lain: pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/MDGs), kondisi perekonomian global yang berpengaruh ke perekonomian nasional dan daerah, mitigasi perubahan iklim global (global warning/climate change), serta kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin pesat.

a. Sustainable Development Goals (SDG's)

Indonesia menjadi salah satu negara yang menandatangani sebuah isu strategis internasional yakni Millenium Development Goals (MDGs). Komitmen bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan MDGs mencerminkan upaya untuk menyejahterakan rakyat sekaligus menyumbangkan dukungan terhadap kesejahteraan masyarakat internasional. Millenium Development Goals (MDGs) memiliki konsep jelas dan indikator pencapaian terukur dalam komitmen memerangi kemiskinan, kelaparan, penyakit, buta huruf, degradasi kualitas lingkungan hidup dan diskriminasi terhadap perempuan. Target pencapaian MDGs tersebut diharapkan tercapai pada tahun 2015 sebagai bagian dari kesepakatan bersama menuju pembangunan global.

Tahun 2015 telah dilewati dan tentu saja evaluasi berbagai capaian MDGs sudah mencapai puncaknya. Capaian bangsa Indonesia pada target MDGs cukup beragam dimana terdapat 13 indikator sudah memenuhi target yang diharapkan sebelum tahun 2015 berakhir, sedangkan 36

indikator diperkirakan akan tercapai pada tahun 2015. Selain itu, terdapat 14 indikator MDGs yang masih memerlukan kerja keras dan kerja cerdas untuk mencapai target sesuai kesepakatan internasional.

Program MDGs yang berakhir pada tahun 2015 ini, diteruskan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) yang disahkan di Sidang Umum PBB akhir September di New York, Amerika Serikat. SDGs tidak terpisah dari MDGs dan merupakan penyempurnaan dari MDGs. Bentuk penyempurnaan dilakukan melalui sejumlah pendekatan yang dipandang perlu dengan tetap melibatkan peran aktif warga dunia bagi terciptanya kepentingan global yang lebih luas. Tahun 2016 merupakan tahun pertama implementasi agenda pembangunan dunia Post-2015 (SDGs). Sidang Umum PBB pada 4 Desember 2014 telah menyetujui platform agenda pembangunan dunia Post-2015 berdasar pada hasil Open Working Group (OWG) on Sustainable Development Goals yang akan menjadi target dan tujuan pembangunan dunia sampai 2030. Rumusan SDG terdiri dari 17 tujuan dan 169 target dimana pencapaian lebih terukur untuk menciptakan masyarakat dunia 2030 jauh lebih baik dari saat ini. Ke-17 tujuan SDGs tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menghapus segala bentuk kemiskinan dimana pun berada;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan dari air dan sanitasi untuk semua;
7. Memastikan seluruh penduduk mendapat akses untuk energi yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan;
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak untuk semua secara berkelanjutan;
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif berkelanjutan, dan inovasi asuh;
10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara-negara;
11. Membuat pemukiman kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;

12. Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Pelestarian dan pemanfaatan samudera, laut dan sumber daya kelautan berkelanjutan dalam rangka pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan mempromosikan pemanfaatan ekosistem darat, lestari mengelola hutan, memerangi penggusuran, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
16. Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; serta
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Target pembangunan universal yang tertuang dalam SDGs membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat dunia, termasuk dari pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat. Di setiap negara, tidak hanya negara miskin dan berkembang tetapi juga negara maju, rumusan SDGs merupakan sumber penting untuk menyelaraskan strategi dan kebijakan demi membuat kehidupan di muka bumi menjadi lebih baik. Di Indonesia khususnya Kota Pariaman, rumusan SDGs dan target pencapaian dapat menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional maupun daerah.

b. Ancaman krisis ekonomi global

Pada awal tahun 2016, Bank Indonesia memberikan indikasi bahwa kelesuan ekonomi dunia yang telah terjadi dalam beberapa tahun akan membaik. Namun sampai dengan pertengahan tahun 2016, tak banyak sentimen positif yang diharapkan dapat menggairahkan (kembali) ekonomi dunia. Bahkan, fenomena "Brexit" atau keluarnya Inggris dari Uni Eropa semakin meningkatkan kecemasan atas masa depan ekonomi dunia, berdampingan dengan isu-isu terorisme global, rasis di Amerika dan gejala global pada umumnya, termasuk perang di Timur Tengah yang antara lain menyisakan permasalahan tak kalah serius atas jutaan pengungsi yang belum jelas masa depannya.

Ketidakpastian ekonomi global juga sama terjadi di Kawasan Asia Pasifik. China sebagai salah satu tujuan ekspor Indonesia dalam beberapa tahun ini juga mengalami kelesuan, tak terkecuali juga dengan Jepang. Beberapa indikasi lain mengkonfirmasi dalam beberapa tahun ke depan akan banyak tekanan ekonomi dunia yang berimbas baik secara langsung maupun tidak langsung kepada

Indonesia maupun Provinsi Sumatera Barat serta Kota Pariaman yang berpengaruh pada perlambatan pemulihan ekonomi.

c. Antisipasi perubahan iklim global (global warming/climate change)

Perkembangan lingkungan pada era globalisasi pembangunan sekarang ini menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan pembangunan yang mengesampingkan faktor kelestarian lingkungan hidup sehingga menyebabkan kelestarian hidup yang buruk dengan akibat ancaman global warming. Global warming merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam yang dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, hingga banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama dalam adanya bencana alam. Perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi global warming. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mempunyai strategi dalam menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek global warming dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

d. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin pesat

Pada era globalisasi sekarang ini ilmu pengetahuan dan komunikasi semakin mudah terjangkau oleh lapisan masyarakat yang mengindikasikan perkembangan IPTEK dan telekomunikasi mengalami perkembangan yang positif. Kemajuan IPTEK dan komunikasi bertujuan untuk mempermudah kehidupan seseorang dalam berbagai hal. Dengan perkembangan yang positif ini, dunia industri teknologi dan komunikasi semakin menunjukkan agregat yang signifikan. Dengan adanya kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi ini, Negara Indonesia diharapkan mampu mengikuti setiap perkembangan globalisasi yang ada sehingga diharapkan Indonesia mempunyai peluang dalam memanfaatkan atau membuat produk yang lebih unggul. Ke depannya nanti, diharapkan Indonesia tidak hanya sebagai pemakai (user) tetapi mampu menjadi pembuat sehingga memiliki persaingan yang cukup sehat dalam pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Jika hal tersebut terealisasi, maka Indonesia akan mampu menjadi negara yang tidak hanya mengandalkan teknologi dari luar negeri, namun mampu mengeksport segala bentuk teknologi informasi, dan komunikasi sesuai dengan spesifikasi yang mampu berdaya saing internasional.

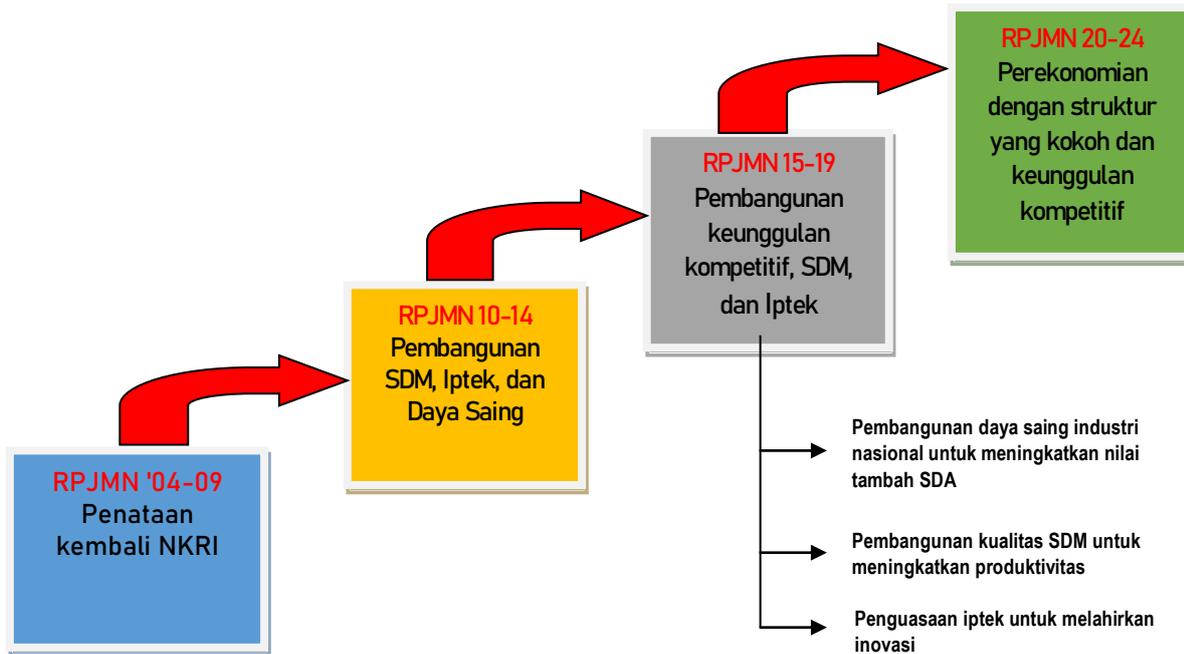
5.2.2 Isu atau Kebijakan Nasional

1) Telaahan RPJPN Tahun 2005-2025

Isu-isu secara nasional yang memiliki potensi besar untuk memengaruhi arah pembangunan Kota Pariaman pada masa mendatang adalah kebijakan dari pemerintah pusat. Dokumen perencanaan tingkat nasional merupakan salah satu sumber kebijakan yang memiliki kepastian tinggi

dan dalam amanat peraturan perundangan harus diikuti karena penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RPJMN. Mengingat perodesasi RPJMD Kota Paraman mengikuti periode RPJMN III dan IV. maka arah kebijakan RPJMD Kota Kota Paraman menyelaraskan dengan periode RPJMN III (2015-2019) dan IV (2019-2024) yang mengacu pada RPJPN tahap ketiga (2015-2019) dan tahap ke empat (2019-2024).

Gambar 4.3
Fokus Kebijakan Setiap Tahapan dalam RPJPN 2005-2025



Arah kebijakan untuk RPJMN tahap III ditekankan pada pembangunan daya saing industri nasional untuk meningkatkan nilai tambah SDA, pembangunan kualitas SDM untuk meningkatkan produktivitas, dan penguasaan IPTEK untuk melahirkan inovasi. Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM tahap III, RPJM tahap III ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Kualitas sumber daya manusia terus mengalami perubahan positif yang ditandai oleh meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal serta

kesejahteraan dan perlindungan anak; tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang; serta mantapnya budaya dan karakter bangsa.

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan semakin efektif dan efisien yang dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari; terus membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup; meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat terhadap lingkungan hidup; serta semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah Indonesia.

Daya saing perekonomian Indonesia semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, kelautan, dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan; terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha; makin selarasnya pembangunan pendidikan, industri, ilmu pengetahuan dan teknologi; serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan, dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi; terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai; mulai dimanfaatkannya tenaga nuklir untuk pembangkit listrik dengan mempertimbangkan faktor keselamatan secara ketat; terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi Indonesia; terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan sumber daya air; serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Wilayah perdesaan merupakan titik vital pembangunan masyarakat ekonomi lemah. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur perdesaan harus terus dikembangkan terutama untuk mendukung pembangunan pertanian. Selain itu, pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi sarana prasarana pendukung kehidupan bagi seluruh masyarakat harus terus ditingkatkan dengan didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang, berkelanjutan, efisien, dan akuntabel. Diharapkan, dengan terpenuhinya kondisi tersebut semakin mendorong terwujudnya kabupaten/kota tanpa permukiman kumuh.

Berdasarkan telaahan RPJPN tahap III (2015-2019), maka pembangunan Kota Pariaman harus selaras dengan arahan RPJPN tahap III dengan menyesuaikan karakteristik lokal seperti:

1. Meningkatkan daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat;
2. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari;
3. Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan didukung oleh meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat; serta
4. Semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, kelautan, dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan untuk mendukung daya saing perekonomian Indonesia yang semakin kuat dan kompetitif.

2) Telaahan RPJMN Tahun 2015-2019

Dalam merumuskan dan merealisasikan berbagai komitmen Presiden dan Wakil Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpilih pada periode ini, serta berdasarkan kajian maupun analisis mengenai permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, termasuk dalam penyelarasan dengan sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJP Nasional tahun 2005-2025, maka untuk memajukan Negara Indonesia ke depan ditetapkan visi RPJM Nasional tahun 2015-2019 sebagai berikut:

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Gotong royong merupakan intisari dari ideologi Pancasila. Tanggung jawab untuk membangun bangsa harus dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat dalam memutuskan suatu perihal dan gotong royong dalam bekerja. Kekuatan rakyat adalah gotong royong, dimana rakyat selalu bahumembahu dan bekerjasama menyelesaikan berbagai hambatan dan tantangannya ke depan.

Berdaulat adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi bangsanya sendiri. Oleh karena itu, pembangunan selain sebagai usaha untuk mewujudkan kedaulatan sebagai negara merdeka, pembangunan juga merupakan upaya membangun kemandirian. Bangsa yang berdaulat dan mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian diperlukan kekuatan dan kemampuan nasional di segala lini baik bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Kemandirian suatu bangsa tercermin antara lain pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya; kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; kemampuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang makin kokoh dan berkurangnya ketergantungan kepada sumber luar negeri; dan kemampuan memenuhi kebutuhan pokok.

Kemandirian dalam kebudayaan harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan baik hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan. Kemandirian dan kemajuan suatu bangsa tidak boleh hanya diukur dari perkembangan ekonomi semata, namun kemandirian dan kemajuan juga tercermin dalam kelembagaan, pranatapanata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik dan sosial. Secara lebih mendasar lagi, kemandirian sesungguhnya mencerminkan sikap seseorang atau sebuah bangsa mengenai jati dirinya, masyarakatnya, serta semangatnya dalam menghadapi berbagai tantangan.

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berlandaskan kepentingan nasional; serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi serta untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut **NAWA CITA**, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara;

2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsabangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa; serta
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dalam pelaksanaan agenda prioritas nasional tersebut, maka dirumuskanlah kebijakan pengembangan wilayah pulau-pulau besar yang diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dengan tetap mempertahankan momentum pembangunan di wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. Percepatan pembangunan wilayah tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengurangi kesenjangan antar wilayah sebagai satu kesatuan Negara yang berkeadilan.

5.2.3 Telahaan RPJMN Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

Penelaahan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Kota Pariaman dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 bertujuan untuk menyelaraskan dan menjabarkan RPJMD Kota Pariaman sehingga dapat memberikan sumbangsiah positif pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat. Perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 memiliki visi pembangunan **“Terwujudnya Sumatera Barat Yang Madani Dan Sejahtera”**,

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN 2015-2019, dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun

2005-2025. Untuk memahami Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat tersebut dijelaskan pengertian sebagai berikut:

Madani

Sumatera Barat Madani adalah suatu masyarakat yang berperadaban tinggi dan maju yang berbasis pada nilai-nilai, norma hukum, moral yang ditopang oleh keimanan. Masyarakat madani menghormati pluralistis, bersikap terbuka dan demokratis serta selalu bergotong royong menjaga kedaulatan negara. Dengan demikian, masyarakat madani tersebut pada dasarnya adalah masyarakat yang agamais yang ditandai oleh adanya keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, lahir dan batin serta material dan sipiritual.

Sejahtera

Sumatera Barat Sejahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi serta hiburan; terciptanya hubungan antar masyarakat yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian, serta tersedianya prasarana dan sarana publik terkait dengan infrastruktur pelayanan publik, transparansi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpelihara dengan baik. Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat bersifat dinamis, dari waktu ke waktu akan mengalami perubahan sesuai dengan aspirasi dan tuntutan yang berkembang di masyarakat. Untuk itu sarana dan prasarana dalam usaha memenuhi kebutuhan dasar harus terus menerus mengikuti dinamika perubahan, serta dibuka ruang yang seluas-luasnya untuk mencapai kemajuan dan perkembangan bagi kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Dalam pencapaian visi tersebut. Adapun misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah” Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”;
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional;
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi;
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah;

5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

Prioritas Pembangunan Daerah yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Mental Pengamalan Agama dan ABS-SBK Dalam Kehidupan Masyarakat;
2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan;
3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan;
4. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat;
5. Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis;
6. Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi;
7. Peningkatan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman dan Kelautan;
8. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal;
9. Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur;
10. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana.

Berdasarkan informasi visi, misi dan prioritas tersebut, Provinsi Sumatera Barat menekankan pembangunan daerah pada masyarakat yang berperadaban tinggi dan maju yang berbasis pada nilai-nilai, norma hukum, moral yang ditopang oleh keimanan melalui perbaikan sikap mental yang sesuai dengan nilai agama, adat dan kearifan lokal budaya Minangkabau, yang kemudian diikuti dengan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan SDM, ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan. Prioritas pembangunan daerah provinsi yang diusulkan dikembangkan dari persyaratan minimum standar pembangunan daerah (SPM). Dan Memperhatikan kondisi daerah dan isu global Sustainable, maka prioritas pembangunan untuk provinsi Sumatera Barat juga difokuskan pada pengembangan sumber energi terbarukan dan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan, disamping kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana.

Dalam rangka menunjang pembangunan berdimensi kewilayahan provinsi Sumatera Barat maka kebijakan dan strategi pembangunan yang akan dilakukan pemerintah Kota Pariaman juga akan

memperhatikan pembangunan berdimensi kewilayahan yang telah ditetapkan Provinsi Sumatera Barat untuk Kota Pariaman meliputi :

1. Pengembangan Sistem Perkotaan yang menetapkan Kota Pariaman sebagai salah satu daerah untuk Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).
2. Sebagai Kawasan sepadan pantai.
3. Sebagai Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya. Di Kota Pariaman ditetapkan sebagai Kawasan Pantai Berhutan Bakau.
4. Sebagai Kawasan pengembangan Kawasan Sentra Industri dengan komoditi : 1) Industri Tekstil dan Produksi Tekstil, 2) Industri Makanan dan Ringan, 3) Industri Pengelohan Hasil Laut dan Perikanan.
5. Sebagai Kawasan Pariwisata dengan komoditi : 1) Kawasan yang dikembangkan, 2) Kawasan Pantai Gandoriah dan Pulau Angso Duo.

5.2.4 Telaah RPJPD Kota Pariaman Tahun 2005-2025

RPJPD Kota Pariaman Tahun 2005-2025 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan RPJMD, karena RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan tahapan keempat pelaksanaan pembangunan dari RPJPD Kota Pariaman. Alur tahapan dan penetapan skala prioritas yang ditetapkan ini mencerminkan pentingnya permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan yang lain. Oleh karena itu, tekanan pada skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua terus berkesinambungan dari periode satu ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang yang telah disusun. Visi RPJPD Kota Pariaman tahun 2005-2025 adalah

“Mewujudkan Pariaman Sebagai Kota Perdagangan Dan Jasa Di Wilayah Pesisir Barat Sumatera Menuju Masyarakat Madani ”.

Rumusan visi tersebut dapat diterjemahkan adanya cita dan citra Kota Pariaman dimasa mendatang untuk menjadi salah satu Kota Perdagangan Dan Jasa yang terletak dipantai Barat Sumatera. Perwujudan Kota Perdagangan Dan Jasa dimaksud utamanya dibangun dalam kerangka sistem ekonomi kerakyatan yang berwawasan lingkungan menuju masyarakat madani.

Kota Pardagangan merupakan Kota perdagangan mengandung arti bahwa Kota Pariaman dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang, akan berkembang menjadi pusat aktivitas perdagangan baik skala regional, nasional maupun internasional.



Kota Jasa Kota Jasa mengandung arti bahwa Kota Pariaman dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang akan berkembang menjadi pusat aktivitas jasa pelayanan antara lain : hotel, restoran, transportasi, komunikasi, keuangan perbankan, pendidikan, kesehatan dan pelayanan jasa lainnya.

Wilayah Pesisir Barat Sumatera merupakan Suatu wilayah yang batasan cakupannya meliputi di sepanjang pesisir barat pulau sumatera.

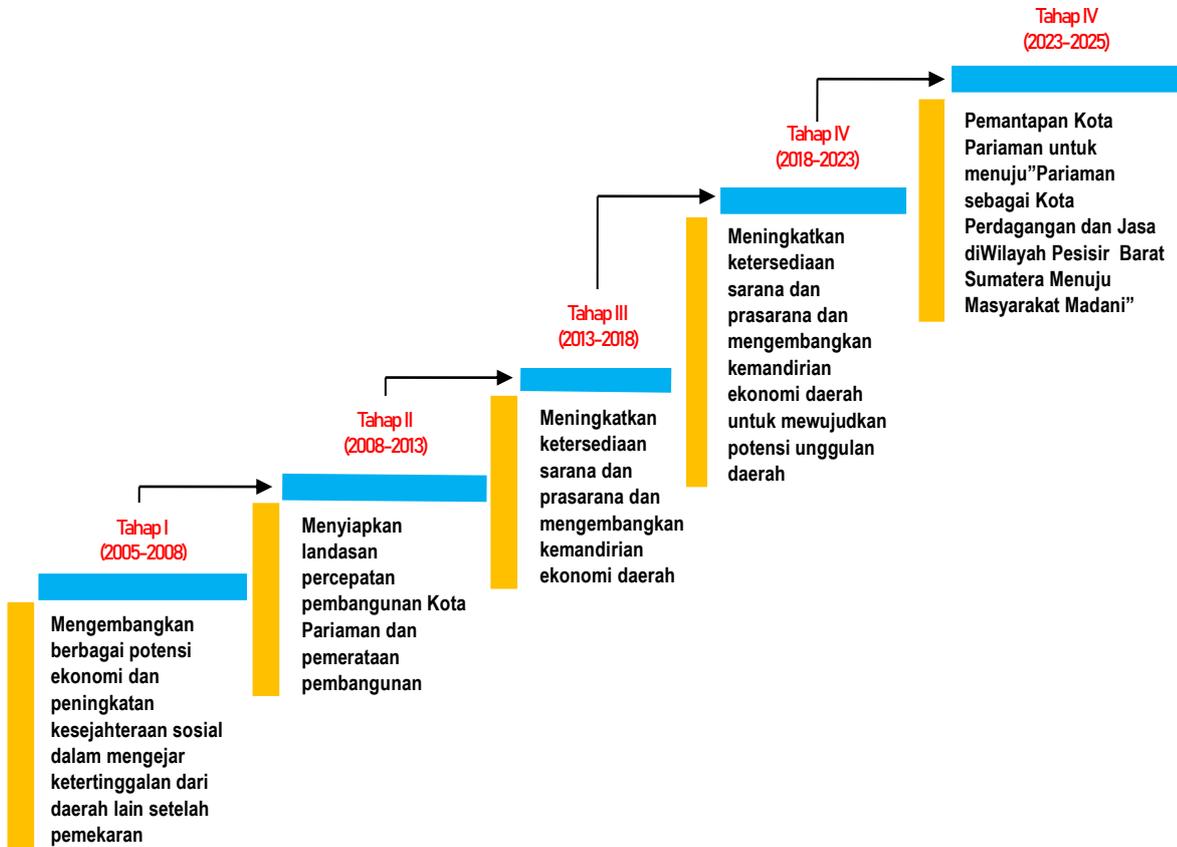
Masyarakat Madani merupakan Masyarakat Madani mengandung arti bahwa dalam 20 tahun mendatang diharapkan terwujud masyarakat Kota Pariaman yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, berbudi pekerti luhur, peradaban maju, memiliki kesadaran sosial yang kuat, gotong royong, sehat, cerdas, makmur, sejahtera, dalam lingkungan yang damai, tenteram, dan nyaman.

Dalam rangka mewujudkan visi Kota Pariaman sebagai Kota Perdagangan dan Jasa di Wilayah Pesisir Barat Sumatera menuju masyarakat madani maka misi Kota Pariaman dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas SDM dan Derajat Sosial Masyarakat;
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berwawasan lingkungan;
3. Mewujudkan rasa tertib dan aman dalam kehidupan beragama dan bernegara;
4. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik didukung peningkatan kualitas aparatur dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
5. Mewujudkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pembangunan daerah.

RPJPD 2005-2025 pada tahun RPJMD ke 4 (2018-2023), diarahkan dengan tetap berpegang pada capaian kinerja pada RPJMD ke 3. Sesuai dengan hasil implementasi, pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-3, maka pada RPJM ke-4 diarahkan untuk lebih memantapkan penguatan upaya pencapaian keunggulan daerah melalui sarana-sarana pendukung lanjut, penguatan orientasi kompetisi pada pembangunan SDM unggul, serta ekspansi perekonomian dan industri berbasis keunggulan daerah yang didukung dengan ketersediaan energy.

Gambar 4.4
Tema/Agenda Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman Tahun 2005-2025



5.2.5 Telaah RTRW Kota Pariaman

Rencana tata ruang pada dasarnya merupakan bentuk intervensi yang dilakukan agar terwujud alokasi ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keseimbangan antar wilayah. Proses perencanaan tata ruang sendiri dapat dijelaskan dengan pendekatan sistem yang melibatkan input, proses dan output. Input yang digunakan adalah keadaan fisik seperti kondisi alam dan geografis, sosial budaya seperti demografi sebaran penduduk, ekonomi seperti lokasi pusat kegiatan perdagangan yang ada maupun yang potensial dan aspek strategis nasional lainnya. Keseluruhan input ini diproses dengan menganalisis input tersebut secara integral baik kondisi saat ini maupun ke depan untuk masing-masing hirarki tata ruang nasional, provinsi maupun kabupaten/kota sehingga menghasilkan output berupa rencana tata ruang yang menyeluruh.

RTRW Nasional merupakan perencanaan makro strategis nasional yang menggambarkan arah dan kebijakan pembangunan nasional secara ketataruangan yang memuat antara lain infrastruktur nasional seperti jalan nasional, pelabuhan samudera maupun bandara internasional. Sedangkan RTRW Provinsi merupakan perencanaan regional yang menjabarkan RTRWN dalam konteks ruang wilayah provinsi secara lebih rinci termasuk memuat rencana pengembangan infrastruktur jalan provinsi, terminal maupun pelabuhan regional. Sementara itu RTRW Kabupaten/Kota merupakan rencana tata ruang skala kabupaten/kota dengan muatan utama kelengkapan infrastruktur di tingkat lokal atau regional seperti jalan kabupaten/kota, kebutuhan jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi yang ada.

Gambaran kondisi tersebut sering kita jumpai di berbagai kota di Indonesia, salah satunya adalah Kota Pariaman. Kota Pariaman yang resmi terbentuk pada tahun 2002 mengalami perkembangan pembangunan yang sangat cepat yang jika tidak diiringi dengan pengaturan pemanfaatan ruang akan mengakibatkan pembangunan tumbuh secara sporadis pada beberapa kawasan tertentu.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pariaman merupakan dasar/arahannya bagi pemanfaatan ruang di wilayah Kota Pariaman. Arahannya ini harus mampu mengakomodasi kepentingan seluruh stakeholders pembangunan (pemerintah, private / swasta serta masyarakat) dalam melakukan aktivitasnya masing-masing. Penjabaran aktivitas tersebut tercermin dari pola pemanfaatan ruang (tata guna lahan) yang ada. Selain itu RTRW juga harus mempunyai visi dan misi ke depan yang jelas terutama dalam penataan ruang dan pembangunan Kota Pariaman. Aktivitas masyarakat kota (fisik, ekonomi, sosial dan politik) yang sangat dinamis secara langsung maupun tidak langsung turut memiliki andil dalam perkembangan Kota Pariaman.

Perubahan secara fisik berupa adanya perkembangan dan perubahan pemanfaatan ruang, perubahan dalam bidang ekonomi terutama terkait dengan kebijakan otonomi daerah. Perubahan dalam bidang sosial politik adalah adanya perubahan besar sejak era reformasi yang ditandai dengan perubahan paradigma pembangunan yang sebelumnya bersifat top down menjadi bottom up. Kondisi tersebut secara tidak langsung juga berakibat pada perubahan karakteristik masyarakat yang berkembang ke arah demokrasi, yang salah satunya diwujudkan dalam proses pembangunan yang transparan dalam arti pemerintah harus terbuka pada seluruh masyarakat (terutama untuk mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat).

Kota Pariaman telah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) melalui bantuan teknis Dirjen Penataan Ruang pada tahun 2004 dan telah di Perdakan pada tahun 2005. Dalam

perjalanannya RTRW Kota Pariaman tersebut sudah dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dan masyarakat umum dalam pengembangan wilayah Kota Pariaman. Dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai pengganti Undang-Undang nomor 24 tahun 1992 maka semua produk RTRW baik di tingkat provinsi maupun kota harus disesuaikan karena terdapat beberapa perbedaan dengan materi yang terdapat pada RTRW yang sebelumnya antara lain tentang jangka waktu rencana di mana pada RTRW yang lama jangka waktu untuk RTRW Kota adalah selama 10 (sepuluh) tahun sedangkan menurut undang-undang yang baru adalah selama 20 (dua puluh) tahun. Kemudian juga menurut Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 ini produk RTRW harus lebih menekankan kepada sanksi dan adanya penetapan kawasan strategis di setiap tingkatan RTRW baik provinsi maupun kota. Selain itu dengan keluarnya perubahan undang-undang penataan ruang dari undang-undang nomor 24 tahun 1992 menjadi undang-undang nomor 26 tahun 2007 di mana pada Bab XIII pasal 78 menyatakan bahwa RTRW Provinsi dan Kota harus sudah disesuaikan dan diperdakan sesuai materi Undang-undang nomor 26 tahun 2007 paling lambat dua tahun bagi provinsi dan tiga tahun bagi kota sejak undang-undang tersebut diundangkan.

A. Tujuan Penataan Ruang Kota Pariaman

Berdasarkan Visi dan Misi yang terdapat pada dokumen RPJPD Kota Pariaman Tahun 2005-2025 maka ditetapkan tujuan dari RTRW Kota Pariaman, yaitu:

**“Mewujudkan Kota Pariaman Sebagai Kota Wisata Pesisir Yang Madani Untuk Mendukung
Perdagangan dan Jasa Yang Berwawasan Lingkungan”**

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai tujuan penataan ruang Kota Pariaman adalah sebagai berikut:

- 1) Wisata pesisir; sektor pariwisata sangat diharapkan dapat menjadi lokomotif pengembangan kegiatan ekonomi Kota Pariaman di masa mendatang, hal ini terutama berdasarkan pertimbangan atas potensi SDA kelautan dan potensi kekayaan budaya yang dimiliki serta posisi geografis Kota Pariaman yang sangat strategis. Selain itu juga dipertimbangkan keterbatasan pengembangan sektor lain seperti pertanian dan perkebunan yang terkendala oleh minimnya lahan yang dapat dikembangkan serta adanya persaingan di sektor perdagangan & jasa dengan kota lainnya. Kegiatan sektor pariwisata ditekankan pada pemanfaatan potensi bahari yang mencakup kawasan pantai, laut dan pulau-pulau kecil serta pengembangan dan peningkatan

kegiatan festival Tabuik yang sudah menjadi kalender acara nasional. Puncak kegiatan pariwisata setiap tahunnya dilaksanakan pada setiap pelaksanaan Festival Tabuik. Sebagai maskot pariwisata Kota Pariaman, sudah selayaknya kegiatan Festival Tabuik ini dapat diagendakan dan disiapkan dengan lebih matang serta mendapatkan dukungan dari berbagai sektor kegiatan lainnya. Dari sisi aspek infrastruktur kota, diperlukan penataan, pengembangan dan pembangunan infrastruktur khusus untuk pelaksanaan kegiatan ini. Misalnya seperti rumah tabuik yang permanen dan lebih representatif, jalur jalan yang lebar dan dipersiapkan khusus untuk mengarak tabuik, areal pertemuan 2 tabuik dan lokasi pengarungan tabuik di pantai Gondorih. Lokasi-lokasi tersebut harus disiapkan dan dipersiapkan dengan baik, terencana dan terukur sehingga dapat menampung membludaknya penonton yang bisa mencapai ratusan ribu orang dari berbagai kalangan dan berbagai tempat. Madani; sesuai dengan karakter masyarakat Pariaman yang agamais maka pengembangan kegiatan pariwisata maupun perdagangan dan jasa yang akan mendukung pengembangan wilayah akan membawa dampak positif terhadap masyarakat setempat. Kegiatan pariwisata yang dikembangkan harus yang bercirikan islami.

- 2) Perdagangan dan Jasa; untuk menunjang pencapaian visi Kota Pariaman yakni memantapkan kerangka pemerintahan yang optimal menuju kota perdagangan dan jasa, dengan membenahi sarana dan infrastruktur pasar yang masih bersifat tradisional di Kota Pariaman. Di bidang industri produksi industri kecil dan rumah tangga cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pembinaan dan pengembangan yang dilakukan telah memberikan dampak positif. Beberapa jenis produk hasil kerajinan industri kecil sudah memasuki pasar luar negeri, seperti produk sulaman, mukena, pakaian muslim. Produk makanan olahan tradisional seperti kipang kacang dan emping melinjo juga sudah memasuki pasar regional seperti Pekanbaru, Medan dan Jakarta namun masih terbatas dalam skala kecil. Terdapat sebanyak sekitar 200 lebih unit usaha dengan jumlah tenaga kerja 2.000 orang lebih.
- 3) Berwawasan lingkungan; merupakan upaya pengembangan kegiatan kota yang berwawasan lingkungan dengan memperhatikan mitigasi bencana untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui membangun fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana serta memperhatikan ruang terbuka hijau kota.

B. Kebijakan Penataan Ruang

Kebijakan penataan ruang wilayah kota merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kota. Kebijakan penataan ruang wilayah kota berfungsi:

- 1) Sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah kota;
- 2) Sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah kota;
- 3) Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kota;
- 4) Sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

Kebijakan penataan ruang wilayah kota dirumuskan berdasarkan:

- 1) Tujuan penataan ruang wilayah kota dan ketentuan peraturan perundangundangan;
- 2) Karakteristik wilayah kota; dan
- 3) Kata-kata kunci dari isu-isu strategis Kota Pariaman.

Kebijakan penataan ruang wilayah kota dirumuskan dengan kriteria:

- 1) Mengakomodasi kebijakan penataan ruang wilayah nasional dan kebijakan penataan ruang wilayah provinsi yang berlaku pada wilayah kota bersangkutan;
- 2) Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kota bersangkutan;
- 3) Mampu menjawab isu-isu strategis baik yang ada sekarang maupun yang diperkirakan akan timbul di masa yang akan datang; dan
- 4) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

C. Strategi Penataan Ruang

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kota ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi penataan ruang wilayah kota berfungsi :

- 1) Sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis kota;
- 2) Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam rtrw kota; dan
- 3) Sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

Strategi penataan ruang wilayah kota dirumuskan berdasarkan :

- 1) Kebijakan penataan ruang wilayah kota;
- 2) Kapasitas sumber daya wilayah kota dalam melaksanakan kebijakan penataan ruangnya; dan
- 3) Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Strategi penataan ruang wilayah kota dirumuskan dengan kriteria:

- 1) Memiliki kaitan logis dengan kebijakan penataan ruang;
- 2) Tidak bertentangan dengan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah nasional, dan provinsi;
- 3) Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kota bersangkutan secara efisien dan efektif;
- 4) Harus dapat dijabarkan secara spasial dalam rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah kota; dan
- 5) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

D. Strategi Dasar Pengembangan Kota Pariaman

Strategi dasar pengembangan Kota Pariaman ini dimaksudkan sebagai sarana untuk mengarahkan pengembangan kawasan kota sesuai dengan kebijaksanaan pengembangan yang telah digariskan. Jadi pada dasarnya strategi ini, sebagai media dalam menentukan rencana pengembangan kota lebih lanjut agar sesuai dengan apa yang dimiliki atau keadaan potensi dan masalah di wilayah perencanaan.

Adapun strategi pengembangan fungsi dan peran Kota Pariaman dalam pengembangan sistem kota-kota di Provinsi Sumatera Barat, adalah sebagai berikut :

- 1) Fungsi tempat pasar (marketplace function), dimana barang, jasa konsumsi dan investasi dijual kepada masyarakat di sekitar Kota Pariaman .
- 2) Masih merupakan fungsi tempat pasar, tetapi merupakan arus balik dari fungsi tempat pasar yang pertama, yaitu sebagai tempat pemasaran hasil pengolahan pertanian dan industri. Fungsi ini merupakan kegiatan yang potensial berkembang di Kota Pariaman, mengingat Pasar di Pariaman masih menjadi orientasi pasar bagi kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kota Pariaman yang dulunya merupakan bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Padang Pariaman. Selain itu pola perdagangan yang melayani ke wilayah belakangnya, selain tempat pemasaran juga sebagai tempat distribusi dan koleksi barang-barang dari luar maupun dari dalam wilayah Kota Pariaman.
- 3) Merupakan terminal jasa distribusi, yang meliputi sektor angkutan perdagangan yang diperlukan untuk menunjang fungsinya sebagai pusat pemasaran secara lebih tegas yaitu menghubungkan pusat produksi dan pusat pemasaran.



- 4) Fungsi transaksi finansial berupa kemudahan kredit pertanian dari pemerintah, hal ini biasanya dibarengi oleh arus baliknya, berupa tabungan pedesaan yang disalurkan oleh bank-bank yang hirarkinya lebih tinggi.
- 5) Fungsi penyediaan pelayanan pengembangan kegiatan pertanian dan industri.
- 6) Fungsi pelayanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, komunikasi, peribadatan, rekreasi, pemerintahan dan lainnya yang mencerminkan fungsi Kota Pariaman sebagai pusat pelayanan kota.
- 7) Fungsi pelayanan dan koordinasi pertahanan dan keamanan.

E. Rumusan Strategi Penataan Ruang

Dengan pertimbangan bahwa strategi adalah turunan dari kebijakan yang dijabarkan secara lebih operasional yang dapat dituangkan dalam bentuk ruang. Mengacu pada klausul kebijakan yang telah dirumuskan di atas serta dikaitkan dengan program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Pariaman, maka strategi penataan ruang adalah sebagai berikut :

- 1) Strategi pengembangan kawasan perumahan kawasan perumahan yang sesuai dengan karakter ruang kota, sosial budaya masyarakat, daya dukung dan daya tampung serta kerawanan terhadap bencana meliputi:
 - a) mengembangkan kawasan perumahan di Kota Pariaman dengan kepadatan tinggi di pusat kota, kepadatan sedang dan kepadatan rendah dipinggir kota dan pada kawasan rawan bencana;
 - b) mendorong pembangunan secara vertikal terbatas di kawasan pusat kota untuk mengoptimalkan intensitas ruang dan menjamin keseimbangan antara ruang terbangun dan RTH dengan tetap memperhatikan ketentuan bangunan tahan gempa;
 - c) mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang sudah tertata;
 - d) mengembangkan perumahan yang mendukung pengembangan kegiatan industri.
- 2) Strategi peningkatan kegiatan industri kecil/rumah tangga yang berbasis kerakyatan dalam mendukung kegiatan perdagangan dan jasa meliputi :
 - a) menetapkan sentra industri sesuai dengan potensi yang dimiliki;
 - b) mengembangkan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan industri kecil/ rumah tangga;
 - c) mengarahkan kegiatan industri ke arah bagian barat (hilir) wilayah Kota Pariaman dan sepanjang koridor jalan regional guna menghindari kemungkinan pencemaran air di arah

hulu sungai yang akan difungsikan sebagai sumber air baku kota dan kemudahan akses transportasi.

- 3) Strategi peningkatan kegiatan pariwisata pesisir yang berwawasan lingkungan meliputi:
 - a) mengembangkan sarana dan prasarana pariwisata pesisir yang terintegrasi dengan kegiatan ekonomi, sosial, budaya sehingga dapat dikembangkan menjadi kesatuan kegiatan pariwisata yang utuh;
 - b) mengembangkan pasar wisata di “Pasar Lama Kota Pariaman” Kecamatan Pariaman Tengah;
 - c) mengembangkan Kawasan Wisata Pantai Gandorih yang didukung oleh arsitektur kota, sistem pelayanan transportasi massal terpadu dan sistem jaringan utilitas yang handal;
 - d) mengembangkan potensi wisata alternatif kota untuk meragamkan objek dan kawasan wisata kota.
- 4) Strategi peningkatan produktivitas kegiatan pertanian wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan meliputi:
 - a) Menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan kota (LP2B) dan pembatasan pembangunan prasarana yang memotong kawasan persawahan untuk mempertahankan fungsinya sebagai aset kota dalam rangka mendukung program strategis ketahanan pangan nasional;
 - b) mengupayakan kegiatan intensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi pada lahan tidak terbangun dan lahan sisa yang berupa lahan cadangan pengembangan sebagai lahan pertanian khususnya areal persawahan beririgasi teknis;
- 5) Strategi peningkatan pertumbuhan sektor industri dengan didukung pasar regional sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan meliputi:
 - a) meningkatkan pertumbuhan sektor industri dengan didukung pasar regional sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan;
 - b) meningkatkan pemasaran hasil industri pada kawasan pasar dan rekreasi untuk mendukung pemasaran hasil-hasil industri di Kota Pariaman.
- 6) Strategi pembangunan sarana dan prasarana wilayah yang berbasis mitigasi bencana meliputi:
 - a) merehabilitasi sarana dan prasarana wilayah yang rusak akibat bencana alam;
 - b) mewujudkan struktur dan pola ruang Kota Pariaman berbasis mitigasi bencana;

- c) membatasi pembangunan sarana dan prasarana publik yang strategis seperti kesehatan dan pendidikan di kawasan sepanjang pantai; dan
 - d) dalam jangka panjang merelokasi fasilitas kesehatan, pendidikan dan pemerintahan pada kawasan bebas bencana tsunami.
 - e) menyediakan sarana dan prasarana di pusat-pusat pelayanan kota dan lingkungan sesuai dengan skala pelayanannya;
 - f) meningkatkan fungsi dan kualitas bangunan publik dan perumahan yang antisipatif terhadap bencana.
- 7) Strategi pengembangan sarana prasarana yang terpadu untuk mendukung Kota Pariaman sebagai bagian PKN PASOPALAPA meliputi;
- a) mengembangkan jaringan transportasi jalan maupun kereta api yang menghubungkan Kota Pariaman dengan wilayah sekitarnya;
 - b) mengembangkan moda transportasi massal berbasis rel dan jalan raya yang menghubungkan antara Kota Pariaman dengan kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman.
- 8) Strategi pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi;
- a) Mengembangkan pulau untuk kegiatan pariwisata sesuai dengan daya dukung lingkungannya;
 - b) Melakukan konservasi pulau Kasiak dan pesisir pulau untuk perlindungan penyu dan terumbu karang.
 - c) Mengembangkan potensi perikanan dan pariwisata pesisir dengan membangun prasarana dan sarana pemasaran perikanan dan pendukung wisata.

5.2.6 Hasil Telaah KLHS Kota Pariaman

Sebagai dasar penyusunan RPJMD Kota Pariaman Kota Pariaman Tahun 2018-2023, maka Pemerintah Kota Pariaman wajib melaksanakan KLHS RPJMD sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas kebijakan pembangunan daerah. KLHS ini dilakukan pada tahap awal dari proses penyusunan Rancangan RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023, sehingga dapat diperkirakan dampak negatif terhadap lingkungan hidup apabila Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) dilaksanakan. Menurut Asdak (2012), KLHS tidak mengkaji dampak sebuah proyek, melainkan mengkaji dampak sebuah Kebijakan, Rencana dan Program (KRP). Karenanya hasil dari kajian ini tentunya bersifat strategis, untuk memberikan rekomendasi penyempurnaan KRP yang tertuang

dalam RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023. Dengan kata lain, dengan adanya Pengendalian Lingkungan, implementasi KLHS diharapkan permasalahan lingkungan yang diperkirakan terjadi dapat diminimalisasi sehingga pembangunan yang berkelanjutan dapat diwujudkan di Kota Pariaman.

Berdasarkan hasil proses KLHS Penyusunan RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023, dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan KLHS RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 15 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah Wajib untuk membuat KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedalam penyusunan atau evaluasi RTRW beserta rinciannya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. KLHS RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 secara umum telah menggunakan pedoman berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Meskipun demikian, pedoman tidak dapat menjawab semua kebutuhan sesuai dengan tahapan terutama saat melakukan kajian pengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup Kota Pariaman.
2. Tidak tersedianya data dan informasi yang memadai untuk digunakan dalam proses pengkajian merupakan kelemahan utama dari proses pelaksanaan KLHS Kota Pariaman Tahun 2018-2023;
3. Isu strategis yang dihasilkan dari proses KLHS terdiri dari 8 isu strategis, yaitu: (1) Kesenjangan Sosial; (2) Rendahnya Kualitas Pembangunan Kesehatan; (3) Belum Optimalnya Produksi, Distribusi dan Kualitas Hasil Pertanian; (4) Terbatasnya Infrastruktur Pembangunan Wilayah; (5) Rendahnya Daya Saing Daerah; (6) Bencana Alam; (7) Kerusakan Lingkungan, dan (8) Belum Tertatanya Penataan Ruang;
4. Secara umum rumusan visi, misi, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD Kota Pariaman sudah memenuhi sebagian besar prinsip pembangunan berkelanjutan, namun ada beberapa catatan penekanan yang perlu menjadi perhatian Tim penyusun RPJMD yaitu menjadikan Kota Pariaman berwawasan lingkungan. Meskipun misi sudah memperhatikan pembangunan berkelanjutan tetapi aspek lingkungan yang dapat berimplikasi pada tidak terjaminnya keadilan antarkelompok dan antargenerasi harus mendapatkan perhatian;
5. Dari hasil kajian pengaruh didapatkan 9 program prioritas dan mitigasi nya terhadap isu strategis, terutama program-program yang terkait dengan pembangunan fisik antara lain yaitu

(1) Program pengembangan sentra Industri, (2) Program Penyediaan dan pengelolaan air baku, (3) Program Pembangunan dan Peningkatan sarana dasar perkotaan, (4) Program Pengelolaan Areal Pemakaman, (5) Program pembinaan Pedagang PKL (6) Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, (7) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan, (8) Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, (9) Program pembangunan jalan dan jembatan.

6. Untuk meminimalkan pengaruh/dampak negatif tersebut dirumuskan mitigasi dan alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan;

Telaahan KLHS terhadap RPJMD yang memberikan dampak negatif dan bagaimana Mitigasi atau kegiatan pengurangan dampaknya. Kegiatan Mitigasi tersebut menjadi bagian pembahasan di dalam RPJMD.

Tabel 4.5
Indikasi Program KLHS RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023

NO	Indikasi Program	Dampak	Mitigasi	Program RPJMD
1	Program pengembangan sentra Industri	- Sampah dan limbah cair	- Penataan sarana dan prasarana pencegahan dampak lingkungan	- Program Sentra Industri
		- Pencemaran lingkungan	- Meningkatkan partisipasi paguyuban sentra industr	- Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
		- Lingkungan tidak tertata dan cenderung menjadi kumuh	- Pengawasan terhadap ketentuan yang terdapat dalam izin lingkungan	- Program Perlindungan dan Konservasi SDA
		- Menurunkan jasa pengaturan kualitas udara	- Pengembangan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan	- Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
			- Memanfaatkan sisa area untuk dijadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	- Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas
			- Menyediakan lahan parkir	
2	Program Penyediaan dan	- Penurunan tanah	- Penegakan peraturan dengan	- Program Penyediaan dan



	pengelolaan air baku		melakukan rekomendasi teknis dan pengawasan pengambilan air tanah	Pengelolaan Air Baku
		- Pengurangan jasa penyediaan air bersih	- Penghijauan dilokasi sumber air	- Program Perlindungan dan Konservasi SDA
			- Penambahan kawasan resapan(biopori)	- Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
3	Program Pembangunan dan Peningkatan Sarpras Dasar Perkotaan	- Kerusakan lingkungan	- Penegakkan rekomendasi hasil analisis dampak lingkungan	- Program Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman
		- Meningkatkan pencemaran udara	- Penggunaan teknologi pengolahan sampah yang tepat guna dan ramah lingkungan	- Program pembangunan sarana dan prasarana dasar perkotaan
		- Pengurangan jasa pengaturan kualitas udara	- Meningkatkan partisipasi pedagang pasar	- Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas
		- Meningkatkan kerawanan sosial	- Penyediaan lahan parkir	
		- meningkatkan kemacetan	- Memperhatikan daya dukung dan daya tampung kawasan	
			- Perlu rekayasa lalu lintas	
			- Sosialisasi kepada masyarakat	
4	Program pembinaan PKL	- drainase tdk tertata	- Penggunaan teknologi pengolahan sampah yang tepat guna dan ramah lingkungan	-
		- meningkatnya timbulan sampah dan limbah cair	- Pembuatan drainase (saluran air) untuk mengalirkan air agar tidak menggenangi	- Program Pembinaan pedagang kaki lima



			lingkungan lokasi PKL	
		- meningkatkan pencemaran udara (bau)	- Penyediaan lahan parkir	- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
		- Konflik sosial	- Sosialisasi kepada masyarakat	- Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
		- Penurunan jasa pengaturan iklim		- Program Perlindungan dan Konservasi SDA
		- pengurangan jasa kualitas udara		- Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas
5	Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	- Berpotensi menimbulkan banjir	- Penggunaan teknologi pengolahan sampah yang tepat guna dan ramah lingkungan	- Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
		- Peningkatan sampah dan limbah cair	- Penyediaan RTH kawasan	- Program Perlindungan dan Konservasi SDA
		- Nilai resapan tanah semakin berkurang	- Penataan Sarana dan Prasarana Pencegahan Dampak Lingkungan	- Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
		- Berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan akibat penggunaan material	- Penyediaan lahan parkir	- Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas
		- menurunkan jasa pengaturan kualitas udara		
6	Program peningkatan produksi	- Kerusakan lingkungan	- Memperhatikan sarana produksi pertanian yang	- Program Pengendalian Pencemaran dan



	pertanian/pe rkebunan		ramah lingkungan	Perusakan Lingkungan Hidup
		- pengurangan jasa pengurai limbah	- Pelibatan partisipasi kelompok tani	- Program Perlindungan dan Konservasi SDA
		- penurunan pada kehatan manusia di karenakan penggunaan pestisida		
7	Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	- Pencemaran lingkungan akan meningkat seiring bertambahnya jumlah limbah dari berbagai kegiatan perdagangan, pendidikan, olahraga dan pergudangan.	- Perijinan dan non perijinan harus mematuhi perundangundangan	- Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
		- Kerusakan lingkungan akan meningkat karena pengambilan SDA	- Memperhatikan daya dukung dan daya tampung kawasan	- Program Perlindungan dan Konservasi SDA
		- Alih fungsi lahan pertanian untuk perdagangan, pendidikan, olahraga dan pergudangan.	- Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan yang terdapat dalam izin lingkungan	- Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
		- Munculnya permukiman baru di sekitar kawasan strategis	- Penyediaan RTH kawasan	- Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
		- Berpengaruh terhadap penurunan jasa pangan		
		- Menurunkan jasa pengaturan iklim		

8	Program pembangunan Jalan dan jembatan	<ul style="list-style-type: none"> - Berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan akibat penggunaan material 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan drainase (saluran air) untuk mengalirkan air agar tidak menggenangi lingkungan dan badan jalan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Drainase
		<ul style="list-style-type: none"> - Berkurang atau hilangnya tanaman turus jalan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan area di sekitar lokasi pembangunan jalan dan jembatan sebagai ruang terbuka hijau (RTH) dengan mempertimbangkan keselamatan, kelancaran dan kenyamanan jalan serta area tersebut merupakan ruang milik jalan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
		<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan keanekaragaman hayati 	<ul style="list-style-type: none"> - Penghijauan (turus) di sepanjang koridor jalan dengan tanaman responsif menyerap karbon, memiliki perakaran yang kuat dan memiliki tajuk yang rindang 	<ul style="list-style-type: none"> - Program pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
		<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan bentang alam 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan jalan dengan memperhatikan akses kaum difabel, lansia dan anak-anak 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas
		<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pencemaran lingkungan : kebisingan, polusi udara 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan jalan dengan memperhatikan akses kaum difabel, lansia dan anak-anak 	
		<ul style="list-style-type: none"> - Berpotensi menimbulkan konflik sosial 	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu adanya rekayasa lalu lintas 	
		<ul style="list-style-type: none"> - kemacetan pada saat 		

		pembangunan		
9	Program Pelayanan Angkutan	- menambah pencemaran udara	- Penambahan RTH	- Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
		- Mengurangi jasa kualitas udara	- Operasional Bus harus layak jalan	- Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
		- mengurangi jasa pengurai limbah	- Sosialisasi kepada masyarakat	
		- konflik social di sekitar shelter		

5.2.7 Telaah RPJMD Daerah Tetangga

Kota Pariaman hanya berbatasan langsung dengan Kabupaten Padang Pariaman. Dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah, Kabupaten Padang Pariaman tersebut memiliki keterhubungan sehingga di dalam satu region dapat saling mendukung untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dokumen RPJMD Padang Pariaman tersebut mempunyai visi dan misi yang sama-sama kuat dan mempunyai tujuan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka pencapaian visi tersebut, mereka mempunyai misi yang sebagian lingkup besarnya adalah pembangunan sumber daya manusia, pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan infrastruktur secara keseluruhan, maupun peningkatan kelembagaan pemerintahan.

Pada dokumen RPJMD Padang Pariaman tersebut mempunyai tujuan/sasaran yang melingkupi cakupan permasalahan daerah masing-masing dengan poin penting berupa tujuan dan sasaran yang mengacu pada misi RPJMD masing-masing daerah.

Adapun Visi dan misi dari RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

“ Terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman Yang Baru Religius, Cerdas dan Sejahtera.”

Adapun pengertian empat kunci tersebut adalah:

- 1) **Baru** memiliki arti suatu perubahan wajah, ruang dan suasana Kabupaten Padang Pariaman.
- 2) **Religius** memiliki makna masyarakat yang menjunjung tinggi norma-norma agama, berpegang teguh kepada ajaran agama dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
- 3) **Cerdas** memiliki arti sebagai suatu kondisi masyarakat yang berkualitas dan berilmu pengetahuan.

- 4) **Sejahtera** memiliki arti sebuah kondisi tercapainya taraf kehidupan yang layak dari sisi ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya.

Dalam upaya mewujudkan Visi tersebut, diperlukan sejumlah misi yang dapat menuju pencapaian visi secara terstruktur, maka dirumuskan “Misi Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2021” adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah Adat Bersandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
- 2) Meningkatkan perekonomian Kabupaten Padang Pariaman melalui daya dukung sektor primer dan jasa.
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil melalui peningkatan sarana prasarana dan kualitas tenaga pendidik.
- 4) Meningkatkan potensi daya saing daerah melalui pengembangan pariwisata, transportasi, perdagangan, penataan ruang dan pengelolaan lingkungan.
- 5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan.
- 6) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, melalui Pembinaan aparatur dan Pelayanan Publik.
- 7) Mewujudkan ketahanan bencana melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan kesiapan sarana dan prasarana yang ramah bencana.

Dalam rangka penyelarasan pelaksanaan pembangunan antar daerah dalam Provinsi Sumatera Barat, maka perencanaan pembangunan Kota Pariaman perlu meninjau kebijakan pembangunan daerah sekitarnya melalui dokumen RPJMD. Adapun penyelarasan pembangunan antar di Kota Pariaman hanya dengan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman. Karena Kota Pariaman hanya berbatasan langsung dengan Kabupaten Padang Pariaman.

Pada bagian bab ini yang perlu diperhatikan adalah kebijakan pembangunan yang kolaborasi antara pemerintah Kota Pariaman dengan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman serta yang terpenting sekali adalah memperhatikan hal-hal yang telah dikerjasamakan.

Untuk penyediaan infrastruktur skala regional Pemerintah Kota Pariaman dan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan kesepakatan bersama terkait :

1. Penegasan Batas Administrasi di Wilayah Berbatasan
2. Pembangunan dan Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Regional.
3. Pembangunan dan Pengelolaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Regional
4. Penyediaan Sumber Air Baku/Minum dan Pengelolaan Instalasi Air Minum Regional

5. Pembangunan Infrastruktur di wilayah DAS Berbatasan
6. Pengelolaan sumberdaya di wilayah DAS Berbatasan
7. Pengelolaan Moda Transportasi Darat dan Laut di wilayah Berbatasan
8. Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Sektor Pariwisata
9. Pembangunan di Bidang Ekonomi dan Penanganan Inflasi Daerah

5.2.8 Telaah rancangan teknokratik RPJMN 2019-2024

- a. Visi Pembangunan RPJMN : Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur.
- b. Tema Pembangunan : Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan.
- c. Fokus Pembangunan :
 1. Fokus Pembangunan Manusia meliputi : 1) Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial, 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing, 3) Pembangunan Karakter Bangsa
 2. Fokus Pembangunan Ekonomi meliputi : 1) Energi, 2) Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Digital, 4) Industri Manufaktur, 5) Kelautan dan Kemaritiman.
 3. Fokus Pembangunan Kewilayahan meliputi : 1) Sentra-sentra Pertumbuhan, 2) Komoditas Unggulan Daerah, 3) Pertumbuhan Perkotaan.
 4. Fokus Pembangunan Insfrastruktur meliputi : 1) Transportasi, 2) Telekomunikasi, 3) Sumber Daya Air, 4) Perumahan dan Permukiman
 5. Fokus Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan Politik.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2020 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian 5 (lima) prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;
2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah;
3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;
4. Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup;
5. Stabilitas pertahanan dan keamanan.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) prioritas pembangunan nasional maka arah kebijakan dan program prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:



1. Prioritas Nasional 1: Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, dengan arah kebijakan yaitu:

- a. Meningkatkan keterjangkauan perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan penduduk yang terkendala dokumen kependudukan.
- b. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta.
- c. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas untuk semua penduduk.
- d. Meningkatkan daya tahan ekonomi bagi kelompok miskin dan rentan.
- e. Memajukan kebudayaan dan penguatan karakter untuk mewujudkan bangsa berprestasi.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan.
- b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
- c. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
- d. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
- e. Pengentasan kemiskinan.
- f. Pembangunan budaya, karakter, dan prestasi bangsa.

2. Prioritas Nasional 2: Infrastruktur dan pemerataan wilayah, dengan arah kebijakan yaitu:

- a. Meningkatkan akses hunian, air minum, dan sanitasi yang layak serta terjangkau.
- b. Mengembangkan aksesibilitas transportasi di kawasan 3T yang mempertimbangkan karakteristik wilayah, keterpaduan multimoda, dan mendukung kawasan yang lebih maju.
- c. Meningkatkan standar bangunan dan memperkuat rantai pasokan konstruksi melalui inovasi kebencanaan.
- d. Membangun infrastruktur transportasi yang mampu meningkatkan konektivitas dan menjangkau seluruh wilayah serta terhubung dengan kawasan prioritas dan sistem jaringan utama logistik.
- e. Mengembangkan angkutan massal perkotaan berbasis rel dan jalan yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan.

- f. Membangun infrastruktur serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta penyiaran melalui transformasi digital.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Perluasan infrastruktur dasar.
- b. Penguatan infrastruktur kawasan tertinggal dan ketahanan bencana.
- c. Peningkatan konektivitas multimoda dan antarmoda mendukung pertumbuhan ekonomi.
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan.
- e. Perluasan teknologi informasi dan komunikasi.

3. *Prioritas Nasional 3: Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja, dengan arah kebijakan yaitu:*

- a. Meningkatkan kapasitas pemanfaatan peluang usaha dan pengelolaan UMKM.
- b. Mempercepat transformasi struktural.
- c. Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing.
- d. Menurunkan defisit neraca transaksi berjalan untuk menjaga stabilitas ekonomi.
- e. Membangun ekosistem yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan kewirausahaan dan UMKM.
- b. Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil.
- c. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja.
- d. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
- e. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

4. *Prioritas Nasional 4: Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup, dengan arah kebijakan yaitu:*

- a. Meningkatkan EBT untuk memenuhi kebutuhan energi.
- b. Meningkatkan produktivitas pangan dalam menjamin stabilitas ketersediaan pangan berkualitas.
- c. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air.

- d. Meningkatkan daya dukung, daya tampung serta mitigasi dampak dan bahaya perubahan iklim.
- e. Mengoptimalkan pembangunan berketahanan bencana.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan.
- b. Peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air.
- c. Pemenuhan kebutuhan energi baru dan terbarukan (EBT).
- d. Peningkatan daya dukung SDA dan daya tampung lingkungan.
- e. Penguatan ketahanan bencana.

5. *Prioritas Nasional 5: Stabilitas pertahanan dan keamanan, dengan arah kebijakan yaitu:*

- a. Meningkatkan posisi kekuatan pertahanan.
- b. Meningkatkan stabilitas kawasan dan kerja sama pembangunan internasional.
- c. Menegakkan hukum dan anti korupsi.
- d. Membasmi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan terorisme serta gangguan kamtibmas.
- e. Meningkatkan keamanan siber.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kemampuan pertahanan.
- b. Peningkatan diplomasi politik dan kerja sama pembangunan internasional.
- c. Penguatan sistem peradilan dan upaya anti korupsi.
- d. Penanggulangan terorisme, peningkatan keamanan siber, dan penguatan keamanan laut.
- e. Penanggulangan narkoba dan penguatan Kamtibmas

5.3 Isu-isu Strategis Pembangunan Daerah

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut: 1) Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional; 2) Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah; 3) Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap publik; 4) Memiliki daya dorong untuk pembangunan daerah; 5) Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan 6) Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap isu internasional, isu dan kebijakan nasional, isu dan kebijakan Provinsi Sumatera Barat, telaah RPJPD Kota Pariaman, telaah RTRW Kota Pariaman, perbandingan dengan Kabupaten tetangga, serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Pariaman, maka isu dan kebijakan serta permasalahan pembangunan yang ada selama beberapa periode pembangunan perlu dikaji kembali untuk penetapan isu strategis Kota Pariaman pada pelaksanaan pembangunan periode 2018-2023 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Pembangunan sektor pendidikan mempunyai peran penting dalam peningkatan pelayanan dasar SDM. Untuk mewujudkan hal ini, dilakukan melalui peningkatan aksesibilitas, kelembagaan, sumber daya manusia dan tata laksana yang meliputi penyediaan prasarana dan sarana sesuai standar, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, pengelolaan sistem pendidikan yang berkualitas, termasuk pendidikan karakter, pengembangan nasionalisme substansi, dan pendidikan inklusi.

2. Peningkatan Kualitas Kesehatan

Peningkatan kualitas pembangunan kesehatan merupakan pelayanan dasar salah satu pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan kesehatan dilakukan melalui peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata kelola meliputi antara lain melalui peningkatan kualitas prasarana dan sarana kesehatan, kualitas tenaga medis dan paramedis, perbaikan sistem pelayanan dengan memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat Kota Pariaman termasuk masyarakat miskin. Pembangunan kesehatan juga diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan peningkatan perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat.

Peningkatan kualitas kesehatan akan dilaksanakan melalui Misi II RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 yaitu Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berkualitas dan Berbudaya. Tujuan yang

ingin dicapai adalah Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya, dengan sasaran Meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat.

3. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta meningkatnya kearifan budaya lokal. Peningkatan pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, rasa aman dan tentram serta adil dalam segala bidang; penguatan karakter berbasis kearifan lokal, penguatan nilai-nilai kebangsaan dan budi pekerti; pelestarian dan pengembangan seni budaya.

Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat akan dilaksanakan melalui Misi V RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 yaitu Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif Yang Berbasis Lokal. Tujuan yang ingin dicapai adalah Meningkatkan Daya Saing Masyarakat, dengan sasaran Meningkatkan Perlindungan Sosial Masyarakat.

4. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran

Kemiskinan adalah kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari secara layak. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan krusial di Kota Pariaman mengingat terdapat 5,20 % penduduk Kota Pariaman yang terkategori miskin pada tahun 2017 menurut BPS. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kurangnya kesempatan kerja, beban ekonomi keluarga, keterbatasan akses permodalan, tingkat pendidikan yang rendah. Pengangguran merupakan salah satu permasalahan krusial di kawasan perkotaan termasuk Kota Pariaman.

Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran akan dilaksanakan melalui Misi II RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 yaitu Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas dan Misi V yaitu Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif Yang Berbasis Lokal. Tujuan yang ingin dicapai adalah Meningkatkan Daya Saing Masyarakat, dengan sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan dan Meningkatkan Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja. Pembangunan penanganan kemiskinan melalui gerakan bersama penanggulangan kemiskinan daerah secara komprehensif dan terpadu. Sedangkan penanganan pengangguran dilakukan melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan kemampuan dan keterampilan pencari kerja agar memiliki daya saing serta perluasan jaringan kerja.

5. Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal

Pelestarian nilai-nilai budaya lokal di Kota Pariaman merupakan salah satu isu yang perlu diperhatikan, mengingat kondisi sosial budaya saat ini sudah banyak terpengaruh arus globalisasi.

Hal yang dilakukan Pemerintah Kota Pariaman dalam melestarikan seni dan budaya yang berbasis kearifan lokal yaitu dengan pengembangan nilai budaya serta melestarikan kekayaan cagar budaya yang ada di Kota Pariaman. Hal ini akan dijawab pada Misi I RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 yaitu Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berkualitas dan Berbudaya. Tujuan yang ingin dicapai adalah Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya, dengan sasaran Meningkatnya Kearifan Budaya Lokal.

6. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

Prioritas utama Kota Pariaman dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan meliputi kapabilitas, integritas, akuntabilitas, ketaatan pada hukum, kredibilitas dan transparansi. Langkah utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas di Kota Pariama dilakukan melalui penciptaan struktur pemerintah yang efisien, peningkatan kapasitas aparatur dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang lebih baik melalui peningkatan ketersediaan dan kualitas data.

Fokus Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman terkait dengan meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan Kepala Daerah melalui evaluasi tingkat maturitas SPIP maupun tingkat leveling kapabilitas APIP, meningkatkan integritas dan kapabilitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Peningkatan pengendalian dan pengelolaan keuangan dan aset daerah juga menjadi fokus lain dari pembenahan reformasi dan birokrasi di Kota Pariaman. Peningkatan reformasi birokrasi termasuk didalamnya adalah peningkatan pelayanan publik melalui penguatan sistem dan akses pelayanan berbasis teknologi informasi yang terpadu (smart city); pelayanan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, inklusif dan berkualitas dengan pembangan Mall Pelayanan Publik.

Isu Strategis Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi akan dijawab melalui Misi III RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 yaitu Mewujudkan Pemerintahan Yang Prima Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik berbasiskan Smart City. Tujuan yang ingin dicapai adalah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani, dengan sasaran Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Melayani.

7. Peningkatan Tata Ruang Dan Kualitas Lingkungan Hidup

Pembangunan tata ruang dan kualitas lingkungan hidup untuk mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan, mewujudkan ruang kota yang berkualitas. Pembangunan tata ruang dan kualitas lingkungan hidup mencakup ketersediaan produk hukum pengaturan tata ruang (RTRW, RDTRK, zonasi) yang dapat dijadikan

acuan dalam membangun ruang kota, peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan ruang dan daya dukung lingkungan.

Isu Strategis Peningkatan Tata Ruang dan Kualitas Lingkungan Hidup akan dijawab melalui Misi IV RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 yaitu Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana. Tujuan yang ingin dicapai adalah Terwujudnya Pembangunan Kota yang Tangguh, Produktif dan Berkelanjutan, dengan sasaran Terwujudnya Tata Ruang yang Berdaya Guna serta Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas.

8. Peningkatan Infrastruktur yang Tangguh, modern, dan Berkelanjutan serta Mitigasi Bencana.

Pembangunan infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan mengandung pengertian dimana pembangunan infrastruktur tidak hanya untuk kepentingan generasi saat ini, namun juga generasi yang akan datang serta mampu merespon perubahan situasi yang terjadi. Pembangunan infrastruktur menyangkut kinerja pelayanan infrastruktur kota yang baik dengan tetap memerhatikan kualitas lingkungan hidup, sarana dan prasarana dasar permukiman yang berkualitas serta meningkatnya ketangguhan bencana.

Peningkatan infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan akan dilaksanakan melalui Misi I dan Misi IV RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 yaitu Mewujudkan Wisata Kota Pesisir Yang Maju, Religius, Tertib dan Berbudaya Terbaik di Sumatra dan Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana. Tujuan yang ingin dicapai adalah Terwujudnya Pembangunan Kota yang Tangguh, Produktif dan Berkelanjutan, dengan sasaran terwujudnya tata ruang yang berdaya guna, meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur kota, terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas, terwujudnya sarana dan prasarana dasar permukiman yang berkualitas serta meningkatnya ketangguhan bencana.

9. Peningkatan Ekonomi dan Sektor Pariwisata sebagai Daya Saing Daerah.

Struktur perekonomian daerah Kota Pariaman yang didominasi oleh sektor pertanian, sektor konstruksi dan industri pengolahan, walaupun disadari sektor pertanian dari tahun sebelumnya mengalami kontribusi yang sedikit menurun yang disebabkan karena mulai naiknya sektor Perdagangan, Jasa dan Pariwisata. Pada satu sisi sektor ini memberikan dampak positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi daerah. Di sisi lain perekonomian yang didominasi oleh sektor konstruksi

dan industri pengolahan strukturnya relatif lemah dan sangat rawan terhadap adanya gejolak perekonomian. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan ekonomi kerakyatan yang berbasis sumber daya dan potensi lokal berupa usaha mikro dan koperasi harus lebih ditingkatkan produktifitasnya agar dapat berperan lebih signifikan dalam perekonomian daerah.

Beberapa permasalahan pada bidang pariwisata yaitu:

1. Belum menguatnya pariwisata sebagai pendorong terciptanya perekonomian inklusif.
2. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kota Pariaman masih kecil.
3. Jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan belum menunjukkan performa yang sesuai dengan potensinya.

Kondisi yang menjadi akar masalah masih belum optimalnya perkembangan pariwisata, yaitu:

1. Terbatasnya atraksi di destinasi wisata yang menekan lama kunjung wisatawan..
2. Belum terinternalisasinya nilai-nilai hospitality di masyarakat.
3. Belum maksimalnya analisa pasar wisatawan, branding dan aktivitas promosi
4. Belum berkembangnya produk ekonomi kreatif lokal

Isu Strategis Peningkatan Ekonomi dan Daya Saing Daerah akan dijawab melalui Misi I dan Misi V RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 yaitu Mewujudkan Wisata Kota Pesisir Yang Maju, Religius, Tertib dan Berbudaya Terbaik di Sumatra dan Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif Yang Berbasis Lokal. Tujuan yang ingin dicapai adalah Meningkatnya Daya Saing Perekonomian Daerah, dengan sasaran Meningkatnya Nilai Perdagangan dan Jasa Unggulan serta Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Lokal.



BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB V**VISI, MISI, TUJUAN
DAN SASARAN****5.1 Visi Pembangunan Daerah**

VISI adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan atau Visi juga dapat diartikan gambaran perwujudan masa depan yang diinginkan. Adapun tujuan ditetapkannya visi antara lain untuk memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategik dan menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam organisasi serta menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi pembangunan daerah Kota Pariaman untuk periode RPJMD 2018-2023 sesuai dengan Visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

" Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa, Yang Religius Dan Berbudaya"

Memperhatikan Visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kota Pariaman dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global.

Visi tersebut mengandung maksud bahwa Pariaman sebagai kota kecil berwawasan lingkungan akan menjadi kota yang handal dan maju dalam wisata, perdagangan dan jasa, yang religious dan berbudaya dengan dukungan infrastruktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan dukungan pengembangan politik, keamanan, sosial, ekonomi, agama dan budaya.

Untuk memahami Visi Pembangunan Kota Pariaman tersebut jelaskan pengertian sebagai berikut:

Kota Wisata : Kota Pariaman diarahkan sebagai kota tujuan wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun domestik. Dengan gerakan yang menyatukan seluruh potensi daerah dan



stakeholder dalam penyediaan sarana pariwisata dan prasarana wisata atau fasilitas umum sehingga menarik wisatawan untuk datang ke destinasi wisata yang disediakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perdagangan dan Jasa : mengandung arti bahwa Kota Pariaman akan menjadi Kota Perdagangan dan Jasa yang maju, yang didukung oleh kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap memperhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan Kota Pariaman. Kota Pariaman yang maju dalam perdagangan dan jasa dapat terlihat antara lain melalui laju pertumbuhan ekonomi yang tiap tahun terus meningkat, kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB dan kontribusi kategori Industri Pengolahan serta terhadap PDRB yang semakin meningkat serta nilai investasi yang semakin besar

Religius : mengandung arti bahwa masyarakat Kota Pariaman meyakini kebenaran ajaran Agama Islam serta mengamalkannya dalam wujud keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tindakan nyata dalam keseharian, dengan menjunjung tinggi toleransi dan kepedulian dalam menjalankan kehidupannya.

Berbudaya : mempunyai arti bahwa setiap perilaku kehidupan masyarakat yang dilandasi oleh etos kerja, tata cara, adat istiadat, tradisi, kearifan lokal, norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta diyakini sebagai nilai-nilai budi pekerti yang luhur yang diwujudkan dalam perilaku interaksi sosial sebagai identitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

5.2. Misi Pembangunan Daerah

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Atau MISI adalah kondisi yang harus dipenuhi agar visi yang telah ditetapkan diatas dapat tercapai dengan memperhatikan kondisi objektif daerah.

Dalam rangka mewujudkan visi jangka menengah Kota Pariaman sebagai Kota Wisata, Perdagangan, Jasa, Yang Religius Dan Berbudaya" maka misi Kota Pariaman dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Wisata Kota Pesisir Yang Maju, Religius, Tertib dan Berbudaya Terbaik di Sumatra;
2. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berkualitas dan Berbudaya;
3. Mewujudkan Pemerintahan Yang Prima Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik berbasis Smart City;
4. Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana;
5. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif Yang Berbasis Lokal.

Lima butir misi diatas didasarkan kepada kebutuhan pembangunan yang telah di temakan dalam bentuk Visi pembangunan daerah. Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap misi tersebut serta mengurangi potensi ambiguitas dalam memahami butir misi, maka penjabaran Misi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut;

1. **Mewujudkan Wisata Kota Pesisir Yang Maju, Religius, Tertib dan Berbudaya Terbaik di Sumatra**

Pembangunan diprioritaskan pada pembangunan destinasi wisata dan peningkatan pengelolaan wisata yang maju, religius, tertib dan berbudaya dengan cara meningkatkan daya saing pariwisata adalah bagaimana cara menarik minat para wisatawan untuk datang berkunjung yang tentunya akan mendatangkan devisa dan menciptakan nilai tambah *multipliers effect* terhadap akselerasi pembangunan daerah. Kota Pariaman yang kaya akan nilai sejarah, seni dan budaya dapat dikembangkan untuk tujuan pelestarian sejarah, seni dan budaya islam. Semua daya pesona tersebut memberi nilai tambah diiringi dengan usaha minat wisatawan untuk menikmati berbagai objek wisata serta hasil industri kreatif yang ada. Selain itu perlu jaminan wisata yang mempertahankan nilai-nilai agama dan budaya yang tertib.

2. **Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berkualitas dan Berbudaya**

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi serta menjunjung tinggi budaya asli Kota

Pariaman. Misi membangun sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi, berbudaya, dan berkualitas melalui penguasaan iptek serta memiliki etos kerja yang tinggi ditandai dengan meningkatnya status kesehatan dan taraf pendidikan masyarakat dengan ukuran penilaian dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pengembangan dan Peningkatan mutu SDM dapat dilihat dari tiga dimensi, yaitu kualitas pendidikan yang bermutu tinggi disemua strata, perkembangan IPTEK yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan derajat kesehatan yang tinggi dan merata keseluruh pelosok daerah dan lapisan masyarakat. Termasuk dalam kualitas sumberdaya manusia ini adalah adanya disiplin dan etos kerja yang tinggi serta terdapatnya kesetaraan gender sehingga produktivitas tinggi tersebut mampu memanfaatkan peluang, dapat menghadapi tantangan dan siap mengantisipasi kompetisi global.

3. Mewujudkan Pemerintahan Yang Prima Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Smart City.

Misi ini diarahkan untuk membangun tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan pada pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, efektif, efisien dan akuntabel dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dengan berbasis Smart City.

4. Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana;

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan Kota Pesisir Yang Modern yang ditunjukkan dengan peningkatan kualitas infrastruktur, pengembangan water front city, peningkatan pendapatan masyarakat yang lebih tinggi dan merata dengan mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat pesisir yang lebih produktif berbasis kerakyatan, mendorong sektor unggulan daerah dan memanfaatkan sumberdaya lokal untuk menghasilkan produk yang berdaya saing. Dengan tetap memperhatikan pembangunan yang dinamis, berwawasan lingkungan hidup serta mitigasi bencana.

5. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif Yang Berbasis Lokal.

Misi ini diarahkan pada peningkatan kemampuan perekonomian daerah dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, berorientasi pada ekonomi kerakyatan dan sektor ekonomi basis yang mempunyai daya saing baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional serta meningkatkan

investasi pada sektor industri kecil dan menengah untuk menyerap tenaga kerja yang didukung oleh keberadaan kawasan industri dan perdagangan serta dibangunnya sentra-sentra industri kecil dan rumah tangga.

5.3 Tujuan Dan Sasaran

Untuk mencapai kelima misi pembangunan Kota Pariaman dalam jangka menengah, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi tersebut. Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran operasional untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi.

Perumusan tujuan adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (policy planning) yang memiliki titik kritis (critical point) dalam penyusunan RPJMD.

Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran. Perumusan tujuan dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih juga menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Berangkat dari pada Visi dan Misi tersebut maka dapat dirumuskan Tujuan dan Sasaran sebagaimana dijelaskan dibawah ini.

1. Dalam rangka pencapaian Misi Mewujudkan Wisata Kota Pesisir Yang Maju, Religius, Tertib dan Berbudaya Terbaik di Sumatra, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan Sektor Pariwisata Dalam Perekonomian, dengan sasaran pembangunan:
 - 1) Terwujudnya Daya Saing Wisata.

2. Dalam rangka pencapaian misi Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berkualitas dan Berbudaya, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan Kualitas SDM, dengan sasaran pembangunan:
 - 1) Meningkatnya Kualitas Pendidikan
 - 2) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
 - 3) Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat
 - 4) Menurunnya Angka Kemiskinan Dan Pengangguran
 - 5) Meningkatnya Kemandiran Desa
3. Mewujudkan Pemerintahan Yang Prima Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik berbasis Smart City, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi, dengan sasaran pembangunan :
 - 1) Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintahan
4. Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana; maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan serta Mitigasi Bencana, dengan sasaran sebagai berikut :
 - 1) Meingkatnya Kualitas Infrastruktur
 - 2) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
 - 3) Meningkatnya Mitigasi Bencana
 - 4) Terwujudnya Rasa Tertib dan Aman Dalam Kehidupan bermasyarakat
5. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif Yang Berbasis Lokal, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang bertumpu ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif untuk meningkatkan daya saing Kota Pariaman, dengan sasaran pembangunan:
 - 1) Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk
 - 2) Meningkatnya Nilai Investasi
 - 3) Meningkatnya peran industri dan perdagangan serta jasa dalam stabilitas perekonomian



5.4 Konsistensi Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD menjadi tuntutan yang perlu diperhatikan. Konsistensi penjabaran Visi dan Misi kedalam Tujuan dan Sasaran menentukan efektivitas pembangunan daerah sesuai dengan amanat pembangunan yang tertuang dalam Visi dan Misi Walikota terpilih. Berangkat dari tuntutan tersebut, maka dapat dijabarkan konsistensi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut kedalam matriks berikut ini.



Tabel: 5.1
Matriks Konsistensi Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

No	Visi : " Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa Yang Religius Dan Berbudaya"				Indikator Sasaran		Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir		
	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran					2018	2019	2020	2021	2022		2023	
1	Mewujudkan Wisata Kota Pesisir Yang Maju, Religius, Tertib dan Berbudaya terbaik Sumatra	1	Meningkatkan Sektor Pariwisata Dalam Perekonomian	Presentase Sektor Pawisata Terhadap PDRB (2018 : 12 %) (2023 : 15 %)	1	Terwujudnya Daya Saing Wisata	1	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata	%	4,0	5,0	5,2	5,4	5,6	5,8	5,8
							2	Presentase Pertumbuhan Spending Of Money	%	NA	3,5	4,5	5,00	5,25	5,50	5,50
2	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berkualitas dan Berbudaya	2	Meningkatkan Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (2018 : 76,26) (2023 : 79,01)	2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	3	Angka Harapan Lama Sekolah	tahun	14,52	14,56	14,60	14,64	14,68	14,72	14,72
							4	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	10,36	10,60	10,90	11,30	11,60	12,00	12,00
							5	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	69,87	70,07	70,30	70,60	71,00	71,50	71,50
							6	Indeks Keluarga Sehat	Nilai	NA	0,145	0,155	0,165	0,175	0,185	0,185
							7	Indeks Daya Beli Masyarakat	(Juta/Rp)	12,4	12,7	13,1	13,6	14,2	14,8	14,8
					5	Menurunnya angka kemiskinan	8	Angka Kemiskinan	%	5,03	4,80	4,50	4,20	3,90	3,50	3,50



					dan Pengangguran												
						9	Angka Pengangguran	%	5,72	5,47	5,10	4,80	4,40	3,90	3,90		
					6	Meningkatnya Kemandirian Desa	10	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,6837	0,6850	0,6880	0,6920	0,6960	0,6980	0,6980	
3	Mewujudkan Pemerintahan Yang Prima Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Smart City	3	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi	Indeks RB (2018 : 45 %) (2023 : 75 %)	7	Meningkatnya Kapasitas tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan	11	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Kategori	CC	B	BB	BB	A	A	A	
							12	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	78,80 (Baik)	80,25 (Baik)	82,40 (Baik)	84,50 (Baik)	86,65 (Baik)	88,35 (Sangat Baik)	88,35 (Sangat Baik)	
							13	Opini WTP BPK Terhadap LKPD	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
							14	Indeks SPBE	Skor	2,61	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,1	
4	Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana	4	Terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan serta Mitigasi Bencana	% Pencapaian Target SDG's (2018 : 40 %) (2023 : 70 %)	8	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	15	Indeks Infrastruktur Daerah	Nilai	55,50	60,20	65,45	70,50	75,20	80,15	80,15	
						9	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	16	Indeks Kualitas Lingkungan	%	60,40	64,42	66,00	68,50	69,20	70,10	70,10
						10	Meningkatnya Mitigasi	17	Indeks Resiko Bencana	Kategori	171 (Tinggi)	171 (Tinggi)	171 (Tinggi)				



						Bencana)			
					11	Terwujudnya rasa tertib dan aman dalam kehidupan Masyarakat	18	Indeks Ketentraman dan ketertiban	Nilai	60,2	62,4	64,6	66,7	68,5	70,4	70,4
5	Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif Yang Berbasis Lokal	5	Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang bertumpu ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif untuk meningkatkan daya saing kota Pariaman	Angka Pertumbuhan Ekonomi (2018 : 5,51 %) (2023 : 6,20 %)	12	Menurunnya Ketimpangan pendapatan antar penduduk	19	Indeks Gini (Gini Ratio)	%	0,316	0,285	0,265	0,240	0,225	0,200	0,20
					13	Meningkatnya Nilai Investasi	20	Laju Pertumbuhan Investasi	%	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,0
					14	Meningkatnya peran industri dan perdagangan serta jasa dalam stabilitas perekonomian	21	Laju pertumbuhan Sektor Industri (%)	%	1,1	1,15	1,2	1,3	1,4	1,5	1,5
							22	Laju pertumbuhan Sektor Perdagangan dan Jasa (%)	%	1,8	2	2	2	2,5	2,5	2,5



BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VI**STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN
DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Pariaman Sebagai "**Kota Wisata, Perdagangan, Jasa, Yang Religius Dan Berbudaya**", memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun mulai 2018 sampai dengan 2023. Arah kebijakan memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Rumusan strategi dan arah kebijakan dalam mendukung tujuan dan sasaran pembangunan Kota Pariaman ditunjukkan pada Tabel 6.1.

Rumusan strategi dan arah kebijakan dalam mendukung tujuan dan sasaran pembangunan Kota Pariaman ditunjukkan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1.
Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Visi : " Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa Yang Religius Dan Berbudaya"							
Misi 1 : Mewujudkan Wisata Kota Pesisir Yang Maju, Religius, Tertib dan Berbudaya terbaik Sumatra							
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
1	Meningkatkan Sektor Pariwisata Dalam Perekonomian	1	Terwujudnya Daya Saing Wisata	1	Perwilayahan Pembangunan DPN	1	Perencanaan Pembangunan DPN dan KSPN
						2	Penegakan regulasi Pembangunan DPN dan KSPN
						3	Pengendalian implementasi Pembangunan DPN dan KSPN
				2	Pembangunan Daya Tarik Wisata	1	Perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan DPN dan pengembangan daerah
						2	Pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada
						3	Pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas
						4	Revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan DPN
				3	Pembangunan Aksesibilitas	1	Pengembangan dan peningkatan kemudahan



					Pariwisata		akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPN
						2	Pengembangan dan peningkatan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPN
						3	Pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPN
				4	Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata	1	Pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPN
						2	Peningkatan Prasarana Umum, kualitas Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPN
						3	Pengendalian Prasarana Umum, Pembangunan Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung
				5	Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata	1	Pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui Pembangunan Kepariwisata
						2	Optimalisasi pengarusutamaan gender melalui Pembangunan



							Kepariwisataan
						3	Peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata
						4	Penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang Kepariwisataan
						5	Perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal
						6	Peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal
						7	Peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapa pesona untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisataan setempat
				6	Pengembangan investasi di bidang pariwisata	1	Peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata
						2	Peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata
Adapun program yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran diatas adalah :							



1	Program pengembangan destinasi pariwisata
2	Program Peningkatan Pelestarian Kebudayaan
3	Program Pembangunan SDM Pariwisata
4	Program Pemberdayaan dan Penguatan Eksistensi Lembaga-Lembaga Adat Seni dan Budaya
5	Program Pengembangan Daya Tarik Wisata
6	Program Pembangunan Fasilitas Pariwisata
7	Program Pengembangan Citra Pariwisata
8	Program Pengembangan Promosi Pariwisata
9	Program Pengembangan Kemitraan Promosi Pariwisata
10	Program Pengendalian Perpikiran

Misi 2 : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berkualitas Dan Berbudaya

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
2	Meningkatkan Kualitas SDM	2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1	Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar	1	Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran Sekolah Dasar (SD)
						2	Meningkatkan Pendidikan Agama Berbasis Afeksi
						3	Meningkatkan Akreditasi Sekolah SD
						4	Meningkatkan Prestasi Siswa dan Sekolah SD
				2	Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1	Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)
						2	Meningkatkan Pendidikan Agama Berbasis Afeksi
						3	Meningkatkan Akreditasi Sekolah SMP
						4	Meningkatkan Prestasi Siswa dan Sekolah SMP
				3	Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah	1	Melaksanakan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK)



					Non Formal dan Informal		Paket A, B dan C
						2	Meningkatkan Pembinaan Taman Bacaan Masyarakat atau Pustaka Yang Ada Di Desa
						3	Meningkatkan Pemberdayaan Pendidikan Masyarakat Berbasis Desa/Kelurahan
						4	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
						5	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Vokasional
						6	Meningkatkan Akreditasi Lembaga Kursus dan Pendidikan Non Formal
				4	Peningkatan Pengembangan Pendidikan	1	Meningkatkan Kualitas Pendidik dan Tenaga Pendidikan
						2	Meningkatkan Pengelolaan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
						3	Meningkatkan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
						4	Meningkatkan pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan
						5	Meningkatkan pengelolaan sekolah inklusi
				5	Peningkatan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan	1	Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan



						2	Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan keliling
						3	Meningkatkan kapasitas pengelola perpustakaan kota, sekolah dan khusus
						4	Meningkatkan budaya gemar membaca
				6	Optimalisasi pelestarian koleksi pustaka dan data informasi perpustakaan	1	Meningkatkan pengelolaan koleksi pustaka
						2	Meningkatkan jumlah judul bahan pustaka
						3	Meningkatkan pengelolaan sistem perpustakaan
Adapun program yang diperlukan untuk mencapai sasaran diatas adalah :							
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini						
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun						
3	Program Pendidikan Non Formal						
4	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan						
5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan						
6	Program Fasilitasi Keagamaan dan Kemasyarakatan						
7	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan						
		3	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	Peningkatan pelayanan kesehatan dasar	1	Meningkatkan kepuasan layanan kesehatan puskesmas
				2	Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan	1	Meningkatkan pelayanan kesehatan rumah sakit Pratama
				3	Peningkatan upaya pelayanan kesehatan	1	Meningkatkan penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan
						2	Meningkatkan Kepastian Kepemilikan Jaminan



							Kesehatan Nasional (JKN) bagi Warga Kota Pariaman
						3	Meningkatkan fasilitas kesehatan terakreditasi milik pemerintah
						4	Meningkatkan fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah Dalam Memenuhi Standar
						5	Mengoptimalkan cakupan penanganan kegawat daruratan kesehatan
						6	Menambahkan layanan puskesmas 24 jam dengan layanan rawat inap persalinan
				4	Peningkatan regulasi dan pengembangan sumber daya kesehatan	1	Meningkatkan fasilitas kesehatan sesuai standar
						2	Meningkatkan tenaga kesehatan yang berijin
						3	Meningkatkan tenaga kesehatan sesuai kompetensi
						4	Meningkatkan ketersediaan obat, vaksin dan alkes
						5	Mengendalikan penggunaan obat rasional di puskesmas
				5	Peningkatan kesehatan masyarakat	1	Mengoptimalkan pelayanan antenatal sesuai standar untuk ibu hamil
						2	Mengoptimalkan pelayanan persalinan sesuai standar
						3	Mengoptimalkan Pelayanan Sesuai Standar Bagi Bayi Yang



							Baru Lahir
						4	Mengoptimalkan pelayanan kesehatan sesuai standar untuk balita
						5	Mengoptimalkan Anak Pada Usia Pendidikan Dasar Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar
						6	Meingkatkan penduduk usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
						7	Meningkatkan jumlah wilayah dalam melaksanakan KTR
						8	Mengoptimalkan cakupan Desa/kelurahan siaga aktif (Mandiri)
						9	Meningkatkan rumah, tempat-tempat umum (TTU), tempat pengelolaan makanan (TPM) dalam memenuhi syarat kesehatan
						10	Meningkatkan kualitas air minum yang memenuhi kesehatan
				6	Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit	1	Mengoptimalkan pelayanan TB sesuai standar bagi penderita TB
						2	Mengoptimalkan layanan pemeriksaan bagi orang yang berisiko terinfeksi HIV AIDS
						3	Mengoptimalkan cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
						4	Meningkatkan cakupan desa/kelurahan Universal



							Child Immunization (UCI)
						5	Meningkatkan penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar
						6	Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi sesuai standar
						7	Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi penderita diabetes melitus sesuai standar
						8	Mengoptimalkan cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
				7	Pengendalian penduduk	1	Meningkatkan edukasi pengendalian penduduk bagi aparatur, remaja dan masyarakat
						2	Meningkatkan pengelolaan Data, Advokasi, dan Komunikasi Informasi Edukasi
				8	Peningkatan keluarga berencana dan pembangunan ketahanan keluarga	1	Meningkatkan pelayanan fasilitas kesehatan keluarga berencana (KB)
						2	Meningkatkan kepesertaan KB
						3	Meningkatkan pembinaan pendewasaan usia perkawinan
						4	Meningkatkan edukasi kesehatan reproduksi
						5	Meningkatkan ketahanan keluarga melalui BKB, BKR, Bina keluarga lansia
Adapun program yang diperlukan untuk mencapai sasaran diatas adalah :							



1	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan						
2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat						
3	Program Pengawasan Obat dan Makanan						
4	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat						
5	Program Perbaikan Gizi Masyarakat						
6	Program Pengembangan Lingkungan Sehat						
7	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular						
8	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan						
9	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan						
10	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita						
11	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia						
12	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak						
13	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular						
14	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata						
15	Program pelayanan kesehatan Rujukan						
16	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan						
17	Program Keluarga Berencana						
18	Program Kesehatan Reproduksi Remaja						
19	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan						
20	Program pelayanan kontrasepsi						
21	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan						
22	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri						
23	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak						
24	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat						
25	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR						
26	Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga						
		4	Meningkatnya Pendapatan Perkapita	1	Peningkatan ketahanan pangan	1	Peningkatan ketahanan pangan Meningkatkan pembinaan ketersediaan



			Masyarakat				dan distribusi pangan
						2	Meningkatkan pembinaan pola konsumsi dan kewaspadaan pangan
				2	Peningkatan pembinaan budidaya dan produk kehewan dan perikanan	1	Meningkatkan pembinaan budidaya peternakan dan perikanan
						2	Meningkatkan mutu dan keamanan produk hasil peternakan dan perikanan
				3	Peningkatan pembinaan budidaya dan produk hasil pertanian	1	Meningkatkan pembinaan budidaya pertanian
						2	Meningkatkan mutu dan keamanan produk hasil pertanian
Adapun program yang diperlukan untuk mencapai sasaran diatas adalah :							
1.	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif						
2.	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan						
3.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah						
4.	Program pengembangan industri kecil dan menengah						
5.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah						
6.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi						
7.	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri						
		5	Menurunnya Angka Kemiskinan dan Pengangguran	1	Mempercepat Penanggulangan kemiskinan secara terpadu	1	Meningkatkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial Meningkatkan
						2	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin



						3	Meningkatkan PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial
						4	Peningkatan advokasi dan rehabilitasi sosial
				4.	Perluasan kesempatan kerja dan Peluang Usaha	1	Peningkatan jaringan tenaga kerja
						2	Peningkatan ketrampilan masyarakat
						3	Meningkatkan Kapasitas dan Keterampilan Angkatan Kerja yang berbasis digital dan teknologi untuk memenuhi Kebutuhan Pasar
Adapun program yang diperlukan untuk mencapai sasaran diatas adalah :							
1	Program Penanganan PMKS						
2	Program Penguatan PSKS						
3	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja						
4	Program Peningkatan Kesempatan Kerja						
5	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan						
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial						
		6	Meningkatnya Kemandirian Desa	1	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	1	Meningkatkan kelembagaan kemasyarakatan
						2	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
						3	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat berbasis Desa/Kelurahan
				2	Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan	1	Mengoptimalkan organisasi perempuan



					Perempuan		
						2	Meningkatkan penanganan terhadap perempuan korban kekerasan
						3	Meningkatkan layanan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
				3	Peningkatan Perlindungan Anak	1	Meningkatkan pengarusutamaan hak anak
						2	Meningkatkan penanganan terhadap anak korban kekerasan
						3	Fasilitasi Taman Pendidikan Anak
				4	Peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan	1	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
						2	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat
						3	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat
						4	Meningkatkan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat
Adapun program yang diperlukan untuk mencapai sasaran diatas adalah :							
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan						
2	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan						



3	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
4	Program Pengelolaan Keragaman Budaya
5	Program peningkatan kemampuan teknologi industri
6	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
7	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
8	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan

Misi 3 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Prima Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Smart City

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
3	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	7	Menigkatnya Kapasitas tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	1	Peningkatan penyelenggaraan tata pemerintahan	1	Meningkatkan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
						2	Meningkatkan Pengawasan Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan
						3	Meningkatkan fasilitasi peringatan hari besar keagamaan
						4	Meningkatkan Pemantapan Nasionalisme Ormas dan Organisasi Keagamaan
				2	Penataan peraturan perundang-undangan dan pelayanan hukum	1	Meningkatkan kualitas penyusunan peraturan perundangundangan
						2	Mengoptimalkan fasilitasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dengan DPRD
						3	Meningkatkan kualitas layanan konsultasi hukum dan penyelesaian sengketa hukum
						4	Meningkatkan pembinaan masyarakat sadar hukum



						5	Meningkatkan kualitas penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah
				3	Peningkatan perekonomian, pengembangan pendapatan asli daerah dan kerjasama	1	Mengoptimalkan pengendalian dan evaluasi pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)
						2	Meningkatkan kualitas bahan pendukung kebijakan peningkatan pajak dan retribusi daerah
						3	Meningkatkan pembinaan terhadap BUMD dan BLUD
						4	Meningkatkan kualitas kerjasama daerah
				4	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	1	Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan fisik kegiatan
						2	Meningkatkan pengendalian Kontrak Kritis
						3	Meningkatkan fasilitasi penyusunan pedoman pelaksanaan APBD
				5	Peningkatan pelayanan pengadaan barang/jasa	1	Meningkatkan kualitas pengelolaan aplikasi pengadaan barang dan jasa
						2	Meningkatkan pengelolaan proses pelelangan
						3	Meningkatkan kapasitas SDM pengadaan
						4	Meningkatkan penyelesaian permasalahan pengadaan



				6	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah	1	Meningkatkan Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur
						2	Meningkatkan kualitas Pemantapan Ketatalaksanaan
						3	Meningkatkan pembinaan pelayanan publik
						4	Meningkatkan pembinaan akuntabilitas publik perangkat daerah
						5	Meningkatkan pemantapan kelembagaan perangkat daerah
						6	Meningkatkan kualitas kebijakan pengukuran kinerja ASN
				7	Peningkatan pelayanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah dan kerumahtanggaan	1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kerumahtanggaan
						2	Meningkatkan kualitas Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah
						3	Meningkatkan kualitas Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Pariaman
				8	Peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah	1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah



						2	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota Pariaman
				9	Peningkatan perencanaan dan pengendalian bidang ekonomi	1	Meningkatkan kualitas perencanaan bidang ekonomi
						2	Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program bidang ekonomi
				10	Peningkatan perencanaan dan pengendalian bidang fisik	1	Meningkatkan kualitas perencanaan bidang fisk
						2	Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program bidang fisik
				11	Peningkatan perencanaan dan pengendalian bidang sosial	1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Bidang Sosial Budaya
						2	Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program bidang sosial
				12	Peningkatan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	1	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah
						2	Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program pembangunan daerah
						3	Meningkatkan kualitas data pembangunan daerah
				13	Peningkatan penelitian dan pengembangan	1	Meningkatkan penelitian dan pengembangan kebijakan pembangunan



					untuk mendorong inovasi daerah		daerah
						2	Meningkatkan fasilitas inovasi daerah
				14	Peningkatan perencanaan dan pengendalian anggaran	1	Meningkatkan kualitas dokumen penganggaran
						2	Mengoptimalkan pengendalian anggaran
				15	Pengendalian belanja daerah dan pengelolaan dana transfer	1	Melaksanakan pembinaan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah
						2	Mengoptimalkan pengendalian belanja daerah
						3	Meningkatkan pengelolaan dana transfer
				16	Peningkatan pengelolaan pembiayaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1	Meningkatkan kualitas Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
						2	Meningkatkan Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) berbasis akrual
						3	Meningkatkan Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
				17	Peningkatan perencanaan, pemanfaatan dan inventarisasi aset	1	Meningkatkan pengelolaan pemanfaatan aset daerah
						2	Optimalisasi Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan



				18	Peningkatan pelayanan, pendaftaran, dan penetapan pajak daerah	1	Meningkatkan pemutakhiran data wajib pajak
						2	Mengoptimalkan penerapan sistem e-tax
						3	Meningkatkan pelayanan pajak daerah
				19	Pengoptimalan pembukuan & penagihan pajak daerah	1	Meningkatkan Pengelolaan Penagihan Pajak Daerah
						2	Meningkatkan pembinaan wajib pajak daerah
						3	Meningkatkan pembukuan dan pelaporan pajak daerah
				20	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan bidang pemerintahan dan aparatur	1	Optimalisasi pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur
						2	Meningkatkan pembinaan kepatuhan aparatur
				21	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan bidang pengelolaan keuangan dan aset	1	Optimalisasi pengawasan bidang pengelolaan keuangan dan aset
						2	Meningkatkan kualitas Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Keuangan
				22	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan bidang pembangunan fisik	3	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan bidang pembangunan fisik
						4	Meningkatkan kualitas



							Review Pengadaan Barang dan Jasa
				23	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan bidang sosial ekonomi budaya	1	Optimalisasi pengawasan bidang sosial ekonomi dan budaya
						2	Meningkatkan kualitas Review Dokumen Akuntabilitas Kinerja
				24	Peningkatan dan evaluasi pengawasan	1	Mengoptimalkan tindak lanjut pemeriksaan eksternal dan internal
						2	Meningkatkan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP)
				25	Peningkatan pengembangan karir aparatur sipil negara	1	Optimalisasi penyediaan data formasi pegawai
						2	Meningkatkan pengelolaan rekrutmen aparatur sipil negara (ASN)
						3	Meningkatkan pengembangan karier ASN
						4	Meningkatkan pengelolaan data dan informasi kepegawaian
				26	Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian	1	Meningkatkan pengelolaan mutasi data kepegawaian ²
						2	Meningkatkan pembinaan jabatan fungsional
						3	Meningkatkan pembinaan ASN
						4	Meningkatkan pengelolaan kesejahteraan ASN



						5	Optimalisasi penatausahaan kepegawaian
						6	Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian secara elektronik
				27	Peningkatan kompetensi aparatur sipil negara	1	Optimalisasi analisa kebutuhan diklat
						2	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
				28	Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	1	Meningkatkan pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)
						2	Meningkatkan Pelaksanaan Pelayanan Jemput Bola Pendaftaran Penduduk
				29	Peningkatan pelayanan pencatatan sipil	1	Meningkatkan Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian
						2	Meningkatkan Pelayanan Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, Dan Kewarganegaraan
				30	Peningkatan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	1	Meningkatkan kerjasama administrasi kependudukan
						2	Meningkatkan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
						3	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Informasi Kependudukan



						4	Meningkatkan kapasitas SDM Teknologi informasi dan komunikasi
				31	Peningkatan pengelolaan pengembangan kearsipan	1	Meningkatkan pengelolaan arsip
						2	Meningkatkan sarana prasarana kearsipan
						3	Meningkatkan kapasitas pengelola arsip
				32	Pengoptimalan fasilitasi penyusunan perundang-undangan	1	Meningkatkan kualitas penyusunan kajian perundang-undangan
						2	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pembahasan Raperda/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD
						3	Meningkatkan Pelayanan Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD
				33	Peningkatan fasilitasi penganggaran dan pengawasan	1	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pembahasan Penganggaran
						2	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD
						3	Meningkatkan Pengembangan Kerjasama dan Penjangkaran Aspirasi Masyarakat
				34	Peningkatan pengelolaan informasi dan statistik	1	Meningkatkan pengelolaan media informasi pemerintah
						2	Meningkatkan sosialisasi kebijakan pemerintah melalui berbagai media



				35	Peningkatan komunikasi publik	1	Meningkatkan pengelolaan kehumasan dan pelayanan informasi
						2	Meningkatkan pengelolaan keluhan dan aduan masyarakat
						3	Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan telematika pada ruang publik
						4	Meningkatkan pembangunan aplikasi untuk mewujudkan e-government
						5	Meningkatkan pengetahuan teknologi informasi bagi aparatur
						6	Meningkatkan sarana prasarana untuk mendukung e-government
				36	Peningkatan pelayanan persandian	1	Meningkatkan kualitas sarana prasarana persandian dan telekomunikasi
						2	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian Komunikasi dan Informatika
Adapun program yang diperlukan untuk mencapai sasaran diatas adalah :							
1	Program Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah						
2	Program Pengembangan Ketatalaksanaan						
3	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur						
4	Program Peningkatan Manajemen SDM dan Aparatur						
5	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan						
6	Program Pelayanan dan Bantuan Hukum						
7	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah						
8	Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan						



9	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
10	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
11	Program Pengembangan Kearsipan
12	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
13	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
14	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
15	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya
16	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
17	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
18	Program perencanaan pembangunan daerah
19	Program perencanaan pembangunan ekonomi
20	Program perencanaan sosial dan budaya
21	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
22	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK
23	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
24	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
25	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
26	Program E-Government
27	Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik
28	Program Pengembangan Data/ Informasi Statistik Sektoral
29	Program Persandian Untuk Pengamanan Informasi
30	Program Penataan Administrasi Kependudukan

Misi 4 : Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
4	Meningkatkan keberlanjutan pembangunan Kota yang modern berwawasan lingkungan serta Mitigasi Bencana	8	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	1	Peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	1	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan dan bangunan perlengkapan jalan



						2	Meningkatkan kualitas penerangan jalan umum
				2	Peningkatan Pemenuhan Infrastruktur Dasar dan Perkotaan	1	Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Perkotaan
				3	Peningkatan dan pemeliharaan saluran pengairan dan drainase	1	Meningkatkan pembangunan saluran pengairan/penyediaan bangunan talud
						2	Meningkatkan kualitas saluran pengairan/penyediaan bangunan talud
						3	Mengoptimalkan penataan kawasan sungai
				4	Penambahan pembangunan gedung pemerintah	1	Meningkatkan pemenuhan bangunan-bangunan gedung sesuai standar kebutuhan
				5	Peningkatan perumahan permukiman dan tata bangunan	1	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman
						2	Meningkatkan penanganan Kawasan Kumuh
						3	Meningkatkan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
						4	Mengoptimalkan cakupan saluran air limbah
						5	Mengoptimalkan pengelolaan air minum
				6	Peningkatan pengelolaan persampahan	1	Meningkatkan pembinaan kelompok masyarakat peduli sampah
						2	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah



						3	Meningkatkan kebersihan jalan
				7	Peningkatan pengelolaan lalu lintas	1	Meningkatkan kajian dan pengembangan lalu lintas
						2	Meningkatkan manajemen dan rekayasa lalu lintas
						3	Meningkatkan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
				8	Peningkatan pengelolaan perparkiran	1	Meningkatkan pembinaan juru parkir, petugas parkir dan pedagang TKP
						2	Meningkatkan sarana dan prasarana perparkiran
						3	Mengoptimalkan penyelenggaraan perparkiran
						4	Meningkatkan penertiban parkir liar
				9	Peningkatan angkutan jalan, pengendalian operasional dan keselamatan lalu lintas	1	Meningkatkan kualitas pengujian kendaraan bermotor
						2	Meningkatkan kualitas sarana transportasi publik.
						3	Meningkatkan edukasi keselamatan lalu lintas bagi pelajar dan masyarakat
						4	Meningkatkan Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional
							Adapun program yang diperlukan untuk mencapai sasaran diatas adalah :
1							Program pembangunan jalan dan jembatan



2	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong						
3	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah						
4	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan						
5	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan						
6	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya						
7	Program Pengendalian Banjir						
8	Program Pembinaan Jasa Konstruksi						
9	Program Pengendalian Pemanfaatan Penerangan Jalan Umum						
10	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan						
11	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga						
12	Program Pengendalian Perpikiran						
13	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan						
14	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ						
15	Program peningkatan pelayanan angkutan						
16	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas						
17	Program Pengendalian Perpikiran						
18	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor						
19	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal						
20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)						
21	Program pendidikan politik masyarakat						
22	Program pengembangan wawasan kebangsaan						
		9	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1	Peningkatan efektivitas penataan dan pengendalian dampak lingkungan	1	Meningkatkan ketertiban dokumen lingkungan Meningkatkan
						2	Meningkatkan konservasi air tanah
						3	Meningkatkan ketertiban Izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)



						4	Meningkatkan pemantauan usaha/kegiatan berpotensi pencemaran lingkungan
				2	Optimalisasi pengembangan kapasitas lingkungan hidup	1	Mengoptimalkan wawasan lingkungan di sekolah
						2	Meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
						3	Meningkatkan pantauan pada perusahaan mikro kecil dalam menaati dokumen lingkungan
						4	Meningkatkan pemantauan layanan pengujian parameter kualitas air dan udara
				3	Optimalisasi pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) publik	1	Meningkatkan pembangunan RTH Publik
						2	Meningkatkan pengelolaan RTH publik
						3	Meningkatkan pemeliharaan taman kota dan perindang jalan
Adapun program yang diperlukan untuk mencapai sasaran diatas adalah :							
1	Program Pengembangan Perumahan						
2	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan						
3	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup						
4	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam						
5	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup						
6	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)						
7	Program perancangan prasarana wilayah dan sumber daya alam						
8	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah						



9	Program pembangunan infrastruktur perdesaan						
10	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya						
		10	Meningkatnya Mitigasi Bencana	1	Peningkatan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana alam	1	Meningkatkan edukasi bencana bagi warga di kawasan rawan bencana
						2	Meningkatkan kampung/Desa tangguh bencana
						3	Mengoptimalkan pelayanan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap bagi korban bencana
						4	Meningkatkan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana
				2	Peningkatan ketangguhan bencana	1	Peningkatan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana
						2	Meningkatkan ketangguhan kota terhadap bencana
						3	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi bencana
				3	Peningkatan pencegahan kebakaran	1	Meningkatkan edukasi proteksi kebakaran
						2	Meningkatkan pelayanan rekomendasi kebakaran
				4	Peningkatan penanggulangan kebakaran	1	Meningkatkan ketrampilan petugas kebakaran
						2	Meningkatkan sarana dan prasarana penanganan kebakaran



						3	Meningkatkan ketepatan waktu penyelamatan kebakaran
Adapun program yang diperlukan untuk mencapai sasaran diatas adalah :							
1	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam						
2	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kebencanaan						
		11	Terwujudnya Rasa Tertib dan Aman Dalam Kehidupan Bermasyarakat	1	Meningkatkan rasa aman dan nyaman masyarakat	1	Meningkatkan penanganan pelanggaran Perda
				2		2	Meningkatkan Peran Sat Pol PP, Dubalang Desa/Kelurahan dalam Menjalankan Tugasnya
						3	Membuat Regulasi tentang Penegakan Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat
Adapun program yang diperlukan untuk mencapai sasaran diatas adalah :							
1	Program pemeliharaan Ketentraman dan ketertiban umum, serta Perlindungan Masyarakat						
2	Program Penegakan Perundang-undangan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
3	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan						
Tujuan							
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
5	Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang bertumpu ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif untuk meningkatkan daya saing kota Pariaman	12	Menurunnya Ketimpangan Pendapatan antar Penduduk	1	Pemeliharaan sarana prasarana kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar	1	Meningkatkan pengelolaan kebersihan pasar
						2	Meningkatkan pengelolaan pengamanan dan



							penertiban pasar
				2	Peningkatan penataan, pengembangan dan pendapatan pasar	1	Meningkatkan penataan lahan dan pedagang
						2	Meningkatkan SDM pelaku pasar tradisional
						3	Meningkatkan pemeliharaan sarana prasarana pasar
						4	Meningkatkan pengelolaan pendapatan pasar
				3	Peningkatan Pengembangan Dan Penempatan Tenaga Kerja	1	Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja
						2	Meningkatkan pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja
						3	Meningkatkan Penempatan Calon Tenaga Kerja melalui mekanisme Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Lokal (AKL), dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN)
						4	Memperluas kesempatan kerja melalui padat karya infrastruktur
				4	Peningkatan perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja	1	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan kesejahteraan tenaga kerja
						2	Meningkatkan upah minimum kota
				5	Pengoptimalan kualitas koperasi	1	Meningkatkan pembinaan kelembagaan koperasi
						2	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan koperasi

				6	Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil mikro	1	Meningkatkan Fasilitas Kemitraan dan Pembiayaan Bagi Pelaku MK
						2	Menumbuhkan Wirausaha Baru (HBC)
						3	Meningkatkan Pengembangan, Konsultasi Bisnis dan Manajemen bagi Usaha Mikro
						4	Meningkatkan pengembangan kemitraan UKM dengan hote, restoran dan toko
Adapun program yang diperlukan untuk mencapai sasaran diatas adalah :							
1	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani						
2	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)						
3	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan						
4	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan						
5	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan						
6	Program peningkatan produksi hasil peternakan						
7	Program pengembangan budidaya perikanan						
8	Program pengembangan perikanan tangkap						
9	Program peningkatan produksi hasil peternakan						
10	Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan						
11	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan						
12	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan						
13	Program Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana Pertanian/ Peternakan						
14	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif						
15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan						
16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah						
17	Program pengembangan industri kecil dan menengah						
18	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah						
19	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi						
20	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri						
		13	Meningkatnya Nilai Investasi	1	Peningkatan pelayanan penanaman modal dan perizinan	1	Melaksanakan penelitian dan pemeriksaan data terkait permohonan izin
						2	Menerbitkan izin sesuai dengan prosedur



				2	Peningkatan pengawasan dan penanganan pengaduan penanaman modal dan perizinan	1	Melaksanakan pengawasan izin sesuai dengan izin yang diawasi
						2	Menindaklanjuti pengaduan terkait perizinan dan penanaman modal
				3	Penguatan regulasi dan pengembangan kinerja layanan penanaman modal dan perizinan	1	Melaksanakan kajian dan sosialisasi peraturan perizinan
						2	Mengevaluasi regulasi pelayanan perizinan
						3	Melaksanakan evaluasi kinerja pelayanan perizinan
				4	Pengembangan penanaman modal	1	Meningkatkan pengembangan SIM Aplikasi Perizinan dan Penanaman Modal
						2	Meningkatkan promosi penanaman modal
						3	Meningkatkan pengendalian dan pengawasan penanaman modal
				5	Mengintensifkan investasi untuk menghidupkan kawasan pengembangan dan pusat-pusat pertumbuhan	1	Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan kapasitas kelembagaan
						2	Mewujudkan kepastian hukum, sistem dan prosedur investasi yang jelas
							Adapun program yang diperlukan untuk mencapai sasaran diatas adalah :
1							Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi



2	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi						
3	Program Pengembangan Pelayanan Perizinan						
		14	Meningkatnya peran industri dan perdagangan serta jasa dalam stabilitas perekonomian	1	Pengoptimalan pembinaan perindustrian	1	Meningkatkan pembinaan teknis perindustrian
						2	Meningkatkan pembinaan sarana perindustrian
						3	Meningkatkan pameran industri kreatif
						4	Meningkatkan perancangan teknologi tepat guna bagi IKM
						5	Meningkatkan pembinaan sentra industri Kerajinan
				2	Pengotimalan pembinaan dan pengendalian perdagangan	1	Meningkatkan Pengembangan Kemitraan dengan Toko Modern
						2	Meningkatkan pengawasan pengendalian harga
						3	Meningkatkan tata titik lokasi PKL
						4	Meningkatkan promosi produk UMKM
	Adapun program yang diperlukan untuk mencapai sasaran diatas adalah :						
1	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif						
2	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan						
3	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah						
4	Program pengembangan industri kecil dan menengah						
5	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah						

6	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
7	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
8	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif

6.1 PELAKSANAAN ARAH KEBIJAKAN TAHUNAN

Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Untuk memudahkan pemahaman terhadap kesinambungan pembangunan setiap tahun dalam jangka 5 (lima) tahun, terlebih dahulu disederhanakan dalam agenda atau tema pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Atas dasar tema pembangunan inilah disusun arah kebijakan lebih jelas agar RPJMD mudah dituangkan dalam RKPD. Selanjutnya, tahapan-tahapan dimaksud dijadikan sebagai dasar dan disesuaikan dengan pentahapan RKPD.

6.1.1. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2019

Pelaksanaan arah kebijakan pembangunan pada tahun 2019 merupakan kelanjutan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya dan difokuskan pada penyelesaian permasalahan dan target capaian pembangunan yang belum tercapai dan terselesaikan pada periode pelaksanaan RPJMD Tahun 2013-2018. Pada tahun ini dilakukan penyusunan dan penetapan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis satuan kerja pemerintah daerah, termasuk perencanaan pembangunan sektor unggulan seperti pariwisata dan infrastruktur pendukungnya. Disamping itu dilakukan penyempurnaan struktur organisasi tata kerja perangkat daerah sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan di Pemerintah Kabupaten/Kota menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Serta titik fokus dari kebijakan pembangunan pada tahun pertama RPJMD Kota Pariaman tahun 2018-2023 ini adalah Penyiapan Insfratraktur untuk Mendukung Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa Yang Religius Dan Berbudaya.

6.1.2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2020

Pelaksanaan arah kebijakan pembangunan tahun 2020 merupakan pelaksanaan dari prioritas pembangunan yang sudah dirumuskan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 yaitu Penyiapan Insfratraktur untuk Mendukung Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa Yang Religius Dan Berbudaya.

6.1.3. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2021

Pelaksanaan arah kebijakan pembangunan tahun 2021 merupakan lanjutan dari pelaksanaan tahun sebelumnya dan lebih difokuskan Percepatan Pengembangan Infrastruktur untuk memecahkan Masalah Besar Perkotaan dan Daya Saing SDM.

6.1.4. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2022

Pelaksanaan program pembangunan tahun-tahun sebelumnya, terutama bidang infrastruktur diharapkan sudah menampakkan hasil. Oleh karena itu arah kebijakan pembangunan tahun 2022 difokuskan Penguatan Sektor Ekonomi Yang Didukung Oleh Peningkatan Sektor Wisata, Potensi Unggulan Lokal, Perdagangan Dan Jasa Yang Religius Berbudaya.

Pelaksanaan arah kebijakan pembangunan tahun 2022 disamping tetap melanjutkan program/kegiatan prioritas pembangunan sebelumnya merupakan tahap pematapan untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan jangka menengah daerah sesuai target yang telah ditetapkan. Arah kebijakan pembangunan tahun ini difokuskan pada prioritas. pengembangan yang perlu ditingkatkan kinerjanya, berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian program pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya.

6.1.5. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023

Pelaksanaan arah kebijakan pembangunan tahun 2023 untuk menyelesaikan target program yang belum dicapai. Kebijakan pada tahun ini difokuskan pada upaya “Perwujudan Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa, Yang Religius Dan Berbudaya”

Pada tahun ini merupakan masa transisi kepemimpinan daerah karena kepala daerah sekarang akan berakhir masa jabatannya pada bulan Oktober tahun 2023. Dengan demikian arah pelaksanaan pembangunan yang sudah dipersiapkan dalam periode terakhir RPJMD 2018-2023 akan dilaksanakan oleh kepala daerah berikutnya.

Tabel 6.2
Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kota Pariaman Tahun 2018-2023

Tahun	Arah Kebijakan
2019	a. Merupakan kelanjutan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya dan difokuskan pada penyelesaian permasalahan dan target capaian pembangunan yang belum tercapai dan terselesaikan pada periode pelaksanaan RPJMD Tahun 2013-2018.
	b. Pada tahun ini dilakukan penyusunan dan penetapan perencanaan

	<p>pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis satuan kerja pemerintah daerah, termasuk perencanaan pembangunan sektor unggulan seperti pariwisata dan infrastruktur pendukungnya. Disamping itu dilakukan penyempurnaan struktur organisasi tata kerja perangkat daerah sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan di Kabupaten/Kota menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</p>
	<p>c. Serta titik fokus dari kebijakan pembangunan pada tahun pertama RPJMD Kota Pariaman tahun 2018-2023 ini adalah Penyiapan Insfratraktur untuk Mendukung Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa Yang Religius Dan Berbudaya</p>
2020	<p>Pelaksanaan arah kebijakan pembangunan tahun 2020 merupakan pelaksanaan dari prioritas pembangunan yang sudah dirumuskan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 yaitu Penyiapan Insfratraktur untuk Mendukung Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa Yang Religius Dan Berbudaya.</p>
2021	<p>Pelaksanaan arah kebijakan pembangunan tahun 2021 merupakan lanjutan dari pelaksanaan tahun sebelumnya dan lebih difokuskan Percepatan Pengembangan Insfratraktur untuk memecahkan Masalah Besar Perkotaan dan Daya Saing SDM.</p>
2022	<p>a. Pelaksanaan program pembangunan tahun-tahun sebelumnya, terutama bidang infrastruktur diharapkan sudah menampakkan hasil. Oleh karena itu arah kebijakan pembangunan tahun 2022 difokuskan Penguatan Sektor Ekonomi Yang Didukung Oleh Peningkatan Sektor Wisata, Potensi Unggulan Lokal, Perdagangan Dan Jasa Yang Religius Berbudaya.</p>
	<p>b. Pada tahun ini merupakan masa transisi kepemimpinan daerah karena kepala daerah sekarang akan berakhir masa jabatannya pada bulan Oktober tahun 2023. Dengan demikian arah pelaksanaan pembangunan yang sudah dipersiapkan dalam periode terakhir RPJMD 2018-2023 akan dilaksanakan oleh kepala daerah berikutnya.</p>
2023	<p>a. Pelaksanaan arah kebijakan pembangunan tahun 2023 untuk menyelesaikan target program yang belum dicapai. Kebijakan pada tahun ini difokuskan pada upaya "Perwujudan Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa, Yang Religius Dan Berbudaya"</p>

	<p>b. Pada tahun ini merupakan masa transisi kepemimpinan daerah karena kepala daerah sekarang akan berakhir masa jabatannya pada bulan Oktober tahun 2023. Dengan demikian arah pelaksanaan pembangunan yang sudah dipersiapkan dalam periode terakhir RPJMD 2018-2023 akan dilaksanakan oleh kepala daerah berikutnya.</p>
--	--

6.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah memiliki nilai yang sangat strategis sebab menjadi prioritas pembangunan tahunan. Dengan demikian, prioritas pembangunan tahunan selama periode pembangunan jangka menengah Kota Pariaman meliputi:

Prioritas pembangunan adalah kumpulan program prioritas yang bersifat lintas sektoral sebagai penjabaran operasional dari rencana pembangunan. Pembangunan Kota Pariaman Tahun 2018-2023 dijabarkan ke dalam 9 (Sembilan) prioritas pembangunan, sebagai berikut:

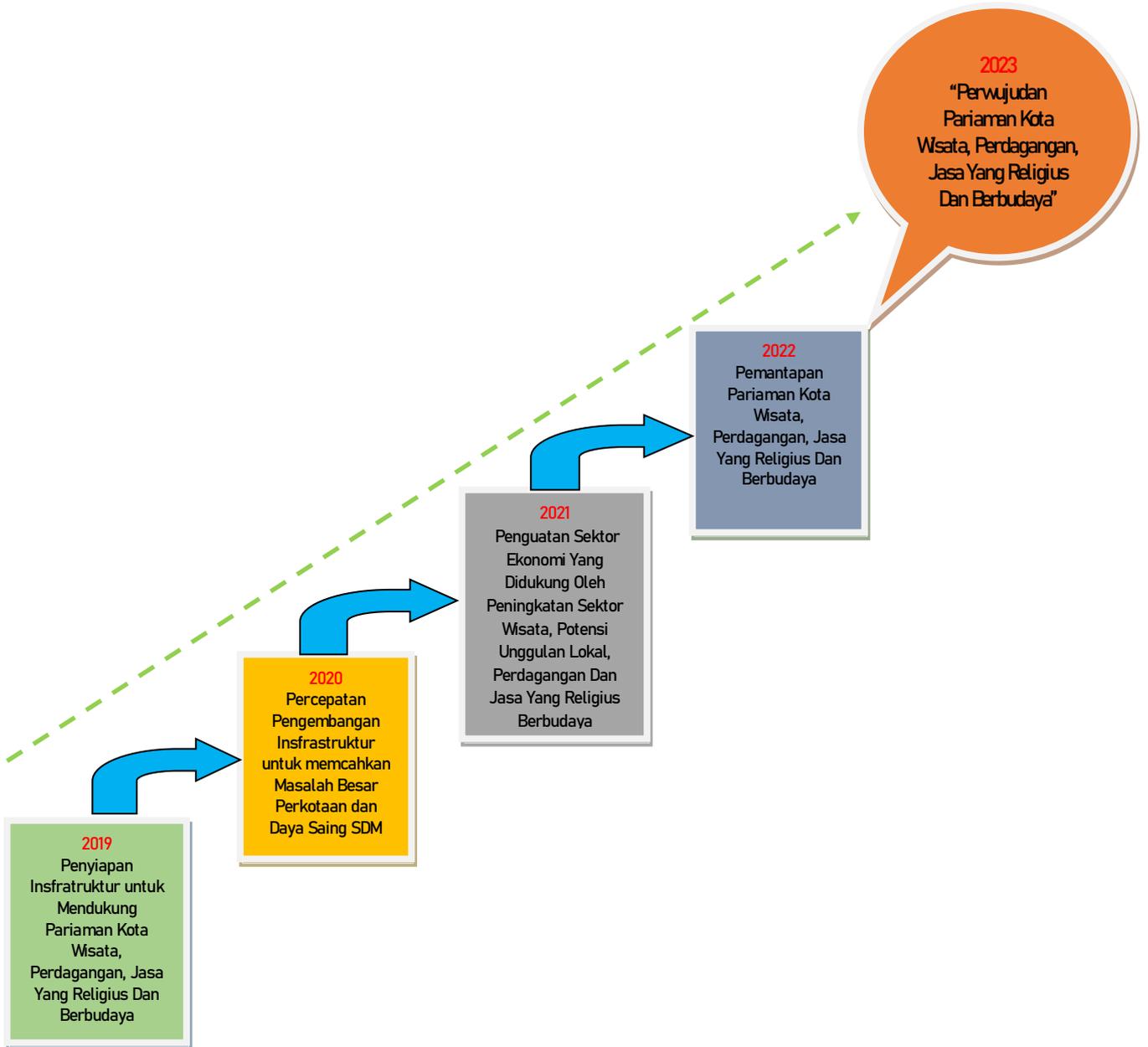
1. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Derajat Kesehatan serta Daya Saing SDM
2. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Berbudaya
3. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Smart City
4. Pengentasan Kemiskinan Dan Pengurangan Tingkat Pengangguran Serta Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.
5. Peningkatan Pengelolaan Daya Saing Pariwisata yang terpadu dengan pengembangan Ekonomi Kerakyatan Yang Berbasis Pada Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Daya Saing.
6. Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Kerakyatan Dan Daya Dukung Pariwisata
7. Meningkatkan penataan kota, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas umum yang nyaman dan berkelanjutan.
8. Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Permukiman Dan Optimisasi Pengembangan Water Front City.
9. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan diatas, maka dapat disimpulkan tema atau fokus pembangunan. Tema atau fokus pembangunan akan

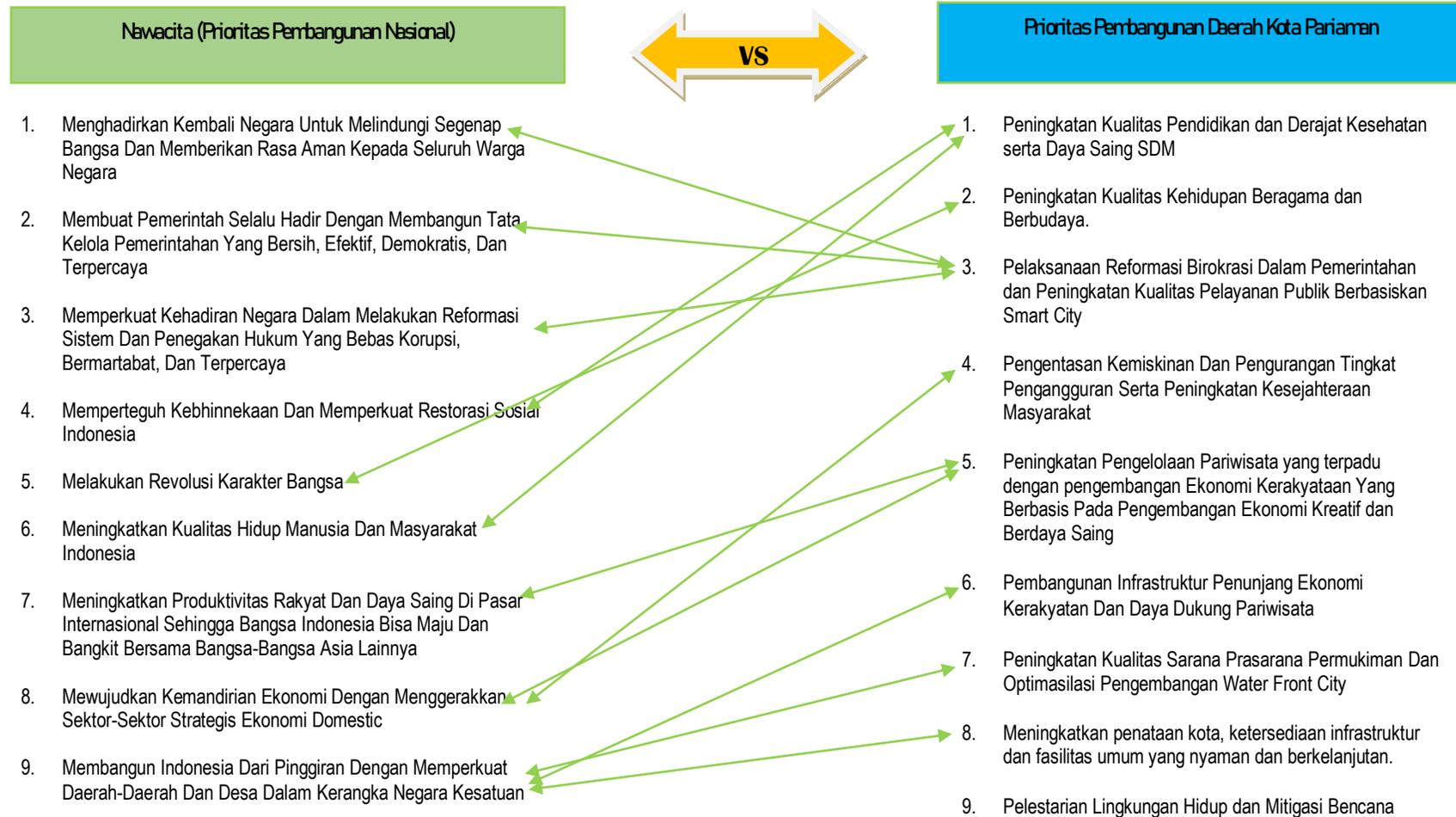


memberi arah yang jelas bagi pemerintah Kota Pariaman dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan di RPJMD setiap tahun. Penetapan tema atau fokus RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari tema atau fokus pembangunan tahap keempat pada RPJPD Kota Pariaman Tahun 2005-2025, yaitu **“Mewujudkan Pariaman Sebagai Kota Perdagangan Dan Jasa Di Wilayah Pesisir Barat Sumatera Menuju Masyarakat Madani ”**. Untuk mewujudkan tema pembangunan tahap keempat pada RPJPD Kota Pariaman, maka tema atau fokus pembangunan lima tahunan (2018-2023) disajikan pada Gambar 6.1 berikut ini.

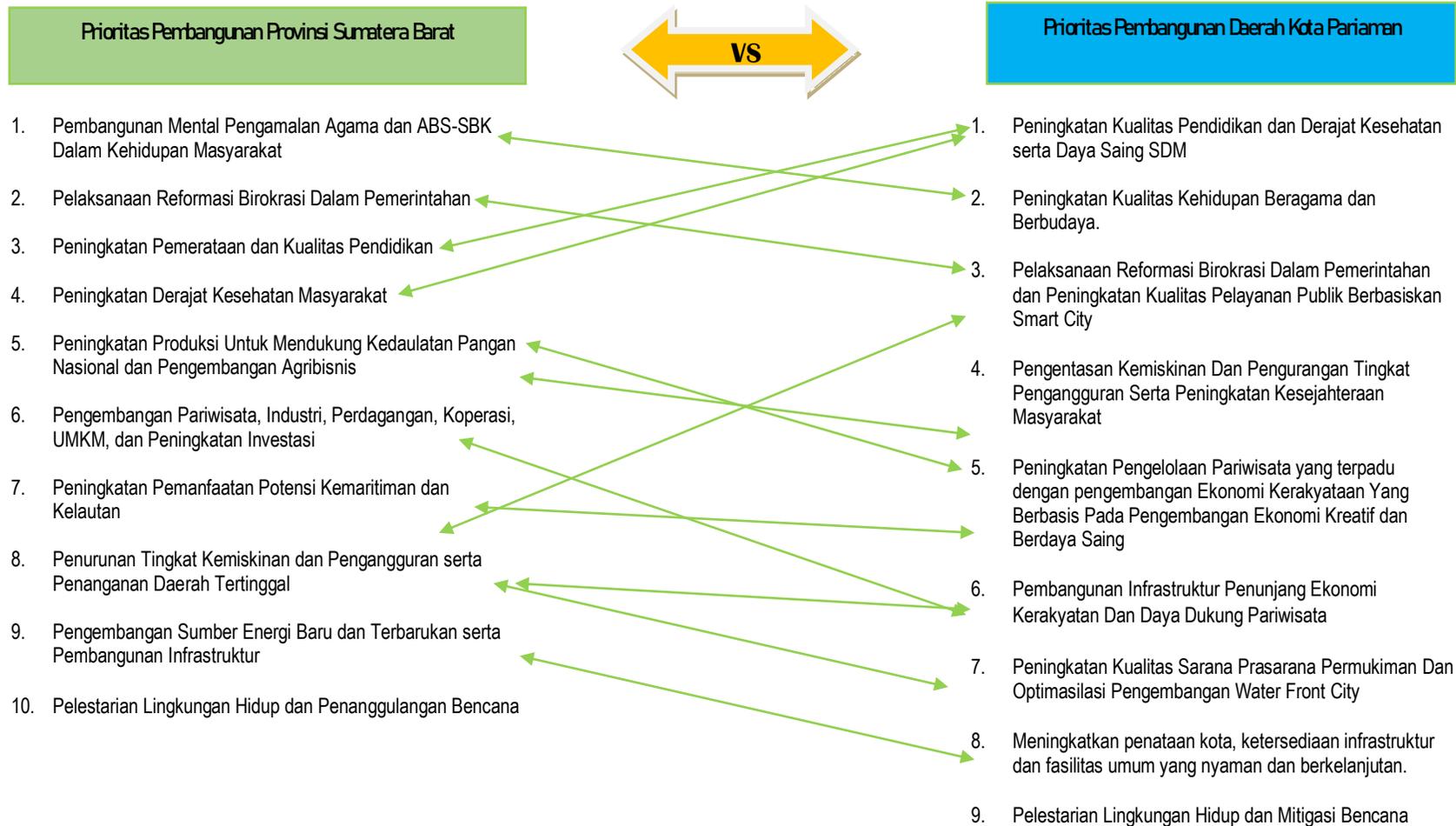
Gambar 6.1
Agenda/Tema Pembangunan RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023



Gambar 6.2
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional dengan
Prioritas Pembangunan Daerah Kota Pariaman



Gambar 6.3
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat dengan
Prioritas Pembangunan Daerah Kota Pariaman



6.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DENGAN PENDEKATAN SPASIAL

Pendekatan spasial mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pariaman Tahun 2010-2030, khususnya dalam menyelaraskan kebijakan ruang antar wilayah, antar sektor dan dimensi waktu pembangunan RPJMD Tahun 2018-2023. Fungsi RTRW merupakan matra spasial RPJPD yang mengarahkan lokasi dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Kota Pariaman. Kedudukan RTRW adalah sebagai pedoman dalam:

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan rencana sektoral lainnya;
2. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
3. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah Kabupaten/Kota, serta keserasian antarsektor;
4. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
5. Penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan tahun 2019-2023 yang telah dirumuskan dengan pendekatan holistic-tematik dan integratif selain memperhatikan pelaksanaan urusan sesuai kewenangan provinsi harus mengadopsi kebijakan penataan ruang yang terkait pengembangan wilayah, pengembangan struktur ruang (sistem perkotaan dan jaringan prasarana), dan pola ruang (kawasan lindung dan budidaya). Kebijakan penataan ruang merupakan arahan dalam mencapai Tujuan Penataan Ruang Kota Pariaman yaitu mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan berdayasaing. Tujuan penataan ruang Kota Pariaman dicapai melalui sasaran penataan ruang, meliputi:

1. Mewujudkan optimasi dan sinergi pemanfaatan ruang wilayah secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan nasional.
2. Menciptakan keserasian dan keseimbangan antar wilayah, antar kawasan dan antar sektor pembangunan.
3. Menciptakan keterpaduan program-program pembangunan wilayah.
4. Mendorong minat investasi masyarakat dan dunia usaha di wilayah Kota Pariaman.

Kebijakan pengembangan wilayah memberi acuan fokus pengembangan dan arahan sifat pengembangan secara kewilayahan sesuai karakteristik, potensi pengembangan (kebijakan nasional dan infrastruktur strategis eksisting), serta daya dukung lingkungan untuk mendukung pembangunan. Kebijakan struktur ruang dan pola ruang memberi arahan pengembangan sarana dan prasarana serta pengembangan sektor ekonomi yang dominan dalam skala provinsi. Penyelarasan ini berimplikasi pada kesesuaian arahan pembangunan ekonomi, sosial, dan fisik dengan target lokasi dan prioritas penanganan yang sesuai dengan fokus pengembangan wilayah serta rencana tata ruang dan daya dukung lingkungan. .

Selanjutnya dalam perumusan rencana pembangunan, penyelarasan prioritas pembangunan RPJMD Kota Pariaman Tahun 2019-2023 perlu memperhatikan indikasi program pemanfaatan ruang dalam dimensi waktu yang sama, yang merupakan perwujudan rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang untuk mencapai tujuan penatan ruang Kota Pariaman.

6.4 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018-2023

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan dasar bagi penentuan program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah menjadi pelaksana dari arah kebijakan yang telah ditetapkan, sesuai dengan rencana waktu pelaksanaan. Program pembangunan daerah merupakan program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya, sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Dengan demikian, program pembangunan daerah memiliki posisi strategis dalam pencapaian target sasaran pembangunan, dalam mewujudkan visi dan misi. Program pembangunan daerah disajikan selama 5 (lima) tahun mulai Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023, disajikan berdasarkan sasaran pembangunan jangka menengah. Dengan sifat program pembangunan daerah yang bersifat strategis, maka pelaksanaan dan penganggarannya diutamakan. Penentuan program pembangunan daerah Kota Pariaman juga merupakan bentuk pelaksanaan program unggulan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Pariaman Tahun 2018-2023. Berikut ini diuraikan program unggulan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Pariaman Tahun 2018-2023.



PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH TERPILIH

1.	Lanjutkan Program Kesehatan Gratis
2.	Lanjutkan Program Pendidikan Gratis
3.	Kartu Pariaman Pintar
4.	Lanjutkan Bis Sekolah Gratis
5.	Magrib Mengaji dan Subuh Mubarakah
6.	Program <i>satu keluarga satu sarjana</i>
7.	Lanjutkan Pembangunan Masjid Terapung Pariaman
8.	Lanjutkan Pembangunan GOR
9.	Pembangunan Youth Centre
10.	Pembangunan Pusat Pendidikan Alquran (Read Alquran Centre)
11.	Pengembangan Pendidikan agama non formal MDA (tingkat SD), MDW (Tingkat SLTP), MDU (Tingkat SLTA)
12.	Program Pariaman Sejahtera
13.	Pengembangan kawasan Wisata Terpadu dengan UMKM
14.	Pengembangan jalan sisi timur pariaman.
15.	Kesejahteraan Guru honor PAUD, TK, SD, SMP
16.	Pengembangan <i>water front city</i>
17.	Kesempatan Kerja Keluarga Miskin
18.	Revitalisasi PKK
19.	Revitalisasi Pasar Yang Ada Di Kota Pariaman

Berdasarkan kepada keterangan yang disebutkan di atas, beserta ilustrasi yang digambarkan diatas, maka dapat dijabarkan pendefinisian program program prioritas pembangunan daerah melalui janji-janji kampanye Walikota Terpilih. Adapun keterangan definisi tersebut dapat diamati pada tabel berikut ini:

No	Misi	Program Strategis Kepala Daerah	Rencana Aksi/indikasi Program/Bentuk Kegiatan Prioritas Sesuai Permendagri No.13 Tahun 2006	OPD Peanggung Jawab	KET
1.	Mewujudkan Wisata Kota Pesisir Yang Maju, Religius, Tertib dan Berbudaya terbaik Sumatera	1. Pengembangan kawasan Wisata Terpadu dengan UMKM	- Wisata yang berkelanjutan	- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			- Pengembangan Model Kawasan Wisata Pesisir Terpadu	- Bappeda	
			- Optimalisasi Sapta Pesona dan wisata halal	- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			- Penataan Kelembagaan dan Manajemen serta Informasi	- Bagian Organisasi Sekdako	
				- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			- Pengembangan sentra dan kluster industry	- Dinas Perindustrian, Perdagangan & KUKM	
			- Program Pengembangan destinasi pariwisata	- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			- Pengembangan UMKM berbasis Ekonomi Kreatif dan Budaya	- Dinas Perindustrian, Perdagangan & KUKM	



						- Dinas Pariwisata & Kebudayaan	
				- Program e-commer (bisnis online)		- Dinas Perindustrian, Perdagangan & KUKM	
				- Pembinaan dan Pengembangan Sektor2 Ekonomi Kreatif		- Dinas Perindustrian, Perdagangan & KUKM	
				- Program pengembangan pemasaran pariwisata		- Dinas Pariwisata & Kebudayaan	
				- Program Peningkatan SDM Pelaku Usaha dan Pokdawis		- Dinas Pariwisata & Kebudayaan	
				- Pengembangan Kawasan Wisata Terpadu dengan UMKM berorientasi dengan Pengembangan Waterfront City		- Dinas Pariwisata & Kebudayaan	
						- Dinas Perindustrian, Perdagangan & KUKM	
						- Dinas PUPR & Pertanahan	
						- Dinas Permukiman, Perumahan Rakyat, Dan Lingkungan Hidup	
				- Terwujudnya kawasan destinasi primer (kawasan		- Dinas Pariwisata &	



				wisata minat khusus)		Kebudayaan	
						- Dinas PUPR & Pertanahan	
				- Pengembangan Desa Wisata Dikelola Oleh BUMDes		- Dinas Pariwisata & Kebudayaan	
						- DPM Des	
				- Pengelolaan Rumah tabuik secara optimal		- Dinas Pariwisata & Kebudayaan	
						- Dinas Perindustrian, Perdagangan & KUKM	
				- Penyediaan Tempat Parkir Kendaraan Wisata yang representatif		- Dinas Perhubungan dan UPTD.Parkir	
		2.	Lanjutkan Pembangunan Masjid Terapung Pariaman	- Studi AMDAL Laut dan Pesisir		- OPD Pemrakarsa	
				- Konektivitas dan aksesibilitas (Petunjuk arah daerah wisata)		- Dinas PUPR & Pertanahan	
				- Perumusan Aktivitas dan Fungsi dari masjid terapung		- Dinas Perhubungan	
				- Rumah Al Quran		- Dinas PUPR & Pertanahan	



				- Sekolah Islam Terpadu	- Dinas PUPR & Pertanahan	
				- Program Pembangunan Sarana Umum dan Tempat Ibadah Publik	- Dinas PUPR & Pertanahan	
		3.	Pembangunan Pusat Pendidikan Alquran (Read Alquran Centre)	- Mendirikan Sekolah Alquran	- Dinas PUPR & Pertanahan	
					- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
				- Ekstra kurikuler kajian Al Quran di SMP	- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
				- Sekolah Islam Terpadu (TK, SD, SMP)	- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
				- Pembangunan Islamic Centre Pariaman	- Dinas PUPR & Pertanahan	
				- Mendirikan Sekolah Model TK IT, SD IT, dan SMP IT	- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
				- Pemberdayaan mushalla di setiap sekolah dengan program tahfidz sebagai ekschool	- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
					- Kemenag Kota Pariaman	
				- Pembangunan sekolah tafiz yang dikelola pemko	- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	



2.	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas	1.	Lanjutkan program pendidikan Gratis	-	Taman Cerdas Anak	-	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				-	Pelatihan Guru PAUD	-	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				-	Bantuan Sarana dan Prasarana PAUD	-	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				-	Bantuan PAUD	-	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				-	Program Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini	-	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				-	Program Peningkatan Mutu PAUD	-	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				-	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah	-	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				-	Penganggaran Dana untuk operasional Sekolah mulai dari TK, SD Dan SLTP sampai SMA	-	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		2.	Program Pariaman Sejahtera	-	Gerakan pengentasan kemiskinan	-	Dinas Sosial
				-	Pembukaan lapangan pekerjaan	-	Dinas Pertanian, Pangan & Perikanan



						- Dinas Perindustrian, Perdagangan & KUKM	
						- Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga	
						- Dinas PM, PTSP & Naker	
		3.	Program satu keluarga satu sarjana	- Bantuan Pendidikan		- Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga	
				- MOU dengan Perguruan Tinggi		- BAZ Kota Pariaman	
		4.	Lanjutkan Bis Sekolah Gratis	- Penambahan Bis		- Dinas Perhubungan	
				- Rehabilitasi Bis Yang ada		- Dinas Perhubungan	
				- Manajemen Operasional Bis Sekolah Gratis		- Dinas Perhubungan	
		5.	Kartu Pariaman Pintar	- Pelatihan Lesson Studi dan PTK Guru		- Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga	
				- Seminar dan Workshop Artikel Guru		- Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga	
				- Kartu Pariaman Pintar		- Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga	
						- Dinas Komunikasi & Informatika	
				- Sistem Zonasi Pendaftaran Siswa		- Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga	



				- Sekolah Unggul	- Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga	
				- Sekolah Model	- Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga	
				- Keterampilan untuk Anak Putus Sekolah	- Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga	
				- Keterampilan untuk Anak Disabilitas	- Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga	
				- Program Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini	- Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga	
				- Program Peningkatan Mutu PAUD	- Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga	
				- Program Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah	- Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga	
				- Program Peningkatan Mutu Pendidikan SD	- Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga	
				- Program Peningkatan Akses Pendidikan SD	- Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga	
				- Program Peningkatan Mutu Pendidikan SMP	- Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga	
				- Program Peningkatan Akses Pendidikan SMP	- Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga	
				- Program Peningkatan Akses Pendidikan Masyarakat	- Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga	



		6. Lanjutkan Program kesehatan Gratis	- Penyuluhan Kesehatan	- Dinas Kesehatan	
			- Penambahan Sarana Promosi Kesehatan	- Dinas Kesehatan	
			- Program pemberian bantuan iuran JKN	- Dinas Kesehatan	
			- Penyuluhan Lingkungan Sehat	- Dinas Kesehatan	
			- Sekolah Sehat	- Dinas Kesehatan	
			- RT Sehat	- Dinas Kesehatan	
			- Desa/Kelurahan Sehat	- Dinas Kesehatan	
				- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
				- Kecamatan	
			- Penyuluhan Lingkungan	- Dinas Kesehatan	
			- Modernisasi Ambulance	- Dinas Kesehatan	
			- Iuran BPJS Dibayar Dengan Dana Desa (ADD) Sebanyak 50 Orang Per Desa	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
			-	- Kecamatan	
			- Untuk dikelurahan pembiayaan di kecamatan atau di OPD terkait melalui dana ADK sebanyak 50 orang per kelurahan	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
				- Kecamatan	



				- Iuran BPJS Utk Masyarakat Miskin Di Tanggung APBD Sebanyak + 7.000 Orang	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
				-	- Kecamatan	
				- Iuran BPJS Utk Keluarga Miskin Ditanggung Oleh Baznas Kota Pariaman Sebanyak + 3.000 Org	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
				-	- Kecamatan	
				- Pembentukan RSUD dan Puskesmas menjadi Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD)	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
					- Kecamatan	
		7.	Magrib Mengaji dan Subuh Mubarakah	- Setiap ASN Melakukan Magrib Mengaji dan Shubuh Mubarakah di tempat Mesjid ASN berdomisili	- BKPSDM	
				- Zikir Bersama	- Bagian Kesra	
				- Tabligh Akbar	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
					- Kecamatan	
3.	Mewujudkan Pemerintahan Yang Prima Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Smart City	1.	Reformasi Birokrasi	- Manajemen Perubahan	- Semua Perangkat Daerah	



				- Penguatan Pengawasan	- Inspektorat	
				- Penguatan Akuntabilitas Kinerja	- Semua Perangkat Daerah	
				- Penguatan Kelembagaan	- Bagian Organisasi & Aparatur	
				- Penguatan Tata Laksana	- Bagian Organisasi & Aparatur	
				- Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur	- Bagian Organisasi & Aparatur	
				- Penguatan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan di Lingkungan Pemko Pariaman	- Bagian Organisasi & Aparatur	
				- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	- Bagian Organisasi & Aparatur	
4.	Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana	1.	Pengembangan water front city	- Program Penataan DAS (Lomba Kali Bersih)	- Dinas Perum, Perkim dan LH	
				- Program Penyusunan Regulasi Water Front City	- Dinas Perum, Perkim dan LH	
				- Program Penataan Pantai	Dinas Perum, Perkim dan LH	
				- Tata Ruang Berbasis KLHS	- Dinas Perum, Perkim dan LH	



				- Pengelolaan Sampah Terpadu dan Kebersihan Lingkungan	- Dinas Perum, Perkim dan LH	
				- Permukiman Bersih	- Dinas Perum, Perkim dan LH	
				- Integrasinya penataan lingkungan kota (city in garden) yang berwawasan lingkungan antar OPD	- Dinas Perum, Perkim dan LH	
				- Modernisasi Sarana dan Prasarana	- Dinas Perum, Perkim dan LH	
		2.	Lanjutkan Pembangunan GOR (Sport Center)	- Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
				- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
				- Pembinaan Olahraga Potensial	- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
				- Pencarian dan Pembinaan Atlet Berbakat	- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
		3.	Pembangunan Youth Centre		- Dinas PUPR & Pertanahan	
		4.	Master Plan Kota Berbasis Lingkungan dan Mitigasi Bencana Gempa dan Tsunami		- Dinas Perum, Perkim dan LH	
					- BPBD	



		5.	Mewujudkan Tata Ruang Kota berbasis KLHS	-	Dinas PUPR & Pertanahan		
				-	Dinas Perum, Perkim dan LH		
		6.	Mewujudkan Rumah Sakit Berbasis Kelestarian Lingkungan	-	Dinas Perum, Perkim dan LH		
				-	Dinas Kesehatan		
		7.	Mewujudkan Pariaman city in the Garden	-	Dinas PUPR & Pertanahan		
				-	Dinas Perum, Perkim dan LH		
		8.	Pembangunan Pelabuhan	-	Dinas PUPR & Pertanahan		
				-	Dinas Perhubungan		
		9.	Pariaman smart City	-	Dinas Komunikasi & Informatika		
		10.	Pembangunan Jalan Sisi Timur Pariaman	-	Dinas PUPR & Pertanahan		
5.	Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif Yang Berbasis Lokal	1.	Kesempatan kerja untuk keluarga miskin	-	Studi Implementasi dan Evaluasi Kebijakan dalam Penanaman Modal	-	Dinas PM PTSP & Naker
				-	Rumah Promosi	-	Dinas Perindustrian, Perdagangan & KUKM
				-	Promosi Potensi Ekonomi Berbasis Web	-	Dinas Perindustrian,



						Perdagangan & KUKM
						- Dinas Komunikasi & Informatika
				-	Program Penguatan Kebijakan dan Peningkatan Promosi Penanaman Modal	- Dinas PM PTSP & Naker
			2. Revitalisasi Pasar Yang Ada di Kota Pariaman	-	Optimalisasi Fungsi Lahan Pertanian	- Dinas Pertanian , Pangan & Perikanan
				-	Pangan Terbaru	- Dinas Pertanian , Pangan & Perikanan
				-	Pengembangan Tanaman Agrowisata	- Dinas Pertanian , Pangan & Perikanan
						- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				-	Pengembangan Kawasan Perikanan Darat	- Dinas Pertanian , - Pangan & Perikanan
				-	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	- Dinas Pertanian , Pangan & Perikanan
				-	Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Mikro	- Dinas Perindustrian, Perdagangan & KUKM
				-	Program Pelayanan Penanaman Modal	- Dinas PM, PTSP & Naker
				-	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	- Dinas Pertanian , Pangan & Perikanan
				-	Program Peningkatan	- Dinas Pertanian ,



				produksi produk ternak		Pangan & Perikanan	
			3. Revitalisasi PKK	- Program Revitalisasi PKK	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
					-	Kecamatan	
				- Lomba Kreativitas PKK	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
					-	Kecamatan	
				- Produk Unggulan Setiap Desa/Kelurahan	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
					-	Kecamatan	
				- Studi Pemetaan Potensi Desa	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
					-	Kecamatan	
				- Gerakan Desa Berbasis WEB	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
					-	Kecamatan	
					-	Dinas Komunikasi & Informatika	
				- Peluang Bisnis dan Pemasaran	-	Dinas Koperindag & KUKM	
					-	Dinas PM, PTSP & Naker	
				- Roadmap industri kreatif	-	Dinas Koperindag & KUKM	
					-	Dinas Pariwisata &	



							Kebudayaan	
				-	Relevansi Produk Ekonomi dengan Kegiatan Wisata	-	Dinas Koperindag & KUKM	
						-	Dinas Pariwisata & Kebudayaan	
				-	Roadmap Bisnis Industri Kreatif	-	Dinas Koperindag & KUKM	
						-	Dinas Pariwisata & Kebudayaan	
				-	Bantuan Modal dan pendampingan Manajemen	-	Dinas Koperindag & KUKM	
						-	Bank di Kota Pariaman	
				-	Program Penguatan Modal dan Manajemen	-	Dinas Koperindag & KUKM	
						-	Bank di Kota Pariaman	



BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH



BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan ditunjukkan pada tabel berikut ini.



Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 – 2023

NO	Uraian	PROYEKSI					KET
		2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	
4	PENDAPATAN	686.195.621.170	759.357.593.526	829.164.491.180	907.882.045.477	957.606.974.346	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	35.881.361.440	40.261.262.296	45.193.407.040	50.749.420.736	57.010.441.604	
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	8.808.080.368	10.192.292.423	11.648.686.287	13.395.989.230	15.405.387.614	
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	6.973.558.414	7.670.914.255	8.438.005.681	9.281.806.249	10.209.986.874	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.290.774.658	6.856.944.377	7.474.069.371	8.146.735.615	8.879.941.820	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	13.808.948.000	15.604.111.240	17.632.645.701	19.924.889.642	22.515.125.296	
4.2	DANA PERIMBANGAN	612.835.276.000	674.118.803.600	736.245.158.220	809.869.674.042	846.521.806.772	
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	12.730.522.000	14.003.574.200	15.403.931.620	16.944.324.782	18.638.757.260	
4.2.2	Dana Alokasi Umum	429.494.368.000	472.443.804.800	519.688.185.280	571.657.003.808	588.322.704.189	
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	99.939.086.000	109.932.994.600	120.926.294.060	133.018.923.466	146.320.815.813	
4.2.4	Dana Desa	48.050.234.000	52.855.257.400	52.855.257.400	54.654.569.800	56.120.026.780	
4.2.5	Dana Insentif Daerah	22.621.066.000	24.883.172.600	27.371.489.860	30.108.638.846	33.119.502.731	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	37.478.983.730	44.977.527.630	47.725.925.920	50.749.164.039	54.074.725.970	
4.3.1	Dana BOS	12.267.870.730	12.267.870.730	12.267.870.730	12.267.870.730	12.267.870.730	
4.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	25.211.113.000	27.709.656.900	30.458.055.190	33.481.293.309	36.806.855.240	
4.3.3	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	
5	BELANJA	723.876.777.946	796.672.918.988	858.898.864.992	927.781.108.383	996.105.821.452	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	337.905.243.210	363.363.557.803	378.722.816.478	401.079.679.518	420.673.279.216	
5.1.1	Belanja Pegawai	231.140.381.262	245.008.804.138	259.709.332.386	275.465.386.381	293.062.128.491	
5.1.2	Belanja Hibah	2.600.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	



5.1.3	Belanja Bantuan Sosial	0.00	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	
5.1.4	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.578.163.878	1.672.853.711	1.773.224.933	1.879.618.429	1.992.395.535	
5.1.5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	98.731.346.070	107.681.899.954	108.240.259.158	114.734.674.708	116.618.755.190	
5.1.6	Belanja Tidak Terduga	1,000,000,000.00	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	
5.2	Belanja Langsung	385.971.534.736	433.309.361.185	480.176.048.514	526.701.428.864	575.432.542.236	
5.2.1	Belanja Pegawai	17.480.864.500	18.354.907.725	18.722.005.880	19.658.106.173	20.641.011.482	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	192.294.324.012	221.138.472.614	245.561.242.066	269.561.242.066	293.561.242.066	
5.2.3	Belanja Modal	176.196.346.224	193.815.980.846	215.892.800.568	237.482.080.625	261.230.288.687	
	Surplus/Defisit	(37.681.156.776)	(31.915.325.462)	(29.734.373.812)	(24.899.062.906)	(42.498.847.106)	
6	PEMBIAYAAN						
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	47.681.156.776	41.915.325.462	39.734.373.812	34.899.062.906	52.498.847.106	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	47.681.156.776	41.915.325.462	39.734.373.812	34.899.062.906	52.498.847.106	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	10.000.000.000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10.000.000.000	
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000.000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	
	Pembiayaan Netto	37.681.156.776	31.915.325.462	29.734.373.812	24.899.062.906	42.498.847.106	
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan						

Sumber : BPKPD Kota Pariaman Tahun 2018



Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2018-2023
Pemerintah Kota Pariaman



NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A URUSAN WAJIB																	
I URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 Urusan Pendidikan																	
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	Point	78,45	82,5	2.237.656.500	84,15	1.943.924.000	86,20	1.963.363.200	88,75	1.982.996.700	90,10	2.002.826.500	90,10	10.130.766.900	Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga
		Presentase Terlayannya Administrasi Perkantoran	%	95	100		100		100	100	100		100	100	100		
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kondisi sarana & prasarana perkantoran dalam keadaan baik	%	75	86	125.820.000	87	353.461.000	88	356.995.500	89	360.565.400	90	364.171.000	90	1.561.012.900	Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga
c	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase terpenuhinya Baju Dinas PNS (1 stel / orang)	%	0	-	-	-	-	100	90.000.000	-	-	100	90.000.000	100	90.000.000	Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga
d	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	orang	6	6	20.000.000	6	20.000.000	6	20.000.000	6	20.000.000	6	20.000.000	30	80.000.000	Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga
e	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	B	B	17.000.000	B	19.880.000	BB	20.078.800	BB	20.279.500	BB	20.482.200	BB	77.641.700	Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga
f	Program pendidikan anak usia dini	Angka Partisipasi PAUD	%	69,50	70,0	1.209.512.500	71,1	3.502.619.500	72,3	3.537.645.600	71,7	3.573.021.900	72,3	3.608.752.000	72,4	15.431.551.500	Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga
g	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase SD Berakreditasi A	%	20	25	15.916.527.500	30	20.503.904.300	40	20.708.943.200	50	20.916.032.600	60	21.125.192.900	60	99.170.600.500	Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga
		Persentase SMP Berakreditasi A	%	25	30		40		50		60		70		70		
		Nilai rata-rata ujian nasional SD	Nilai	7,2	7,25		7,3		7,35		7,40		7,45		7,45		
		Nilai rata-rata ujian nasional SMP	Angka	5,60	5,70		5,75		5,85		5,90		6,00		6		
		Angka kelulusan	%	100	100		100		100		100		100		100		
		Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	90,10	92,30		95,25		97,40		98,65		100,20		100,20		
		Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	%	100,79	100,86		100,95		101,20		102,0		103,0		103,0		
		Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%	88,90	90,50		100,05		100,90		110,05		110,20		110,20		
		Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	%	132,41	132,50		132,60		133,10		134,10		135,10		135,10		
h	Program Pendidikan Non Formal	Jumlah Lembaga PAUD yang siap Terakreditasi	Sekolah	1	2	886.427.000	4	1.912.196.000	6	1.931.317.800	8	1.950.630.900	10	1.970.137.100	10	8.650.708.800	Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga



NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
		Jumlah MDA yang Dikelola dan dibentuk oleh Desa/Kelurahan	Desa/Kelurahan	5	15		25		35		45		55		55		
		Persentase Anak SMP yang bisa Baca Alquran dan menanamkan nilai keagamaan	%	40	50		55		60		65		70		70		
		Jumlah Sekolah Pendidikan Menengah Pertama Yang melaksanakan Ekstrakurkuler Ke Agamaan (Minggu, Bulan, Triwulan)	Sekolah	1	4		8		9		12		14		14		
i	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidik/tenaga kependidikan	%	85,20	86,10	347.660.000	86,25	1.955.956.200	86,40	1.975.515.600	86,50	1.995.270.700	86,55	2.015.223.300	86,55	8.289.625.800	Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga
j	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Jumlah Sekolah yang melaksanakan Ujian akhir	Sekolah	105	105	548.332.000	105	2.963.137.700	105	4.444.706.373	105	7.111.530.008	105	12.089.600.849	106	27.157.306.930	Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga
		Persentase Siswa Miskin Yang Menerima Kartu PARIAMAN Pintar	%	NA	5		15		30		50		70		70		
		Persentase KK Miskin Yang Mendapatkan Program Satu Keluarga Satu Sarjana	%	NA	5		15		25		40		60		60		
Jumlah						21.308.935.500		33.175.078.700		35.048.566.073		37.930.327.708		43.306.385.849		170.769.293.830	
2 Urusan Kesehatan																	
a.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	Point	79,45	81,5	1.317.458.250	84,15	1.313.489.000	87,20	1.326.623.800	88,75	1.339.890.000	90,10	1.353.288.800	90,10	6.650.749.850	Dinkes
		Persentase Terlayannya Administrasi Perkantoran	%	95	100		100		100		100		100		100		
b.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kondisi sarana & prasarana perkantoran dalam keadaan baik	%	75	86	491.071.900	87	844.908.900	88	853.357.900	89	861.891.400	90	870.510.200	90	3.921.740.300	Dinkes
c.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase terpenuhinya Baju Dinas PNS (1 stel / orang)	%	0	-	-	-	-	100	97.500.000	-	-	100	97.500.000	100	195.000.000	Dinkes
d.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	orang	16	16	67.000.000	25	100.000.000	25	100.000.000	25	100.000.000	25	100.000.000	91	467.000.000	Dinkes
e.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	B	B	53.423.000	B	52.550.000	BB	53.075.400	BB	53.606.000	BB	54.141.900	BB	266.796.300	Dinkes
f.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat	%	85	87	1.066.272.000	88	336.507.000	89	1.076.934.700	90	1.087.703.800	91	1.098.580.600	91	4.665.998.100	Dinkes



NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
g	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Presentase Klinik dan Rumah Praktek Yang Memenuhi Standar Kesehatan	%	60	65	72.513.000	70	9.248.632.300	75	9.340.151.700	80	11.476.200.700	85	11.590.962.800	85	41.728.460.500	Dinkes
h	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Kantin Sekolah, dan Restoran yang terjamin steril makanannya	%	65	70	21.972.100	72	64.553.600	74	64.232.200	76	64.874.500	78	66.820.800	80	262.453.200	Dinkes
i	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Rumah Tangga Ber PHBS	%	60	62	154.185.500	64	160.480.000	66	161.117.800	68	162.728.900	70	167.610.800	72	806.123.000	Dinkes
		Jumlah kader posyandu yang dibina dan difasilitasi	orang	218	218	336.600.000	218	130.000.000	218	131.300.000	218	132.613.000	218	133.939.100	218	864.452.100	DPMD
j	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase Penanganan Gizi Masyarakat	%	100	100	276.602.000	100	1.238.708.000	100	1.250.128.000	100	1.262.629.200	100	1.275.255.400	100	5.303.322.600	Dinkes
k	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan Masyarakat Yang Memiliki Jamban Sehat	%	60	62	279.357.850	64	228.970.000	66	230.292.600	70	232.595.400	72	234.921.200	78	1.206.137.050	Dinkes
l	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase Penyakit Menular Yang Ditangani	%	100	100	418.516.700	100	380.955.600	100	383.798.000	100	387.635.800	100	391.512.000	100	1.962.418.100	Dinkes
m	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah Akreditasi Puskesmas	Puskesmas	4	5	730.550.000	6	5.547.533.000	7	5.602.041.100	7	5.658.061.200	7	5.714.641.600	7	23.252.826.900	Dinkes
n	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Dasar	%	70	72	6.030.856.000	75	6.091.164.500	78	6.151.108.900	81	6.212.619.600	84	6.274.745.500	84	30.760.494.500	Dinkes
o	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan	%	75	80	4.676.972.800	95	6.615.354.500	90	6.680.541.100	95	6.747.346.500	100	6.814.820.100	100	31.535.035.000	Dinkes
		Persentase penduduk yang mempunyai JKN	%	65	70		75		85		90		95		95		
p	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar	%	100	100	116.824.000	100	67.242.000	100	67.914.400	100	68.593.500	100	69.279.400	100	389.853.300	Dinkes
		Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100		100		100		100		100		100		
		Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100		100		100		100		100		100		



NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
q	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Persentase Lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	134.590.000	100	67.982.000	100	68.661.800	100	69.348.300	100	70.041.800	100	410.623.900	Dinkes
r	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar	%	100	100	440.409.000	100	453.621.100	100	458.157.300	100	462.738.700	100	467.366.100	100	2.282.292.200	Dinkes
s	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Persentase Penyakit Tidak Menular Yang Ditangani	%	100	100	736.796.900	100	758.900.600	100	781.667.400	100	805.117.300	100	829.270.800	100	3.911.753.000	Dinkes
Jumlah						17.421.971.000		33.701.552.100		34.878.604.100		37.186.193.800		37.675.208.900		160.863.529.900	
3 Urusan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang																	
a.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	Point	77,45	80,5	1.782.185.000	84,15	1.716.085.000	87,20	1.767.567.480	88,75	1.820.594.407	90,10	1.875.212.133	90,10	8.961.644.020	Dinas PUPR & Pertanahan
		Persentase Terlayannya Administrasi Perkantoran	%	95	100		100		100		100		100		100		
b.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan sarana & prasarana perkantoran dalam keadaan baik	%	75	86	3.325.290.500	87	5.748.075.500	88	5.920.517.600	89	6.098.133.000	90	6.281.076.800	90	27.373.093.400	'Dinas PUPR & Pertanahan
		Persentase Kondisi Gedung Kantor Pemko Dalam Kondisi Baik	%	80,10	80,25		80,40		80,60		80,80		80,90		80,90		
c.	Program peningkatan disiplin aparat	Persentase terpenuhinya Baju Dinas PNS (1 stel / orang)	%	0	-	-	-	-	100	67.500.000	-	-	100	67.500.000	100	135.000.000	'Dinas PUPR & Pertanahan
d.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	orang	5	5	16.800.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	96.800.000	'Dinas PUPR & Pertanahan
e.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	B	B	20.200.000	B	15.000.000	BB	15.449.800	BB	15.913.000	BB	16.390.100	BB	82.952.900	'Dinas PUPR & Pertanahan
f.	Program pembangunan jalan dan jembatan	Persentase panjang jalan yang dibangun dalam kondisi baik	%	41,30	,55,60	25.032.739.500	60,40	37.549.109.200	65,21	45.058.931.000	68,46	56.023.663.700	70,10	77.863.831.100	70,10	241.528.274.500	Dinas PUPR & Pertanahan
		Persentase Perluasan Jalan Sisi Timur Kota Pariaman	%	10,20	20,20		30,15		40,70		60,45		80,50		80,50		
g.	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Persentase jalan Kota yang memiliki drainase	%	40,10	42,18	1.253.907.250	44,50	2.929.287.500	46,95	2.958.580.300	48,40	2.988.166.000	50,10	3.018.047.600	50,10	13.147.988.650	Dinas PUPR & Pertanahan
h.	Program Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Persentase Jalan dan jembatan dalam kondisi baik	%	64	66	9.793.697.500	69	13.201.410.000	73	13.333.424.000	77	13.466.758.100	81	13.601.425.600	81	63.396.715.200	Dinas PUPR & Pertanahan



NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
i	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Presentase irigasi dengan kondisi baik	%	70,10	72,45	12.800.028.000	74,66	11.120.145.000	76,60	11.231.346.350	78,20	11.343.659.700	80,10	11.683.969.400	80,10	58.179.148.450	Dinas PUPR & Pertanahan
j	Program Pengendalian Banjir	Presentase Sungai Yang Dipelihara	%	55,60	58,45	395.000.000	60,10	412.023.500	65,75	416.143.600	70,10	420.304.900	75,65	432.913.900	75,65	2.076.385.900	Dinas PUPR & Pertanahan
k	Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Perda RTRW	ada/tidak	ada	ada	507.560.000	ada	488.780.000	ada	650.000.000	ada	-	ada	-	ada	1.646.339.951	Bappeda
		Jumlah Perda RDTR	ada/tidak	-	-		ada		ada		ada		ada		ada		Dinas PUPR & Pertanahan
l	Program Pemanfaatan Ruang	Presentase Tertatanya Kawasan Pusat Kota	%	50,15	52,25	1.170.160.000	56,44	1.181.861.600	60,78	1.193.680.000	65,15	1.205.616.600	70,20	1.241.784.900	70,20	5.993.103.100	Dinas PUPR & Pertanahan
		Presentase Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW	%	92,10	93,40		94,15		94,40		95,25		95,50		95,50		
m	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Presentase RTH Publik (City In The Garden)	%	5	7	101.000.000	8	199.600.000	9	201.596.000	10	203.611.900	11	205.647.900	11	911.455.800	Dinas PUPR & Pertanahan
n	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Jumlah SDM OPD terkait Yang Memiliki Keahlian Kontruksi	OPD	5	-	-	15	337.962.500	20	371.758.750	25	408.934.600	27	449.827.900	27	1.568.483.750	Dinas PUPR & Pertanahan
o	Program Pengembangan Water Front City Kota Pariaman	Jumlah Pengembangan Sungai menjadi Water Front City Di Kota Pariaman	Kawasan	0	1	15.600.500.000	2	20.280.650.000	3	24.336.780.000	3	34.071.492.000	4	39.182.215.800	4	133.471.637.800	Dinas PUPR & Pertanahan
		Jumlah				71.778.867.750		95.184.989.800		107.527.825.080		128.070.934.907		155.923.453.033		558.486.070.570	
4 Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman																	
a.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	Point	77,45	80,5	2.036.894.300	84,15	1.868.066.700	87,20	1.924.108.600	88,75	1.981.831.700	90,10	2.041.286.500	90,10	9.852.187.800	Dinas Perkim, Perum & LH
		Presentase Terlayannya Administrasi Perkantoran	%	95	100		100		100		100		100		100		
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan sarana & prasarana perkantoran dalam keadaan baik	%	75	86	268.817.275	87	467.560.000	88	481.586.600	89	496.034.000	90	510.914.800	90	2.224.912.675	Dinas Perkim, Perum & LH
c.	Program peningkatan disiplin aparat	Persentase terpenuhinya Baju Dinas PNS (1 stel / orang)	%	0	-	-	-	-	100	75.000.000	-	-	100	75.000.000	100	150.000.000	Dinas Perkim, Perum & LH
d.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	orang	5	5	25.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	105.000.000	Dinas Perkim, Perum & LH
e.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	B	B	24.504.000	B	15.000.000	BB	15.449.800	BB	15.913.000	BB	16.390.100	BB	87.256.900	Dinas Perkim, Perum & LH
f	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni	%	NA	78	387.387.600	79	388.378.100	80	400.029.300	85	412.030.100	90	424.391.000	90	2.012.216.100	Dinas Perkim, Perum & LH
g	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Persentase rumah bersanitasi layak	%	78,9	80,25	22.566.285.000	82,45	20.870.405.000	83,80	21.496.516.400	84,15	23.216.237.600	85,00	23.912.724.700	85,00	112.062.168.700	Dinas Perkim, Perum & LH
		Persentase pemukiman yang tertata	%	20	25		30		35		40		50		50		



NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
		Persentase Penurunan luas permukiman kumuh	%	2,3	2,2		2,1		1,9		1,8		1,7		1,7		
		Indeks Infrastruktur Perdesaan	Nilai	NA	35,4		37,25		38,70		39,50		40,10		40,10		
		Jumlah				25.308.888.175		23.629.409.800		24.412.690.700		26.142.046.400		27.000.707.100		126.493.742.175	
5 ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat																	
a.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	Point	77,45	80,5	952.135.000	84,15	980.699.000	87,20	1.010.119.900	88,75	1.040.423.400	90,10	1.071.635.995	90,10	5.055.013.295	Sat Pol PP
		Persentase Terlengkapnya Administrasi Perkantoran	%	95	100		100		100		100		100		100		
b.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan sarana & prasarana perkantoran dalam keadaan baik	%	75	86	613.715.500	87	632.126.900	88	651.090.600	89	670.623.200	90	690.741.740	90	3.258.297.940	Sat Pol PP
c.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase terpenuhinya Baju Dinas PNS (1 stel / orang)	%	0	-	-	-	-	100	232.500.000	-	-	100	232.500.000	100	465.000.000	Sat Pol PP
d.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	orang	5	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	100.000.000	Sat Pol PP
e.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	B	B	12.100.000	B	12.462.900	BB	12.836.600	BB	13.221.500	BB	13.617.900	BB	64.238.900	Sat Pol PP
f.	Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	%	70	75	2.475.934.500	78	2.550.212.500	83	2.626.718.800	87	2.705.520.300	92	2.786.685.900	92	13.145.072.000	Sat Pol PP
g.	Program Perlindungan Masyarakat	Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan perlindungan masyarakat	%	56,60	58,25	1.039.967.250	60,10	1.071.166.200	62,45	1.071.166.200	64,15	1.103.301.100	65,25	1.136.400.100	65,25	5.422.000.850	Sat Pol PP
h.	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Jumlah Monitoring kantrantibmas Yang Dilaksanakan	Kali	24	24	413.226.000	24	551.008.000	24	578.558.400	24	607.486.300	24	637.860.600	120	2.788.139.300	Kesbang pol
i.	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Jumlah Dokumen Data Pekat Masyarakat Yang Disediakan	Dok	1	1	157.760.000	1	185.750.000	1	195.037.500	1	204.789.300	1	215.028.700	5	958.365.500	Kesbang pol
j.	Program Pengembangan Kapasitas SDM Petugas Sat Pol PP	Persentase peningkatan kapasitas Pol PP	%	65	70	450.000.000	75	463.500.000	80	477.405.000	85	491.727.150	90	506.478.900	90	2.389.111.050	Sat Pol PP
k.	Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase Cakupan pelayanan penanganan kebakaran	%	120,20	124,15	649.200.000	124,15	668.676.000	124,15	688.736.200	124,15	709.398.200	124,15	730.680.100	124,15	3.446.690.500	Sat Pol PP
		Jumlah				6.784.038.250		6.398.843.500		6.558.073.300		6.754.214.850		6.956.240.635		33.451.410.534	
6 Urusan Sosial																	
a.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	Point	77,45	80,5	952.135.000	84,15	980.699.000	87,20	1.010.119.900	88,75	1.040.423.400	90,10	1.071.635.995	90,10	5.055.013.295	Dinas Sosial
		Persentase Terlengkapnya Administrasi Perkantoran	%	95	100		100		100		100		100		100		



NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan sarana & prasarana perkantoran dalam keadaan baik	%	75	86	613.715.500	87	632.126.900	88	651.090.600	89	670.623.200	90	690.741.740	90	3.258.297.940	Dinas Sosial
c	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase terpenuhinya Baju Dinas PNS (1 stel / orang)	%	0	-	-	-	-	100	60.000.000	-	-	100	60.000.000	100	120.000.000	Dinas Sosial
d	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	orang	5	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	100.000.000	Dinas Sosial
e	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	B	B	12.100.000	B	12.462.900	BB	12.836.600	BB	13.221.500	BB	13.617.900	BB	64.238.900	Dinas Sosial
f	Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	70	72	639.640.000	74	658.829.200	76	678.594.000	78	698.951.800	80	719.920.300	80	3.395.935.300	Dinas Sosial
g	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS	%	100	100	315.680.000	100	325.150.400	100	334.904.900	100	344.952.000	100	355.300.500	100	1.675.987.800	Dinas Sosial
h	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Peningkatan Fakir Miskin, KAT, dan PMKS Lainnya Yang di Berdayakan	%	0,00	15	409.507.000	25	421.792.200	35	434.445.900	45	447.479.200	60	460.903.500	60	2.174.127.800	Dinas Sosial
i	Program Penanganan Fakir Miskin	Persentase keluarga miskin dan kelompok rentan yang meningkat produktifitas sosial ekonominya	%	0	1	525.450.000	1	541.213.500	1	557.449.900	1	574.173.300	1	591.398.400	1	2.789.685.100	Dinas Sosial
j	Program Penanganan PMKS	Persentase Penurunan Angka PMKS	%	45	50	-	55	1.325.779.200	60	1.339.036.900	65	1.352.427.200	70	1.365.951.400	70	5.383.194.700	Dinas Sosial
k	Program Penguatan PSKS	Persentase Persentase KK sangat miskin mendapatkan Jaminan Perlindungan Sosial melalui PKH dan bentuk lainnya	%	39	40	-	42	895.205.500	45	904.157.500	48	913.199.000	50	922.330.900	50	3.634.892.900	Dinas Sosial
Jumlah						3.488.227.500		5.813.258.800		6.002.636.200		6.075.450.600		6.271.800.635		27.651.373.735	
II. URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1. Urusan Tenaga Kerja																	
a	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan Penempatan Tenaga Kerja	%	25,20	35,20	275.702.000	43,70	530.207.500	51,60	535.509.500	60,35	540.864.500	65,00	546.273.000	65,00	2.428.556.500	DPMPTSP & Naker
b	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	%	0	10	6.721.000	11	13.837.000	12	13.975.300	13	14.114.900	14	14.256.000	14	62.904.200	DPMPTSP & Naker
c	Program Perlindungan, Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Kasus Industrial Yang Di Fasilitasi	%	100	100	19.820.000	100	10.351.500	100	10.454.800	100	10.559.300	100	10.664.800	100	61.850.400	DPMPTSP & Naker
Jumlah						302.243.000		554.396.000		559.939.600		565.538.700		571.193.800		2.553.311.100	
2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																	
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	Point	77,45	80,5	952.135.000	84,15	980.699.000	87,20	1.010.119.900	88,75	1.040.423.400	90,10	1.071.635.995	90,10	5.055.013.295	DP3AKB



NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
		Presentase Terlayannya Administrasi Perkantoran	%	95	100		100		100		100		100		100		
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan sarana & prasarana perkantoran dalam keadaan baik	%	75	86	613.715.500	87	632.126.900	88	651.090.600	89	670.623.200	90	690.741.740	90	3.258.297.940	DP3AKB
c	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase terpenuhinya Baju Dinas PNS (1 stel / orang)	%	0	-	-	-	-	100	67.500.000	-	-	100	67.500.000	100	135.000.000	DP3AKB
d	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	orang	5	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	100.000.000	DP3AKB
e	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	B	B	12.100.000	B	12.462.900	BB	12.836.600	BB	13.221.500	BB	13.617.900	BB	64.238.900	DP3AKB
f	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Persentase perempuan korban KDRT yang tertangani	%	80	86	579.333.600	88	596.713.600	90	614.615.000	92	633.053.450	94	652.045.000	96	3.075.760.650	DP3AKB
		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	%	0	20		30		40		50		60		60		
g	Program peningkatan peran serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	%	51,34	52	275.400.000	53	283.662.000	54	292.171.800	55	300.936.900	58	309.965.000	58	1.462.135.700	DP3AKB
		Jumlah				2.452.684.100		2.525.664.400		2.668.333.900		2.678.258.450		2.825.505.635		13.150.446.485	
3 Urusan Pangan																	
a	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Skor PPH	%	88,8	89,4	1.285.247.200	90,0	1.199.763.500	90,8	1.211.761.000	91,4	1.223.878.500	91,8	1.236.117.200	91,8	6.156.767.400	Dinas Pertanian, Pangan & Perikanan
		Jumlah				1.285.247.200		1.199.763.500		1.211.761.000		1.223.878.500		1.236.117.200		6.156.767.400	
4 Urusan Pertanahan																	
a	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase sertifikasi aset tanah dan bangunan pemko	%	58,80	60,20	4.496.300.000	63,45	8.979.822.600	66,15	13.469.733.840	68,50	20.204.600.680	70,10	30.306.900.964	70,10	77.457.358.084	Dinas PUPR & Pertanahan
		Jumlah Luas Ha Tanah Yang Dibebaskan	Ha	20	25		30		35		40		45		45		Dinas Perkim, Perum & LH
		Persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan pertanahan	%	30,4	31,4		32,6		33,8		34,7		35,0		35,0		
b	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Persentase Kasus-kasus tanah yang terselesaikan	%	100	100	19.400.000	100	56.500.000	100	57.065.000	100	57.635.500	1'00	58.211.700	100	248.812.200	Dinas PUPR & Pertanahan
		Jumlah				4.515.700.000		9.036.322.600		13.526.798.840		20.262.236.180		30.365.112.664		77.706.170.284	Dinas Perkim, Perum & LH
5 Urusan Lingkungan Hidup																	



NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
a.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase cakupan pelayanan persampahan	%	45,40	50,80	3.612.944.350	55,60	3.584.679.250	60,20	3.692.219.500	65,35	3.802.986.000	70,10	3.917.075.500	70,10	18.609.904.600	Dinas Perkim, Perum & LH
b.	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Penurunan luas permukiman kumuh	%	4	2,5	585.455.500	1,5	525.969.000	1	578.565.900	0	595.922.700	0	613.800.300	0	2.899.713.400	Dinas Perkim, Perum & LH
c.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Lingkungan Yang Disusun	dok	1	1	264.061.500	1	335.338.000	1	345.398.000	1	355.759.900	1	366.432.600	5	1.666.990.000	Dinas Perkim, Perum & LH
d.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase Sekolah Adiwiyata	%	40	42	126.099.000	44	85.471.000	46	138.708.900	48	152.579.700	50	167.837.600	50	670.696.200	Dinas Perkim, Perum & LH
e.	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Presentase RTH Publik (City In The Garden)	%	5	7	5.739.249.500	8	5.717.449.500	9	6.313.174.400	10	6.502.569.600	11	6.697.646.612	11	30.970.089.612	Dinas Perkim, Perum & LH
																Dinas PUPR & Pertanahan	
f.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Jumlah Ranperda Air Limbah Yang Disusun	dok	NA	-	543.525.000	1	48.007.200	-	597.877.500	-	615.813.700	-	634.288.000	1	2.439.511.400	Dinas Perkim, Perum & LH
		Jumlah Titik IPAL Yang Dibangun	titik	10	12		14		16		18		20		20		
g.	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Indeks Kualitas Air	%	70	70	465.700.800	70	479.671.800	70	494.061.900	70	508.883.700	70	524.150.200	70	1.978.406.500	Dinas Perkim, Perum & LH
		Indeks Kualitas Udara	%	80	80		80		80		80		80		80		
		Indeks Tutupan Lahan	%	24	26		28		31		33		36		36		
Jumlah						11.337.035.650		10.776.585.750		12.160.006.100		12.534.515.300		12.921.230.812		59.235.311.712	
6 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																	
a.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	Point	77,45	80,5	657.737.800	84,15	416.293.800	87,20	420.456.600	88,75	424.661.000	90,10	428.907.500	90,10	2.348.056.700	Dinas Capil
		Persentase Terlayannya Administrasi Perkantoran	%	95	100		100		100		100		100		100		
b.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan sarana & prasarana perkantoran dalam keadaan baik	%	75	86	418.295.000	87	269.300.000	88	271.992.800	89	274.712.600	90	277.459.500	90	1.511.759.900	Dinas Capil
c.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase terpenuhinya Baju Dinas PNS (1 stel / orang)	%	0	-	-	-	100	52.500.000	-	-	100	52.500.000	100	105.000.000	Dinas Capil	
d.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	orang	5	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	50.000.000	Dinas Capil



NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
e.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	B	B	15.000.000	B	15.000.000	BB	15.000.000	BB	15.000.000	BB	15.000.000	BB	75.000.000	Dinas Capil	
f.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Kepemilikan KK	%	91,25	92,45	1.298.849.800	93,10	1.334.433.000	94,20	1.347.777.200	96,40	1.361.254.800	98,15	1.374.867.200	98,15	6.717.182.000	Dinas Capil	
		Cakupan Kepemilikan KTP Elektronik	%	90,10	91,20		92,60		94,30		95,15		96,25		96,25			
		Cakupan Penerbitan Akte Kematian	%	45,40	54,45		58,00		62,10		65,00		68,10		68,10			
		Persentase Penyelesaian Penerbitan dokumen kependudukan tepat waktu	%	85	90		95		100		100		100		100			
		Indeks Kepuasan Masyarakat	%	75,10	79,10		84,20		88,60		92,50		95,40		95,40			
Jumlah						2.399.882.600	2.045.026.800	2.117.726.600	2.085.628.400	2.158.734.200	10.806.998.600							
7 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa																		
a.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	Point	77,45	80,5	1.308.860.000	84,15	1.107.833.600	87,20	1.118.911.800	88,75	1.130.100.800	90,10	1.141.401.700	90,10	5.807.107.900	DPM Des	
		Presentase Terlayannya Administrasi Perkantoran	%	95	100		100		100		100		100		100			
b.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan sarana & prasarana perkantoran dalam keadaan baik	%	75	86	201.317.000	87	134.500.000	88	135.844.800	89	137.203.100	90	138.574.900	90	747.439.800	DPM Des	
c.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase terpenuhinya Baju Dinas PNS (1 stel / orang)	%	0	-	-	-	-	100	66.000.000	-	-	100	66.000.000	100	132.000.000	DPM Des	
d.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	orang	5	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	50.000.000	DPM Des	
e.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	B	B	15.000.000	B	20.000.000	BB	20.000.000	BB	20.000.000	BB	20.000.000	BB	95.000.000	DPM Des	
f.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Tingkat swadaya masyarakat	%	NA	10,5	1.254.111.800	10,8	2.341.622.300	11,1	2.365.038.500	11,4	2.388.688.800	11,8	2.412.575.600	11,8	10.762.037.000	DPM Des	
g.	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Jumlah Posyantekdes Yang Terbentuk dan Berfungsi Dengan Baik	Kelompok	2	6	15.860.000	10	81.795.000	14	82.612.900	18	83.438.900	22	84.273.200	22	347.980.000	DPM Des	
		Jumlah BUMDes Yang berfungsi dengan Baik	Unit	30	36		41		47		51		55		55			
h.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat dan Swadaya Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	%	80,25	81,50	114.740.350	82,45	104.264.000	83,60	105.306.500	84,10	106.359.500	85,00	107.423.000	85,00	538.093.350	DPM Des	



NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
		Revitalisasi PKK Yang Dilakukan (Kecamatan dan Desa/Kelurahan)	Desa/Kelurahan	75	75		75		75		75		75		75		
i	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah Aparatur Desa Yang Berprestasi	Orang	4	4	73.765.000	4		4		4		4		4		
j	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	NA	68	1.145.566.000	70	1.814.189.500	72	1.832.331.300	74	1.850.654.500	75	1.869.160.900	75	8.511.902.200	DPM Des
		Jumlah				4.139.220.150		5.449.704.400		5.504.201.000		5.559.242.500		5.614.834.400		25.967.120.450	
8 Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana																	
a.	Program Keluarga Berencana	Angka Pemakaian Kontrasepsi/ CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49	%	67,50	67,85	315.054.000	67,95	324.505.600	68,25	334.240.700	68,60	344.267.900	68,95	354.595.900	68,95	1.672.664.100	DP3AKB
		Rata-rata jumlah anak per keluarga	orang	4	4		4		4		4		4		4		
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	21,14	19,57		18,19		16,98		15,92		15		15		
		Jumlah				315.054.000		324.505.600		334.240.700		344.267.900		354.595.900		1.672.664.100	
9 Urusan Perhubungan																	
a.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	Point	77,45	80,5	1.144.362.400	84,15	895.045.200	87,20	921.896.400	88,75	949.553.100	90,10	978.039.500	90,10	4.888.896.600	Dinas Perhubungan
		Presentase Terlayannya Administrasi Perkantoran	%	95	100		100		100		100		100		100		
b.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan sarana & prasarana perkantoran dalam keadaan baik	%	75	86	448.109.750	87	295.160.000	88	304.014.600	89	313.134.900	90	322.528.700	90	1.682.947.950	Dinas Perhubungan
c.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase terpenuhinya Baju Dinas PNS (1 stel / orang)	%	0	-	-	-	-	100	75.000.000	-	-	100	75.000.000	100	150.000.000	Dinas Perhubungan
d.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	orang	5	5	11.500.000	5	100.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	5	186.500.000	Dinas Perhubungan
e.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	B	B	10.998.500	B	11.546.000	BB	11.892.100	BB	12.248.600	BB	12.615.800	BB	59.301.000	Dinas Perhubungan
f.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase Ketersediaan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan	%	68	70	3.529.700	72	308.918.500	74	315.096.800	77	321.398.700	80	327.826.600	80	1.276.770.300	Dinas Perhubungan



NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
g	Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ Perhubungan	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam kondisi baik	%	72	75	239.250.000	78	238.721.000	81	243.495.350	84	248.365.200	86	253.332.400	86	1.223.163.950	Dinas Perhubungan
h	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	Jumlah Bus Sekolah Gratis yang beroperasi	unit	9	11	1.502.897.400	12	2.488.150.000	12	2.537.912.900	12	2.588.671.100	12	2.640.444.400	12	11.758.075.800	Dinas Perhubungan
		Persentase kendaraan umum yang berizin	%	NA	70,10		75,60		80,25		85,20		90,00		90,00		
i	Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas	Indeks angka kecelakaan lalu lintas	%	0,00193	0,00175	914.920.100	0,00158	963.675.000	0,00143	982.948.400	0,00129	1.002.607.300	0,00117	1.022.659.300	0,00117	4.886.810.100	Dinas Perhubungan
j	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase kendaraan yang layak beroperasi	%	40	42	106.343.000	45	253.311.600	47	258.377.700	49	263.545.100	52	268.815.800	52	1.150.393.200	Dinas Perhubungan
k	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut	Persentase kapal laut pariwisata dan kapal nelayan yang layak beroperasi	%	38	43	983.580.000	46	253.311.600	49	258.377.700	52	263.545.100	54	268.815.800	54	2.027.630.200	Dinas Perhubungan
	Jumlah					5.365.490.850		5.807.838.900		5.934.011.950		5.988.069.100		6.195.078.300		29.290.489.100	
10 Urusan Komunikasi Dan Informatika																	
a.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	Point	77,45	80,5	1.144.909.250	84,15	1.054.545.250	87,20	1.065.090.600	88,75	1.075.741.400	90,10	1.086.498.700	90,10	5.426.785.200	Dinas Kominfo
		Persentase Terlayannya Administrasi Perkantoran	%	95	100		100		100		100		100		100		
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan sarana & prasarana perkantoran dalam keadaan baik	%	75	86	505.000.000	87	125.500.000	88	129.264.800	89	133.142.600	90	137.136.700	90	1.030.044.100	Dinas Kominfo
c.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase terpenuhinya Baju Dinas PNS (1 stel / orang)	%	0	-	-	-	-	100	60.000.000	-	-	100	60.000.000	100	120.000.000	Dinas Kominfo
d.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	orang	5	5	6.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	86.000.000	Dinas Kominfo
e.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	B	B	11.455.000	B	11.840.000	BB	12.195.000	BB	12.560.600	BB	12.937.100	BB	60.987.700	Dinas Kominfo
f	Program E-Government	% pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-Government)	Nilai	80	90	2.415.490.400	90	6.636.292.400	90	2.536.264.900	90	2.612.352.700	90	2.690.723.200	90	16.891.123.600	Dinas Kominfo
g	Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	55	65	3.126.570.500	70	2.586.062.500	75	2.663.644.300	80	2.743.553.500	85	2.825.860.000	85	13.945.690.800	Dinas Kominfo
h	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah Jenis Media Informasi Publikasi	Media	5	5	450.000.000	5	469.200.000	5	483.276.000	5	497.774.200	5	512.707.400	5	2.412.957.600	Sekretariat DPRD



NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
Jumlah						7.154.425.150		10.777.940.150		6.840.470.800		6.961.982.400		7.208.726.400		38.943.544.900	
11 Urusan Koperasi dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil																	
a.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	Point	77,45	80,5	1.362.649.500	84,15	1.203.617.400	87,20	1.215.653.500	88,75	1.227.809.900	90,10	1.240.087.800	90,10	6.249.818.100	Dinas Koperindagkop & KUKM
b.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Terlayannya Administrasi Perkantoran	%	95	100		100		100		100		100		100	1.056.342.600	Dinas Koperindagkop & KUKM
c.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase terpenuhinya Baju Dinas PNS (1 stel / orang)	%	0	-	-	-	-	100	67.500.000	-	-	100	67.500.000	100	135.000.000	Dinas Koperindagkop & KUKM
d.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	orang	5	5	10.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	90.000.000	Dinas Koperindagkop & KUKM
e.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	B	B	11.033.000	B	35.000.000	BB	20.000.000	BB	20.000.000	BB	20.000.000	BB	106.033.000	Dinas Koperindagkop & KUKM
f.	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Persentase UKM terhadap UMKM	%	20,4	21,2	173.711.250	22,4	258.496.000	23,00	261.080.900	24,5	268.913.200	25,00	276.980.500	25,00	1.239.181.850	Dinas Koperindagkop & KUKM
g.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase pertumbuhan ekonomi kerakyatan masyarakat	%	15,18	16,00	646.539.000	17,10	467.358.000	18,25	472.031.500	19,40	476.751.700	20,00	481.519.100	20,00	2.544.199.300	Dinas Koperindagkop & KUKM
		Persentase pertumbuhan ekonomi kreatif masyarakat	%	NA	8,5		8,7		8,9		9,2		9,5		9,5		
h.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase Peningkatan Modal UMKM	%	1,5	1,6	646.539.000	1,7	467.358.000	1,8	472.031.500	1,9	476.751.700	2,0	481.519.100	2,0	2.544.199.300	Dinas Koperindagkop & KUKM
		Persentase Pertumbuhan Volume Penjualan UMKM	%	1,6	1,7		1,8		1,9		2,0	-	115	2,1		2,1	
i.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	%	45,25	48,50	91.069.000	53,25	202.440.000	59,40	204.464.300	62,25	206.508.800	65,00	208.573.700	65,00	913.055.800	Dinas Koperindagkop & KUKM
		Persentase Koperasi Aktif	%	75,61	78,50		81,25		84,45		87,10		90,25		90,25		
Jumlah						3.129.872.750		2.864.859.400		2.945.457.400		2.915.811.700		3.021.828.700		14.877.829.950	
12 Urusan Penanaman Modal																	
a.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	Point	77,45	80,5	854.634.500	84,15	898.525.000	87,20	907.510.180	88,75	916.585.185	90,10	944.082.633	90,10	4.521.337.498	Dinas PM, PTSP & Naker
		Persentase Terlayannya Administrasi Perkantoran	%	95	100		100		100		100		100		100		



NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan sarana & prasarana perkantoran dalam keadaan baik	%	75	86	563.040.000	87	270.250.000	88	278.357.300	89	286.707.900	90	295.308.900	90	1.693.664.100	Dinas PM, PTSP & Naker
c	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase terpenuhinya Baju Dinas PNS (1 stel / orang)	%	0	-	-	-	100	37.500.000	-	-	100	37.500.000	100	75.000.000	Dinas PM, PTSP & Naker	
d	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	orang	5	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	50.000.000	Dinas PM, PTSP & Naker
e	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	B	B	10.000.000	B	10.000.000	BB	10.000.000	BB	10.000.000	BB	10.000.000	BB	50.000.000	Dinas PM, PTSP & Naker
f	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Pameran Investasi Yang Diikuti	1	1	1	6.908.000	1	9.724.500	1	9.821.700	1	10.018.100	1	10.218.400	5	46.690.700	Dinas PM, PTSP & Naker
g	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	%	1	1,1	71.457.000	1,2	32.421.700	1,3	33.070.100	1,4	33.731.500	1,5	34.406.100	1,5	205.086.400	Dinas PM, PTSP & Naker
		Nilai Realisasi Investasi	Milyar	80,4	95,4		115,4		135,4		160,4		190,4		190,4		
h	Program Pengembangan Pelayanan Perizinan	Persentase kesesuaian antara pelaksanaan izin terhadap izin yang diawasi	%	NA	60	167.231.000	65	373.718.000	70	384.929.500	75	396.477.300	80	408.371.500	80	1.730.727.300	Dinas PM, PTSP & Naker
		Nilai Survey kepuasan masyarakat terhadap proses perizinan	%	76,25	77,45		78,20		79,10		79,40		80,00		80,00		
		Jumlah				1.683.270.500		1.604.639.200		1.671.188.780		1.663.519.985		1.749.887.533		8.372.505.998	
13	Urusan Kepemudaan dan Olahraga																
a	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah organisasi kepemudaan yg aktif	Organisasi	36	37	1.719.321.000	38	1.770.900.600	39	1.824.027.600	40	1.878.748.381	40	1.935.110.800	40	9.128.108.381	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
b	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Jumlah Cabang olahraga yang aktif	Cabor	29	32	3.262.257.500	34	3.729.961.500	38	3.767.261.000	40	3.804.933.500	40	3.842.982.800	40	18.407.396.300	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Jumlah Hari Senam Kesegaran Jasmani Yang Dilaksanakan	Hari	48	48	39.200.000	48	50.000.000	48	50.000.000	48	50.000.000	48	50.000.000	240	239.200.000	Disparbud
c	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dibangun	unit	4	5	12.144.226.100	6	12.508.552.800	8	45.800.000.000	10	82.439.999.921	12	145.000.000.000	12	297.892.778.821	Dinas PUPR & Pertanian
		Jumlah Youth Center yang dibangun	unit	0	0		1		1		1		1		1	(APBN dan APBD)	
		Jumlah Stadion Gedung Olahraga	unit	0	0		0		1		1		1		1	(APBN dan APBD)	
		Jumlah				17.125.804.600		18.059.414.900		51.441.288.600		88.173.681.802		150.828.093.600		325.667.483.502	
14	Urusan Statistik																



NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
a.	Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Sektoral/Daerah	Persentase ketersediaan Data Sektoral	%	70	70	70.887.500	70	151.059.900	70	155.591.500	70	160.259.000	70	165.066.600	70	702.864.500	Dinas Kominfo Dan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
		Jumlah Buku Statistik Pertanian, Pangan dan Perikanan Yang Disusun	Dok	1	1		1		1		1		1		1		
b.	Program Pengembangan Data/Informasi	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Yang Disusun	Dok	1	1	50.000.000	1	58.350.000	1	61.267.500	1	64.330.800	1	67.547.300	5	301.495.600	Bappeda
Jumlah						120.887.500		209.409.900		216.859.000		224.589.800		232.613.900		1.004.360.100	
15 Urusan Persandian																	
a.	Program Persandian Untuk Pngamanan Informasi	Indek Keamanan Informasi (KAMI)	Level	2	2	1.830.000	2	164.785.000	2	169.728.500	2	174.820.300	2	180.064.800	2	691.228.600	Dinas Kominfo
Jumlah						1.830.000		164.785.000		169.728.500		174.820.300		180.064.800		691.228.600	
16 Urusan Kebudayaan																	
a.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	Point	77,45	80,5	952.135.000	84,15	980.699.000	87,20	1.010.119.900	88,75	1.040.423.400	90,10	1.071.635.995	90,10	5.055.013.295	Dinas Parbud
		Presentase Terlayannya Administrasi Perkantoran	%	95	100		100		100		100		100		100		
b.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan sarana & prasarana perkantoran dalam keadaan baik	%	75	86	613.715.500	87	632.126.900	88	651.090.600	89	670.623.200	90	690.741.740	90	3.258.297.940	Dinas Parbud
c.	Program peningkatan disiplin aparat	Persentase terpenuhinya Baju Dinas PNS (1 stel / orang)	%	0	-	-	-	-	100	54.000.000	-	-	100	54.000.000	100	108.000.000	Dinas Parbud
d.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	orang	5	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	100.000.000	Dinas Parbud
e.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	B	B	12.100.000	B	12.462.900	BB	12.836.600	BB	13.221.500	BB	13.617.900	BB	64.238.900	Dinas Parbud
f.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah kelompok seni dan budaya yang aktif	Kelompok	10	11	280.546.200	12	283.351.600	13	286.185.000	14	289.046.700	15	291.937.000	15	1.431.066.500	Dinas Parbud
g.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya	event	15	20	1.241.449.000	25	1.253.863.400	30	1.266.401.900	35	1.279.065.800	40	1.291.856.400	40	6.332.636.500	Dinas Parbud
		Persentase Keaktifan Lembaga Adat	%	90	91	97.598.000	92	250.000.000	93	252.499.800	94	255.024.600	95	257.574.700	95	1.112.697.100	DPMD
h.	Program Peningkatan Pelestarian Kebudayaan	Jumlah budaya lokal yang dikembangkan menjadi daya tarik wisata	Jenis	5	7	-	9	3.693.011.500	12	3.729.941.600	13	3.767.241.000	15	3.804.913.400	15	14.995.107.500	Dinas Parbud
i.	Program Pemberdayaan dan Penguatan Eksistensi Lembaga-lembaga Adat Seni dan Budaya	Jumlah Nagari Adat Percontohan Yang Dibina	Buah	5	5	50.997.000	5	51.506.900	5	52.021.900	5	52.542.100	5	53.067.500	5	260.135.400	Dinas Parbud
Jumlah						3.268.540.700		7.177.022.200		7.335.097.300		7.387.188.300		7.549.344.635		32.717.193.135	



NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
17 Urusan Perpustakaan																	
a.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang dibina (Desa/Kelurahan)	unit	2	15	324.752.000	30	334.494.500	40	344.529.300	55	354.865.100	55	365.511.000	55	1.724.151.900	Sekretariat Daerah (Bagian Perpustakaan & Arsip)
b.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Indeks Kepuasan Pengunjung Perpustakaan Daerah	%	NA	70,5 (Kurang Baik)	98.727.000	76,65 (Baik)	201.965.000	80, 50 (Baik)	208.023.900	85,60 (Baik)	214.264.500	88,40 (Sangat Baik)	220.692.300	88,40 (Sangat Baik)	943.672.700	Sekretariat Daerah (Bagian Perpustakaan & Arsip)
Jumlah						423.479.000		536.459.500		552.553.200		569.129.600		586.203.300		2.667.824.600	
18 Urusan kearsipan																	
a.	Program Pengelolaan Pengembangan Kearsipan	Jumlah perangkat daerah/unit kerja yang telah menerapkan Pengelolaan Arsip Sesuai Kaidah Kearsipan	OPD	10	15	67.070.000	20	318.185.000	25	324.548.700	27	331.039.500	27	337.660.200	27	1.378.503.400	Bagian Perpustakaan & Arsip
b.	Program Perlindungan, Penyelamatan, Data dan Informasi Arsip	Persentase arsip yang terlindungi dan terselamatkan	%	NA	10	60.000.000	20	61.200.000	30	63.035.900	40	64.926.900	50	66.874.600	50	316.037.400	Bagian Perpustakaan & Arsip
Jumlah						127.070.000		379.385.000		387.584.600		395.966.400		404.534.800		1.694.540.800	
B. URUSAN PILIHAN																	
1. Urusan kelautan dan perikanan																	
a.	Program pengembangan budidaya perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	316	318	1.065.899.100	320	2.292.562.000	323	2.315.487.600	325	2.338.642.400	328	2.362.028.800	6.728	10.374.619.900	Dinas Pertanian, Pangan & Perikanan
b.	Program pengembangan perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	6.011	6.270	2.872.065.700	6.295	1.060.895.000	6.315	1.071.503.900	6.335	1.082.218.900	6.400	1.093.041.000	6.400	7.179.724.500	Dinas Pertanian, Pangan & Perikanan
c.	Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	Persentase Kualitas SDM Penyuluh Perikanan yang Handal	%	56	61	52.390.000	66	85.800.000	71	86.658.000	76	87.524.500	81	88.399.700	81	400.772.200	Dinas Pertanian, Pangan & Perikanan
d.	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Produksi Ikan Pengolahan	Kg/Tahun	235,50	246,60	211.197.800	251,23	865.570.000	256,56	874.225.600	261,81	882.967.800	267,05	891.797.400	267,05	3.725.758.600	Dinas Pertanian, Pangan & Perikanan
Jumlah						4.201.552.600		4.304.827.000		4.347.875.100		4.391.353.600		4.435.266.900		21.680.875.200	
2 Urusan Pariwisata																	
a.	Program pengembangan destinasi pariwisata	Presentase Objek Wisata Unggulan Dalam Kondisi Baik	%	65	70	132.651.000		3.525.000.000	80	3.560.250.000	85	3.595.852.400	90	3.631.810.800	90	14.445.564.200	Dinas Parbud
		Jumlah Destinasi Wisata Baru	unit	6	7		8	-	9		10		11		11		
		Presentase Pembangunan Masjid Terapung	%	10	25	30.413.053.850	50	44.098.928.083	70	85.992.909.761	80	154.387.237.570	100	270.177.665.657	100	585.069.794.920	Dinas PUPR & Pertanian
		Jumlah Masjid Yang Dibangun	unit	0	1		1		1		1		1		1		



NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
		Jumlah Pusat Pendidikan Alquran Yang Dibangun	unit	-	-		-		-		1		1		1		
		Presentase Pembangunan Pusat Pendidikan Alquran	%	0	0		25		50		75		100		100		
b.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Rata-Rata Lama Tinggal	hari	1	1,1	3.467.034.250	1,2	285.800.000	1,3	294.373.900	1,4	303.205.000	1,5	312.301.100	1,5	4.662.714.250	Dinas Parbud
c.	Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Wisata	Persentase Kondisi Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	%	85	87	716.864.000	89	724.032.600	91	731.272.900	93	738.585.600	95	745.971.456	95	3.656.726.556	Dinas Parbud
d.	Program Pengembangan Kemitraan Promosi	Jumlah Kerjasama yang dilakukan dengan pelaku usaha jasa pariwisata	Kerjasama	2	2	471.400.000	3	1.646.780.000	3	1.663.247.700	4	1.679.880.100	5	1.696.678.800	5	7.157.986.600	Dinas Parbud
e.	Program Pembangunan SDM Pariwisata	Persentase Pelaku Wisata Yang Sudah Sadar Wisata	%	55	60	696.804.000	65	31.740.000	70	32.057.400	75	32.377.900	80	32.701.600	80	825.680.900	Dinas Parbud
f.	Program Pengembangan Daya Tarik Wisata	Jumlah Objek DTW Unggulan	Objek	5	5	-	5	2.613.730.000	5	2.666.004.600	6	2.666.004.600	7	2.719.324.600	7	10.665.063.800	Dinas Parbud
g.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Karya Ekonomi Kreatif Yang Difasilitasi	Fasilitasi	-	-	-	1	325.000.000	1	334.750.000	1*	344.792.500	1	355.136.200	1	1.359.678.700	Dinas Parbud
h.	Program Pembangunan Fasilitas Pariwisata	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pariwisata	%	80	82	-	84	696.804.000	86	710.740.000	88	724.954.800	90	739.453.800	90	2.871.952.600	Dinas Parbud
i.	Program Pengembangan Citra Pariwisata	Terbentuknya Brand Image Kota Pariaman	Jenis	NA	-	-	1	64.250.000	1	65.535.000	-	66.845.700	-	68.182.600	-	264.813.300	Dinas Parbud
Jumlah						35.897.807.100		54.012.064.683		96.051.141.261		164.539.736.170		280.479.226.613		630.979.975.826	
3 Urusan Pertanian																	
a.	Program Internal/Rutin Perangkat Daerah (Dinas Pertanian, Pangan & Perikanan)	Nilai IKM Internal Kantor	Point	74,45	81,8	1.467.201.950	84,15	1.211.085.000	87,20	1.223.195.700	88,75	1.235.427.500	90,10	1.247.781.700	90,10	6.384.691.850	Dinas Pertanian, Pangan & Perikanan
		Presentase Terlayannya Administrasi Perkantoran	%	95	100		100		100		100		100		100		
b.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kondisi sarana & prasarana perkantoran dalam keadaan baik	%	75	86	325.390.600	87	642.204.000	88	648.626.000	89	655.112.200	90	661.663.300	90	2.932.996.100	Dinas Pertanian, Pangan & Perikanan
c.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase terpenuhinya Baju Dinas PNS (1 stel / orang)	%	0	-	-	-	-	100	82.500.000	-	-	100	82.500.000	100	165.000.000	Dinas Pertanian, Pangan & Perikanan
d.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	orang	5	5	10.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	90.000.000	Dinas Pertanian, Pangan & Perikanan
e.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	B	B	13.400.000	B	12.000.000	BB	12.120.000	BB	12.241.200	BB	12.363.600	BB	62.124.800	Dinas Pertanian, Pangan & Perikanan
f.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah Lembaga Petani Yang Dibina	Lembaga	8	10	135.045.000	12	331.040.000	14	334.350.400	16	337.693.900	18	341.070.800	18	1.479.200.100	Dinas Pertanian, Pangan & Perikanan



NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
g.	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Persentase Fasilitas Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	%	15	20	108.825.000	25	176.793.000	28	178.560.900	30	180.346.500	32	182.149.900	32	826.675.300	Dinas Pertanian, Pangan & Perikanan
h	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Produksi padi	Ton	41.834	38.850	1.990.198.000	39.000	795.345.500	40.000	835.112.700	41.000	876.868.300	42.000	920.711.600	42.000	5.418.236.100	Dinas Pertanian, Pangan & Perikanan
i	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Persentase Kualitas SDM Penyuluh Pertanian yang Handal	%	55	60	143.145.000	65	31.324.000	70	31.950.400	75	32.589.400	80	33.241.100	80	272.249.900	Dinas Pertanian, Pangan & Perikanan
j	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Persentase angka kematian ternak	%	0.5	0,47	99.112.000	0,44	276.995.500	0,41	279.765.400	0,38	282.563.000	0,35	285.388.600	0,35	1.223.824.500	Dinas Pertanian, Pangan & Perikanan
k	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Jumlah Populasi Ternak	Ekor	2.250	2.358	37.236.000	2.393	320.115.000	2.429	323.316.000	2.466	326.549.100	2.503	329.814.500	2.503	1.337.030.600	Dinas Pertanian, Pangan & Perikanan
		Jumlah Produksi Peternakan	Ton	652.250	661.236		671.154		681.222		691.404		701.812		701.812		Dinas Pertanian, Pangan & Perikanan
l	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Persentase Fasilitas Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	%	16	21	23.719.000	26	85.081.500	29	85.932.200	32	86.791.500	35	87.659.300	35	369.183.500	Dinas Pertanian, Pangan & Perikanan
m	Program Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana Pertanian/Peternakan	Persentase Ketersediaan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pertanian/Peternakan	%	55	60	1.987.780.000	65	406.895.800	70	610.343.700	75	915.515.500	80	1.373.273.200	80	5.293.808.200	Dinas Pertanian, Pangan & Perikanan
n	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Persentase Ketersediaan Jalan Usaha Tani	%	60	62	-	65	2.000.000.000	68	2.100.000.000	71	2.205.000.000	75	2.315.250.000	75	8.620.250.000	Dinas Pertanian, Pangan & Perikanan
		Persentase Ketersediaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	%	64	67		70		73		75		78		78		
Jumlah						6.341.052.550		6.308.879.300		6.765.773.400		7.166.698.100		7.892.867.600		34.475.270.950	
4 Urusan kehutanan																	
Jumlah																	
5 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral																	
Jumlah																	
6 Urusan Perdagangan																	
a.	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase peningkatan jumlah komoditi yg diperdagangkan	%	1,5	2,0	232.895.750	2,5	234.900.000	3,0	237.248.900	3,5	244.366.300	4,5	251.697.200	4,5	1.201.108.150	Dinas Koperindagkop & KUKM



NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
b.	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	%	1,8	2	5.083.126.550	2	2.275.916.400	2	2.298.675.500	2	2.321.662.200	2,5	2.344.878.800	2,5	14.324.259.450	Dinas Koperindagkop & KUKM
		Jumlah Pasar Yang Dibangun yang direvitalisasi	unit	4	5		6	7		8		8		8			Dinas PUPR & Pertanahan
c.	Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Sarana Perdagangan	Jumlah Pasar Yang Dibangun (Pasar Pariaman)	unit	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(APBN, 120 Milyar)
Jumlah						5.316.022.300	2.510.816.400	2.535.924.400	2.566.028.500	2.596.576.000	15.525.367.600						
7 Urusan Perindustrian																	
a.	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Pertumbuhan Industri	%	1,1	1,15	1.622.184.250	1,2	1.079.370.000	1,3	1.090.163.600	1,4	1.101.065.100	1,5	1.112.075.650	1,5	6.004.858.600	Dinas Koperindagkop & KUKM
b.	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Jumlah Inovasi TTG Tiap Tahunnya	Jenis	1	2	121.968.500	3	250.000.000	4	252.499.900	5	255.024.700	5	257.574.800	5	1.137.067.900	DPMD
Jumlah						1.622.184.250	1.079.370.000	1.090.163.600	1.101.065.100	1.112.075.650	6.004.858.600						
8 Urusan Transmigrasi																	
Jumlah																	
C. FUNGSI PENUNJANG URUSAN																	
1. Perencanaan																	
a.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	Point	77,45	80,5	1.899.680.000	84,15	1.916.461.000	87,20	1.973.954.700	88,75	2.033.173.200	90,10	2.094.168.200	90,10	9.917.437.100	Bappeda
		Persentase Terlengkapnya Administrasi Perkantoran	%	95	100		100		100		100		100		100		
b.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan sarana & prasarana perkantoran dalam keadaan baik	%	75	86	831.810.000	87	698.760.000	88	719.722.600	89	741.314.100	90	763.553.300	90	3.755.160.000	Bappeda
c.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase terpenuhinya Baju Dinas PNS (1 stel / orang)	%	0	-	-	-	100	45.000.000	-	-	100	45.000.000	100	90.000.000	Bappeda	
d.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	orang	5	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	5	125.000.000	Bappeda
e.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	B	B	36.000.000	B	29.960.000	BB	30.858.600	BB	31.784.100	BB	40.000.000	BB	168.602.700	Bappeda
f.	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Persentase hasil koordinasi perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar yang ditindaklanjuti	%	100	100	316.913.000	100	317.750.000	100	327.282.500	100	337.100.900	100	347.213.900	100	1.646.260.300	Bappeda



NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
g	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Persentase terpenuhinya aspek kualitas SDM aparatur perencana Bappeda	%	65	68	135.000.000	70	144.895.000	75	146.343.900	78	147.807.300	81	149.285.300	81	723.331.500	Bappeda
h	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah	%	79,80	80,10	3.750.530.700	81,40	3.355.586.000	82,30	3.456.253.450	83,60	3.559.940.886	84,20	3.737.937.785	84,20	17.860.248.820	Bappeda
		Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		
		Persentase Tingkat Parsitipasi Unsur Terkait Hadir Musrenbang	%	100	100		100		100		100		100		100		
i	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase kesesuaian capaian kinerja OPD sektor ekonom	%	80,10	81,20	130.612.500	82,30	181.950.000	83,45	187.408.500	84,20	193.030.700	85,20	198.821.500	85,20	891.823.200	Bappeda
		Persentase PD lingkup bidang ekonomi yg telah memiliki dokumen perencanaan yg baik, konsisten dan selaras	%	100	100		100		100		100		100		100		
j	Program Perencanaan Sosial Budaya	Persentase kesesuaian capaian kinerja OPD sektor Pemerintahan dan Sosial Budaya	%	81,20	82,30	205.303.000	83,10	293.876.000	84,40	302.692.200	85,00	311.772.900	86,10	321.126.000	86,10	1.434.770.100	Bappeda
		Persentase PD lingkup bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya yg telah memiliki dokumen perencanaan yg baik, konsisten dan selaras	%	100	100		100		100		100		100		100		
k	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Persentase kesesuaian capaian kinerja OPD sektor fisik	%	80,20	81,40	342.855.000	82,50	198.832.000	83,60	204.796.900	84,70	210.940.700	85,10	217.268.800	85,10	1.174.693.400	Bappeda
		Persentase PD lingkup bidang SPW yg telah memiliki dokumen perencanaan yg baik, konsisten dan selaras	%	100	100		100		100		100		100		100		
Jumlah							7.673.704.200	7.163.070.000		7.419.313.350		7.591.864.786		7.939.374.785		37.787.327.120	
2 Pengawasan																	
a.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	Point	77,45	80,5	871.677.200	84,15	1.444.328.400	87,20	1.473.214.800	88,75	1.502.678.900	90,10	1.532.732.300	90,10	6.824.631.600	Inspektorat
		Persentase Terlayannya Administrasi Perkantoran	%	95	100		100		100		100		100		100		
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan sarana & prasarana perkantoran dalam keadaan baik	%	75	86	192.750.000	87	1.508.500.000	88	1.205.500.000	89	1.100.000.000	90	850.000.000	90	4.856.750.000	Inspektorat



NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
c.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase terpenuhinya Baju Dinas PNS (1 stel / orang)	%	0	-	-	-	-	100	75.000.000	-	-	100	75.000.000	100	150.000.000	Inspektorat
d.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	orang	5	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	100.000.000	Inspektorat
e.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	B	B	3.499.000	B	8.264.000	BB	10.000.000	BB	10.000.000	BB	10.000.000	BB	41.763.000	Inspektorat
f.	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Perangkat Daerah yg akuntabilitas kerjanya meningkat per tahun	%	40,20	50,10	1.392.940.000	56,25	3.312.197.000	63,50	3.345.318.900	70,20	3.378.772.000	80,00	3.412.559.600	80,00	14.841.787.500	Inspektorat
		Persentase Perangkat Daerah yg Bebas dari temuan Keuangan	%	15	30		40		50		60		70		70		
		Persentase penyelesaian pengaduan gratifikasi yang ditindaklanjuti di lingkungan perangkat daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		
g.	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,01	3,30	153.483.000	3,50	371.792.000	3,70	375.509.800	3,85	379.264.800	4	383.057.400	4	1.663.107.000	Inspektorat
		Jumlah				2.634.349.200		6.665.081.400		6.429.543.500		6.390.715.700		6.208.349.300		28.328.039.100	
3 Keuangan																	
a.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	Point	77,45	80,5	1.981.877.000	84,15	1.973.660.000	87,20	1.993.396.500	88,75	2.013.330.300	90,10	2.033.463.400	90,10	9.995.727.200	BPKPD
		Persentase Terlayannya Administrasi Perkantoran	%	95	100		100		100		100		100		100		
b.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan sarana & prasarana perkantoran dalam keadaan baik	%	75	86	836.120.000	87	703.500.000	88	724.604.800	89	746.342.800	90	768.732.900	90	3.779.300.500	BPKPD
c.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase terpenuhinya Baju Dinas PNS (1 stel / orang)	%	0	-	-	-	-	100	67.500.000	-	-	100	67.500.000	100	135.000.000	BPKPD
d.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	orang	5	5	65.000.000	5	75.000.000	5	75.000.000	5	75.000.000	5	75.000.000	5	365.000.000	BPKPD
e.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	B	B	477.390.000	B	556.380.000	BB	573.071.200	BB	590.263.100	BB	607.970.700	BB	2.805.075.000	BPKPD
f.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Dokumen Inventasi Keuangan Yang Disusun	dok	1	-	26.000.000	1	122.940.000	1	125.398.800	1	127.906.700	1	131.743.900	4	533.989.400	BPKPD



NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
g	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Prosentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran	%	100	100	6.077.965.200	100	7.576.408.900	100	7.955.229.200	100	8.352.990.600	100	8.770.640.000	100	38.733.233.900	BPKPD
		Prosentase penyerapan belanja daerah	%	70	72		74		76		78		80		80		
		Prosentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik	%	100	100		100		100		100		100		100		
		Prosentase pemenuhan kebutuhan barang daerah	%	88	90		92		94		96		98		98		
		Presentase peningkatan penerimaan PAD	%	4,5	4,7		4,8		5,0		5,2		5,4		5,5		
		Jumlah APBDes Desa Yang Dievaluasi	Desa	55	55	14.848.000	55	14.848.000	55	15.590.200	55	16.369.600	55	17.187.900	55	78.843.700	
h	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa Yang di Fasilitasi dan Dibina	Desa	55	55	157.234.000	55	158.806.300	55	166.746.400	55	175.083.600	55	183.837.600	55	841.707.900	
		Jumlah				9.464.352.200		11.007.888.900		11.514.200.500		11.905.833.500		12.455.050.900		56.347.326.000	
4 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan																	
a.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	Point	77,45	80,5	1.470.744.800	84,15	1.273.969.000	87,20	1.312.188.000	88,75	1.351.553.500	90,10	1.392.099.900	90,10	6.800.555.200	BKPSDM
		Presentase Terlayannya Administrasi Perkantoran	%	95	100		100		100		100		100		100		
b.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan sarana & prasarana perkantoran dalam keadaan baik	%	75	86	296.780.000	87	253.800.000	88	261.413.800	89	269.256.000	90	277.333.500	90	1.358.583.300	BKPSDM
c.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase terpenuhinya Baju Dinas PNS (1 stel / orang)	%	0	-	-	-	-	100	67.500.000	-	-	100	67.500.000	100	135.000.000	BKPSDM
d.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	orang	5	5	15.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	95.000.000	BKPSDM
e.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	B	B	7.000.000	B	10.750.000	BB	11.072.300	BB	11.404.200	BB	11.746.000	BB	51.972.500	BKPSDM
f.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	%	30,50	35,8	1.889.296.900	40,25	5.439.018.600	45,1	5.602.189.000	50,35	5.770.254.500	55,15	5.943.362.000	55,15	24.644.121.000	BKPSDM
		Indeks Propesional ASN	Nilai	NA	73		75		77		80		85		85		
		Persentase Pegawai yg memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial	%	30	35		40		45		55		60		235		
		Jumlah guru yang dinilai Angka Kreditnya	orang	500	500	56.997.750	70	55.580.000	120	56.135.800	170	56.697.100	220	58.397.800	1080	283.808.450	Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga
		Jumlah ASN Fungsional Yang Dinilai Angka Kreditnya	Profesi	250	260	8.162.500	270	66.881.700	280	67.550.517	290	68.225.964	300	70.272.530	1400	281.093.211	, Dinkes



NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
Jumlah						3.743.981.950		7.119.999.300		7.398.049.417		7.547.391.264		7.840.711.730		33.650.133.661	
5 Penelitian dan Pengembangan																	
a.	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki inovasi	%	40	50	529.987.000	60	738.725.000	70	760.886.700	80	783.713.300	90	807.224.600	90	3.620.536.600	Bappeda
		Persentase hasil penelitian yg ditindak lanjuti stakeholder (jumlah penelitian yg ditindak lanjuti dibagi jumlah seluruh penelitian dikali 100%)	%	50	60		65		70		75		80		80		
Jumlah						529.987.000		738.725.000		760.886.700		783.713.300		807.224.600		3.620.536.600	
D. FUNGSI PENDUKUNG URUSAN																	
1 Kesekretariat Daerah																	
a.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	Point	77,45	80,5	9.076.447.500	84,15	7.005.797.500	87,20	7.215.971.300	88,75	7.432.450.300	90,10	7.655.423.700	90,10	38.386.090.300	Sekretariat Daerah (Bagian Umum & Protokoler)
		Presentase Terlayannya Administrasi Perkantoran	%	95	100		100		100		100		100		100		
b.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan sarana & prasarana perkantoran dalam keadaan baik	%	75	86	4.837.462.500	87	9.893.057.500	88	7.914.446.000	89	8.151.879.200	90	8.396.435.400	90	39.193.280.600	Sekretariat Daerah (Bagian Umum & Protokoler)
c.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase terpenuhinya Baju Dinas PNS (1 stel / orang)	%	0	-	209.600.000	-	-	100	67.500.000	-	-	100	67.500.000	100	344.600.000	Sekretariat Daerah (Bagian Umum & Protokoler)
		Persentase terpenuhinya Baju Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (4 stel / orang)	%	100	100	209.600.000	100	115.000.000	100	120.750.000	100	126.787.500	100	133.126.800	100	705.264.300	Sekretariat Daerah (Bagian Umum & Protokoler)
d.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	orang	20	20	75.000.000	20	75.000.000	20	75.000.000	20	75.000.000	20	75.000.000	100	375.000.000	Sekretariat Daerah (Bagian Umum & Protokoler)
e.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	B	B	59.554.500	B	59.554.500	BB	61.340.900	BB	63.180.900	BB	65.076.000	BB	308.706.800	Sekretariat Daerah (Bagian Umum & Protokoler)
f.	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan	%	80	82,50	1.086.994.000	84,40	734.250.000	86,25	756.277.500	88,10	778.965.700	90,00	802.334.600	90,10	4.158.821.800	Sekretariat Daerah (Bagian Umum & Protokoler)
g.	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase harmonisasi produk hukum daerah	%	100	100	405.953.600	100	418.132.200	100	430.676.100	100	443.596.300	100	456.904.100	100	2.155.262.300	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum & HAM)
h.	Program Pelayanan dan Bantuan Hukum	Prosentasi penyelenggaraan bantuan hukum dan HAM	%	90	92,40	369.275.000	94,50	380.353.250	96,10	391.763.800	97,25	403.516.700	98,40	415.622.200	98,40	1.960.530.950	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum & HAM), Sekretariat DPRD



NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
i.	Program Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Presentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	%	90	100	400.883.750	100	412.910.200	100	425.297.500	100	438.056.400	100	451.198.000	100	2.128.345.850	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi & Aparatur)
		Presentase Perangkat Daerah Yang dibentuk sesuai Peraturan Perundang-Undangan	%	100	100		100	100	100	100	100	100	100	100			
j.	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai AKIP Sekretariat Daerah	Nilai	C	B	400.883.750		412.910.200		425.297.500		438.056.400		451.198.000		2.128.345.850	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi & Aparatur dan Bagian Pemerintahan)
		Nilai LPPD	Nilai	2,890	2,900		2,950	3,000		3,100		3,200		3,200			
		IKM	Nilai	78,20	80,50		82,50	84,10		86,50		88,35		88,35			
k.	Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu	%	70,10	72,45	207.868.200	74,50	214.104.200	76,10	220.527.300	78,25	227.143.100	80,45	233.957.300	80,45	1.103.600.100	Sekretariat Daerah (Bagian Ekbang)
		Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan	%	70,10	72,45		74,50	76,10		78,25		80,45		80,45			
l.	Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	%	90,10	90,2	508.500.700	90,3	523.755.700	90,4	539.468.300	90,5	555.652.300	90,6	572.321.800	90,7	2.699.698.800	Sekretariat Daerah (Bagian Ekbang)
m.	Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan	Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi	%	70	74	327.154.000	76	336.968.600	78	347.077.600	80	357.489.900	82	368.214.500	82	1.736.904.600	Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan)
n.	Program peningkatan kualitas pelayanan zakat/wakaf yg dikumpulkan melalui lembaga / Badan Zakat/ Wakaf	Persentase peningkatan zakat/wakaf yg dikumpulkan melalui lembaga / Badan Zakat/ Wakaf	%	2,5	3,00	2.994.746.700	3,5	3.084.589.100	4,0	3.177.126.700	4,5	3.272.440.500	5,00	3.370.613.700	5,00	15.899.516.700	Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)
		Persentase masjid yang dikelola secara optimal	%	40	50		55	60		65		70		75			
		Magrib Mengaji dan Shubuh Mubarakah Yang Dilaksanakan	hari/bulan	4 kali/bulan dan 1 kali/bulan	4 kali/bulan dan 1 kali/bulan		4 kali/bulan dan 1 kali/bulan	4 kali/bulan dan 1 kali/bulan									
o.	Program peningkatan peran & fungsi lembaga sosial keagamaan	Persentase organisasi/ lembaga sosial dan keagamaan yang aktif	%	55	61	1.050.600.000	67	1.082.118.000	73	1.114.581.500	79	1.148.018.900	83	1.182.459.400	85	5.577.777.800	Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)
Jumlah						16.428.423.450		14.192.978.750		14.618.767.600		15.057.330.101		15.509.049.300		75.806.549.200	
2	Kesekretariat DPRD																
a.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	Point	77,45	80,5	1.560.967.000	84,15	1.791.420.000	87,20	1.845.162.500	88,75	1.900.517.200	90,10	1.957.532.600	90,10	9.055.599.300	Sekretariat DPRD



NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
		Presentase Terlayannya Administrasi Perkantoran	%	95	100		100		100		100		100		100		
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan sarana & prasarana perkantoran dalam keadaan baik	%	75	86	1.576.750.000	87	2.475.700.000	88	2.549.970.800	89	2.626.469.800	90	2.705.263.700	90	11.934.154.300	Sekretariat DPRD
c	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase terpenuhinya Baju Dinas PNS (1 stel / orang)	%	0	-	423.150.000	-	300.650.000	100	300.650.000	-	300.650.000	100	300.650.000	100	1.625.750.000	Sekretariat DPRD
		Persentase terpenuhinya Baju Dinas Anggota DPRD (2 stel / orang)	%	100	100		100		100		100		100				
d	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	orang	5	5	40.000.000	10	40.000.000	10	40.000.000	10	40.000.000	10	40.000.000	45	200.000.000	Sekretariat DPRD
e	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	B	B	6.000.000	B	6.299.900	BB	6.614.700	BB	6.945.200	BB	7.292.200	BB	33.152.000	Sekretariat DPRD
f	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Indeks kepuasan pimpinan & anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	%	NA	75	12.572.071.000	80	13.792.385.000	85	14.206.156.500	90	14.632.341.100	95	15.071.311.200	95	70.274.264.800	Sekretariat DPRD
		Jumlah				16.178.938.000		18.406.454.900		18.948.554.500		19.506.923.300		20.082.049.700		93.122.920.400	
E. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																	
1 Kesatuan Bangsa dan Politik																	
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	Point	77,45	80,5	611.388.000	84,15	623.740.000	87,20	642.452.100	88,75	661.725.500	90,10	681.577.100	90,10	3.220.882.700	Kesbang pol
		Presentase Terlayannya Administrasi Perkantoran	%	95	100		100		100		100		100		100		
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan sarana & prasarana perkantoran dalam keadaan baik	%	75	86	87.700.000	87	91.200.000	88	93.935.800	89	96.753.700	90	99.656.100	90	469.245.600	Kesbang pol
c	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase terpenuhinya Baju Dinas PNS (1 stel / orang)	%	0	-	-	-	-	100	52.500.000	-	-	100	52.500.000	100	105.000.000	Kesbang pol
d	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	orang	5	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	100.000.000	Kesbang pol
e	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	B	B	12.100.000	B	12.462.900	BB	12.836.600	BB	13.221.500	BB	13.617.900	BB	64.238.900	Kesbang pol
f	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Indeks Demokrasi	%	62,50	64,50	806.710.000	66,45	979.350.000	68,20	1.028.317.500	69,10	1.079.733.300	70,00	1.133.719.800	70,00	5.027.830.600	Kesbang pol, Sekretariat Daerah (Bagian Umum & Protokoler)
g	Program Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase penanganan konflik yang terjadi di tengah masyarakat	%	100	100	124.350.000	100	341.980.000	100	352.239.300	100	362.806.400	100	373.690.500	100	1.555.066.200	Kesbang pol



NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
		Persentase Ormas yang aktif	%	88,15	89,10		90,25		92,55		93,40		95,10		95,10		
	Jumlah					1.662.248.000		2.068.732.900		2.202.281.300		2.234.240.400		2.374.761.400		10.542.264.000	
2 Penanggulangan Bencana Daerah																	
a.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	Point	77,45	80,5	715.596.000	84,15	732.447.500	87,20	754.420.800	88,75	777.053.300	90,10	800.364.700	90,10	3.779.882.300	BPBD
		Persentase Terlayaninya Administrasi Perkantoran	%	95	100		100		100		100		100		100		
b.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan sarana & prasarana perkantoran dalam keadaan baik	%	75	86	176.587.000	87	1.048.270.000	88	1.079.717.900	89	1.112.109.300	90	1.145.472.400	90	4.562.156.600	BPBD
c.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase terpenuhinya Baju Dinas PNS (1 stel / orang)	%	0	-	-	-	-	100	67.500.000	-	-	100	67.500.000	100	135.000.000	BPBD
d.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	orang	5	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	100.000.000	BPBD
e.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	B	B	15.250.300	B	15.707.700	BB	16.178.700	BB	16.663.800	BB	17.163.400	BB	80.963.900	BPBD
f.	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase Cakupan pelayanan penanganan kebakaran	%	122,20	122,45	2.144.241.700	122,60	2.552.252.800	122,80	2.628.820.300	122,90	2.707.684.900	123,00	2.788.915.400	123,00	12.821.915.100	BPBD
		Persentase Desa Tangguh Bencana	%	30	34		38		42		46		50		50		
g.	Program Penyediaan Sarana Evakuasi	Jumlah Shelter Yang dibangun	unit	-	-	-	-	-	1	15.000.000.000	1	10.000.000.000	1	5.000.000.000	1	30.000.000.000	DPU PR
	Jumlah					3.071.675.000		4.368.678.000		19.566.637.700		14.633.511.300		9.839.415.900		51.479.917.900	
F. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
1 Kecamatan Pariaman Utara																	
a.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	Point	77,45	80,5	358.720.000	84,15	311.300.000	87,20	320.638.900	88,75	330.257.900	90,10	340.165.500	90,10	1.661.082.300	Kecamatan Pariaman Utara
		Persentase Terlayaninya Administrasi Perkantoran	%	95	100		100		100		100		100		100		
b.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan sarana & prasarana perkantoran dalam keadaan baik	%	75	86	348.895.000	87	225.760.000	88	237.048.000	89	248.900.400	90	261.345.400	90	1.321.948.800	Kecamatan Pariaman Utara
c.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase terpenuhinya Baju Dinas PNS (1 stel / orang)	%	0	-	-	-	-	100	67.500.000	-	-	100	67.500.000	100	135.000.000	Kecamatan Pariaman Utara
d.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	orang	5	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	100.000.000	Kecamatan Pariaman Utara
e.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	B	B	7.000.000	B	7.525.000	BB	7.750.700	BB	8.138.200	BB	8.545.100	BB	38.959.000	Kecamatan Pariaman Utara



NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
f	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase keamanan dan kenyamanan lingkungan diwilayah kecamatan yang tidak terjadi	%	0	0	66.390.000	0	45.145.000	0	47.402.200	0	49.772.300	0	52.260.900	0	260.970.400	Kecamatan Pariaman Utara
g	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase Lembaga Adat Yang Aktif	%	100	100	112.350.000	100	95.140.000	100	99.897.000	100	104.891.700	100	110.136.200	100	522.414.900	Kecamatan Pariaman Utara
h	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah UKS Desa Yang Dibina	Desa	17	17	5.147.000	17	9.725.000	17	10.211.200	17	10.721.600	17	11.257.600	17	47.062.400	Kecamatan Pariaman Utara
i	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase Kehadiran Unsur Yang Terkait Dalam Musrenbang	%	100	100	59.680.000	100	77.260.000	100	81.122.400	100	85.178.300	100	89.437.000	100	392.677.700	Kecamatan Pariaman Utara
j	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah Jenis Produk UMKM Wilayah Kecamatan Yang Dipromosikan	Jenis	4	5	17.100.000	7	10.621.500	8	11.152.500	9	11.710.100	10	12.295.500	10	62.879.600	Kecamatan Pariaman Utara
k	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Hari Kebersaran Nasional Yang Diperingati	Kali	3	3	143.295.000	3	100.275.000	3	105.288.700	3	110.553.100	3	116.080.700	15	575.492.500	Kecamatan Pariaman Utara
l	Program Peningkatan Kapasitas aparat pemerintah desa	Persentase Kapasitas SDM Aparatur Desa Yang Berkualitas	%	63	67	49.213.000	70	30.666.000	73	32.199.200	76	33.809.000	79	35.499.300	79	181.386.500	Kecamatan Pariaman Utara
m	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah APDes Desa Yang Diawasi pelaksanaannya	Desa	55	55	7.750.000	55	5.430.000	55	5.972.800	55	6.570.000	55	7.226.900	55	32.949.700	Kecamatan Pariaman Utara
n	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Jumlah UKS Desa/Kelurahan Yang Dibina	Desa/Kelurahan	17	17	23.000.000	17	22.140.000	17	23.247.000	17	24.409.200	17	25.629.600	17	118.425.800	Kecamatan Pariaman Utara
o	Program mengintensifikasi penanganan pengaduan masyarakat	Persentase Pengaduan Pelayanan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	%	100	100	18.846.000	100	32.720.000	100	34.356.000	100	36.073.800	100	37.877.400	100	159.873.200	Kecamatan Pariaman Utara
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	%	70	72		74		76		78		80		80		



NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
p	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah Event kegiatan budaya dan keagamaa yang dilaksanakan	Event	1	-	-	1	271.797.500	1	285.387.300	1	299.656.500	1	314.639.200	4	1.171.480.500	Kecamatan Pariaman Utara
Jumlah						1.237.386.000		1.265.505.000		1.389.173.900		1.380.642.100		1.509.896.300		6.782.603.300	
2 Kecamatan Pariaman Tengah																	
a.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	Point	77,45	80,5	1.500.772.500	84,15	444.310.000	87,20	466.525.500	88,75	489.851.700	90,10	514.344.200	90,10	3.415.803.900	Kecamatan Pariaman Tengah
		Persentase Terlayannya Administrasi Perkantoran	%	95	100		100		100	100	100	100	100	100	100		
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan sarana & prasarana perkantoran dalam keadaan baik	%	75	86	916.220.000	87	211.600.000	88	222.180.000	89	233.289.000	90	244.953.450	90	1.828.242.450	Kecamatan Pariaman Tengah
c.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase terpenuhinya Baju Dinas PNS (1 stel / orang)	%	0	-	-	-	-	100	75.000.000	-	-	100	75.000.000	100	150.000.000	Kecamatan Pariaman Tengah
d.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	orang	5	5	20.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	5	80.000.000	Kecamatan Pariaman Tengah
e.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	B	B	7.500.000	B	7.500.000	BB	7.875.000	BB	8.268.700	BB	8.682.100	BB	39.825.800	Kecamatan Pariaman Tengah
f	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase keamanan dan kenyamanan lingkungan diwilayah kecamatan yang tidak terjadi	%	0	0	97.714.000	0	90.009.000	0	94.509.400	0	99.234.800	0	104.196.500	0	485.663.700	Kecamatan Pariaman Tengah
g	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Lembaga Adat Yang Aktif	%	100	100	345.097.000	100	133.134.000	100	139.790.700	100	146.780.200	100	154.119.200	100	918.921.100	Kecamatan Pariaman Tengah
h	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah Event kegiatan budaya dan keagamaa yang dilaksanakan	Event	1	-	-	1	352.080.000	1	369.684.000	1	388.168.000	1	407.576.300	4	1.517.508.300	Kecamatan Pariaman Tengah
i	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	Persentase Kehadiran Unsur Yang Terkait Dalam Musrenbang	%	100	100	343.095.000	100	53.865.000	100	56.558.200	100	59.386.000	100	62.355.200	100	575.259.400	Kecamatan Pariaman Tengah
j	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan	Persentase Kapasitas SDM Aparatur Desa Yang Berkualitas	%	64	68	48.100.000	70	50.816.900	73	53.357.700	76	56.025.500	79	58.826.700	79	267.126.800	Kecamatan Pariaman Tengah
k	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Jumlah UKS Desa/Kelurahan Yang Dibina	Desa/Kelurahan	22	22	35.550.000	16	31.250.000	16	32.812.500	16	34.453.000	16	36.175.600	16	170.241.100	Kecamatan Pariaman Tengah



NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
l	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase peningkatan kualitas lembaga kesejahteraan sosial	%	75	79	336.610.000	82	4.752.000	86	4.989.500	95	5.238.900	100	5.500.800	100	357.091.200	Kecamatan Pariaman Tengah
m	Program mengintensifkasi penanganan pengaduan masyarakat	Persentase Pengaduan Pelayanan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	%	100	100	19.846.000	100	29.720.000	100	31.206.000	100	32.766.300	100	34.404.500	100	147.942.800	Kecamatan Pariaman Tengah
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	%	70	72		74		76		78		80		80		
n	Program Pelaksanaan Alokasi Dana Kelurahan	Jumlah Besar Alokasi Dana Kelurahan Kecamatan Pariaman Tengah	Kelurahan	16	16	6.667.808.000	16	17.637.040.000	16	17.813.410.400	16	18.169.678.600	16	18.714.768.900	16	79.002.705.900	Kelurahan Kecamatan Pariaman Tengah
Jumlah						10.338.312.500		19.061.076.900		19.382.898.900		19.738.140.700		20.435.903.450		88.956.332.450	
3 Kecamatan Pariaman Selatan																	
a.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	Point	77,45	80,5	344.950.000	84,15	309.680.000	87,20	325.164.000	88,75	341.422.200	90,10	358.493.300	90,10	1.679.709.500	Kecamatan Pariaman Selatan
		Presentase Terlayannya Administrasi Perkantoran	%	95	100		100		100		100		100		100		
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan sarana & prasarana perkantoran dalam keadaan baik	%	75	86	258.590.500	87	190.160.000	88	199.668.000	89	209.651.400	90	220.133.900	90	1.078.203.800	Kecamatan Pariaman Selatan
c.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase terpenuhinya Baju Dinas PNS (1 stel / orang)	%	0	-	-	-	-	100	45.000.000	-	-	100	45.000.000	100	90.000.000	Kecamatan Pariaman Selatan
d.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	orang	5	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	50.000.000	Kecamatan Pariaman Selatan
e.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	B	B	9.350.000	B	6.460.000	BB	6.783.000	BB	7.122.100	BB	7.478.200	BB	37.193.300	Kecamatan Pariaman Selatan
f	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase keamanan dan kenyamanan lingkungan diwilayah kecamatan yang tidak terjadi	%	0	0	73.650.000	0	36.380.000	0	40.018.000	0	44.019.800	0	48.421.700	0	242.489.500	Kecamatan Pariaman Selatan
g	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Lembaga Adat Yang Aktif	%	100	100	78.934.000	100	106.330.000	100	111.646.500	100	117.228.800	100	123.090.200	100	537.229.500	Kecamatan Pariaman Selatan



NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
h	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	Persentase Kehadiran Unsur Yang Terkait Dalam Musrenbang	%	100	100	96.850.000	100	79.915.000	100	83.910.700	100	88.106.200	100	92.511.500	100	441.293.400	Kecamatan Pariaman Selatan
i	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah Jenis Produk UMKM Wilayah Kecamatan Yang Dipromosikan	Jenis	4	5	10.400.000	7	11.526.000	8	12.102.300	9	12.707.400	10	13.342.700	10	60.078.400	Kecamatan Pariaman Selatan
j	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Event Seni Budaya Yang dipelombakan	Event	1	1	62.500.000	1	74.900.000	1	78.645.000	1	82.577.200	1	86.706.000	1	385.328.200	Kecamatan Pariaman Selatan
k	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Hari Kebesaran Nasional Yang Diperingati	Kali	3	3	102.240.000	3	92.280.000	3	96.894.000	3	101.738.700	3	106.825.600	15	499.978.300	Kecamatan Pariaman Selatan
l	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Kapasitas SDM Aparatur Desa Yang Berkualitas	%	67	70	48.100.000	74	50.816.900	76	53.357.700	78	56.025.500	80	58.826.700	80	267.126.800	Kecamatan Pariaman Selatan
m	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Jumlah UKS Desa Yang Dibina	Desa	16	16	49.373.000	16	39.910.000	16	41.905.500	16	44.000.700	16	46.200.700	16	221.389.900	Kecamatan Pariaman Selatan
n	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase peningkatan kualitas lembaga kesejahteraan sosial	%	74	78	3.953.000	83	4.150.600	88	4.358.100	94	4.576.000	100	4.804.800	100	21.842.500	Kecamatan Pariaman Selatan
o	Program mengintensifikasi penanganan pengaduan masyarakat	Persentase Pengaduan Pelayanan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	%	100	100	18.500.000	100	8.600.000	100	9.030.000	100	9.481.500	100	9.955.500	100	55.567.000	Kecamatan Pariaman Selatan
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	%	70	72		74		76		78		80		80		Kecamatan Pariaman Selatan
p	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah Event kegiatan budaya dan keagamaan yang dilaksanakan	Event	1	-	-	1	275.673.000	1	289.456.600	1	303.929.300	1	319.125.700	4	1.188.184.600	Kecamatan Pariaman Selatan
	Jumlah					908.800.000		1.106.621.500		1.208.271.400		1.222.935.400		1.330.782.600		5.777.410.900	
4 Kecamatan Pariaman Timur																	
a.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	Point	77,45	80,5	385.144.050	84,15	329.118.900	87,20	338.992.397	88,75	349.162.072	90,10	359.636.827	90,10	1.762.054.246	Kecamatan Pariaman Timur
		Persentase Terlayaninya Administrasi Perkantoran	%	95	100		100		100		100		100		100		
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan sarana & prasarana perkantoran dalam keadaan baik	%	75	86	436.361.642	87	449.452.426	88	462.935.892	89	476.823.851	90	491.128.410	90	2.316.702.221	Kecamatan Pariaman Timur



NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
c.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase terpenuhinya Baju Dinas PNS (1 stel / orang)	%	0	-	-	-	-	100	45.000.000	-	-	100	45.000.000	100	90.000.000	Kecamatan Pariaman Timur
d.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	orang	5	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	50.000.000	Kecamatan Pariaman Timur
e.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	B	B	6.125.000	B	6.308.650	BB	6.497.723	BB	6.692.456	BB	6.892.985	BB	32.516.814	Kecamatan Pariaman Timur
f.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase keamanan dan kenyamanan lingkungan diwilayah kecamatan yang tidak terjadi	%	0	0	55.515.200	0	43.094.300	0	61.066.700	0	67.173.300	0	73.890.600	0	300.740.100	Kecamatan Pariaman Timur
g.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Lembaga Adat Yang Aktif	%	100	100	108.030.000	100	90.575.500	100	118.833.000	100	130.716.300	100	143.787.900	100	591.942.700	Kecamatan Pariaman Timur
h.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Presentase PMKS Yang ditangani	%	55	57	23.915.600	60	22.231.400	64	26.307.100	68	28.937.800	72	31.831.500	72	133.223.400	Kecamatan Pariaman Timur
i.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase Kehadiran Unsur Yang Terkait Dalam Musrenbang	%	100	100	51.360.800	100	58.468.800	100	64.315.600	100	70.747.100	100	77.821.800	100	322.714.100	Kecamatan Pariaman Timur
j.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah Jenis Produk UMKM Wilayah Kecamatan Yang Dipromosikan	Jenis	4	6	7.399.000	8	16.124.600	9	17.737.000	10	19.510.600	12	21.461.650	12	82.232.850	Kecamatan Pariaman Timur
k.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Event Seni Budaya Yang diperlombakan	Event	1	1	104.000.000	1	107.349.800	1	118.084.700	1	129.893.100	1	142.882.400	1	602.210.000	Kecamatan Pariaman Timur
l.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Hari Kebesaran Nasional Yang Diperingati	Kali	3	3	114.090.050	3	97.019.100	3	125.499.000	3	138.048.845	3	151.853.685	15	626.510.680	Kecamatan Pariaman Timur
m.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Persentase Kapasitas SDM Aparatur Desa Yang Berkualitas	%	69	72	30.843.600	74	37.034.800	77	40.738.200	79	44.812.000	81	49.293.200	81	202.721.800	Kecamatan Pariaman Timur
n.	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah APDes Desa Yang Diawasi pelaksanaannya	Desa	55	55	5.002.100	55	5.502.300	55	6.052.400	55	6.657.600	55	7.323.300	55	30.537.700	Kecamatan Pariaman Timur
o.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Jumlah UKS Desa Yang Dibina di Wilayah kecamatan	Desa	16	16	49.373.000	16	39.910.000	16	54.310.300	16	59.741.330	16	65.715.463	16	269.050.093	Kecamatan Pariaman Timur



NO	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
p	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Pengaduan Pelayanan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	%	100	100	21.351.600	100	7.499.500	100	23.486.700	100	25.835.300	100	28.418.800	100	106.591.900	Kecamatan Pariaman Timur
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	%	71	73		75		77		79		80		80		Kecamatan Pariaman Timur
q	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah Event kegiatan budaya dan keagamaa yang dilaksanakan	Event	1	-	-	1	282.755.000	1	296.892.700	1	311.737.300	1	327.324.100	4	1.218.709.100	Kecamatan Pariaman Timur
Jumlah						916.634.800		1.109.898.350		1.292.746.820		1.332.491.803		1.469.243.609		6.121.015.382	
TOTAL						339.406.077.025		439.887.524.182		552.927.846.669		690.958.108.706		915.455.323.070		2.938.634.879.651	



BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH



BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun. Penetapan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah di Kota Pariaman sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 8.1.



Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019-2023
Pemerintah Kota Pariaman

NO	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja awal	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	76,26	76,81	77,36	77,91	78,46	79,01	79,01
2	Angka Pertumbuhan Ekonomi	%	5,51	5,70	5,90	6,00	6,10	6,20	6,20
3	Angka Kemiskinan	%	5,03	4,80	4,50	4,20	3,90	3,50	3,50
4	Indeks Gini (Gini Ratio)	Nilai	0,316	0,285	0,265	0,240	0,225	0,200	0,200

8.2 Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2018-2023 yang telah direncanakan. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator Kinerja Daerah Kota Pariaman secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tahun 2018-2023
Pemerintah Kota Pariaman

NO	Aspek/fokus/bidang urusan/ indikator kinerja pembangunan daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,51	5,70	5,90	6,00	6,10	6,20	6,20
2	PDRB (ADHB) Perkapita (2010=100)	(Rp/Juta)	50,40	53,05	56,15	59,10	62,00	65,80	65,80
3	Indeks Gini	Nilai	0,316	0,285	0,265	0,240	0,225	0,200	0,200
4	Tingkat Kemiskinan	%	5,03	4,80	4,50	4,20	3,90	3,50	3,50
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,72	5,47	5,10	4,80	4,40	3,90	3,90
6	Indeks Pembangunan Manusia	Skor	76,26	76,81	77,36	77,91	78,46	79,01	79,01
7	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,36	10,60	10,90	11,30	11,60	12,00	12,00
8	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,52	14,56	14,60	14,64	14,68	14,72	14,72
9	Angka Usia Harapan Hidup (AHH)	Tahun	69,87	70,10	70,40	70,90	71,50	72,00	72,00
B	ASPEK PELAYANAN UMUM								
I	URUSAN WAJIB TERAKIT PELAYANAN DASAR								
1	Urusan Pendidikan								
a	Angka Harapan Lama Sekolah	tahun	14,52	14,56	14,60	14,64	14,68	14,72	14,72
b	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	10,36	10,60	10,90	11,30	11,60	12,00	12,00
c	Rata – rata nilai Ujian Nasional SMP	%	51,56	54	56	58	60	62	62
d	Angka Kelulusan (AL) SD/ MI	%	100	100	100	100	100	100	100
e	Angka Kelulusan (AL) SMP/ MTs	%	99,52	99,55	99,6	99,65	99,7	99,8	99,8
f	Jumlah Sekolah Berakreditasi A	Sekolah	27	30	33	36	39	42	42
2	Urusan Kesehatan								
a	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	69,87	70,10	70,40	70,90	71,50	72,00	72,00
b	Indeks Keluarga Sehat	Nilai	NA	0,145	0,155	0,165	0,175	0,185	0,185



3	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang								
a	Persentase panjang jalan kondisi mantap	%	62,10	63,10	64,30	66,60	68,10	70,00	70,00
b	Persentase jalan yang memiliki saluran drainase/gorong-gorong yang berfungsi baik	%	30,90	32,10	34,18	36,34	38,69	40,84	40,84
c	Persentase Jaringan Irigasi Kota Dalam Kondisi Baik	%	67,45	75,20	76,30	77,35	78,60	80,10	80,10
d	Persentase kecukupan luasan Lahan RTH publik	%	30,20	32,26	33,45	34,20	35,10	35,50	35,50
E	Persentase Ketersediaan Bangunan Utama Pemerintah	%	85,60	87,23	89,25	91,50	93,40	95,00	95,00
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman								
a	Jumlah Penurunan Rumah Tidak Layak Huni	Unit	1.527	500	300	250	200	150	1400
b	Persentase Penurunan Lingkungan Permukiman Kukum	%	4,0 Ha	3 Ha (25 %)	2 Ha (50%)	1,5 Ha (63 %)	1 Ha (75 %)	0 Ha (100%)	0 Ha (100%)
c	Persentase Akses Sanitasi	%	10,5 %	14 %	16 %	18 %	20 %	25 %	25 %
d	Persentase Penduduk Berakses Air MInum	%	60	65	70	75	80	85	85
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat								
a	Indeks Ketahanan Daerah	%	45	50	55	60	65	70	70
b	Indeks Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%	60	61	62	63	64	65	65
c	Indeks Penanganan Gangguan dan Ancaman Trantibum	%	59	60	61	62	63	65	65
d	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	%	70	80	85	90	95	100	100
e	Tingkat waktu tanggap (response time rate)	Menit	15	15	15	15	15	15	15
f	Proporsi sarana prasarana yang tersedia sesuai standard	%	17	35	50	65	80	100	100
G	Proporsi personil penanggulangan kebakaran yang terlatih dan kompeten	%	10	40	78	88	95	100	100
6	Sosial								
a	Persentasi Penurunan Angka PMKS	%	45	50	55	60	65	70	70
b	Persentase KK sangat miskin mendapatkan Jaminan Perlindungan Sosial melalui PKH dan bentuk lainnya	%	39	40	42	45	48	50	50
II	URUSAN WAJIB TERAKIT BUKAN PELAYANAN DASAR								
1	Urusan Ketenagakerjaan								
a	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,72	5,47	5,10	4,80	4,40	3,90	3,90
b	Persentase Peningkatan Kesempatan Kerja	%	0	10	11	12	13	14	14



2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
a	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	51,34	52,00	53,00	54,00	55,00	56,00	56,00
3	Urusan Pangan								
a	Skor PPH	%	84	86	87	88	89	90	90
b	Tingkat Keamanan Pangan	Indeks	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
4	Urusan Pertanahan								
a	Persentase sertifikasi aset tanah & bangunan pemko	%	58,80	60,20	63,45	66,15	68,50	70,10	70,10
5	Urusan Lingkungan Hidup								
a	Penurunan luas permukiman kumuh	Ha	4	2,5	1,5	1	0	0	0
b	Jumlah Penurunan Rumah Tidak Layak Huni	Unit	1.527	750	227	200	200	150	150
c	Persentase Ketersediaan Jalan Pedesaan	%	71	75	78	80	83	87	87
d	Persentase Ketersediaan Drainase Pedesaan	%	20	30	35	40	45	50	50
e	Persentase akses sanitasi layak	%	11	14	17	20	23	26	26
f.	Persentase penduduk berakses air minum	%	65	68	72	76	80	82	82
g.	Indeks Kualitas Udara	%	87	89	90	91	92	93	93
h.	Indeks Kualitas Air	%	41	43	46	47	50	53	53
i.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	%	24	26	28	31	33	36	36
6	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
a	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pelayanan)	Nilai	78 (Baik)	80 (Baik)	82 (Baik)	84 (Baik)	86 (Baik)	89 (Sangat Baik)	89 (Sangat Baik)
b	Presentase Cakupan kepemilikan KTP	%	96	97	97	98	98	99	99
c	Prosentase Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP – Elektronik)	%	92	94	95	96	97	98	98
d	Persentase Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	10	50	60	70	80	90	90
e	Persentase Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran (0-18 Tahun)	%	84	86	88	90	92	94	94
F	Prosentase Cakupan Penerbitan Akta Kematian	%	75	76	77	78	79	80	80



7	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa								
a	Persentase kelembagaan Desa Yang berkualitas	%	60	65	70	75	80	85	85
b	Tingkat Swadaya Masyarakat	%	45	50	55	60	65	70	70
C	Jumlah Desa Maju	Desa	28	34	38	42	46	50	50
8	Urusan Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana								
a	Angka Pemakaian Kontrasepsi/ CPR	%	65,47	65,60	65,80	66,00	66,20	66,40	66,40
b	Cakupan PUS yang ingin yang ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	16,74	16,54	16,34	16,04	15,80	15,50	15,50
9	Perhubungan								
a	Indeks Angka Kecelakaan Lalu Lintas	Skala	0,00193	0,00175	0,00158	0,00143	0,00129	0,00117	0,00117
b	Nilai survey IKM Pelayanan transportasi	Angka	NA	75,60 (Kurang Baik)	76,80 (Baik)	78,50 (Baik)	80,15 (Baik)	82,45 (Baik)	82,45 (Baik)
10	Urusan Komunikasi dan Informatika								
a	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	2,61	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,1
b	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	55	65	70	75	80	85	85
11	Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah								
a	Persentase UMKM Terhadap UKM	%	20,4	21,2	22,4	23,0	24,5	25,0	25,0
b	Presentase Koperasi Berkualitas	%	45,25	48,50	53,50	59,40	62,25	65,00	65,00
c	Jumlah Koperasi Aktif	Unit	75	76	77	78	79	80	80
12	Urusan Penanaman Modal								
a	IKM Pelayanan Perizinan	Nilai	78,10 (Baik)	82,30 (Baik)	86,40 (Baik)	88,35 (Sangat Baik)	88,50 (Sangat Baik)	88,60 (Sangat Baik)	88,60 (Sangat Baik)
b	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	%	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,5
13	Urusan Kepemudaan dan Olahraga								
a	Jumlah Medali Yang Diperoleh Pada Event Tingkat Propinsi	Medali	101	-	200	-	150	-	150
b	Jumlah Medali Yang Diperoleh Pada Event Tingkat Nasional	Medali	6	7	7	8	8	9	9
c	Jumlah Pemuda Berprestasi Tk. Provinsi	Orang	2	3	3	4	4	5	5
d	Jumlah Pemuda Berprestasi Tk. Nasional	Orang	2	2	2	2	2	2	2
14	Urusan Statistik								



a	Persentase ketersediaan Data Sektoral	%	70	70	70	70	70	70	70
15	Urusan Persandian								
a	Indek Keamanan Informasi (KAMI)	Level	2	2	2	2	2	2	2
16	Urusan Kebudayaan								
a	Jumlah budaya lokal yang dikembangkan menjadi daya tarik wisata	Jenis	5	7	9	12	13	15	15
16	Urusan Perpustakaan								
a	Jumlah pengunjung perpustakaan	orang	NA	5.000	6.000	7.000	8.500	10.000	10.000
17	Urusan Kearsipan								
a	Presentase Perangkat Daerah Yang Menata Arsip Dengan Baik dan sesuai dengan SOP	%	NA	15	25	30	50	60	60
b	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	%	NA	15	25	35	45	55	65
III	URUSAN PILIHAN								
1	Urusan Kelautan Dan Perikanan								
a	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	6.327	6.588	6.615	6.638	6.660	6.728	6.728
2	Urusan Pariwisata								
a	Jumlah Kunjungan wisatawan	Orang	3,1 (juta)	3,4 (juta)	3,9 (juta)	4,5 (juta)	5, 5 (Juta)	6 (juta)	6 (juta)
b	Rata-rata lama Tinggal	Hari	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,0	2,0
3	Urusan Pertanian								
a	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	%	19,22	19,00	18,00	17,00	17,00	16,00	16,00
b	Jumlah Produksi Pertanian (padi)	Ton	20.058	20.292	20.692	21.105	21.527	21.957	21.957
c	Jumlah Populasi Ternak	Ekor	2.250	2.358	2.393	2.429	2.466	2.503	2.503
d	Jumlah Produksi Peternakan	Ton	652.250	661.236	671.154	681.222	691.404	701.812	701.812
4	Urusan Perdagangan								
a	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (2010=100)	%	10,02	11,18	12,00	13,00	14,00	15,00	15,00
b	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	%	1,8	2	2	2	2,5	2,5	2,5
5	Urusan Perindustrian								



a	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	NA	8,5	8,7	8,9	9,2	9,5	9,5
b	Laju Pertumbuhan Sektor Industri	%	1,1	1,15	1,2	1,3	1,4	1,5	1,5
IV	FUNGSI PENUNJANG URUSAN								
1	Perencanaan								
a.	Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen Perencanaan	%	60	80	81	82	83	85	85
b.	Persentase OPD yang kinerja tercapai	%	62	65	67	72	76	80	80
c.	Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan daerah dalam perumusan kebijakan pembangunan	%	70	73	76	79	82	84	84
d.	Persentase pemanfaatan dokumen penelitian dan pengembangan daerah dalam perumusan kebijakan pembangunan	%	45	55	58	61	65	70	70
2	Pengawasan								
a	Level Kapabilitas APIP	Level	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
b	Nilai Maturitas SPIP Kota Pariaman	Level	3,01 (Level)	3,01 (Level)	3,30 (Level 3)	3,50 (Level 3)	3,70 (Level)	4,00 (Level 4)	4,00 (Level 4)
c	Jumlah OPD/unit kerja yang ditetapkan sebagai zona integritas WBK/WBBM di Kota Pariaman	OPD/Unit Kerja	-	1	2	3	4	5	5
d	Persentase temuan yang ditindak lanjuti	%	83,29	84	86	87	88	90	90
e	Persentase Penyelesaian Program Kerja Pemeriksaan Tahunan	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Keuangan								
a	Opini laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
b	Kontribusi PAD terhadap pendapatan Daerah	%	11,16	11,80	12,50	13,40	14,30	15,00	15,00
4	Kepegawaian								
a	Persentase penempatan aparatur sesuai kompetensi	%	55	60	65	70	75	80	80
b	Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin Pegawai	%	1	1	0,8	0,6	0,4	0,2	0,2
c	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi manajerial	%	25	25	30	35	50	60	60
d	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi teknis	%	30	30	35	40	45	50	50
e	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	%	76,70 (Baik)	78,90 (Baik)	82,50 (Baik)	86,25 (Baik)	88,35 (Amat Baik)	88,50 (Amat Baik)	88,50 (Amat Baik)
5	Penelitian dan Pengembangan								



a	Persentase pemanfaatan dokumen penelitian dan pengembangan daerah dalam perumusan kebijakan pembangunan	%	45	55	58	61	65	70	70
V	FUNGSI PENDUKUNG URUSAN								
1	Kesekretariat Daerah								
a	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai	CC	CC	B	B	BB	BB	A
b	Indeks RB	Kategori	NA	45	50	55	60	65	70
c	Peringkat LPPD	Kategori	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
d	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kategori	78,80 (Baik)	80,25 (Baik)	82,40 (Baik)	84,50 (Baik)	86,65 (Baik)	88,35 (Baik)	88,35 (Baik)
2	Kesekretariat DPRD								
a	Indeks kepuasan pimpinan & anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Skor	NA	75	78	82	86	90	90
b	Persentase Ranperda Yang Disahkan Tepat Waktu dan Sesuai Aturan	%	100	100	100	100	100	100	100
VI	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
1	Kesatuan Bangsa dan Politik								
a	Persentase penanganan konflik yg terjadi di tengah masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100
b	Indeks Demokrasi	%	62,50	64,50	66,45	68,20	69,10	70,00	70,00
c	Persentase ormas yang aktif	%	88,15	89,10	90,25	92,55	93,40	94,15	94,15
2	Penanggulangan Bencana Daerah								
a	Indeks Ketahanan Daerah	%	45	50	55	60	65	70	70
VII	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
1	Kecamatan Utara								
a	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	76,20	78,50	82,60	84,15	86,10	88,25	88,25
b	Tingkat Swadaya Masyarakat	%	25	37,5	50	62,5	75	87,5	87,5
c	Indeks Desa tenteram dan tertib	%	NA	70,40	71,25	72,30	73,35	74,50	74,50
2	Kecamatan Tengah								
a	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	76,35	78,55	82,70	84,35	86,40	88,30	88,30



b	Tingkat Swadaya Masyarakat	Desa	0	1	2	3	4	5	5
c	Jumlah Desa Mandiri	Desa	-	-	-	1	2	3	3
d	Jumlah Kelurahan dengan Nilai Pelayanan Gabungan > 80	Kelurahan	1	3	5	7	9	11	11
e	Indeks Desa tenteram dan tertib	%	NA	69,80	71,10	72,00	72,95	74,10	74,10
3 Kecamatan Selatan									
a	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	76,65	78,75	82,90	84,75	86,80	88,65	88,65
b	Tingkat Swadaya Masyarakat	Desa	0	1	2	3	4	5	5
c	Indeks Desa tenteram dan tertib	%	NA	70,80	71,70	72,50	73,55	74,65	74,65
4 Kecamatan Timur									
a	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	76,65	78,75	82,90	84,75	86,80	88,65	88,65
b	Jumlah Desa Mandiri	Desa	0	1	2	3	4	5	5
c	Indeks Desa tenteram dan tertib	%	NA	70,80	71,70	72,50	73,55	74,65	74,65
III ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Produktivitas Total Daerah	Rp. Juta	65,80	70,20	75,10	82,40	86,80	90,10	90,10
2	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp. Ribu	1,15	1,35	1,65	1,80	1,92	2,10	2,10
3	Nilai Tukar Petani	%	NA	100,38	100,51	100,61	100,73	100,80	100,80
4	Rasio Ketergantungan	%	56,15	56,20	56,30	56,41	56,48	56,52	56,52
5	Daya Beli Masyarakat	(Juta/Rp)	12,4	12,7	13,1	13,6	14,2	14,8	14,8



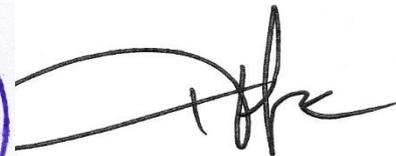
BAB IX

PENUTUP

BAB IX**PENUTUP**

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran visi, misi, dan program Walikota – Wakil Walikota terpilih yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pariaman Tahun 2005-2025, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat. Dalam Menyusun RPJMD ini sudah melalui pendekatan perencanaan politis, teknokratis, top down-bottom up, dan partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan. Untuk keberhasilan pencapaian visi, misi, dan program yang sudah disusun, pelaksanaan RPJMD Kota Pariaman tahun 2018-2023 menjadi tanggung jawab bersama baik di lingkungan pemerintahan daerah, dunia usaha/swasta, maupun masyarakat.

Pariaman, April 2019
WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR



BAPPEDA KOTA PARIAMAN

Jl. Imam Bonjol No. 44
Kota Pariaman - Sumatera Barat
Indonesia
Telp. +62-751-93552 Fax. +62-751-96757
Email : bappedakotapariaman@gmail.com
[www : bappeda.pariamankota.go.id](http://www.bappeda.pariamankota.go.id)
[www : pariaman.go.id](http://www.pariaman.go.id)

copyrights 2019